PT AKR Corporindo Tbk

B E Y O N D

STRATEGY | VALUE | LEGACY

Laporan Tahunan **2024**



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, rencana, proyeksi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang yang terkait dengan lingkungan bisnis Perseroan serta kebijakan dari Manajemen Perseroan. Pernyataan mengenai masa depan tersebut dipengaruhi oleh faktor risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan berbeda dengan yang diharapkan, sehingga tidak ada jaminan bahwa hasil yang diantisipasi oleh Perseroan akan tercapai. Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan-pernyataan tersebut jika keadaan, estimasi, atau pun opini mengalami perubahan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perseroan" dan "AKR" didefinisikan sebagai PT AKR Corporindo Tbk beserta entitas anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan distribusi, jasa logistik, pabrikan, dan kawasan industri.

Penyusunan Laporan Tahunan AKR mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab IV Bagian Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan Tema Tahun 2024

B E Y O N D

STRATEGY | VALUE | LEGACY

Sektor logistik memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga ketahanan energi. Namun, tantangan seperti gap infrastruktur, biaya tinggi, dan operasional yang belum efisien masih menjadi hambatan. Kehadiran PT AKR Corporindo Tbk (AKR) menjadi solusi strategis dalam mengatasi tantangan logistik Indonesia dengan pendekatan yang melampaui strategi konvensional, menciptakan nilai, dan membangun *legacy* berkelanjutan. Melalui jaringan distribusi yang terintegrasi, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, serta keunggulan kompetitif yang dimiliki, AKR berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menurunkan biaya logistik. Melalui bisnis model sebagai fondasi, inovasi sebagai motor penggerak, dan keberlanjutan sebagai arah strategis, AKR menegaskan posisinya sebagai pelaku industri yang relevan dan visioner.

Aktivitas bisnis logistik *supply chain* AKR menunjukkan histori panjang bagi Indonesia. Melalui jaringan infrastruktur yang kuat dan komprehensif, Perseroan mendistribusikan BBM dan Bahan Kimia Dasar ke konsumen industri menjangkau hingga Indonesia Timur. Hingga kini, AKR telah membuktikan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai tantangan industri. Melalui konsistensi dalam memberikan solusi logistik yang efisien, Perseroan terus memperluas perannya untuk mengakselerasi pertumbuhan dan menjadi entitas yang berdaya saing. Tidak hanya melayani kebutuhan domestik, AKR juga menjadi mitra strategis dalam mendorong Indonesia untuk lebih kompetitif di pasar global melalui Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE di Gresik, Jawa Timur.

Sebagai proyek strategis nasional, KEK JIIPE terus meningkatkan *long term multiple value* bagi AKR dan Indonesia, sehingga berhasil dinobatkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Industri Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pada tahun 2024, smelter tembaga *single-line* terbesar yang berlokasi di KEK JIIPE Gresik juga telah resmi beroperasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri turunan tembaga di sekitar wilayah Gresik dan memberikan dampak besar pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

AKR sebagai pemegang saham utama kawasan industri JIIPE mempersiapkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pelayanan di JIIPE terkait penyediaan tenaga listrik dan penyimpanan energi. Kerja sama proyek LNG Terminal juga telah dipersiapkan untuk dapat semakin menjamin ketersediaan energi gas di wilayah Gresik dan Jawa Timur pada umumnya, dan bagi *tenant-tenant* di JIIPE pada khususnya. Ketersediaan utilitas kelas dunia dan fasilitas pelabuhan laut dalam, memberikan kemudahan serta akses yang strategis kepada pelaku industri. Dengan sistem logistik terpadu, JIIPE dirancang untuk menyederhanakan proses ekspor dan mengurangi biaya logistik untuk mendorong pertumbuhan industri yang berdaya saing.

AKR terus mengadopsi strategi yang tepat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi Pemangku Kepentingan mencakup pelanggan, *partner*, karyawan, negara, dan masyarakat serta para Pemegang Saham. Dengan pengalaman yang teruji waktu, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, AKR tidak hanya menghadirkan solusi logistik yang efisien, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk ekosistem industri yang lebih tangguh. Bersama para Pemangku Kepentingan, Perseroan terus melangkah maju menghasilkan nilai tambah yang dapat memberikan dampak positif pada iklim bisnis nasional, dan mendorong pembangunan masa depan yang lebih baik.


AKR
T-01
CAP 5000 KL
HSD

Kesinambungan Tema

2023



Meningkatkan Standar Mencapai Pertumbuhan Baru

PT AKR Corporindo Tbk terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor logistik dan *supply chain* dengan rekam jejak enam dekade yang solid. Dengan mengembangkan jaringan distribusi dari petroleum hingga bahan bakar penerbangan serta mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE di Gresik, AKR berperan penting dalam menciptakan ekosistem *supply chain* terintegrasi. Strategi ini tidak hanya meningkatkan daya saing infrastruktur logistik tetapi juga menarik investasi asing langsung. Keunggulan JIIPE dalam utilitas dan fasilitas kelas dunia turut mendukung pertumbuhan bisnis AKR, terutama dalam menghadapi tren hilirisasi industri di Indonesia. Dengan penerapan prinsip ESG dan model bisnis yang kuat, AKR berhasil mencatat pertumbuhan laba neto sebesar Rp2,780 miliar atau naik 16% dari tahun sebelumnya. Keberlanjutan pertumbuhan AKR dalam lima tahun terakhir mencerminkan visi strategis, ketahanan, serta adaptasi yang kuat terhadap dinamika bisnis, mengukuhkan optimisme untuk terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

2022



Tahun Bertumbuh dan Tetap Tangguh

Tahun 2022, menjadi catatan penting bagi perjalanan bisnis AKR, di mana tantangan dan peluang tidak dapat terpisahkan, menjadi dinamika tersendiri bagi AKR untuk menghadapinya. Dengan *Business* model yang kuat, diikuti oleh ketangguhan, keandalan, dan kapabilitas sumber daya manusia, teknologi, dan Keuangan yang dijaga oleh Perseroan, AKR berhasil mencetak pencapaian yang positif. Lebih dari itu, inisiatif strategis yang telah dijalankan sejak tahun 2013; KEK Gresik JIIPE Gresik mulai menunjukkan hasil dan memasuki momentum monetisasi *asset*. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya ROE AKR (21,9%) dan ROA AKR (8,8%).

2021



Mengembangkan Nilai Berkelanjutan untuk Tumbuh Bersama Bangsa

PT AKR Corporindo Tbk berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan praktik terbaik dalam inisiatif Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Perseroan meyakini penerapan aspek ESG secara konsisten tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, tetapi juga bagi pemangku kepentingan secara keseluruhan. Karena itu, AKR tidak hanya fokus untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, tapi juga berupaya untuk meningkatkan kontribusi untuk pembangunan bangsa. Dengan bertumpu pada kekuatan model bisnis yang telah teruji yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang andal dan platform teknologi informasi yang telah teruji, Perseroan yakin dapat terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional.

2020



Tetap Fokus dalam Situasi yang Menantang

AKR tetap berhasil mempertahankan kinerja operasional & finansial yang kuat meskipun dihadapi oleh tantangan COVID-19 kami beradaptasi dan tetap *agile* di tengah ketidakpastian. Protokol Kontinuitas Bisnis yang kuat yang kami adopsi memungkinkan kami untuk melayani pelanggan tanpa gangguan. Investasi yang telah dilakukan di jaringan logistik, bisnis baru, Platform Teknologi Informasi, dan sumber daya manusia memungkinkan manajemen menyesuaikan diri terhadap era Normal Baru dengan cepat. Sementara itu, manajemen terus memprioritaskan penerapan praktik terbaik dalam inisiatif Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Tujuan dari laporan ini adalah untuk membantu semua pemangku kepentingan dalam lebih memahami kegiatan operasional, kinerja keuangan, inisiatif ESG, dan arah strategis Perseroan menuju masa depan yang lebih baik.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia

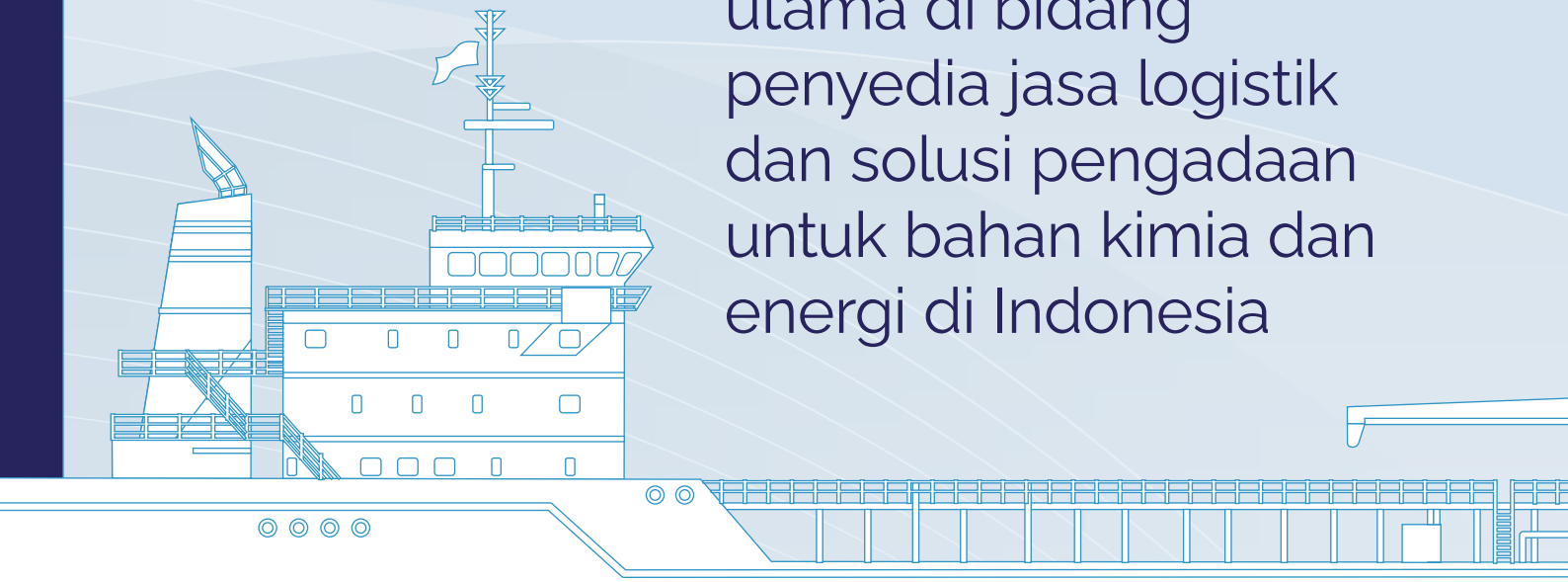

AKR Beyond: Menangkap Peluang dan Membangun Legacy

AKR Beyond adalah komitmen AKR dalam mengimplementasikan strategi yang tepat, mengoptimalkan operasional bisnis, menangkap peluang pertumbuhan di era yang dinamis, dan membangun *legacy* berkelanjutan. Melalui inovasi, sinergi, dan teknologi mutakhir, AKR terus memperkuat fondasi bisnisnya, menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Misi

Mengoptimalkan potensi kita untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan

Kajian dan Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi dan Misi Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkelanjutan meninjau Visi dan Misi Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Proses peninjauan dan persetujuan Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam kontrak manajemen yang dikaji dan ditetapkan setiap tahun.

AKR Beyond Tahun 2024

Strategy

- Memperluas cakupan basis pelanggan industri
- Mempersiapkan ekspansi ke Indonesia Timur
- Mendorong perkembangan ekspansi BBM Ritel
- Pengembangan KEK JIIPE Gresik



Value

Menjawab tantangan industri logistik Indonesia dan mendorong kontribusi terhadap perekonomian nasional



Legacy

Menciptakan nilai tambah dan dampak positif yang signifikan berupa pengalaman, reputasi, dan pertumbuhan sebagai landasan untuk terus maju dan menciptakan dampak baru yang signifikan bagi Indonesia



Pengakuan Dunia atas KEK JIIPE

21
tenants
Jumlah *Tenants*

384
hektar
Akumulasi lahan terjual dan tersewakan

17%
Kontribusi JIIPE pada laba bruto terkonsolidasi perseroan

Keberhasilan JIIPE didukung oleh:

- Kesiapan dan pengembangan lahan, pelabuhan, utilitas, serta infrastruktur
- Beroperasinya pabrik peleburan tembaga *single-line* terbesar di dunia oleh anchor tenant JIIPE, (dimulai pada 2019 dan diresmikan dan beroperasi pada 2024)
- Status Kawasan Ekonomi Khusus sejak 2021 dan sertifikat operasional sejak 2022
- Dukungan kebijakan hilirisasi di Indonesia

JIIPE Mendukung Energi Bersih dan Rendah Karbon

Menyediakan energi yang lebih bersih dan terbarukan





Kawasan industri tanpa limpasan air.



Panel surya di *rooftop* telah dipasang pada pusat utilitas JIIPE, mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan.



Pembangkit listrik tenaga gas akan menjadi sumber listrik selain listrik tegangan tinggi dari PLN.



Fasilitas pengolahan air dan air limbah (WTP & WWTP) untuk menyediakan air bersih dan daur ulang serta mengurangi limpasan air.

Mengukuhkan Stabilitas dan Pertumbuhan dengan Model Bisnis Teruji Waktu

AKR merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang *supply chain* dan logistik, serta pengembang kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi terbesar di tanah air. Perseroan menyediakan produk bahan kimia dasar, energi, dan infrastruktur penting untuk mendukung perkembangan industri di Indonesia.

Kekuatan AKR



AKR terus berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan industri, bertindak sebagai perpanjangan tangan bagi pemasok, menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan manfaat kepada pemegang saham dan karyawan.

AKR menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan menerapkan model bisnis yang solid dan infrastruktur yang komprehensif. Jaringan infrastruktur logistik perusahaan mencakup 13 pelabuhan laut, 6 pelabuhan sungai, serta fasilitas tangki penyimpanan dan gudang yang tersebar di 21 lokasi di seluruh kepulauan Indonesia.

Lokasi Tank Terminal

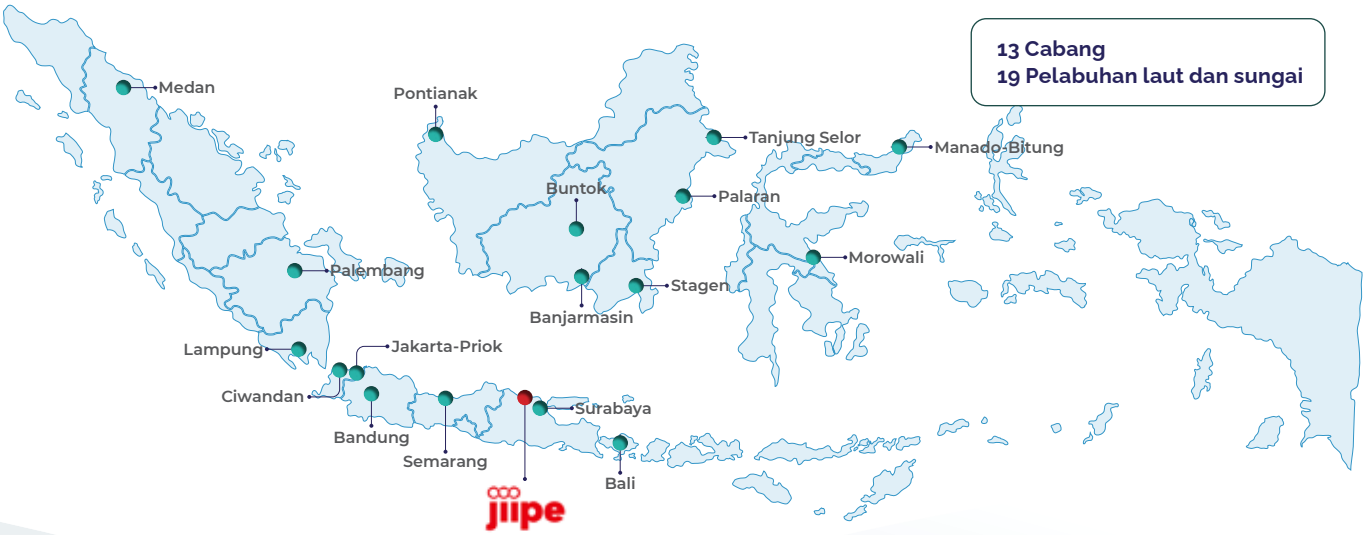

Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi
46.100 KL	590.800 KL	154.600 KL	30.500 KL
• Medan Anggada • Medan Gabion • Palembang Andahanesa • Lampung	• Banten Ciwandan • Jakarta Tank Terminal (JTT) • Tj Priok • Bandung • Semarang Tj Emas • Surabaya Nilam Timur • Surabaya Nilam Utara • Manyar - KEK JIIPE • Anugrah Kreasi Pratama Indonesia (AKPI) • Terminal Nilam Utara (TNU) • Bali	• Pontianak • Buntok Muara Teweh • Banjarmasin • Stagen – Kalsel • Palaran • Tanjung Selor	• Morowali • Bitung

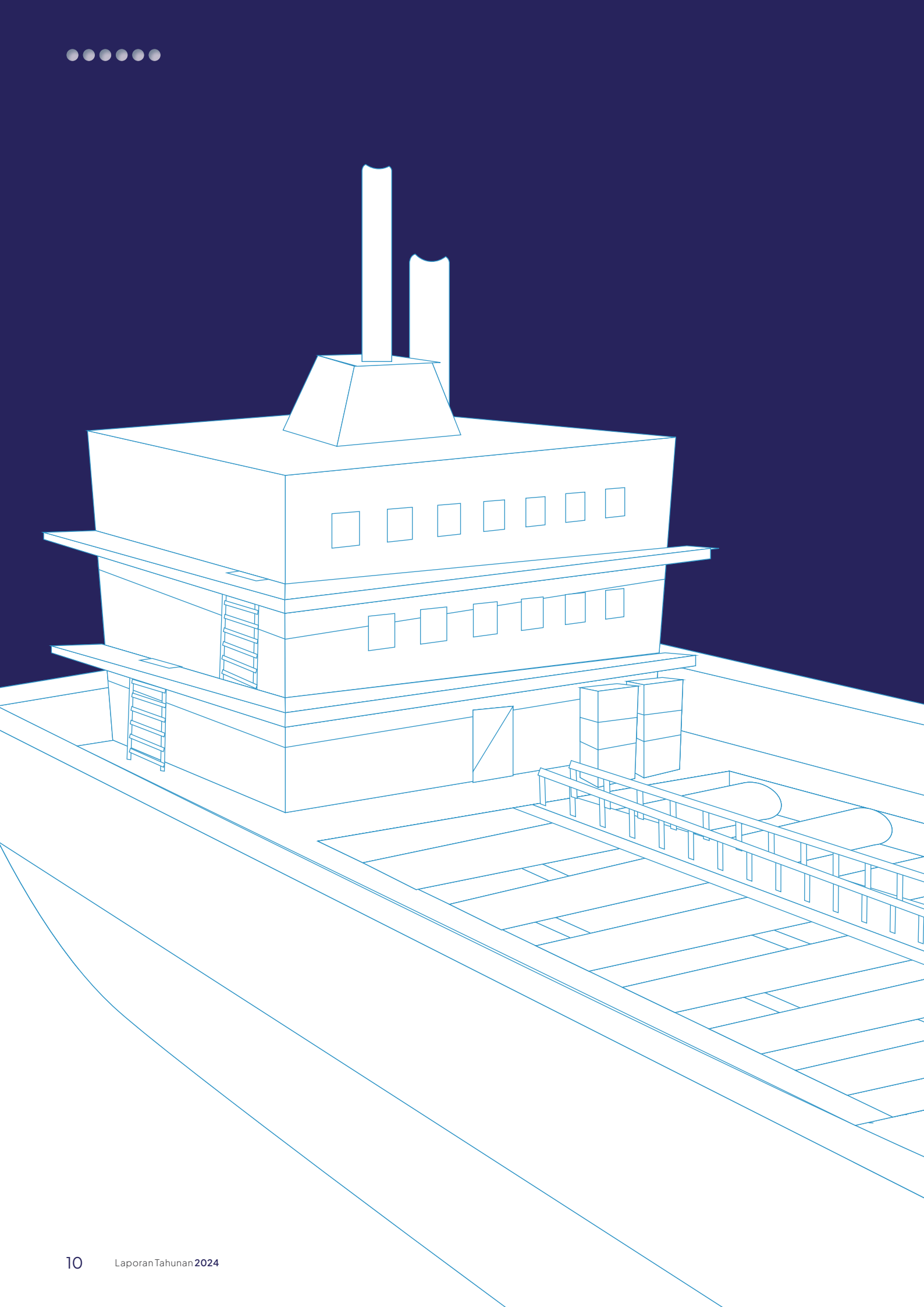

Untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, AKR mengembangkan platform teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan pergerakan, posisi persediaan, dan kondisi produk dari hulu ke hilir, mulai dari transaksi awal hingga produk sampai ke tangan konsumen. Bisnis utama AKR meliputi perdagangan dan distribusi BBM serta bahan kimia dasar seperti caustic soda, sodium sulfat, PVC resin, dan soda ash. Saat ini, Perseroan berekspansi ke sektor BBM ritel dengan menggandeng pemain minyak internasional terkemuka, serta mendirikan SPBU untuk mendistribusikan bensin berkualitas tinggi, sambil mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam distribusi bahan bakar bersubsidi kepada masyarakat.

Selain itu, AKR mengambil langkah progresif melalui Kawasan Industri dan Pelabuhan Terintegrasi/*Java Integrated Industrial Ports Estate* (JIIPE). Dengan status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, AKR berfokus pada potensi pendapatan berkelanjutan dengan menyediakan layanan utilitas seperti tenaga listrik, air, gas, serta operasional pelabuhan yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

19
Pelabuhan Laut dan Sungai

171 SPBU
oleh AKR & bp AKR*
*Per Februari 2025

822.000 KL
Terminal Tangki Penyimpanan

14 Unit
Kapal/SPOB

50,000 Sq.M
Kapasitas Gudang

±250 Unit
Truk Tangki BBM & Kimia

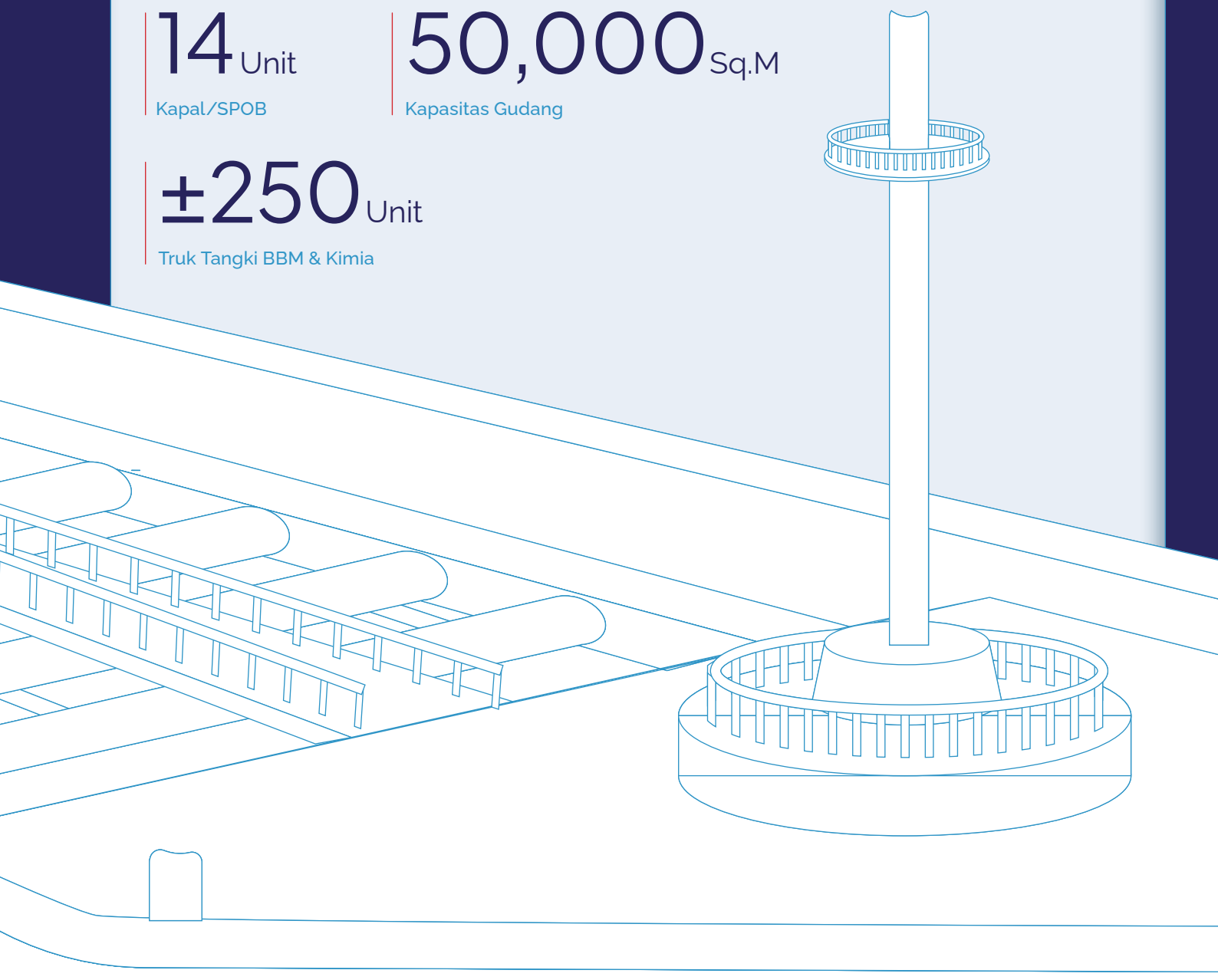

Pencapaian AKR Tahun 2024

Total Penjualan dan Pendapatan

Rp38.729 miliar

Perdagangan dan Distribusi

Rp28.934 miliar

Bahan Bakar Minyak

Perdagangan dan Distribusi

Rp6.598 miliar

Bahan Kimia Dasar

Manufaktur

Rp652 miliar

Kawasan Industri

Rp1.381 miliar

Jasa Logistik

Rp1.165 miliar



Total Aset
Rp33.109 miliar

EBITDA
Rp3.115 miliar

Total Ekuitas
Rp14.624 miliar

ROE
19%

Laba Neto
Rp2.225 miliar

Net Gearing
-0,04x
Net Cash



Keberlanjutan yang Andal, Pertumbuhan yang Bernilai

AKR berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan menciptakan dampak positif bagi bisnis, masyarakat, dan perekonomian nasional. Dengan mengutamakan pertumbuhan yang bernilai, AKR berupaya memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, memastikan terciptanya kesejahteraan yang merata. Kami juga berpartisipasi aktif mengembangkan dan menyediakan energi alternatif yang ramah lingkungan, berperan dalam penyediaan akses energi yang adil, dan mendukung upaya pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Keberlanjutan merupakan inti dari strategi bisnis kami, di mana setiap langkah yang diambil berfokus pada kemajuan yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan daya saing bisnis. Kami percaya bahwa setiap inisiatif keberlanjutan berkaitan sangat erat dengan keberlangsungan bisnis AKR. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, terutama dalam aspek Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG), AKR telah membentuk Komite ESG untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keberlanjutan. Melalui pengawasan ini, kami memastikan bahwa semua inisiatif dan strategi ESG yang diterapkan berjalan dengan baik, menciptakan dampak positif yang luas, dan memperkuat posisi AKR sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Pencapaian Kinerja ESG 2024

E

- Sebanyak 156.438 GJ jumlah energi terbaharukan yang digunakan dalam operasional AKR
- Sebanyak 53.596 ton CO2e emisi 1 dan 2
- Intensitas emisi di dalam organisasi AKR sebesar 0,015ton CO2e/Rp juta laba bruto
- Total biaya pengelolaan biaya lingkungan hidup AKR yaitu Rp8,2 milliar

S

- Realisasi Program CSR 2024 mencapai Rp10+ miliar
- 21% posisi *middle-up management* diduduki oleh wanita
- Jarak tempuh armada truk tanpa kecelakaan tercatat sebesar 12 juta km
- *Zero fatality*

G

- Memperbaharui kebijakan laporan kepemilikan saham sesuai dengan POJK No. 4 tahun 2024 dan ASEAN Scorecard
- Nihil pelanggaran hukum pada tahun 2024
- Sosialisasi *whistleblowing system* yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan Perseroan

Rating ESG oleh Lembaga Internasional

ESG Sustainalytics

20,3 Medium Risk



S&P Global CSA

Meningkat menjadi 37, terjaga di atas rata-rata industri

S&P Global

MSCI SMALL CAPS INDEX



ISS ESG

Performance Score 33,59

ISS ESG

Indeks Saham Utama dan ESG

Index LQ 45
IDX 30
Investor 33
Bisnis 27
IDX Sharia Growth
Kompas100
Pefindo I-Grade 30
TOP 8 IDX ESG Star Listed Company
ESG Quality 45 IDX KEHATI
ESG Sector Leaders IDX KEHATI
IDX LQ45 Low Carbon Leaders

Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2024

Kategori Platinum dari BGK Foundation



Daftar Isi

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab	1
Penjelasan Tema Tahun 2024	2
Kesinambungan Tema	4
Visi dan Misi	6
AKR Beyond: Menangkap Peluang dan Membangun *Legacy*	6
Pengakuan Dunia atas KEK JIIPE	8
Mengukuhkan Stabilitas dan Pertumbuhan dengan Model Bisnis Teruji Waktu	9
Pencapaian AKR Tahun 2024	12
Keberlanjutan yang Anda, Pertumbuhan yang Bernilai	16
Daftar Isi	16

Ikhtisar Keuangan dan Operasional

Ikhtisar Keuangan	20
Ikhtisar Operasional	24
Ikhtisar Saham	24
Ikhtisar Dividen	26
Ikhtisar Efek Lainnya	26
Penghargaan dan Sertifikasi	28
Peristiwa Penting	30

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris	34
Laporan Direksi	40
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Pertanggung Jawaban atas Laporan Tahunan 2024 PT AKR Corporindo Tbk	50

Profil Perusahaan

Informasi Umum	54
Sejarah Singkat	56
Nilai-Nilai Perusahaan	58
Makna Logo Perusahaan	59
Jejak Langkah Perusahaan	60
Bidang Usaha	62
Segmen Usaha, Produk, dan Jasa	64
Keanggotaan dalam Asosiasi	69
Struktur Organisasi	70
Profil Dewan Komisaris	71
Profil Direksi	74
Informasi Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2024	81
Pejabat Eksekutif	82
Komposisi Pemegang Saham Perusahaan	86
Kronologis Pencatatan Saham	92
Informasi tentang Sukuk dan Obligasi Konversi	93
Struktur Grup Perusahaan	94
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	95
Kantor Akuntan Publik	97
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	98
Situs Web Perusahaan	100
Wilayah Operasional dan Daftar Alamat Kantor	102

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Ekonomi dan Industri	106
Tinjauan Operasional	107
Tinjauan Keuangan	115
Kemampuan Membayar Utang	127
Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal	128
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal	129
Realisasi Investasi Barang Modal	129
Target dan Realisasi 2024	129
Proyeksi 2025	130
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (MESOP)	131
Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan	131
Prospek Usaha	132
Dividen	134
Aspek Pemasaran	135
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	136
Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/ Modal	136
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	138

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	140
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak pada Perseroan	140
Informasi Kelangsungan Usaha	141

Fungsi Penunjang Bisnis

Sumber Daya Manusia	143

Governansi Perusahaan

Pencapaian Governansi Perusahaan	156
Komitmen Membangun Governansi Perusahaan	158
Penilaian Penerapan Governansi Perusahaan	165
Rapat Umum Pemegang Saham	166
Pelaksanaan RUPS Tahun 2024	169
Pelaksanaan RUPS Tahun 2023	173
Dewan Komisaris	177
Komisaris Independen	183
Direksi	184
Independensi dan Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi	191
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	198
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	199
Komite Penunjang Dewan Komisaris	202
Komite-Komite Lain Di Bawah Dewan Komisaris yang Dimiliki Oleh Perusahaan	210
Komite Penunjang Direksi	211
Sistem Pengendalian Internal	219
Manajemen Risiko	224
Permasalahan Hukum	229
Sanksi Administratif	229
Akses Informasi dan Data Perusahaan	229
Jalinan Keterikatan dan Komunikasi Investor	230
Pedoman Etika dan Perilaku	232
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan	235
Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi	236
Whistleblowing System	236
Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan Governansi Perusahaan	238
Kebijakan *Insider Trading*	238
Governansi Teknologi Informasi	239
Pedoman Penerapan Prinsip Governansi Perusahaan	243
Keterbukaan Praktik *Bad Governance*	265
Laporan Keuangan	267
Referensi Silang SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Perusahaan Publik	428




AKR
KAP. 2300 KL
15
UTAMAKAN KESELAMATAN KERJA
SAFETY FIRST
STASIUN PENGISIAN 1
FILLING 1A
FILLING 1B
ZONA
3
10



PT AKR Corporindo Tbk

01

Ikhtisar Keuangan dan Operasional

Ikhtisar Keuangan

Posisi Keuangan Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Modal Kerja Bersih	7.544	5.588	4.561	2.716	2.940
Investasi pada Entitas Asosiasi	492	446	417	402	394
Aset Lancar	20.998	18.163	15.841	12.023	8.042
Aset Tidak Lancar	12.111	12.134	11.346	11.486	10.641
Jumlah Aset	**33.109**	**30.297**	**27.188**	**23.509**	**18.684**
Liabilitas Jangka Pendek	13.454	12.575	11.280	9.307	5.102
Liabilitas Jangka Panjang	5.030	3.678	2.752	2.903	3.025
Jumlah Liabilitas	**18.485**	**16.254**	**14.033**	**12.210**	**8.127**
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	11.563	11.263	10.969	9.345	8.752
Kepentingan Non-pengendali	3.061	2.780	2.186	1.954	1.804
Jumlah Ekuitas	**14.624**	**14.043**	**13.155**	**11.299**	**10.556**

Jumlah Aset

Rp Miliar

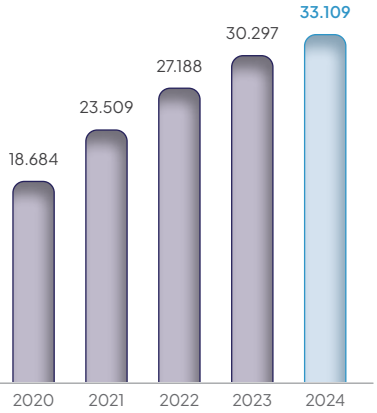

Jumlah Liabilitas

Rp Miliar

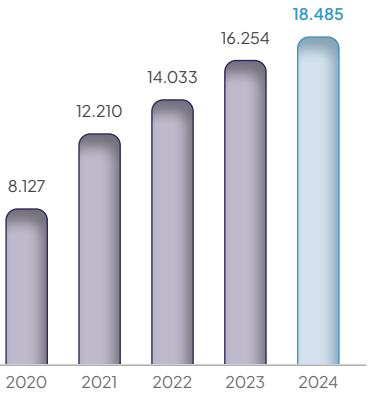

Jumlah Ekuitas

Rp Miliar

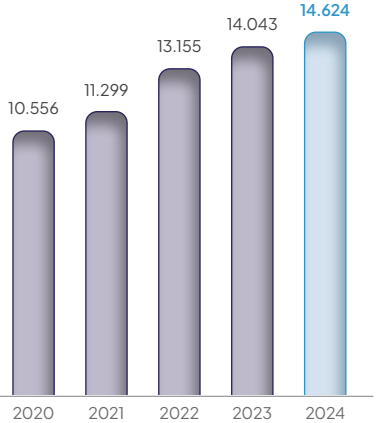

Rasio Laba terhadap Ekuitas

%

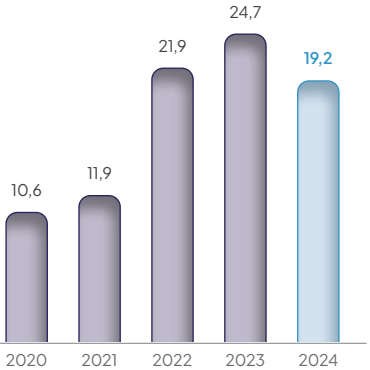

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Penjualan dan Pendapatan	38.729	42.087	47.540	25.707	17.716
Laba Bruto	3.509	4.473	4.252	2.293	2.048
Laba Usaha	2.578	3.561	3.087	1.455	1.258
Laba Neto Tahun Berjalan	2.399	3.078	2.479	1.135	962
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.225	2.780	2.403	1.112	925
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	174	298	76	23	37
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.452	3.048	2.576	1.158	972
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.254	2.761	2.453	1.126	929
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	199	287	123	32	43
Laba per Saham (Rupiah Penuh)	112,73	140,87	121,77	56,32	46,71

Penjualan dan Pendapatan

Rp Miliar

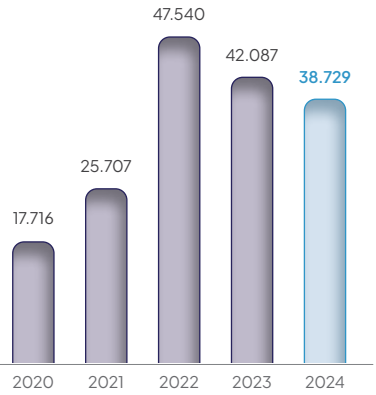

Laba Usaha

Rp Miliar

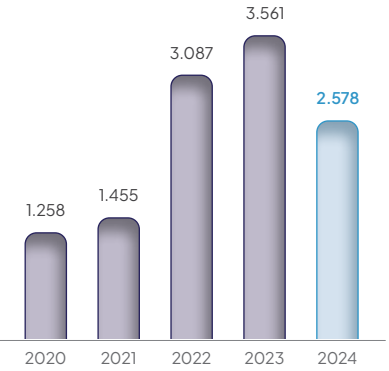

Laba Bruto

Rp Miliar

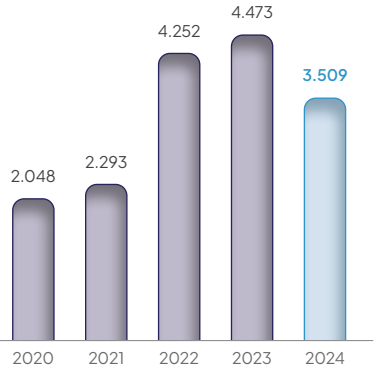

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Rp Miliar

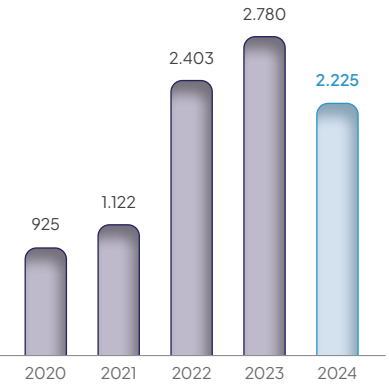

Laba per Saham

Rp

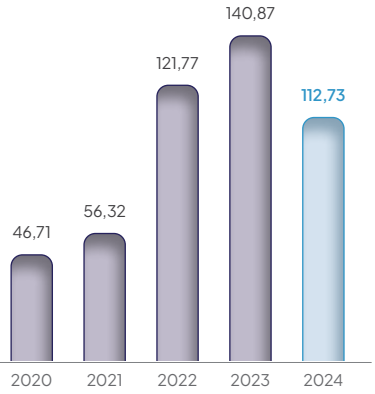

Saldo Kas

Rp Miliar

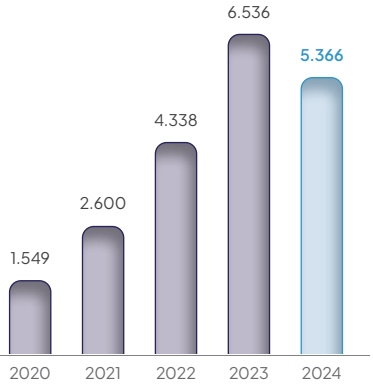

Arus Kas Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.347	3.502	2.629	2.945	1.067
Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1.173)	(584)	(276)	(208)	(139)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.470)	(648)	(873)	(1.683)	(1.239)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	**(1.296)**	**2.270**	**1.479**	**1.053**	**(311)**
Dampak Perubahan Selisih Kurs	127	(72)	258	(2)	0
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**6.536**	**4.338**	**2.600**	**1.549**	**1.861**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**5.366**	**6.536**	**4.338**	**2.600**	**1.549**

Rasio Keuangan Konsolidasian

dalam % kecuali dinyatakan lain

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset	6,7	9,2	8,8	4,7	5,0
Rasio Laba terhadap Ekuitas	19,2	24,7	21,9	11,9	10,6
Rasio Laba terhadap Pendapatan	5,7	6,6	5,1	4,3	5,2
Rasio Lancar (kali)	1,6	1,4	1,4	1,3	1,6
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	1,3	1,2	1,1	1,1	0,8
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali)	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
Marjin Laba Bruto	9,1	10,6	8,9	8,9	11,6
Marjin Laba Usaha	6,7	8,5	6,5	5,7	7,1
Tingkat Perputaran Jumlah Aset (kali)	1,2	1,4	1,7	1,1	0,9
Rasio *Gearing* Bersih (kali)	-0,04	-0,16	-0,12	0,02	0,22
Rasio Harga terhadap Laba (kali)	13,6	10,1	9,2	12,6	10,9

Rasio Laba terhadap Pendapatan

%

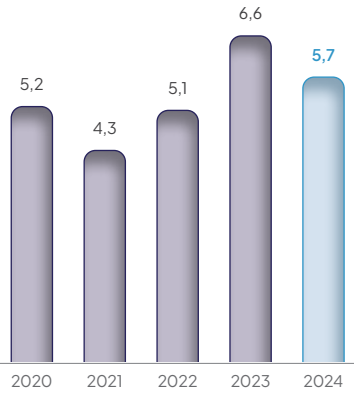

Rasio Laba terhadap Jumlah Aset

%

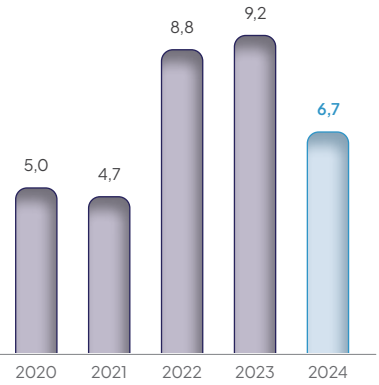

Rasio Lancar

kali

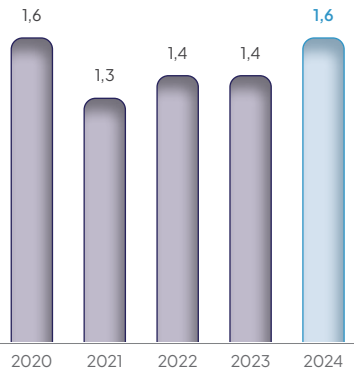

Rasio *Gearing* Bersih

kali

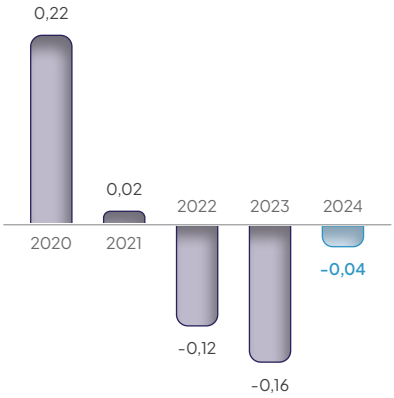

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

kali

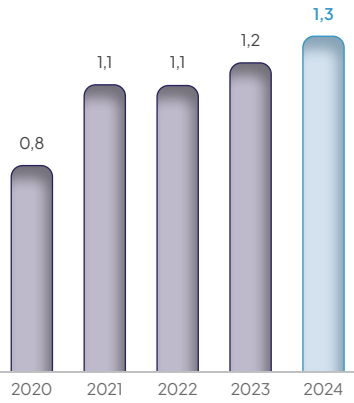

Rasio Pembagian Dividen

%

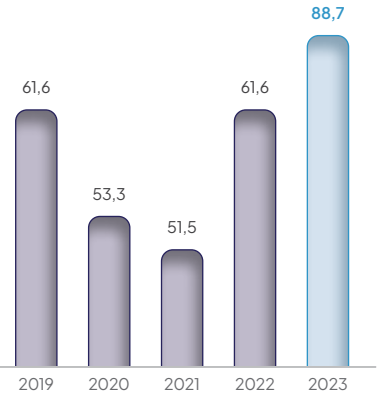

Ikhtisar Operasional

Segmen Operasi terhadap Penjualan dan Pendapatan

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Perdagangan dan Distribusi	35.532	38.213	44.698	23.712	16.219
Jasa Logistik	1.165	993	893	772	319
Pabrikan	652	558	800	684	376
Kawasan Industri	1.381	2.323	1.149	539	319

Ikhtisar Saham

Kinerja Perdagangan Saham

PT AKR Corporindo Tbk (AKR) melaksanakan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) pada 3 Oktober 1994 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham AKRA.

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)	22.482	29.608	28.103	16.500	12.265
Harga Tertinggi (Rp)	1.865	1.670	1.580	944	798
Harga Terendah (Rp)	1.075	1.200	685	554	281
Harga Penutupan (Rp)	1.120	1.475	1.400	822	611
Volume Perdagangan (Lembar Saham)	6.634.160.000	8.660.986.800	13.281.510.800	15.728.500.500	23.413.903.000
Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	20.073.474.600	20.073.474.600	20.073.474.600	20.073.474.600	20.073.474.600

Kinerja Saham Per Triwulan

Periode	Harga Saham (Rp)			Volume Perdagangan (Lembar Saham)	Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2024						
Triwulan 1	1.825	1.475	1.720	1.741.810.000	20.073.474.600	34.526
Triwulan 2	1.865	1.530	1.620	1.474.260.000	20.073.474.600	32.519

Periode	Harga Saham (Rp)			Volume Perdagangan (Lembar Saham)	Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
Triwulan 3	1.620	1.530	1.550	2.125.090.000	20.073.474.600	31.114
Triwulan 4	1.650	1.075	1.120	1.293.000.000	20.073.474.600	22.482
2023						
Triwulan 1	1.650	1.200	1.550	2.364.381.600	20.073.474.600	31.114
Triwulan 2	1.670	1.280	1.420	2.270.581.800	20.073.474.600	28.504
Triwulan 3	1.560	1.255	1.545	2.547.584.300	20.073.474.600	31.014
Triwulan 4	1.550	1.330	1.475	1.478.439.100	20.073.474.600	29.608

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2023 – 2024

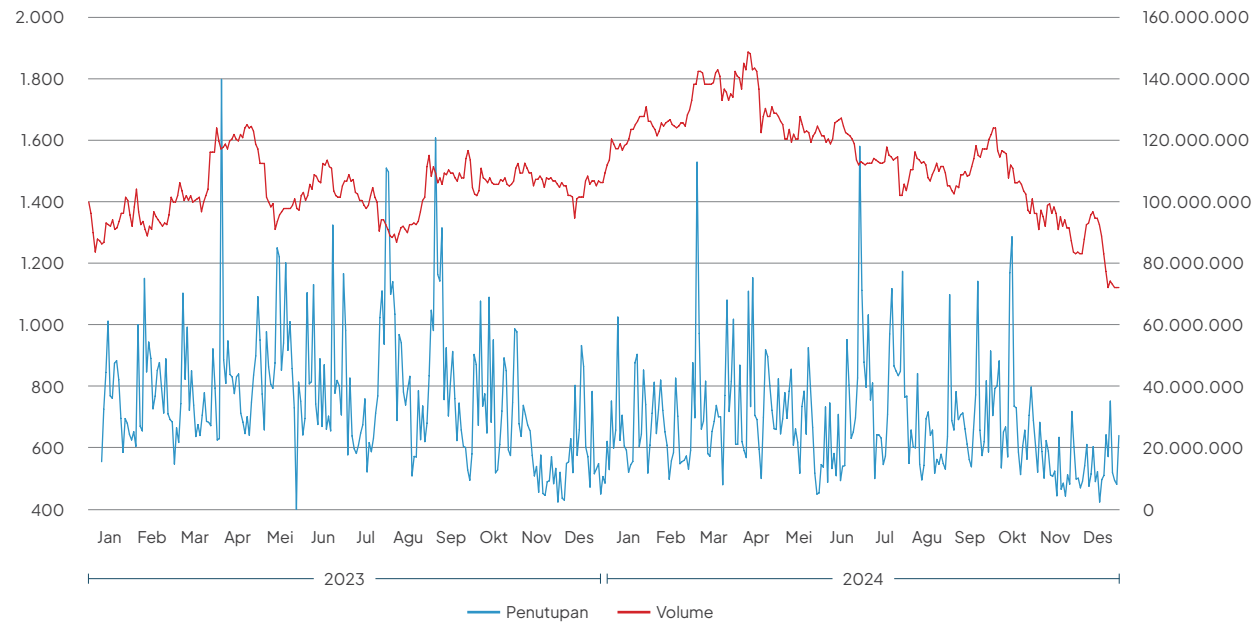

Aksi Korporasi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan yang mempengaruhi perubahan pada saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun perubahan nilai nominal saham.

Sanksi atas Perdagangan Saham

Hingga akhir tahun 2024, AKR tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek, dimana Perseroan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

Ikhtisar Dividen

Dividen Saham	Dividen Saham Tahun Buku 2023	Dividen Saham Tahun Buku 2022
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Miliar)	2.467	1.480
Dividen per Lembar Saham I (Rp)	Rp125	Rp75
Rasio Pembayaran Dividen (%)	88,73%	61,59%

	2023			2022	
	Interim 1	Interim 2	Final	Interim	Final
Tanggal Keputusan RUPS dan Keputusan Direksi	24 Juli 2023 Rp50 saham	23 Oktober 2023 Rp25 saham	14 Mei 2024 Rp50 saham	22 Juli 2022 Rp25 saham	28 April 2023 Rp50 saham
Tanggal Pembayaran	16 Agustus 2023 Rp50 saham	15 November 2023 Rp25 saham	27 Mei 2024 Rp50 saham	16 Agustus 2022 Rp25 saham	24 Mei 2023 Rp50 saham

Ikhtisar Efek Lainnya

Per 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki efek lainnya yang masih *outstanding* di Bursa Efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.



Penghargaan dan Sertifikasi

1. **Indonesia Biggest Companies 2024**
   by Fortune Indonesia 100
2. **Badan Usaha BBM Terbaik Kategori Besar**
   BPH Migas Awards 2024
3. **The Best Logistics Company in Oil and Gas Distribution Category**
   from Bisnis Indonesia Logistics Awards 2024
4. **TOP 3 Best Biodiversity Disclosure**
   7th Global Conference ESG Management & Sustainability
5. **The Best Execution Winner in Distribution & Logistic Industry**
   SPEX2 Award 2024
6. **The Best Indonesia Annual Report Award 2024**
   Gold Predicate (Excellent)
   by Economic Review



7 **Top 50 Big Capitalization Public Listed Company 2024**
IICD

8 **Top 20 GCG Awards 2024**
The Iconomics

9 **Outstanding Achievement in Sustainability & Governance**
SPEx2 Award 2024

10 **Indeks Integritas Bisnis Lestari 2024**

11 **Best Place To Invest Sustainability**
SPEx2 Award 2024

12 **PELINDO Customer Awards 2024**
Category Change Maker Partner



Peristiwa Penting

5 Januari 2024



Pendirian PT Berkah Renewable Energi Nusantara

AKR dan entitas anak PT Usaha Era Pratama resmi mendirikan perusahaan di bidang pengoperasian pembangkit tenaga listrik serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penyediaan energi yaitu PT Berkah Renewable Energi Nusantara di Gresik tanggal 5 Januari 2024.

28 Februari 2024



Pembelian Kapal 105

Dalam mendukung pengembangan aktivitas bisnis logistik *supply chain*, AKR menanamkan modal sebesar Rp210 miliar ke entitas anak PT AKR Sea Transport, yang digunakan untuk membeli kapal 105 untuk memperkuat armada transportasi. Dengan pembelian tersebut, Perseroan telah memiliki 14 unit kapal.

14 Maret 2024



Penandatanganan Kontrak Energi Bersubsidi

Perseroan melanjutkan penugasan penyaluran energi bersubsidi seiring penandatanganan kontrak Tahun Anggaran 2024 dengan Kementerian Keuangan. AKR berkomitmen menjaga kepercayaan pemerintah melalui pengawasan ketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran dan tepat volume.

17 April 2024



Pendirian Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd

AKR telah mendirikan entitas anak Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd (CPIT) di Singapura serta memiliki 100% kepemilikan saham. CPIT bergerak di bidang perdagangan dan distribusi produk *chemicals* dan *petroleum*. Total modal disetor dan ditempatkan sebesar USD 5.000.134,72.

29 April 2024



Pembagian Dividen Tahun Buku 2023

RUPS telah menyetujui dividen Tahun Buku 2023 sebesar Rp2,48 triliun atau setara dengan Rp125/saham. Dividen tersebut mencapai 88,74% dari laba neto. Ini adalah wujud komitmen AKR dalam memberikan nilai tambah, sekaligus mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan arus kas yang sehat.

1 Juli 2024



Pengoperasian Smelter Single Line Terbesar di Dunia

Pertumbuhan industri hilirisasi mineral Indonesia ditandai dengan diresmikannya smelter tembaga single line di JIIPE. Smelter ini akan memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun yang akan menjadi salah satu bahan utama ekosistem kendaraan listrik. Keberadaan smelter ini juga memperkuat rantai pasok industri nasional dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri.

19 Juli 2024



Penghargaan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Terbaik untuk JIIPE

Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial & Port Estate Gresik (KEK JIIPE Gresik) yang merupakan mega proyek hasil kerjasama strategis AKR dan PT Pelindo (Persero) memperoleh penghargaan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

1 Agustus 2024



Prestasi Terbaik dalam Keberlanjutan dan Tata Kelola

Perseroan meraih penghargaan dari SPEx2 Award 2024, yakni penghargaan "*Outstanding Achievement in Sustainability & Governance*" dan "*The Best Execution Winner in Distribution and Logistic Industry*". Penghargaan tersebut menegaskan kembali komitmen keberlanjutan AKR yang dibuktikan dengan tindakan nyata dan strategi yang terarah.

7 Oktober 2024



Pendirian PT Terminal Energi Primer

AKR dan entitas anak PT Usaha Era Pratama menandatangani pendirian perusahaan yaitu PT Terminal Energi Primer yang bergerak di bidang pergudangan dan penyimpanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penyediaan energi. PT Terminal Energi Primer didirikan tanggal 7 Oktober 2024 dan berkedudukan di Gresik.





PT AKR Corporindo Tbk

02

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris

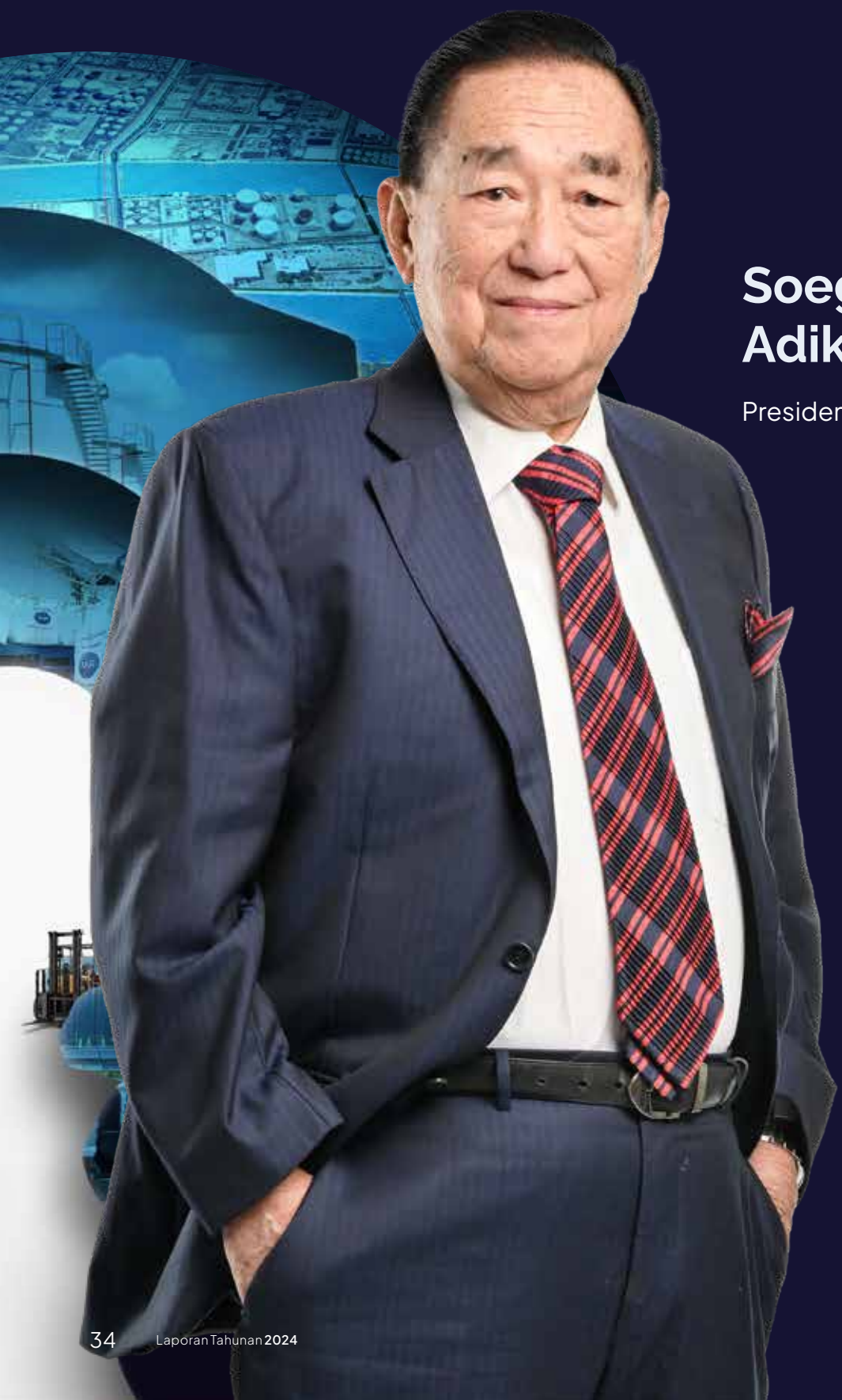

Soegiarto Adikoesoemo

Presiden Komisaris

> AKR telah membangun rekam jejak yang solid selama enam dekade dalam melayani berbagai segmen pelanggan industri di Indonesia. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang telah teruji, AKR diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional. Dewan Komisaris senantiasa menekankan optimalisasi sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Kami dengan penuh rasa syukur melaporkan bahwa PT AKR Corporindo Tbk berhasil menutup Tahun Fiskal 2024 dengan pencapaian yang membanggakan. Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan ini. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, dengan hormat kami menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan arahan strategis kepada Direksi guna memastikan bahwa AKR dikelola sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan serta dalam koridor governansi perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan independensi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Ekonomi Tahun 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan geopolitik, perubahan kebijakan moneter, dan disrupsi rantai pasok. Laporan World Economic Outlook yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% pada tahun 2024. Namun, ketidakpastian tetap tinggi, terutama akibat tekanan inflasi dan dinamika perdagangan global yang terus berkembang.

Di sisi kebijakan, bank sentral di berbagai negara tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk meredam inflasi. Suku bunga acuan di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India tetap tinggi, yang berdampak pada biaya pinjaman global dan potensi perlambatan ekonomi lebih lanjut. Meskipun demikian, optimisme terhadap stabilitas ekonomi mulai meningkat seiring dengan prospek perbaikan rantai pasokan dan moderasi harga energi.

Dewan Komisaris memandang bahwa ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2024 diperkirakan tetap kuat, dengan pertumbuhan yang stabil dan inflasi yang terkendali. Namun, risiko eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan pasar keuangan global tetap perlu diwaspadai. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global akan menjadi kunci keberhasilan ekonomi Indonesia. Adapun poin penting yang diberikan oleh Dewan Komisaris meliputi:

1. Pentingnya strategi bisnis yang fleksibel dan pengelolaan risiko yang cermat untuk memastikan ketahanan dan daya saing Perseroan.
2. Optimalisasi efisiensi operasional melalui transformasi digital.
3. Perluasan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan.
4. Memperkuat inisiatif keberlanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon sebesar 15% melalui praktik hemat energi.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi yang dijalankan oleh Direksi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan misi Perseroan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kinerja operasional, keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip governansi perusahaan. Dengan memastikan bahwa strategi yang diterapkan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, Dewan Komisaris berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan Perseroan di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.

Pengawasan dan Arahan Strategis Dewan Komisaris:

1. **Evaluasi Kinerja dan Strategi**: Dewan Komisaris secara rutin mengadakan diskusi dan rapat dengan Direksi untuk menelaah perkembangan kinerja serta efektivitas strategi yang telah diterapkan.
2. **Fokus pada Efisiensi dan Inovasi**: Menyoroti aspek efisiensi operasional, inovasi bisnis, serta kesiapan dalam menghadapi disrupsi industri dan dinamika pasar.
3. **Mitigasi Risiko dan Peningkatan Daya Saing**: Memberikan arahan strategis untuk mengelola risiko, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi Perseroan di sektor energi dan logistik.
4. **Komitmen terhadap Keberlanjutan**: Memastikan implementasi strategi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Mengawal penerapan governansi dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap aspek operasional.
6. **Keunggulan Kompetitif Jangka Panjang**: Meyakini bahwa komitmen terhadap keberlanjutan akan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Ke depan, Dewan Komisaris akan terus memperkuat peran pengawasan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang diterapkan Direksi mampu menjawab tantangan industri, mendorong efisiensi operasional, serta memperkuat pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang erat antara Dewan Komisaris dan Direksi, kami optimis bahwa Perseroan dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Mekanisme Pengawasan dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris menjalankan mekanisme pengawasan melalui berbagai forum resmi, termasuk rapat berkala dengan Direksi serta Komite di bawah Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 4 (empat) kali. Melalui rapat ini, kami mengevaluasi implementasi strategi, kinerja operasional dan keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip governansi perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan atas laporan kinerja yang disampaikan secara rutin oleh Direksi guna memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perseroan.

Pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan secara berkala, terutama dalam situasi yang memerlukan keputusan strategis atau respons terhadap dinamika industri dan pasar. Dewan Komisaris berperan aktif dalam memberikan pandangan dan arahan konstruktif guna memastikan eksekusi strategi berjalan efektif dengan mempertimbangkan aspek risiko, keberlanjutan, dan efisiensi operasional. Selain melalui forum resmi, Dewan Komisaris juga menjalin komunikasi informal dengan Direksi untuk meningkatkan fleksibilitas serta responsivitas dalam pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh, Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan pengawasan yang lebih mendalam di berbagai aspek operasional. Dengan kombinasi mekanisme formal dan komunikasi yang terbuka, Dewan Komisaris berkomitmen mendukung Direksi dalam mengelola Perseroan secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Penilaian Terhadap Kinerja Perseroan dan Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah menjalankan perannya secara strategis dalam mendukung rantai pasok dan logistik komoditas dasar yang krusial bagi industrialisasi dan produksi sumber energi, khususnya BBM dan kimia dasar. Urgensi peran ini semakin meningkat seiring dengan transisi Indonesia dari negara berbasis ekstraksi menjadi negara dengan nilai tambah (*value-added country*) yang mendorong peningkatan aktivitas produksi energi serta industri turunan lainnya melalui pengembangan *smelter*.

Dalam menghadapi perubahan ini, Direksi telah menunjukkan kinerja yang solid dengan memastikan kelancaran distribusi serta keandalan jasa logistik BBM dan kimia dasar guna mendukung kebutuhan industri yang berkembang pesat. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Direksi, termasuk optimalisasi infrastruktur logistik, menjaga kestabilan pasokan energi, serta ekspansi layanan untuk memperkuat posisi AKR sebagai mitra utama dalam rantai pasok industri energi dan manufaktur. Pencapaian kinerja Perseroan berkat kepemimpinan konsisten Direksi sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Utama	Kontribusi Laba Kotor Berdasarkan Segmen
Profitabilitas Terjaga Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp2.225 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan.	**Segmen Perdagangan & Distribusi** Kontributor utama dengan laba bruto Rp2.629 miliar.
Dividen Kompetitif *Dividend payout ratio* di atas 50% dan dividend yield lebih dari 6% per tahun, mencerminkan komitmen terhadap profitabilitas dan keberlanjutan.	**Segmen Kawasan Industri** Mencatat laba bruto Rp597 miliar berkontribusi sebesar 17% dari laba bruto konsolidasi Perseroan, menunjukkan pertumbuhan yang positif.
EBITDA Kuat Mencapai Rp3.115 miliar, menegaskan stabilitas keuangan dengan neraca yang sehat.	**Segmen Logistik dan Manufaktur** Laba bruto tercatat sebesar Rp283 miliar.

Kinerja Keuangan Utama	Kontribusi Laba Kotor Berdasarkan Segmen
Struktur Keuangan Sehat *Net gearing* pada posisi -0,04× atau *net cash*, mencerminkan manajemen keuangan yang prudent.	
Pengembalian Modal Optimal *Return on Equity* (ROE) sebesar 19% dan *Return on Assets* (ROA) di 7%, menunjukkan efektivitas strategi operasional dan manajemen risiko.	

Kami melihat bahwa ketahanan dan adaptasi bisnis yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas dan dinamika pasar global, menjadi bukti dari efektivitas manajemen risiko yang diterapkan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk mempertahankan momentum ini dengan mengembangkan inovasi, memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta memastikan implementasi governansi guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi Perseroan.

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan, memastikan bahwa kebijakan dan praktik governansi perusahaan diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kontribusi Komite Audit:

1. Memastikan kepatuhan 100% terhadap standar transparansi pelaporan keuangan.
2. Memperkuat sistem pengendalian internal, mengurangi ketidaksesuaian audit hingga 15% dibandingkan dengan tahun 2023.
3. Meningkatkan protokol manajemen risiko, mengurangi potensi risiko keuangan dan operasional.

Kontribusi Komite Nominasi & Remunerasi:

1. Melakukan evaluasi independen terhadap Direksi dan Dewan Komisaris, mempertahankan praktik tata kelola terbaik.
2. Memastikan proses seleksi yang objektif dan berbasis prestasi untuk posisi kepemimpinan, meningkatkan tingkat retensi eksekutif hingga 10%.

Dewan Komisaris mengapresiasi peran aktif dan kontribusi setiap komite dalam memberikan rekomendasi yang berbasis analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus memastikan bahwa kedua komite ini menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, serta memperkuat koordinasi antara komite dan manajemen untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.

Pandangan Atas Penerapan Governansi Perusahaan

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan governansi perusahaan di AKR terus mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Perseroan telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa prinsip Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan diterapkan di seluruh lini operasional. Dewan Komisaris mencatatkan peningkatan kualitas governansi perusahaan sepanjang tahun 2024 meliputi:

Pencapaian Penting Governansi Perusahaan Tahun 2024

Peninjauan Kembali Piagam Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan regulasi terbaru.

Menerima penghargaan terkait governansi:
- Pelindo Customer Awards 2024
- BPH Migas Awards 2024
- Bisnis Indonesia Logistics Awards 2024

Sosialisasi Kode Etik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar integritas dan kepatuhan.

Memperbaharui kebijakan laporan kepemilikan saham sesuai dengan POJK No. 4 tahun 2024 dan ASEAN Scorecard.



Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong Direksi untuk mempertahankan dan meningkatkan standar governansi, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan bisnis dan regulasi yang dihadapi. Governansi perusahaan yang kuat akan menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing Perseroan di industri, serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris akan memastikan bahwa aspek governansi tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan strategis, guna menjaga kesinambungan bisnis dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan Atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan di tahun 2025 tetap positif, didukung oleh peran strategis sektor logistik yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan semakin berkembangnya hilirisasi industri dan peningkatan kebutuhan akan rantai pasok yang efisien, Perseroan berada dalam posisi terdepan untuk terus mengoptimalkan kapabilitasnya di sektor perdagangan dan distribusi BBM, serta pengelolaan kawasan industri.

Namun, Dewan Komisaris juga mencermati adanya tantangan sektor logistik, seperti *gap* infrastruktur, kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, serta harmonisasi regulasi yang perlu mendapat perhatian agar daya saing Perseroan tetap terjaga. Untuk mengoptimalkan peluang dan merespons tantangan, Direksi merumuskan langkah strategis tahun 2025 sebagai berikut

1. Ekspansi ke wilayah timur Indonesia
2. Pengembangan KEK JIIPE Gresik sebagai pusat investasi industri.
3. Peningkatan infrastruktur logistik melalui terminal penyimpanan dan armada transportasi.
4. Penguatan teknologi informasi dengan sistem *monitoring* operasional untuk efisiensi dan keselamatan kerja.
5. Pengawasan implementasi strategi agar selaras dengan prinsip governansi dan memberikan nilai tambah.

Ke depan, Dewan Komisaris menekankan pentingnya sinergi antara segmen-segmen bisnis Perseroan agar dapat memberikan dampak pertumbuhan yang lebih luas, tidak hanya bagi Perseroan tetapi juga bagi industri secara keseluruhan, tenaga kerja, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mengoptimalkan potensi bisnis yang ada, Perseroan diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2024, komposisi Dewan Komisaris tetap tidak mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris
Sofyan A. Djalil	Komisaris
Muhammad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen

Penutup dan Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen atas kerja keras, dedikasi, serta komitmen dalam menjalankan strategi bisnis secara efektif di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika industri yang terus berkembang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan.

Keberhasilan yang diraih sepanjang tahun 2024 merupakan hasil dari kolaborasi yang solid, implementasi governansi perusahaan, serta ketahanan bisnis yang telah dibangun dengan kokoh selama enam dekade terakhir. Dewan Komisaris akan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis guna memastikan bahwa Perseroan tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Jakarta, 4 April 2025
Atas Nama Dewan Komisaris

Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris

Dewan Komisaris



Fauzi Ichsan
Komisaris Independen

Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris

Sofyan A. Djalil
Komisaris

Laporan Direksi

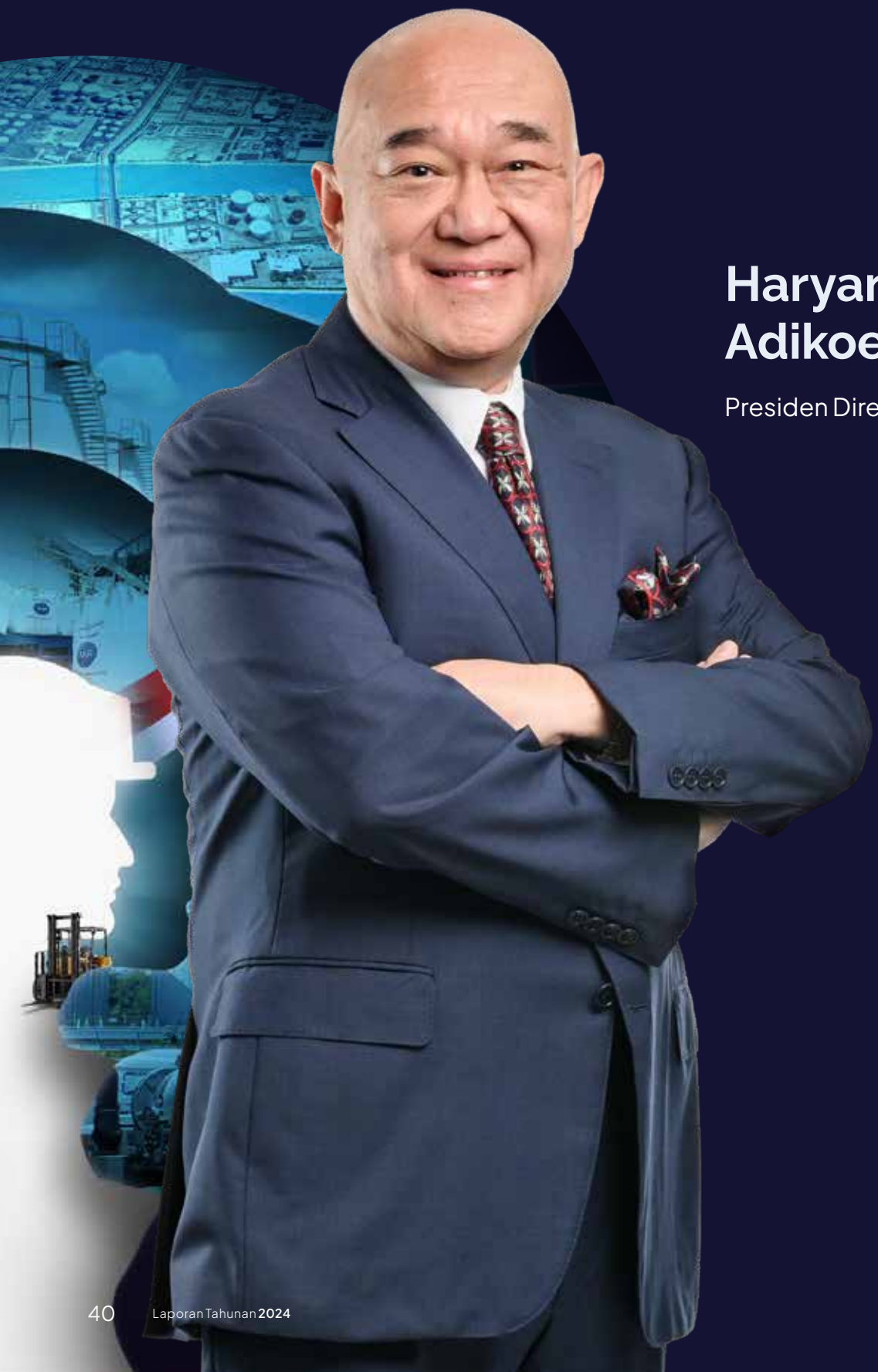

Haryanto Adikoesoemo

Presiden Direktur

> Sebagai perusahaan logistik dan *supply chain* terintegrasi, AKR beradaptasi dengan berbagai dinamika industri yang terus berkembang. Perseroan berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, negara, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat dan model bisnis yang terbukti efektif, Perseroan berhasil menjaga kinerja positif dan profitabilitas yang berkelanjutan dengan laba neto FY 2024 Rp2.225 miliar.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga PT AKR Corporindo Tbk (AKR) dapat melalui tahun 2024 dengan pencapaian kinerja yang baik. Merupakan suatu kehormatan bagi kami Direksi AKR, untuk menyampaikan laporan kinerja Perseroan Tahun Buku 2024.

Sejak didirikan pada tahun 1960, AKR telah menghadapi berbagai tantangan dan dinamika industri yang semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam sektor logistik, perdagangan dan distribusi energi. Perseroan berhasil mencatatkan CAGR laba neto sebesar 16% sejak tahun 2005. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh Insan AKR yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan operasional.

Laporan Tahunan 2024 AKR mengusung "*Beyond Growth*" sebagai perwujudan komitmen AKR untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan dengan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kami berfokus pada 6 (enam) pilar utama dalam pengembangan bisnis, yaitu pemegang saham, negara, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, kami berupaya memberikan manfaat yang lebih besar bagi Perseroan serta menciptakan dampak positif yang lebih luas, sejalan dengan prinsip pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kehadiran AKR sebagai penyedia *end-to-end supply chain* mendorong terwujudnya konektivitas antar daerah sumber energi dengan wilayah permintaan energi hingga ke pelosok negeri didukung oleh sistem teknologi informasi yang komprehensif. Kami percaya dengan menjaga kestabilan pasokan energi, AKR turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kawasan terintegrasi *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) memiliki potensi besar dalam mendorong industrialisasi di Indonesia, membuka peluang investasi baru, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Analisa Ekonomi Makro

Ketidakpastian sosial dan politik global sepanjang 2024 memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dunia, melemahkan daya beli masyarakat Indonesia, serta mengganggu arus perdagangan akibat ketegangan geopolitik dan kebijakan pembatasan investasi. IMF memperingatkan risiko stagnasi ekonomi jangka panjang yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial global. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 4,95% - 5,11% dengan realisasi 5% pada 2024.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan transisi energi global, dan dinamika geopolitik memberikan dampak langsung terhadap harga jual BBM di pasar domestik. Meski demikian, AKR terus memperkuat perannya dalam memastikan ketersediaan dan distribusi energi yang efisien melalui infrastruktur logistik yang terintegrasi serta manajemen risiko yang adaptif.

Dengan dukungan infrastruktur logistik yang terintegrasi di 21 titik strategis di seluruh Indonesia, AKR mendistribusikan kimia dasar dan BBM secara efisien melalui jaringan tangki penyimpanan, pelabuhan, truk, dan kapal. Perseroan secara real-time memantau stok di setiap lokasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik. Selain *hard infrastructure* tersebut, AKR juga menekankan

penguatan *soft infrastructure*, yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia yang terlatih, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan keandalan dan keselamatan operasional.

Pemerintah Indonesia semakin mendorong transisi energi dengan meningkatkan mandatori biodiesel dari B35 menjadi B40 untuk masa mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. AKR turut mendukung implementasi program tersebut dengan memastikan kesiapan infrastruktur serta rantai pasok yang andal dalam mendistribusikan biodiesel ke berbagai sektor industri dan transportasi.

Sebagai perusahaan logistik dan supply chain terintegrasi, AKR terus mempertahankan relevansinya di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat dan model bisnis yang terbukti efektif, Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan bersih serta profitabilitas pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Analisa Kinerja Perseroan Tahun 2024

Tantangan dan Inisiatif Strategis

Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk menjaga layanan logistik BBM dan kimia dasar dengan tingkat pelayanan yang optimal melalui service level agreement yang baik serta harga yang kompetitif. Selain itu, Perseroan terus meningkatkan pelayanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik dengan menyediakan utilitas industri berstandar internasional, termasuk pembangkit listrik, sistem distribusi air, *wastewater treatment*, serta infrastruktur teknologi informasi yang canggih.

Untuk mendukung kinerja optimal dan mengatasi tantangan yang ada, Direksi telah menyusun kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional serta optimalisasi rantai pasok. Adapun kebijakan strategis AKR sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Mempersiapkan Ekspansi ke Indonesia Timur**
   Jangkauan pelanggan Perseroan mencakup berbagai spektrum industri di Indonesia. Perseroan melihat segmen perdagangan distribusi BBM dan kimia dasar akan bertumbuh seiring peningkatan aktivitas pertambangan yang terus meningkat dan juga pertumbuhan *smelter-smelter* baru baik nikel, tembaga, alumina, dll yang juga akan meningkatkan kebutuhan kimia dasar terutama di area Sulawesi, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya. Dengan aset logistik *supply chain* yang terintegrasi, bisnis model yang solid, serta *monitoring* IT yang dapat meminimalisir risiko, Perseroan terbukti dapat mengembangkan bisnis dengan efisien dan efektif. Ke depan, AKR akan terus bertumbuh dengan mengoptimasi keunggulan kompetitif Perseroan melalui penambahan kapasitas di pelabuhan-pelabuhan utama Kalimantan.

2. **Mendorong Potensi KEK JIIPE Gresik sebagai Bagian dari Rantai Pasok Global**
   KEK JIIPE Gresik telah dinobatkan sebagai kawasan industri terbaik di Indonesia, yang semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri. Potensi KEK JIIPE terus dioptimalkan, tidak hanya melalui monetisasi lahan, tetapi juga melalui pengembangan bisnis lainnya, seperti penyediaan listrik, air, gas, serta energi ramah lingkungan dan terbarukan.

   Sebagai pemegang saham utama JIIPE, Perseroan juga mempersiapkan beberapa anak usaha untuk meningkatkan layanan di sektor tenaga listrik dan penyimpanan energi, termasuk dengan membentuk PT Berkah Renewable Energi Nusantara dan PT Terminal Energi Primer. Dengan beroperasinya smelter tembaga terbesar di dunia milik Freeport di JIIPE, ekosistem industri berbasis produk tembaga dan turunannya semakin berkembang dan siap diserap oleh sejumlah tenant besar di kawasan ini. Selain itu, tingkat penyerapan tenaga kerja juga terus meningkat seiring dengan beroperasinya *anchor tenant* di JIIPE. Pada tahun 2024, JIIPE berhasil mencapai target penyerapan tenaga kerja lebih dari 100%, yang menjadikannya sebagai salah satu KEK dengan pencapaian terbaik dalam hal penciptaan lapangan kerja.

3. **Mendorong Perkembangan Ekspansi BBM Ritel**
   Tren pengurangan emisi dan transisi menuju *low-carbon economy* akan mendorong peningkatan penggunaan biodiesel sebagai energi alternatif serta permintaan terhadap BBM berkualitas tinggi. Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung program distribusi BBM subsidi pemerintah dalam menyediakan bahan bakar yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam pengembangan pasar BBM ritel. Per Februari 2025, Perseroan telah mengoperasikan 107 outlet dengan merek AKR serta 64 *outlet* bp AKR yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Pengawasan atas Kebijakan Strategis

Direksi secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan guna memastikan bahwa setiap langkah operasional tetap berada dalam koridor rencana strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, Direksi juga memastikan bahwa strategi yang diterapkan selaras dengan perkembangan bisnis, sehingga tercipta sinergi yang optimal dalam ekosistem usaha Perseroan.

Sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi kinerja, Direksi secara berkala mengadakan rapat koordinasi untuk meninjau pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Dalam rapat ini, Direksi mengevaluasi pencapaian yang telah diraih, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, serta memastikan bahwa seluruh unit bisnis berjalan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Selain mengawasi pelaksanaan strategi, Direksi juga memastikan kesesuaian antara realisasi kinerja dengan rencana anggaran yang telah disepakati. Pengelolaan anggaran yang disiplin dan terencana menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas keuangan serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Direksi berkomitmen untuk menjalankan prinsip governansi perusahaan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pencapaian Kinerja Keuangan dan Operasional AKR Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, AKR terus mengoptimalkan peluang bisnis dengan memanfaatkan perkembangan pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi industri, Perseroan melakukan ekspansi strategis di wilayah timur Indonesia guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Kinerja Perseroan yang membanggakan sepanjang tahun ini tercermin dalam aspek keuangan dan operasional sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Kinerja Keuangan	Kinerja Operasional
1. Profitabilitas dan Efisiensi Keuangan a. Laba di atas Rp2 triliun, masih dalam level pertumbuhan tinggi dibanding rata-rata 2019–2022. b. *Return on Equity* (ROE) sebesar 19% dan *Return on Asset* (ROA) sebesar 7%. c. EBITDA sebesar Rp3.115 miliar dengan neraca sehat dan *net gearing* -0,04× (*net cash*). **2. Perbandingan Pendapatan dan Kontribusi Segmen** a. Pendapatan 2024 sebesar Rp38.729 miliar, turun 8% dari Rp42.087 miliar di 2023 yang dipengaruhi normalisasi harga jual rata-rata dan kondisi ekonomi makro. b. Kontribusi per segmen terhadap total pendapatan: • Perdagangan & distribusi: Rp35.532 miliar (92%). • Kawasan industri: Rp1.381 miliar (4%). • Logistik: Rp1.165 miliar (3%). • Manufaktur: Rp652 miliar (2%). **3. Pertumbuhan Segmen dan Diversifikasi** a. Pertumbuhan segmen perdagangan dan distribusi serta penjualan lahan industri dalam 5 tahun terakhir. b. Pengembangan KEK JIIPE mendukung recurring income melalui layanan utilitas. **4. Ketahanan dan Strategi Bisnis** a. Volume penjualan BBM dan kimia dasar tetap stabil. b. Keberhasilan strategi diversifikasi menjaga momentum pertumbuhan.	**1. Ekspansi dan Pemanfaatan Peluang Bisnis** a. Memanfaatkan perkembangan pusat ekonomi baru di Indonesia. b. Ekspansi strategis di wilayah timur Indonesia sesuai kebijakan hilirisasi industri pemerintah. **2. Pengembangan Kawasan Industri JIIPE** a. Menarik tenant strategis untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi dan kompetitif. b. Penambahan dua entitas anak usaha baru untuk penyediaan tenaga listrik dan penyimpanan energi di JIIPE. c. Segmen kawasan industri mencatat laba bruto Rp597 miliar. **3. Ekspansi BBM Ritel** a. Pengembangan SPBU bp AKR untuk memenuhi permintaan BBM yang meningkat. b. Memperkuat posisi AKR di sektor energi dan logistik nasional. **4. Sinergi Bisnis untuk Hilirisasi** a. Sinergi horizontal melalui *joint venture* dan pendirian usaha baru. b. Sinergi vertikal antar departemen untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Ke depan, AKR senantiasa memanfaatkan setiap peluang pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi operasional, serta governansi perusahaan. Dengan fundamental bisnis yang kuat, strategi ekspansi yang terarah, dan komitmen terhadap pengembangan infrastruktur logistik serta energi, Direksi optimistis dapat mempertahankan kinerja yang solid serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan Governansi Perusahaan

Direksi menilai bahwa penerapan governansi perusahaan telah memberikan hasil optimal dalam mendukung kinerja keuangan dan operasional yang positif. Keberhasilan yang diraih Perseroan juga merupakan bukti dari implementasi governansi yang efektif. Kami memastikan bahwa penerapan governansi tidak hanya menjadi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya Perseroan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kemitraan Strategis

Dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, AKR menjalin kerja sama strategis dengan mitra global. Salah satu pencapaian utama adalah pengembangan terminal penyimpanan BBM independen di Tanjung Priok bersama Royal Vopak. Selain itu, AKR membentuk *joint venture* dengan bp untuk mengembangkan bisnis BBM ritel dan avtur, serta dengan Petronas untuk distribusi bahan kimia di Indonesia. Kami menilai keberhasilan AKR dalam menarik mitra-mitra global tersebut tidak lepas dari 2 (dua) faktor utama, yaitu jaringan distribusi yang luas serta penerapan governansi perusahaan yang baik.

Pembagian Dividen

Dalam tujuh tahun terakhir, *dividend yield* AKR selalu berada di atas 6% per tahun, memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor. Keberhasilan ini mencerminkan penerapan governansi perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan profitabilitas tetapi juga memberikan nilai optimal bagi pemegang saham dan mitra bisnis.

Kepatuhan atas Peraturan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2024, Perseroan terus meningkatkan kualitas governansi perusahaan dengan melakukan berbagai penyempurnaan yang berpedoman pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (PUGKI) 2021, POJK No. 21/POJK.04/2015, SEOJK No. 32/SEOJK.03/2021, serta

ASEAN Corporate Governance Scorecard. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa governansi di lingkungan Perseroan senantiasa sejalan dengan standar terbaik yang berlaku.

Penyempurnaan Kode Etik dan Piagam Direksi & Dewan Komisaris

Setelah melakukan pembaruan kode etik pada tahun 2023 sebagai bagian dari peningkatan internalisasi budaya perusahaan, Perseroan melanjutkan komitmennya dengan menyelenggarakan sosialisasi kode etik kepada seluruh Insan Perseroan di awal tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip governansi perusahaan dalam setiap aspek operasional. Selain itu, Perseroan juga melakukan penyesuaian piagam Direksi dan Dewan Komisaris agar selaras dengan pedoman tata kelola terbaru. Penyempurnaan tersebut mencakup penegasan peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan bisnis berkelanjutan, penguatan transparansi, serta pencegahan potensi benturan kepentingan, sehingga semakin memperkuat prinsip akuntabilitas di dalam Perseroan.

Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal

Sebagai bagian dari komitmen terhadap governansi perusahaan, AKR juga menerapkan sistem pengendalian internal yang mencakup dua aspek utama, yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang komprehensif, Perseroan terus berupaya meningkatkan disiplin operasional dan memastikan bahwa setiap aspek bisnis berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Unit Audit Internal telah menghasilkan sebanyak 580 rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional sepanjang tahun 2024. Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 87% atau 507 rekomendasi hasil audit operasional dan audit khusus telah selesai ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Mekanisme *Whistleblowing System* di AKR

Direksi menekankan pentingnya *whistleblowing system* sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan integritas dalam operasional bisnis. Melalui mekanisme ini, setiap permasalahan yang muncul dapat dilaporkan langsung kepada Direktur Utama untuk segera ditindaklanjuti. Dengan pendekatan ini, Direksi berkomitmen untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga secara proaktif mencari solusi yang tepat guna memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan berintegritas.

Penerapan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal merupakan aset utama dan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus mendorong pengembangan SDM dengan meningkatkan keterampilan baik dari *hard skill* maupun *soft skill*, serta memastikan bahwa setiap karyawan menginternalisasi nilai-nilai perusahaan agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Selain meningkatkan kompetensi teknis, Perseroan juga membekali karyawan dengan keterampilan analitis, kepemimpinan, dan komunikasi yang efektif untuk mendukung kinerja yang optimal.

Penguasaan keterampilan teknis, kemampuan analisis serta mitigasi risiko menjadi aspek krusial dalam pengembangan SDM, dan diprioritaskan dalam kurikulum pelatihan yang dijalankan sepanjang tahun 2024. Dengan menyiapkan talenta terbaik melalui pengembangan SDM yang tepat, tingkat kaderisasi internal berhasil mencapai 42%.

Selain itu, Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, di mana setiap individu tanpa memandang gender, agama, ras, maupun suku, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Prinsip ini digunakan untuk mendorong kolaborasi, upaya saling menghargai, dan pemberdayaan tim yang objektif sebagai bagian dari budaya perusahaan. Sehingga AKR dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta mendorong loyalitas karyawan.

Dengan komitmen yang kuat terhadap pengembangan SDM, Perseroan berupaya meningkatkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Melalui investasi berkelanjutan dalam pelatihan, penguatan budaya perusahaan, serta penerapan prinsip inklusivitas, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal. SDM yang unggul ini menjadi kekuatan utama AKR dalam menghadapi dinamika industri, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Optimalisasi Teknologi Informasi

Perseroan secara aktif mengadopsi dan memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam perencanaan distribusi, perencanaan transportasi, serta pemantauan kualitas produk. Implementasi sistem digital yang terintegrasi, memungkinkan akuntabilitas penuh selama 24 jam, sehingga optimalisasi aset dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Inisiatif ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepada klien di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2024, Perseroan semakin memperkuat sistem monitoring dengan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI). Pengembangan AI diantaranya dengan pemasangan kamera pada dashboard kendaraan truk untuk memantau kondisi kesehatan dan tingkat kelelahan pengemudi. Kemudian kini armada AKR dilengkapi juga kamera eksternal untuk mendeteksi potensi *fraud* dan kecelakaan di jalan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, tetapi juga mendukung implementasi governansi perusahaan melalui sistem TI yang handal. *Monitoring* secara *real-time* telah terbukti mampu menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kepatuhan terhadap standar operasional.

Selain itu, Departemen *Information Technology* secara berkelanjutan memperkuat keamanan siber serta menjaga privasi data melalui audit berkala. Perseroan juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menerapkan standar keamanan TI yang ketat, memastikan perlindungan data yang optimal. Dalam upaya mitigasi risiko, pengawasan terhadap *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan operasional.

Perseroan juga merencanakan pemanfaatan AI generatif dan perluasan agen AI untuk berbagai tugas. Hal ini ditujukan untuk mengintegrasikan visualisasi proses bisnis secara lebih optimal sekaligus menyederhanakan dan mempercepat proses kerja. Dengan strategi ini, ke depan, AKR siap menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis serta terus berinovasi dalam meningkatkan daya saing di era digital.

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan

Direksi Perseroan berkomitmen penuh dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). AKR telah mendukung tercapainya SGDs:



Kami telah memetakan inisiatif keberlanjutan AKR yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

1. **Sosial Masyarakat**
   Perseroan secara aktif mengambil bagian dalam bantuan sosial dan pengembangan masyarakat melalui berbagai inisiatif, terutama di sekitar wilayah operasional. Di antaranya melalui dukungan pembangunan fasilitas masyarakat, kerja sama dengan pemerintah setempat dalam upaya pelestarian lingkungan, pembedayaan komunitas sekitar, program donor darah, dan bantuan mobil klinik guna memastikan akses kesehatan di daerah terpencil.

2. **Ketahanan Energi dan Pelestarian Lingkungan**
   Sebagai bukti komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan lingkungan, AKR mendapatkan penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terbaik dalam Kategori Badan Usaha Lainnya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain itu, AKR telah melaksanakan program penanaman pohon di berbagai wilayah operasional salah satunya sekitar PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS), seperti optimalisasi ruang terbuka dan penghijauan di kawasan industri serta penghijauan pesisir melalui penanaman mangrove.

   Perseroan mendukung terlaksananya program biodiesel sebagai energi transisi, dan mendorong inovasi sumber-sumber energi baru. Di antaranya dengan pengembangan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) di KEK JIIPE Gresik. Kami melihat LNG sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan energi yang stabil bagi Indonesia. Lebih jauh, AKR juga berencana untuk meningkatkan penyediaan energi terbarukan di KEK JIIPE Gresik dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya terapung secara bertahap. Inisiatif ini sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong energi bersih dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

3. **Pendidikan dan Pengembangan SDM**
   Perseroan menaruh perhatian besar pada pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan. Perseroan berinvestasi dalam beberapa pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan benefit yang sesuai sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Perseroan memberikan perhatian kepada keluarga karyawan dengan memberikan program beasiswa kepada putra-putri mereka yang berprestasi di sekolahnya. Hal ini sejalan dengan visi Perseroan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan.

   Melalui KEK JIIPE Gresik, Perseroan berkomitmen menciptakan lapangan kerja dan menyerap putera-putera daerah yang berprestasi. Selain itu, Perseroan memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga karyawan operasional yang membutuhkan melalui program *Heart and Mind*. Perseroan percaya bahwa sinergi yang baik dengan keluarga karyawan akan memotivasi mereka dalam menjaga kinerja dalam bekerja.

4. **Kesehatan dan Keselamatan Karyawan**
   Pada tahun 2024, AKR berhasil mencatatkan *zero fatalities* serta *zero major safety incidents*, mencerminkan komitmen kuat Perseroan terhadap keselamatan kerja dan budaya operasional yang berlandaskan pada kepatuhan serta mitigasi risiko. Perseroan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ditingkatkan melalui penambahan kamera AI yang dipantau selama 24 jam di *control tower* sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari dan potensi *fraud* di jalan dapat terdokumentasi dengan baik. AKR juga memastikan kondisi fisik karyawan tetap prima dengan melaksanakan medical *check-up* secara berkala untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan.

5. **Inklusivitas dan Pengembangan Governansi**
   Komitmen terhadap kesetaraan gender juga menjadi salah satu fokus utama dalam strategi keberlanjutan Perseroan. AKR menjadi salah satu perusahaan di sektor energi yang telah memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 21% di tingkat *middle management* dan ke atas, suatu pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri yang masih di bawah 20%. Ke depan, Perseroan akan terus mendorong inklusivitas dan keberagaman dalam lingkungan kerja, sejalan dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Perseroan percaya bahwa untuk dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, kerja sama dan kemitraan strategis perlu diperkuat. Perseroan secara aktif menjalin kerja sama untuk memperkuat distribusi energi, pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja di KEK JIIPE Gresik, serta penyediaan sumber energi baru.

Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus bertumbuh dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG secara optimal. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, Perseroan berupaya memastikan bahwa 6 (enam) pilar utama yaitu pemegang saham, negara, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan dapat memperoleh manfaat dari keberadaan serta pertumbuhan bisnis AKR. Melalui strategi ini, Perseroan tidak hanya memberikan nilai dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga dapat membangun *legacy* berupa pertumbuhan ekonomi dan industri yang inklusif.

Penilaian Kinerja Komite Pendukung Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga keberlanjutan Perseroan, Direksi AKR dibantu oleh Komite ESG yang berperan untuk memastikan implementasi strategi keberlanjutan dalam operasional Perseroan. Komite ESG bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi dalam perumusan strategi, kebijakan, serta pengawasan implementasi aspek ESG. Komite ESG berfungsi sebagai penasihat Direksi dalam memastikan bahwa seluruh inisiatif ESG sejalan dengan visi, misi, serta strategi keberlanjutan Perseroan.

Direksi menilai bahwa Komite ESG telah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. Komite ESG telah melaksanakan perumusan AKR Horizon 2030 sebagai AKR Sustainability Progress Tracker, memonitor pelaksanaan program ESG tahun 2024, dan mengarahkan penyesuaian program ESG dan target yang diperlukan.

Prospek Usaha Tahun 2025

Dinamika global yang terus berkembang diperkirakan akan tetap mempengaruhi perekonomian Indonesia. Direksi telah merumuskan prospek ekonomi global dan Indonesia, serta kebijakan strategis 2025 sebagai berikut:

1. **Dinamika Global**: Perekonomian Indonesia tetap dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas, kenaikan suku bunga, gangguan rantai pasok, serta tantangan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.
2. **Proyeksi Ekonomi Global**: Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tetap di kisaran 3,2% pada 2025, stabil dibanding 2024.
3. **Proyeksi Ekonomi Indonesia**: Diperkirakan tumbuh 4,95% - 5,11% pada 2025, sama dengan proyeksi 2024, dipengaruhi oleh permintaan domestik yang lebih rendah di akhir 2024.
4. **Peran Sektor Logistik**: Semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan energi.
5. **Tantangan**: Kesenjangan infrastruktur dan efisiensi operasional masih menjadi kendala utama.
6. **Solusi**: Kolaborasi sektor publik dan swasta diperlukan untuk membangun ekosistem logistik yang lebih tangguh dan berdaya saing.

> Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang terintegrasi di berbagai sektor serta peningkatan interkonektivitas. Beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus pengembangan meliputi penguatan *supply chain* yang terintegrasi, peningkatan nilai tambah komoditas, peningkatan infrastruktur logistik yang didukung oleh teknologi informasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi dan institusi.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, AKR telah merumuskan berbagai langkah strategis ke depan:

1. **Ekspansi Wilayah Timur:** Investasi dalam pembangunan tank terminal, armada kapal, dan truk untuk mendukung hilirisasi.
2. **Peningkatan Layanan:** Pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional.
3. **Pengembangan KEK JIIPE Gresik:**
   - Menjadi destinasi utama investasi domestik & asing.
   - Didukung oleh fasilitas unggulan yaitu infrastruktur utilitas kelas dunia, pelabuhan, dan transportasi multimoda untuk efisiensi logistik.
   - Dukungan insentif fiskal & non-fiskal serta sistem perizinan satu pintu.
4. **Ekspansi SPBU bp AKR:** Memperluas jaringan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar berkualitas premium.

Dengan strategi yang terarah serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, AKR optimis dapat terus bertumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional di tahun 2025 dan seterusnya.

Perubahan Komposisi Direksi

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi Perseroan. Struktur kepemimpinan tetap konsisten dalam mendukung visi dan strategi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, komposisi Direksi per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur
Jimmy Tandyo	Direktur
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur
Mery Sofi	Direktur
Suresh Vembu	Direktur
Nery Polim	Direktur
Ter Murti Tiban	Direktur

Penutup dan Apresiasi

Direksi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Keberhasilan Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh Insan AKR, mitra bisnis, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lain yang terus mendukung strategi dan arah pengembangan Perseroan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan arahan strategis yang telah memastikan bahwa Perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melangkah ke tahun 2025, Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing Perseroan melalui inovasi, efisiensi operasional, dan ekspansi bisnis yang strategis. Dengan fondasi bisnis yang kuat dan strategi yang adaptif terhadap dinamika pasar, kami optimis bahwa AKR akan terus memberikan nilai yang optimal bagi para pemegang saham dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kami percaya bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang solid, Perseroan dapat menghadapi tantangan di masa depan dan meraih peluang pertumbuhan yang lebih besar.

Jakarta, 4 April 2025
Atas Nama Direksi



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur

Direksi



Suresh Vembu
Direktur

Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur

Bambang Soetiono Soedijanto
Direktur

Termurti Tiban
Direktur



Nery Polim
Direktur

Jimmy Tandyo
Direktur

Mery Sofi
Direktur

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT AKR Corporindo Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT AKR Corporindo Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 April 2025
Dewan Komisaris

Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris

Sofyan A. Djalil
Komisaris

Fauzi Ichsan
Komisaris Independen

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT AKR Corporindo Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT AKR Corporindo Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 April 2025
Direksi



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur



Jimmy Tandyo
Direktur



Bambang Soetiono Soedijanto
Direktur



Mery Sofi
Direktur



Suresh Vembu
Direktur



Nery Polim
Direktur



Termurti Tiban
Direktur


DILARANG MENUMPANG
Quester
AKR
GKE 280



PT AKR Corporindo Tbk

03

Profil Perusahaan

Informasi Umum



Nama Perusahaan	PT AKR Corporindo Tbk	Kode Emiten	AKRA
Tanggal Pendirian	28 November 1977	Status Badan Hukum	Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk)

Bidang Usaha

- Perdagangan dan Distribusi
- Jasa Logistik
- Pabrikan
- Kawasan Industri

Dasar Hukum Pendirian

Akta Nomor 46 tanggal 28 November 1977, dibuat di hadapan Sastra Kosasih Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/151/7 tanggal 14 Juni 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal 19 Desember 1978, Tambahan Nomor 741/1978.

Modal Dasar	Rp750.000.000.000 terbagi atas 37.500.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20.	Modal Ditempatkan dan Disetor	Rp401.469.492.000 dengan komposisi saham 20.073.474.600 saham dengan nilai nominal Rp20 yang telah ditempatkan dalam Perusahaan.



Kepemilikan Saham	PT Arthakencana Rayatama	63,6%
	Management	1,8%
	Publik	33,0%
	Treasury Stock	1,6%

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1994
Kode Obligasi dan Peringkatnya	Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga tetap Seri C, idAA (telah dilunasi pada 7 Juli 2024)
Jumlah Karyawan	2.452 Karyawan

Kantor Pusat	AKR Tower Lantai 26 Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530, Indonesia
Kontak Perusahaan	+62 21 5311110,+62 21 5311185 +62 21 5311185, +62 21 5311388, 5311185 corporate.secretary@akr.co.id www.akr.co.id

Sejarah Singkat

PT AKR Corporindo Tbk, selanjutnya disebut sebagai "AKR" atau "Perseroan", didirikan di Surabaya berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 28 November 1977, yang dibuat di hadapan Notaris Sastra Kosasih dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Saat awal didirikan, bisnis Perseroan berfokus pada perdagangan bahan kimia dasar. Pada tahun 1970, AKR memiliki jumlah besar tangki penyimpanan bahan kimia dasar dan gudang di berbagai pelabuhan utama di Indonesia, hingga menjadi distributor bahan kimia terbesar di tanah air.

Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis bahan kimia dasar, AKR memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada 1980–an untuk memperkuat operasional dan ekspansi usaha. Sebagai bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan akses terhadap pendanaan dan memperluas jangkauan bisnis, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994 dengan kode saham AKRA. Langkah ini menandai era baru bagi AKR dalam memperkuat posisinya di industri energi dan logistik di Indonesia.

Pada tahun 2004, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Dalam anggaran dasar, lini usaha Perseroan tidak lagi hanya terbatas pada bisnis bahan kimia dasar, melainkan mencakup bahan kimia, bahan bakar minyak (BBM), gas, logistik, jasa pengangkutan, penyewaan gudang dan tangki, perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, kontraktor bangunan dan jasa (kecuali jasa hukum), serta beroperasi sebagai perwakilan dan/ atau peragenan dari perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Perubahan anggaran dasar mendorong peningkatan kinerja Perseroan dengan tercatat sebagai perusahaan swasta nasional pertama yang terlibat dalam distribusi produk BBM. Sejak 2010 hingga 2024, Perseroan diamanatkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan dipercaya secara berkelanjutan untuk menjalankan tugas sebagai Badan Usaha Pelaksana P3JBT (Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu) dengan menerapkan sistem teknologi terpadu yang inovatif untuk mengawasi dan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi.

Hingga kini, AKR bersama bp AKR mengoperasikan 171 outlet ritel BBM yang tersebar di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) hingga ke wilayah perkotaan. Dalam mendukung pengembangan bisnis, Perseroan terus memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan melalui sinergi dengan mitra-mitra strategis terkemuka di berbagai sektor.

AKR terus memperluas perannya dalam mengakselerasi pertumbuhan dan meningkatkan daya saing. Pada tahun 2013, Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan Pelindo untuk mengembangkan *Java Integrated Industrial Port Estate* (JIIPE) di Jawa Timur. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE memiliki luas 3.000 hektare, yang mencakup 1.761 hektare kawasan industri, 406 hektare pelabuhan laut dalam, dan 800 hektare area residensial yang dikembangkan oleh perusahaan afiliasi.

Melalui PT Usaha Era Pratama Nusantara, AKR memiliki 60% saham di PT Berkah Manyar Kawasan Sejahtera, anak usaha pengelola kawasan industri JIIPE.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan JIIPE sebagai KEK Teknologi & Manufaktur, menjadikannya salah satu kawasan industri paling kompetitif dan diminati oleh pelaku industri di Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Sebagai *Special Economic Zone* (SEZ) untuk sektor teknologi dan manufaktur, serta bagian dari Proyek Strategis Nasional, JIIPE juga menjadi lokasi pembangunan pabrik peleburan tembaga terbesar di dunia. *Groundbreaking* proyek ini dilaksanakan pada Agustus 2021 dan dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia, menandai pencapaian penting dalam pengembangan kawasan industri strategis ini.

Sinergi Perseroan dengan mitra strategis semakin berkembang dengan terjalinnya kerja sama dengan bp pada tahun 2018 dalam pengembangan pasar ritel BBM dan pelumas, serta distribusi bahan bakar pesawat terbang di bandara-bandara baru di Indonesia. Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, AKR bersama bp terus memperluas jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bp AKR, yang per 31 Desember 2024 telah beroperasi secara efektif dengan jumlah mencapai 61 unit.

Tahun 2021 menandai babak baru dalam pencapaian Perseroan dengan ekspansi ke sektor energi bersih melalui pendirian PT Berkah Buana Energi, perusahaan *Joint Venture* distribusi gas bersama PT Bayu Buana Gemilang. Melalui inisiatif ini, Perseroan mendistribusikan gas alam ke KEK JIIPE Gresik dan sekitarnya. Selain itu, Perseroan juga mendirikan PT Anugrah Kreasi Pratama Indonesia untuk mendukung perkembangan KEK JIIPE melalui bisnis di bidang pergudangan, serta PT Berkah Bunker Service sebagai perusahaan yang menyediakan layanan pelayaran pelabuhan laut.

Perseroan terus memperkuat pengembangan JIIPE melalui kerja sama strategis dan pembentukan anak usaha baru pada tahun 2023 dan 2024. Salah satu langkah penting adalah perjanjian kerja sama dengan BP Gas & Power Investments Limited (BP) untuk mengembangkan proyek impor LNG, termasuk terminal regasifikasi di JIIPE. Proyek ini dirancang untuk menyediakan pasokan gas yang andal bagi para tenant di JIIPE, dengan potensi kapasitas yang dapat mendukung jaringan pipa gas lokal di Jawa Timur. Selain itu, Perseroan membentuk PT Berkah Renewable Energi Nusantara untuk mengoperasikan pembangkit tenaga listrik di wilayah JIIPE serta PT Terminal Energi Primer untuk melayani kebutuhan pergudangan, penyimpanan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyediaan energi di kawasan tersebut.

Kronologis Perubahan Nama dan Badan Hukum

Berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 28 November 1977 yang dibuat di hadapan Notaris Sastra Kosasih, Perseroan didirikan dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Kemudian, Perseroan beberapa kali melakukan perubahan nama dengan rincian kronologi berikut:

- Setelah menyelenggarakan *Initial Public Offering* (IPO) dan secara resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 3 Oktober 1994, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Aneka Kimia Raya Tbk. Perubahan ini telah disetujui seluruh pemegang saham Perseroan dan tercatat secara resmi dalam Akta Nomor 163 pada tanggal 16 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 Agustus 1994 Nomor C2-12686.HT.01.04. Th.94.
- Sejalan dengan penambahan lini usaha, Perseroan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Perubahan ini resmi tercatat dalam Akta Nomor 36 yang dibuat Pada tanggal 23 September 2004, dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta. Perubahan ini mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 September 2004 Nomor C-24263 HT.01.04.TH 2004.

Sekilas Perubahan Nama Perseroan





Nilai-Nilai Perusahaan



Berkolaborasi



Menghargai Kinerja Tinggi



Memberdayakan Tim



Tidak Berkompromi



Tangkas



Memiliki Jiwa Kewirausahaan

Makna Logo Perusahaan

PT AKR Corporindo Tbk

Logo AKR merepresentasikan komitmen terhadap visi Perseroan dan mencerminkan identitas Perseroan sebagai pemain utama dalam bidang penyediaan jasa logistik dan solusi pengadaan bahan kimia dan energi di Indonesia. Visi ini mendorong Perseroan untuk senantiasa mencapai kinerja unggul di ranah global dengan manajemen aset dan sumber daya, sinergi dengan mitra, dan strategi inovatif yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan mendorong kemajuan usaha dalam skala besar.

1. Logo Perseroan dibuat dengan menjadikan huruf "AKR" dari akronim Perseroan sebagai elemen pusatnya.
2. Akronim "AKR" ditempatkan di dalam sebuah lingkaran berwarna biru, mencerminkan status AKR sebagai entitas usaha yang diakui dan memiliki reputasi yang mendunia.
3. Warna merah pada huruf "A" dalam akronim "AKR" menggambarkan cahaya, melambangkan ketulusan dan kejujuran Perseroan dalam menjalankan bisnis, dengan fokus pada aktivitas usaha yang sehat dan bertanggung jawab.
4. Warna putih pada akronim "AKR" mencerminkan sikap profesionalisme dan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi usaha yang berlaku, serta komitmennya untuk selalu mengutamakan praktik persaingan usaha yang adil dan setara.

Jejak Langkah Perusahaan

1960

Bisnis perdagangan bahan kimia dasar mulai beroperasi di Surabaya.

1977

Usaha diformalkan dengan pendirian PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977.

1980

AKR memulai pembangunan tangki penyimpanan bahan kimia dasar serta fasilitas gudang di berbagai pelabuhan.

1994

AKR melakukan penawaran umum perdana pada tanggal 3 Oktober 1994, saham AKR dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "AKRA".

2004

- PT Aneka Kimia Raya Tbk resmi berganti nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk pada 23 September 2004.
- AKR mengakuisisi saham pabrik Sorbitol Sorini dan Khalista.

2005

AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan BBM non-subsidi di Indonesia.

2006

AKR mengakuisisi dan mulai mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok.

2008

- AKR membeli kapal pengangkut BBM pertama, yaitu SPOB AKRA-10.
- Terminal Stagen dengan kapasitas 50.000 KL resmi beroperasi.

2010

- AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia melalui pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
- Fase I PT Jakarta Tank Terminal, entitas anak yang bergerak di bidang terminal tangki penyimpanan BBM di Tanjung Priok, diresmikan pada April 2010.
- AKR mendivestasikan pabrikan Sorbitol Sorini.

2013

AKR bersama Pelindo memulai pengembangan *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIIPE), sebuah kawasan yang mengintegrasikan area industri dengan pelabuhan laut dalam di Gresik, Jawa Timur.

2015

Serah terima lahan Kawasan Industri yang pertama:

- *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) mendapat persetujuan dari pemerintah melalui program KLIK.
- Penandatanganan Perjanjian *Joint Venture* untuk mendistribusikan avtur bagi kebutuhan penerbangan.
- Pelabuhan JIIPE resmi memulai operasionalnya.

2017

- bp dan AKR menandatangani Perjanjian *Joint Venture* untuk bisnis ritel di Indonesia.
- Castrol dan AKR menjalin kerja sama melalui Perjanjian Distribusi Pelumas.
- AKR mendivestasikan Pelabuhan Guigang di Tiongkok.
- PT Berlian Manyar Sejahtera berhasil memperoleh konsesi 76 tahun.

2018

- AKR menyelesaikan divestasi dari Kalista Liuzhou Chemical Industries Ltd di China.
- JIIPE diresmikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
- Proyek JTT Fase 2A dengan peningkatan kapasitas 100.000 KL resmi dimulai.
- SPBU pertama hasil kerja sama bp dan AKR resmi beroperasi.

2019

- Penyerahan lahan untuk proyek Smelter di kawasan JIIPE.
- Terminal Avtur hasil kerja sama JV Air bp dan AKR resmi dibuka di Morowali, Sulawesi Tengah.
- Kawasan Industri JIIPE, melalui PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, memperoleh Sertifikasi ISO Terintegrasi.

2020

- AKR melunasi Obligasi Berkelanjutan AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri A senilai Rp895 miliar.
- AKR berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Perdagangan dan Distribusi BBM Industri.
- AKR menandatangani perjanjian kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad (PCG) untuk mendistribusikan bahan kimia dan meresmikan PT Anugerah Kimia Indonesia.

2021

- Kawasan Industri JIIPE diresmikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk Sektor Teknologi & Manufaktur.
- Lokasi untuk smelter tembaga dan *Precious Metal Refinery* terbesar ditetapkan di KEK JIIPE Gresik.
- Perusahaan usaha *Joint Venture* didirikan untuk bisnis distribusi Gas Bumi.
- Perjanjian sewa tanah jangka panjang ditandatangani untuk pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus bagi smelter tembaga.
- AKRA masuk dalam Indeks ESG utama, termasuk Indeks SRI-KEHATI, Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI.
- Anugerah Kimia Indonesia melakukan pengiriman bahan kimia dasar pertama kepada pelanggan.

2022

- AKRA melakukan *Stock Split* saham dengan rasio 1:5.
- KEK JIIPE Gresik memasang sistem panel surya (PLTS Atap) untuk mendukung komitmen penggunaan energi terbarukan.
- Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara BKMS dan PLN ditandatangani untuk memasok kebutuhan listrik proyek smelter tembaga *single line* di KEK JIIPE.
- AKR melunasi Obligasi Berkelanjutan AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri B senilai Rp68 miliar.
- JIIPE menerima Sertifikat Operasional sebagai KEK Gresik.
- Sebanyak 11 terminal penyimpanan AKR, 1 cabang AKR, dan JTT menerima Sertifikat Proper BIRU.
- Penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian biodiesel bersubsidi untuk periode 2023 - 2027

2023

- PT Anugrah Kreasi Pratama Indonesia didirikan untuk mengoperasikan *Bonded Warehousing* di JIIPE.
- PT Berkah Bunker Service didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha Pelayanan Kepelabuhan Laut di JIIPE.
- AKR menandatangani Perjanjian Pengembangan Bersama dengan BP GAS & POWER untuk mengembangkan proyek LNG di JIIPE.

2024

- **PT Berkah Renewable Energi Nusantara didirikan untuk mengoperasikan Pembangkit Tenaga Listrik di Wilayah JIIPE.**
- **Dimulainya perluasan Terminal Penyimpanan di Morowali**
- **AKR menambah 2 kapal baru, yaitu AKRA 103 dan AKRA 105, sehingga jumlah kapal total menjadi 14.**
- **Perseroan melakukan registrasi atas kepemilikan saham Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd untuk memperkuat aktivitas perdagangan kimia dan BBM.**
- **PT Terminal Energi Primer didirikan untuk melayani Pergudangan dan Penyimpanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penyediaan energi di wilayah JIIPE.**
- **KEK JIIPE Gresik memperoleh penghargaan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.**



Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Mengacu pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan perubahannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 28 April 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah pada bidang:

1. Industri;
2. Perdagangan;
3. Pengangkutan dan pergudangan (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya);
4. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin;
5. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); dan
6. Konstruksi.



Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Industri:
   - Industri yang memproduksi hasil dari kilang minyak bumi mencakup sektor pengolahan aspal/ter, bitumen, dan lilin (yang dapat digunakan untuk pelapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan lainnya), serta *Petroleum Coke*. Selain itu, kategori ini juga mencakup industri produk yang digunakan dalam industri petrokimia dan produk-produk lainnya, seperti *white spirit, vaseline*, lilin parafin, *petroleum jelly*, industri briket minyak bumi, serta pencampuran *biopetroleum*, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol); dan
   - Industri bahan bakar minyak dari proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi meliputi kegiatan pemurnian dan pengilangan yang menghasilkan berbagai jenis bahan bakar, seperti Avigas, Avtur, *Gasoline*, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, serta *Solvent*/Pelarut. Kategori ini juga mencakup produksi LPG yang berasal dari hasil pengilangan minyak bumi.
2. Perdagangan
   - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, beserta produk terkait, meliputi minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, bensin, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, *biopetroleum*, bahan bakar gas seperti LPG, gas butana, dan propana, minyak semir, minyak pelumas, serta produk minyak bumi yang telah diproses dan dimurnikan;
   - Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar mencakup aktivitas perdagangan bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin sintetis, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam, sulfur, serta produk sejenis lainnya; dan
   - Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di fasilitas pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara, mencakup kegiatan penjualan eceran BBM, BBG, LPG, atau jenis bahan bakar lainnya di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara seperti SPBU, SPBG, dan sejenisnya. Ini juga mencakup bahan bakar untuk *speed boat* dan *generator*

set (genset). Kegiatan ini turut melibatkan penjualan pelumas, produk pendingin, bahan pembersih, serta barang-barang lain yang mendukung kebutuhan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.

3. Pengangkutan dan Pergudangan (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya):
   - Angkutan melalui saluran pipa, mencakup kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak mentah, bahan bakar minyak, produk olahan, dan gas bumi), cairan, air, lumpur, serta komoditas lainnya dari lokasi produksi (produsen) ke lokasi konsumen menggunakan saluran pipa berdasarkan pembayaran jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk pengoperasian gardu pompa;
   - Angkutan bermotor untuk barang umum, meliputi kegiatan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti truk, *pick up*, bak terbuka, dan bak tertutup (*box*);
   - Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup kegiatan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu, seperti BBM, minyak bumi, produk olahan, LPG, LNG, CNG, barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, alat berat, peti kemas, tumbuhan hidup, hewan hidup, dan kendaraan bermotor;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, mencakup pengangkutan barang menggunakan kapal laut yang dirancang untuk mengangkut barang tertentu, seperti barang berbahaya, limbah berbahaya, bahan bakar minyak, minyak bumi, produk olahan, LPG, LNG, CNG, ikan, dan sejenisnya;
   - Pergudangan dan penyimpanan, meliputi kegiatan penyimpanan sementara barang sebelum dikirim ke tujuan akhir untuk tujuan komersial;
   - Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, meliputi kegiatan penyimpanan, penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, gas, dan/atau hasil olahan di lokasi permukaan tanah, bawah tanah, atau permukaan air untuk tujuan komersial, termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas;
   - Aktivitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mencakup penyimpanan barang yang memerlukan fasilitas khusus sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun;
   - Aktivitas *bonded warehousing* atau kawasan berikat, mencakup kegiatan usaha di wilayah pabean dengan perlakuan khusus, seperti yang dikelola oleh perusahaan di daerah industri tertentu seperti Pulau Batam; dan
   - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk kendaraan darat, mencakup penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) berbagai jenis alat transportasi darat tanpa operatornya, seperti mobil, truk dan mobil derek.
4. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (Jasa)
   Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup pemberian nasihat, bimbingan, dan dukungan operasional terkait berbagai aspek organisasi dan manajemen. Ini mencakup perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, kebijakan pemasaran, perencanaan sumber daya manusia, serta perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

   Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan dukungan operasional untuk berbagai fungsi manajemen. Hal ini meliputi konsultasi manajemen yang diberikan oleh *agronomist* dan *agricultural economics* dalam bidang pertanian dan sejenisnya, serta perancangan metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, dan pengawasan anggaran belanja. Selain itu, jasa juga mencakup pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha serta pelayanan masyarakat terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, serta informasi manajemen. Layanan studi investasi infrastruktur juga termasuk dalam lingkup ini.



Kegiatan Usaha Penunjang

1. Pengangkutan dan Pergudangan
   - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, meliputi kegiatan pelayanan kepelabuhan laut yang terkait dengan transportasi perairan untuk penumpang, hewan, atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal, misalnya pelabuhan dan dermaga, kegiatan navigasi, pemeriksaan muatan kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakar radiasi pengion), pelayaran, kegiatan berlabuh, serta jasa penambatan; dan
   - Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, meliputi penyelenggaraan pelabuhan yang terletak di sungai dan danau yang mencakup berbagai kegiatan terkait angkutan perairan untuk penumpang, hewan, atau barang. Aktivitas ini melibatkan pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan muatan kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakar radiasi pengion), pelayaran, kegiatan berlabuh, serta penyediaan jasa penambatan, pemanduan, dan penundaan.

2. Konstruksi
   - Konstruksi bangunan sipil jembatan dan jalan layang, *flyover*, dan underpass mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *flyover*. Kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap, dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
   - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, meliputi pemasangan bahan hasil produksi pabrik, seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya. Proses ini dilakukan dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil;
   - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya untuk pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan, sarana jalur sungai, dock (pangkalan), lock (*Panama Canal Lock, Hoover Dam*), dan lain-lain; dan
   - Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, meliputi kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil dalam konteks kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.
3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas, dan Udara Dingin
   - Pembangkitan tenaga listrik mencakup aktivitas pembangkitan listrik dari berbagai sumber energi, baik fosil maupun terbarukan. Sumber energi fosil meliputi batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel, sementara sumber energi terbarukan mencakup panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan, serta perbedaan suhu lapisan laut. Selain itu, pembangkitan dari sumber energi hybrid yang menggabungkan energi fosil dengan energi terbarukan, serta energi dari teknologi *energy storage*;
   - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya mencakup jasa-jasa yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, namun tidak termasuk dalam kelompok 35121 hingga 35122. Contohnya meliputi jasa pencatatan meteran, penyusunan tagihan, perdagangan pulsa atau token listrik, serta berbagai kegiatan penunjang kelistrikan lainnya;
   - Pengadaan gas alam dan buatan mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar, dengan proses yang meliputi peningkatan mutu gas seperti pemurnian, pencampuran, dan metode lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi, gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lainnya; dan
   - Distribusi gas alam dan buatan meliputi usaha penyaluran gas melalui jaringan dengan tekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar), tekanan tinggi (antara 4 bar hingga 10 bar), serta tekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar), baik dari produksi sendiri maupun pihak lain hingga ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa berdasarkan balas jasa atau *fee* termasuk dalam kelompok 49300. Kegiatan ini mencakup penyaluran, distribusi, dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang memperdagangkan gas melalui sistem distribusi yang dioperasikan pihak lain, serta pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Segmen Usaha, Produk, dan Jasa

Dalam rangka mendukung kegiatan usahanya, Perseroan mengelompokkan jenis kegiatan usaha utama ke dalam 4 (empat) segmen berikut:
1. Perdagangan dan Distribusi BBM dan Bahan Kimia Dasar
2. Logistik Pihak Ketiga
3. Pabrikan
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan yang Terintegrasi

Perseroan menawarkan produk-produk yang beragam sesuai dengan masing-masing segmentasi kegiatan usahanya, antara lain:

Perdagangan dan Distribusi

Perseroan memiliki fokus utama pada segmen perdagangan dan distribusi. Dalam segmen ini, Perseroan memprioritaskan 2 (dua) produk utama, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar.

PRODUK BBM INDUSTRI



1. Bahan Bakar Minyak Industri Non-Subsidi

Perseroan mulai mengembangkan bisnis distribusi BBM industri non-subsidi sejak tahun 2005. Perseroan terus memperluas fasilitas jaringan logistik untuk mendukung distribusi BBM kepada pelanggan, terutama di sektor industri pertambangan, pembangkit listrik, manufaktur, transportasi, dan *bunker*. Perseroan memiliki fasilitas terminal tangki di sejumlah pelabuhan utama yang terletak di lokasi strategis di Indonesia, dengan total kapasitas mencapai 822.000 KL.

Perseroan memiliki keunggulan di bisnis ini dengan dukungan *supply chain management* yang andal, sehingga dapat memastikan terpenuhinya kapasitas, kualitas, hingga ketepatan waktu dalam proses pendistribusian BBM kepada pelanggan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini didorong oleh pengoperasian kapal-kapal pengangkut BBM yang terdiri dari kapal tanker, tongkang dan kapal tongkang bermesin (*Self-Propelled Oil Barge*/SPOB) untuk mendistribusikan BBM melalui laut maupun sungai. Kapal-kapal tersebut secara khusus dirancang untuk pengiriman BBM melalui sungai-sungai yang dangkal yang terdapat di wilayah Kalimantan dengan tingkat kedalaman hingga 2,7 meter. Hingga kini, Perseroan juga memiliki armada truk ±250 unit untuk mengirim produk-produk ke seluruh Indonesia.

Pada akhir Agustus 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan kewajiban penggunaan Biodiesel untuk semua pengguna industri dan transportasi, dengan beberapa pengecualian terbatas. Dalam penugasan B35, AKR menerima kuota alokasi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) terbesar untuk proses *blending* di antara perusahaan swasta.

PRODUK BBM RITEL

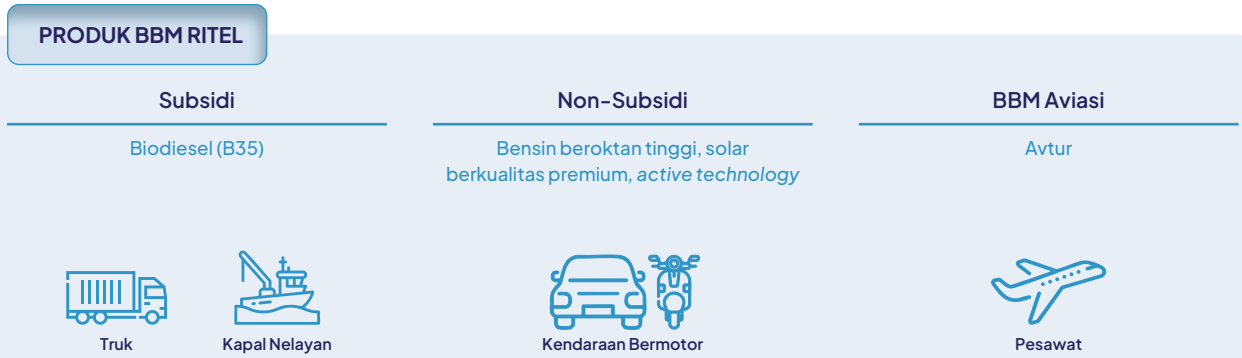

2. BBM Ritel Non-Subsidi

Pada April 2017, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan BP untuk mengembangkan industri BBM ritel di Indonesia. Kerja sama tersebut menghasilkan Perusahaan Joint Venture yang bernama PT Aneka Petroindo Raya, yang beroperasi dengan nama "bp AKR Petroleum Retail". Dalam perjanjian eksklusif, kedua pihak berkomitmen dalam mengembangkan dan menyajikan pengalaman yang unik bagi setiap konsumen dengan keahlian dan pengalaman BP serta AKR di pasar ritel yang tengah berkembang di Indonesia.

Hingga akhir tahun 2024, PT Aneka Petroindo Raya (APR) telah membuka 61 SPBU by AKR yang berlokasi di Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Malang, hingga *Toll Rest Area*. Dengan perkembangan industri yang terus berjalan, sektor ritel diharapkan terus menjadi faktor penunjang pertumbuhan Perseroan untuk segmen bahan bakar hingga di masa mendatang.

3. Bahan Bakar Minyak Ritel Bersubsidi

Sejak tahun 2010, Perseroan telah mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkat kapasitas dan pengalaman yang dimiliki. Distribusi BBM bersubsidi tersebut dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dengan merek AKRA SOL, yang saat ini telah menjadi produk Biodiesel.

Perseroan mengoperasikan SPBKB dan SPBN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencakup pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dengan jaringan terminal yang terorganisir dengan baik dan armada transportasi yang luas, Perseroan dapat menjalankan tugas distribusi BBM bersubsidi dengan efisien. Hal ini memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam bisnis distribusi BBM. Pada tahun 2024, AKR menyalurkan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 167.515 KL sejalan dengan penandatangan kontrak energi bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2024.

Tipe Produk	Produk
BBM Industri Non-Subsidi	• Biodiesel (B35) • Industrial Diesel Oil (IDO) • Marine Fuel Oil
BBM Ritel Non-Subsidi	• Gasoline RON 92 dan RON 95 • High Quality Diesel
BBM Subsidi	Biodiesel (B35)

4. Bahan Kimia Dasar

AKR adalah distributor utama PT Asahimas Chemical dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan berbagai bahan kimia dasar, termasuk chlor alkali, *solvents*, asam, serta bahan kimia organik dan anorganik. Selain distribusi dari PT Asahimas Chemical, Perseroan juga melakukan perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar dari pemasok domestik dan internasional untuk mendukung operasional bisnisnya.

AKR mendirikan terminal tangki penyimpanan pertamanya di Indonesia pada 1970–an dan berkembang menjadi salah satu distributor bahan kimia dengan pangsa pasar yang signifikan di Tanah Air. Keberhasilan ini didorong oleh infrastruktur yang memadai dan kekuatan dalam *supply chain* dan logistik yang terintegrasi. Sinergi antara infrastruktur yang handal dan sistem *supply chain* serta logistik yang efisien menjadikan AKR pilihan utama bagi berbagai industri di Indonesia yang memerlukan pasokan bahan kimia dasar. Beberapa sektor industri yang menjadi pelanggan AKR antara lain industri pemurnian mineral (*smelter*), industri barang konsumen, tekstil, kaca, dan lainnya.

Produk Kimia Dasar	Konsumen
• *Caustic Soda* • *Sodium Hypochlorite* • *Hydrogen Peroxide* • *PVC Resins* • *Soda Ash* • *Sulphuric Acid* • *Hydrochloric Acid* • *Sodium Sulphate* • *Methanol*	• Produsen Produk Rumah Tangga • Tekstil • Kaca • Kertas • Pupuk • Kimia dan Farmasi • Plastik • *Food Additive* • *Smelter*

5. Pelumas

Perseroan mengembangkan dan mengakselerasi ekspansi bisnis di sektor pelumas melalui anak perusahaan, yakni PT Anugerah Lubrindo Raya (ALR), yang didirikan pada tanggal 7 Februari 2019 sebagai entitas anak PT Anugerah Krida Retailindo. ALR menjalankan bisnis utama di bidang perdagangan dan distribusi pelumas untuk sektor industri, kelautan, pertambangan, dan kendaraan komersial dengan merek kenamaan Castrol. Ekspansi ini merupakan salah satu upaya Perseroan dalam meningkatkan portofolio bisnis dan memperkuat fondasi di sektor pelumas.

6. Avtur

Perseroan menandatangani pembentukan perusahaan patungan dengan Air bp di tahun 2016. Langkah ini ditujukan untuk untuk mendistribusikan bahan bakar pesawat terbang di bandara-bandara Indonesia. Kerjasama ini menghasilkan pembentukan perusahaan *Joint Venture*, yakni PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR). Selanjutnya, pada Agustus 2019, DPR meresmikan pembukaan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) pertama di bandara khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, dan Cibubur. Dengan ini, Perseroan menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang mendistribusikan bahan bakar pesawat terbang.

7. Gas

Perseroan dan PT Bayu Buana Gemilang (BBG) menjalin kerjasama untuk mendirikan perusahaan patungan pada 4 Agustus 2021 dengan nama PT Berkah Buana Energi (BBE). Perusahaan tersebut berfokus pada kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan distribusi gas alam melalui pipa dari lokasi sumber gas ke pelanggan.

Pada tahap awal, kegiatan perusahaan patungan ini akan difokuskan pada pengembangan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, guna memenuhi kebutuhan industri di wilayah tersebut. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memegang 65% kepemilikan, sementara BBG memiliki 35%.

Jasa Logistik

Perseroan memiliki infrastruktur logistik yang kuat, yang meliputi gudang, tangki penyimpanan, kapal hingga truk pengangkut. Dengan demikian, Perseroan menawarkan infrastruktur logistik dan distribusi yang efisien kepada pihak ketiga dengan layanan pengelolaan kargo curah yang efektif dan terpercaya di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia.

Melalui PT AKR Transportasi Indonesia selaku salah satu anak perusahaan, Perseroan menyediakan jasa angkutan darat untuk mendukung layanan logistik. Di samping itu, Perseroan juga menyediakan kapal-kapal besar untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan konsumen dan pihak ketiga melalui PT AKR Sea Transport.

Perseroan memiliki 51% saham di PT Jakarta Tank Terminal (JTT), sebuah perusahaan patungan dengan Royal Vopak. JTT berfokus pada pengoperasian terminal tangki penyimpanan BBM independen berkapasitas total 350.000 cbm di pelabuhan Tanjung Priok. JTT merupakan salah satu pemilik terminal tangki swasta terbesar di Indonesia yang dilengkapi dengan dermaga dan pipa yang dipasang di bawah laut. JTT berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan distribusi BBM Perseroan. Selain itu, JTT juga merupakan pemilik terminal tangki independen dengan pelanggan dari perusahaan-perusahaan minyak terkemuka. Adapun jenis produk dan pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan
Jasa Penanganan Barang Curah
Jasa Penanganan Peti Kemas
Transportasi Darat dan Laut
Tangki Penyimpanan
Vendor Managed Inventory
Pergudangan
Jasa pelabuhan melalui perusahaan afiliasi PT BMS

Untuk pelanggan-pelanggan utamanya, Perseroan menawarkan sistem *Vendor Managed Inventory* (VMI), yakni pengelolaan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lokasi pelanggan. Setiap pelanggan hanya perlu membayar sesuai dengan penggunaan aktual, sementara Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi pengelolaan persediaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penerapan VMI menjadi wujud komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah dengan menawarkan solusi pengelolaan persediaan yang lebih efektif.

Pabrikan

Segmen pabrikan Perseroan memproduksi bahan perekat kayu dengan kualitas tinggi yang diproduksi oleh entitas anak Perseroan, yakni PT Arjuna Utama Kimia (Aruki) di Surabaya, Jawa Timur. Aruki berfokus pada kegiatan penyediaan bahan perekat yang diperlukan oleh berbagai perusahaan dalam industri kayu dan kertas di Indonesia.

Tipe Produk	Merek	Produk Akhir
Urea-formaldehyde Resin	Uloid	Kayu lapis dan perkayuan
High Solid Urea-formaldehyde Resin	Uloid	*Particle Board and MDF*
Melamine-formaldehyde Resin	Uloid	Kayu lapis dan perkayuan
Planol-formaldehyde Resin	Uloid	Kayu lapis dan perkayuan
Two Component Vinyl Urethane Adhesive	Struct Bond	*Wood working, Furniture, Flooring & FJLB*

Tipe Produk	Merek	Produk Akhir
Polyacrylamide Monomer (PAM) Resin	HOFMANN	*High performance dry strength enhancement resin for paper*
Polyacrylamide Monomer (PAM) Resin	HOPELON	*High performance dry strength enhancement resin for paper*
Melamine Resin	URAMIN	*Paper wet strength improvement resin*
Poly Vinyl Acetate	PVAc	Lem multiguna untuk kayu dan kertas

Kawasan Industri

AKR telah mengembangkan *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) bersama Pelindo, yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari strategi ekspansinya. Investasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan solusi energi bagi pelanggan industri. JIIPE memiliki pelabuhan laut dalam terpadu yang terhubung dengan kawasan industri besar, dengan interkonektivitas yang kuat di salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat.

Memiliki luas wilayah total lebih dari 3.000 hektare, proyek ini akan menjadi salah satu kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terbesar di Indonesia. Area yang sedang dikembangkan mencakup 1.761 hektare lahan untuk kawasan industri, 406 hektare lahan untuk pelabuhan laut dan 800 hektare untuk perumahan dan ruang komersial yang dikembangkan oleh perusahaan afiliasi dari PT AKR Corporindo Tbk.

Dengan perannya sebagai kawasan ekonomi khusus bertemakan teknologi dan manufaktur untuk program hilirisasi Pemerintah, JIIPE menyediakan fasilitas penunjang kelas dunia seperti pembangkit listrik, saluran air, *waste water treatment* dan Teknologi Informasi. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pendapatan yang berkelanjutan untuk Perseroan sehingga bisnis industrial tidak hanya terbatas pada penjualan dan sewa lahan. Berikut rincian jenis produk dan pelayanan.

Pelayanan
Kawasan Industri
Port and Port Operator
Utilities & Infrastructures

Pasar yang Dilayani

Sebagai penyedia layanan logistik dan solusi pengadaan (rantai pasok) untuk energi dan bahan kimia di Indonesia, Perseroan didukung oleh infrastruktur dan jaringan logistik yang luas dan memadai. Perseroan memiliki tangki penyimpanan dan terminal distribusi di 19 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan juga memiliki armada logistik lengkap yang meliputi kapal dan truk pengiriman BBM dan Kimia dasar, serta telah melayani ribuan perusahaan dan industri.

Perseroan juga mendistribusikan Biodiesel dan *Fuel Oil* ke beberapa pelanggan sektor industri yang mencakup komersial, pertambangan, pembangkit listrik, manufaktur, pembangunan, perikanan, bunker dan lain-lain. Di samping itu, Perseroan menghadirkan bahan bakar standar Euro 4 ke sektor ritel melalui ritel *outlet*.

Dalam pengembangan bisnis BBM ritel non-subsidi dan avtur, Perseroan menjalin kerja sama dengan bp Global dan membentuk *joint venture* seperti bp-AKR yang hingga akhir Desember 2024 mengoperasikan 61 SPBU dan PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR) untuk kepemilikan 2 depo avtur di Indonesia. Dalam segmen ritel bersubsidi, Perseroan mendistribusikan dan menjual Biodiesel dan bensin RON 92 dan RON 95 untuk kendaraan bermotor dan nelayan di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain itu, Perseroan juga terlibat dalam kegiatan distribusi dan perdagangan kimia dasar, berperan sebagai distributor untuk produsen kimia dasar internasional di Indonesia. Produk kimia dasar yang didistribusikan Perseroan menjadi bahan baku untuk berbagai industri seperti smelter, industri kimia, tekstil, pulp, kertas, barang konsumsi, pupuk, produk olahan kayu, makanan, farmasi, dan industri lainnya.

Keanggotaan dalam Asosiasi

Dalam rangka memperluas jaringan bisnis serta mendorong komunikasi yang lebih luas dan efektif, Perseroan tergabung dalam beberapa asosiasi bisnis dan organisasi lainnya. Selaku anggota yang berpartisipasi aktif, keanggotaan asosiasi dan organisasi menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam memecahkan setiap persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional. Hingga 31 Desember 2024, AKR tergabung dalam asosiasi-asosiasi berikut.

Nama Organisasi	Posisi di Asosiasi	Iuran Keanggotaan/Tahun (Rp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	Rp27.500.000
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota	Rp3.500.000
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Rp3.000.000
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota	Rp5.000.000

Struktur Organisasi

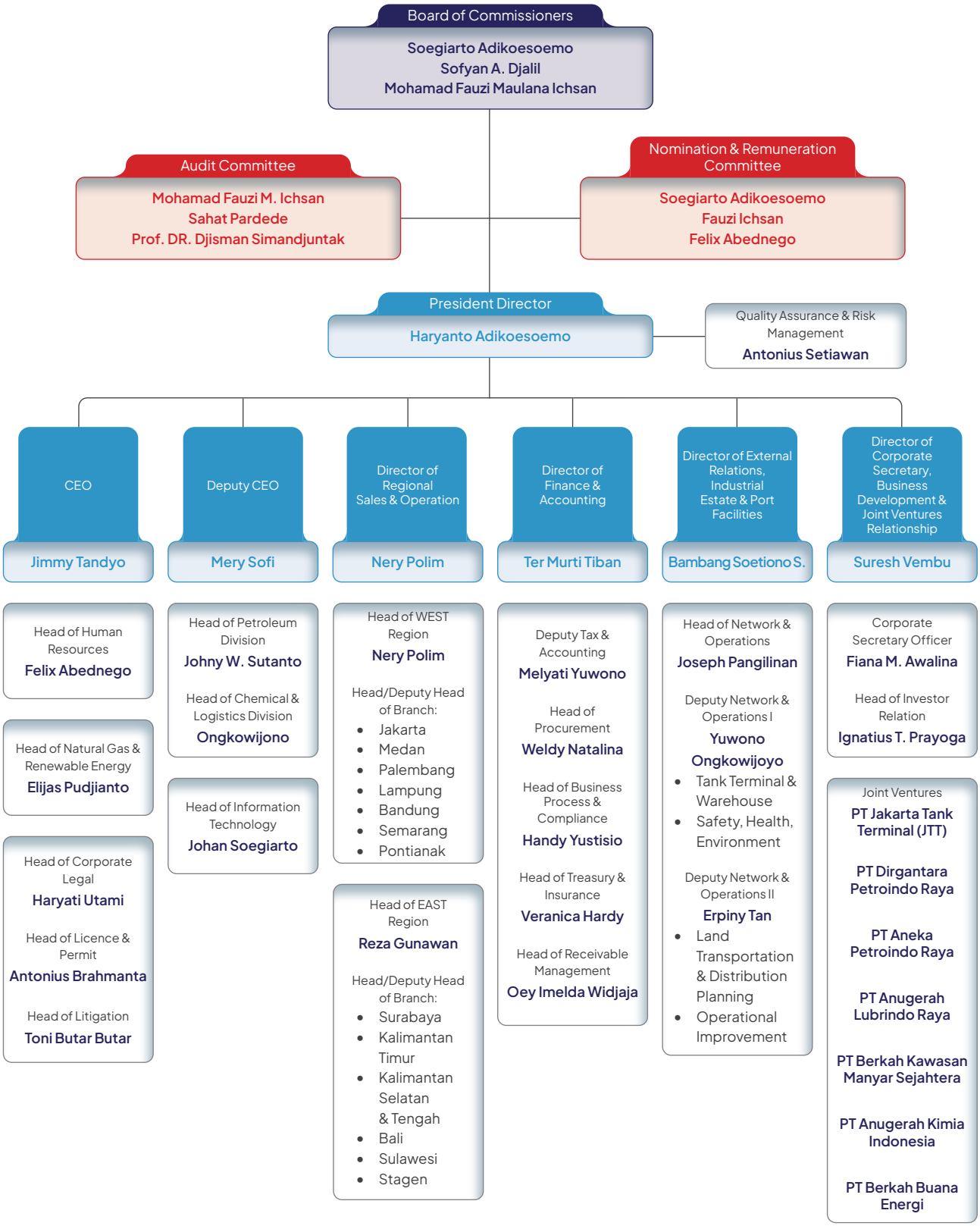

Profil
Dewan Komisaris



Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Surabaya

Tempat Tanggal Lahir
Malang, 24 Maret 1938

Usia
87 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
- SMA Yong Ching Night School, Surabaya (1957)
- SMP Yong Ching Night School, Surabaya (1954)
- SD Chung Hua Sie Siau Lawang, Malang (1951)

Riwayat Jabatan
- Founder & Chairman AKR (Guangxi) Coal Trading Co. Ltd, Guigang, Tiongkok (2008–2019)
- Founder & Chairman AKR (Guigang) transshipment port, Co. Ltd, Guigang, Tiongkok (2016–2017)
- Founder & Chairman AKR Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co. Ltd, Guigang, tiongkok (2006–2017)
- Presiden Direktur PT AKR (1982–1992)
- Pendiri AKR Group (1960)
- Mendirikan perusahaan sendiri bernama UD. Sinar Djaja (1960)

Rangkap Jabatan
- Presiden Komisaris PT Arjuna Utama Kimia (2007–sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT AKR Corporindo Tbk
- Komisaris Utama PT AKR Land Development (d/h PT Union Perkasa Wisesa) Jakarta (1998–sekarang)
- Presiden Komisaris PT Arthakencana Rayatama (1992–sekarang)
- Komisaris Utama PT Andahanesa Abadi (1992–sekarang)

Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 101.604.800 saham di Perseroan.



Sofyan A. Djalil

Komisaris

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Aceh, 23 September 1953

Usia
71 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 28 April 2023.

Riwayat Pendidikan
- Ph.D Hukum dan Kebijakan Pasar Modal, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (1993)
- Master of Arts in Law and Diplomacy, Tufts University (1991)
- Master of Arts (MA), Kebijakan Publik, Tufts University (1989)
- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1984)

Riwayat Jabatan
- Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016 – 2022)
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)
- Ketua Tim Kajian Strategis Wakil Presiden Budiono (2010–2014)
- Menteri Komunikasi dan Informatika (2004–2007)
- Konsultan Community Relation Chevron Indonesia (2000)
- Asisten Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (1998–2000)
- Vice President Research & Development Bursa Efek Jakarta (1998)

Rangkap Jabatan
- CEO Indonesia Business Council (IBC) (2023–sekarang)
- Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2023–sekarang)
- Dewan Pengarah Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) (2023–sekarang)
- Komisaris Utama PT Indika Nature (2022–sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki saham di Perseroan.



Mohamad Fauzi Maulana Ichsan

Komisaris Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 27 Januari 1970

Usia
55 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
- Master of Science, Development Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, USA, (1995)
- Bachelor of Science, London School of Economics (LSE), University of London, UK (1991)
- Ordinary and Advanced Level Certificates of Education, Cambridge University Board, UK (1988)

Riwayat Jabatan
- Executive Committee Member of International Association of Deposit Insurers, IADI, Basel, Switzerland (2017–2020)
- Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2015–2019)
- Anggota Dewan Komisaris LPS (2014–2015)
- Managing Director, Senior Economist, and Head of Government Relations, Standard Chartered Bank (SCB) Jakarta (2001–2014)
- Senior Economic Adviser for British Ambassador to Indonesia (1998–2000)
- Bond Trader Citibank Singapore (1997–1998)
- Head of Fixed Income Sales Desk Citibank Jakarta (1995–1997)
- Research Analyst, Harvard Institute for International Development, Advisory Team for Minister of Finance, Departemen Keuangan (1991–1993)

Rangkap Jabatan
- Komisaris Independen Unilever Indonesia (2021–sekarang)
- Komisaris Independen Manulife Investment Management (2020–sekarang)
- Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) (2020–sekarang)
- Ketua Komite Nominasi dan remunerasi PT AKR Corporindo Tbk (2020–sekarang)
- Ketua Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk (2020–sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki saham di Perseroan.

Profil Direksi



Haryanto Adikoesoemo

Presiden Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Surabaya, 21 September 1962

Usia
62 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
- Executive Management Program Harvard Business School (1993)
- Bachelor of Science, University Bradford, United Kingdom (1983)
- "A" Level Hall Green Technical College, United Kingdom (1980)
- "O" Level St. Patrick's School, Singapura (1978)

Riwayat Jabatan
- Wakil Ketua, Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd (2004–2018)
- Komisaris Utama PT Bumi Karunia Pertiwi (2009 – 2018)
- Direktur AKR (Guigang) Coal Trading Co. Ltd (2008 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co.Ltd (2006 – 2017)
- Komisaris Utama PT Jabal Nor (2011 – 2017)
- Executive Committee of Business office Ministry (2003)

Rangkap Jabatan
- Direktur Lubrindo Shipping Services Pte Ltd (2019–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Lubrindo Batam (2019–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Lubrindo Raya (2019–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugrah Karya Raya (2009 – sekarang)
- Komisaris PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Komisaris PT Arjuna Utama Kimia (2007 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT Jakarta Tank Terminal (2005 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Usaha Era Pratama Nusantara (2002 – sekarang)
- Presiden Direktur PT Arthakencana Rayatama (1992 – sekarang)
- Presiden Direktur PT AKR Land Development (d/h PT Union Perkasa Wisesa) (1985 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 205.604.600 saham di Perseroan.



Jimmy Tandyo

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Surabaya, 22 Agustus 1951

Usia
73 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
- Advance Management Program di Harvard Business School (2005)
- Lulusan Institut Bahasa Asing (1970)

Riwayat Jabatan
- Direktur AKR (Guangxi) Coal Trading Co Ltd. (2008–2019)
- Direktur Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd, (2012–2018)
- Komisaris PT Bumi Karunia Pertiwi (2009 – 2018)
- Komisaris PT Jabal Nor (2011 – 2017)
- Direktur AKR Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co.Ltd. (2006 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur PT Sorini Corporation Tbk (1985 -2006)
- General Manager PT Aneka Kimia Raya (1974 – 1985)

Rangkap Jabatan
- Komisaris Utama PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Komisaris PT Berkah Renewable Energi Nusantara (2024–sekarang)
- Komisaris Utama PT Berkah Buana Energi (2021–sekarang)
- Komisaris PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Terminal Nilam Utara (2015 – sekarang)
- Komisaris PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2012 – sekarang)
- Komisaris PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Komisaris PT Anugrah Karya Raya (2009 – sekarang)
- Direktur Utama PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Komisaris PT Jakarta Tank Terminal (2007 – sekarang)
- Komisaris PT Usaha Era Pratama Nusantara (2002 – sekarang)
- Direktur PT Arthakencana Rayatama (1992 – sekarang)
- Komisaris PT Arjuna Utama Kimia (1985 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 39.000.000 saham di Perseroan.



Bambang Soetiono Soedijanto

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Rembang, 8 Februari 1962

Usia
63 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE Surabaya (1986)

Riwayat Jabatan
- Komisaris PT Berlian Manyar Stevedore (2016–2019)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Kepala Kantor Cabang surabaya PT AKR Corporindo Tbk (1992–1994)
- Ketua Divisi Keuangan dan akuntansi di PT AKR Corporindo Tbk Kantor Cabang surabaya (1989–1992)

Rangkap Jabatan
- Komisaris PT Berkah Buana Energi (2021–sekarang)
- Direktur Utama PT Terminal Nilam Utara (2014 –sekarang)
- Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2012– sekarang)
- Komisaris PT Berlian Manyar Sejahtera (2012 – sekarang)
- Presiden Direktur PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Presiden Direktur PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Direktur PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Direktur PT Arjuna Utama Kimia (2007 – sekarang)
- Direktur PT Jakarta Tank Terminal (2005 – sekarang)
- Direktur Utama PT Usaha Era Pratama Nusantara (2002 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 4.780.000 saham di Perseroan.



Mery Sofi

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Bagan Siapi-api, 25 April 1967

Usia
58 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Krida Wacana, Jakarta (1990)

Riwayat Jabatan
- Direktur Utama PT Berkah Buana Energi (2021–2023)
- Direktur Utama PT Bumi Karunia Pertiwi (2012 – 2018)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co.Ltd. (2006 – 2017)
- Direktur Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Financial Controller PT AKR Corporindo Tbk (1997– 2006)
- Manajer Keuangan dan akuntansi pada Divisi Kemasan Group Indofood (1995–1997)
- Manajer Akuntansi pada Divisi Kemasan Group Indofood (1992–1995)

Rangkap Jabatan
- Direktur Utama PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Direktur Chemical Petroleum International Trading PTE. LTD (2024 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT AKR Transportasi Indonesia (2024 – sekarang)
- Komisaris PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2017 - sekarang)
- Komisaris Utama PT Dirgantara Petroindo Raya (2017 - sekarang)
- Direktur PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Direktur PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Direktur PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Direktur PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Direktur PT Arjuna Utama Kimia (2007 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 2.303.000 saham di Perseroan.



Suresh Vembu

Direktur

Kewarganegaraan
India

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Nagapattinam, 23 Juni 1964

Usia
60 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
- Bachelor of Commerce dari Bangalore University, MES College (1984)
- Chartered Accountancy dari Indian Institute of Chartered Accountants, New Delhi (1987)

Riwayat Jabatan
- Corporate Secretary dan Head Investor Relations PT AKR Corporindo Tbk dan PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (2007–2009)
- Head of Corporate Finance & Investor Relations PT AKR Corporindo Tbk. (2004–2007)
- General Manager Corporate Finance (Engineering) – Texmaco, indonesia (2001–2004)
- Finance Manager Texmaco Perkasa Engineering (1998–2001)
- Manajer Komersial PT Perkasa Heavyndo Engineering (1995–1998)
- Manajer Keuangan, Birla 3M Limited, Bangalore (1991–1995)
- Asisten Manajer Keuangan TVs electronics Limited, Bangalore (1984–1991)

Rangkap Jabatan
- Wakil Presiden Komisaris PT Anugerah Kimia Indonesia (2020–sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Batam (2020–sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Raya (2020–sekarang)
- Komisaris PT Dirgantara Petroindo Raya (2018–sekarang)
- Komisaris Utama PT Aneka Petroindo Raya (2018–sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 3.727.500 saham di Perseroan.



Nery Polim

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Medan, 17 Desember 1964

Usia
60 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Akuntansi dari California State University of Bakersfield, USA (1988)

Riwayat Jabatan
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Company (2014 – 2017)
- Kepala People Development (1993 – 2012)

Rangkap Jabatan
- Direktur Utama PT Anugerah Krida Retailindo (2017 - sekarang)
- Direktur PT AKR Niaga Indonesia (2015 – sekarang)
- Komisaris PT Anugrah Karya Raya (2011 – sekarang)
- Komisaris PT Usaha Era Pratama Nusantara (2006 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 1.050.000 saham di Perseroan.



Termurti Tiban

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat Tanggal Lahir
Medan, 19 Juli 1970

Usia
54 tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 30 April 2020.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti (1993)
- Indonesia Certified Public Accountant (CPA - IAPI) and Chartered Accountant (CA - IAI)

Riwayat Jabatan
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (Member Firm of Ernst & Young) (sebelum tahun 2014)

Rangkap Jabatan
- Direktur PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Direktur Chemical Petroleum International Trading PTE. LTD (2024 – sekarang)
- Komisaris PT AKR Transportasi Indonesia (2024–sekarang)
- Direktur PT Berkah Renewable Energi Nusantara (2024–sekarang)
- Komisaris Utama PT Berkah Bunker Service (2023–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia (2023–sekarang)
- Direktur PT Berkah Buana Energi (2021–sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Batam (2019–sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Raya (2019–sekarang)
- Komisaris PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2017–sekarang)
- Direktur PT Anugerah Krida Retailindo (2017 - sekarang)
- Direktur PT Usaha Era Pratama Nusantara (2019 – sekarang)
- Direktur PT AKR Sea Transport (2015–sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 450.000 saham di Perseroan.

Informasi Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2024

Tidak terdapat perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan ini.



Pejabat Eksekutif



Johny W Sutanto

Head of Petroleum Division

Bergabung sejak
1 Maret 2004

Usia
59 tahun

Riwayat Pendidikan

- Master of Business Adiministration dari University of Technology Sydney (2003)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun (1988)

Riwayat Jabatan

- Head of Petroleum Division, PT AKR Corporindo Tbk (2020 – sekarang)
- Commercial Petroleum, PT AKR Corporindo Tbk (2016 – 2020)
- Business Development, PT AKR Corporindo Tbk (2006 – 2016)
- Supply Chain Manager, PT AKR Corporindo Tbk (2004 – 2006)
- Group Product Manager di PT Warner Lambert Indonesia / Pfizer Indonesia (1992 – 2001)



Ongkowijono Soehardjo Hartono

Head Of Chemical & Logistics Division

Bergabung sejak
1 November 2002

Usia
55 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Pertanian dari Universitas Kristen Satya Wacana (1993)

Riwayat Jabatan

- Head of Chemical & Logistics Division, PT AKR Corporindo Tbk (2020 – sekarang)
- Head of Branch Jakarta, PT AKR Corporindo Tbk (2008 – 2020)
- Head of Branch Surabaya, PT AKR Corporindo Tbk (2002 – 2008)
- Head of Branch, Preffered Banking and Commercial Lending Surabaya, PT Bank Universal (2000 – 2002)
- Branch Manager Solo, PT Bank Bali (1998 – 2000)
- Head of Special Asset Management Branch Semarang, PT Bank Bali (1995 – 1998)



Reza Gunawan

Head of East Region

Bergabung sejak
16 September 1996

Usia
52 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Industri dari Universitas Surabaya (1996)

Riwayat Jabatan

- Head of EAST Region, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – sekarang)
- Head of Branch Surabaya, PT AKR Corporindo Tbk (2013 – 2018)
- Deputy of Commercial Director, PT AKR Corporindo Tbk (2012 – 2013)
- Head of Branch Surabaya, PT AKR Corporindo Tbk (2008 – 2012)
- Head of Sales Chemicals, PT AKR Corporindo Tbk (2007 – 2008)
- Head of Branch Semarang, PT AKR Corporindo Tbk (2005 – 2007)



Joseph Pangilinan

Head of Network & Operations Division

Bergabung sejak
1 Agustus 2018

Usia
57 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Sipil dari University of San Carlos, Filipina (1988)

Riwayat Jabatan

- Director – Head of Network & Operation Division, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – sekarang)
- Regional Logistics & Technical Manager – Total Oil Asia – Pacific PTE LTD (2013 – 2018)



Felix Abednego

Head of Human Resources Division

Bergabung sejak
17 Mei 2021

Usia
52 tahun

Riwayat Pendidikan

- Master of Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, The Netherlands (2000)
- Sarjana Biologi, jurusan Mikrobiologi Lingkungan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1995)

Riwayat Jabatan

- Director – Human Resources Division PT AKR Corporindo Tbk (2021 – sekarang)
- Human Resources Director, South East Asia Region, Mundipharma (2020 – 2021)
- Human Resources Director, PT Mundipharma Healthcare Indonesia (2017–2020)
- Human Resources Development Center Head, Upstream Business, PT SMART Tbk (2013–2016)
- Head of Human Resources and General Affairs, PT Nissan Motor Indonesia (2011–2013)



Elijas Pudjianto

Head of Natural Gas & Renewable Energy

Bergabung sejak
1 Februari 2022

Usia
59 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1990)

Riwayat Jabatan

- Director – Head of Natural Gas & Renewable Energy, PT AKR Corporindo Tbk (2022 – sekarang)
- President Director of PT Jasatama Petroindo (a wholly owned subsidiary of BP) / Head of BP Trading & Shipping - Indonesia di BP Trading & Shipping, Jakarta (2014 – 2021)
- Business Development Director - Middle East di BP, Singapore (2012 – 2014)
- Vice President, Sales and Marketing di BP Indonesia – Tangguh LNG, London (2010 – 2012)
- Marketing, Sales Operations and Shipping Manager di BP Indonesia – Tangguh LNG, Jakarta (2005 – 2009)



Johan Soegiarto

Head of Information Technology Division

Bergabung sejak
1 September 2024

Usia
51 tahun

Riwayat Pendidikan

- Innovation, Harvard Extension School (2019)
- Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan (2019)
- Sarjana Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (1997)

Riwayat Jabatan

- DCIO, Gill Capital Group (2022–2024)
- Corporate IT Director, RS Mitra Keluarga (2019–2021)
- VP IT, PT Matahari Department Store Tbk (2014–2019)
- Senior IS Manager, PT Merck Tbk (2008–2014)
- CIO, Sanofi Aventis (1998–2007)



Melyati Yuwono

Deputy Tax & Accounting

Bergabung sejak
1 Agustus 1995

Usia
53 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Manajemen dari Universitas Kristen Satya Wacana (1994)

Riwayat Jabatan

- Deputy Tax & Accounting PT AKR Corporindo Tbk (2023 – sekarang)
- Finance Controller PT AKR Corporindo Tbk (2012 – 2023)
- Head of Taxation PT AKR Corporindo Tbk (2010–2012)
- Finance Controller PT AKR Corporindo Tbk (2009 – 2010)
- Head of Accounting Jakarta Branch PT AKR Corporindo Tbk (2007–2009)
- Head of Finance Accounting - Corporate PT AKR Corporindo Tbk (2005–2007)
- Accounting Department PT AKR Corporindo Tbk (1995–2005)



Yuwono Ongkowijoyo

Deputy Network & Operations I

Bergabung sejak
12 September 2000

Usia
48 tahun

Riwayat Pendidikan

- Master Of Information & Technology System dari University of New South Wales (2000)
- Sarjana Teknik Mesin dari University of Wollongong (1998)

Riwayat Jabatan

- Deputy Network and Operation I, PT AKR Corporindo Tbk (2023 – sekarang)
- Head Of Network & Distribution, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – 2023)
- Head of Improvement, PT AKR Corporindo Tbk (2017 – 2018)
- Head of Operation WEST Region, PT AKR Corporindo Tbk (2016 – 2017)
- Head of SHE, PT AKR Corporindo Tbk (2011 – 2016)
- Head of Branch Kalimantan Selatan, PT AKR Corporindo Tbk (2009 – 2011)
- Head of Operation Jakarta Branch, PT AKR Corporindo Tbk (2006 – 2009)
- Head of Distribution Jakarta Branch, PT AKR Corporindo Tbk (2005 – 2006)



Erpiny Tan

Deputy Network & Operations II

Bergabung sejak
1 April 2003

Usia
46 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara (2000)

Riwayat Jabatan

- Deputy Network & Operations II, PT AKR Corporindo Tbk (2023 – sekarang)
- Head of Operations Services & Improvement, PT AKR Corporindo Tbk (2019 – 2023)
- Head of IT Business Partner, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – 2019)
- Lead of Technology Enterprise Enablement Build, PT AKR Corporindo Tbk (2011 – 2017)
- IT Business Analyst, PT AKR Corporindo Tbk (2006 – 2011)

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Kepemilikan 5% atau Lebih dan <5%

No	Pemegang Saham	1 Januari 2024		31 Desember 2024	
		Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Kepemilikan Saham 5% atau Lebih					
1.	PT Arthakencana Rayatama	12.077.492.600	60,2	12.768.961.300	63,6%
Kepemilikan <5%					
2.	Dewan Komisaris & Direksi	350.219.900	1,7	358.519.900	1,8%
3.	Masyarakat	7.309.457.100	36,4	6.625.338.400	33,0%
4.	Treasury Stock	336.305.000	1,7	320.655.000	1,6%
Jumlah		**20.073.474.600**	**100,0**	**20.073.474.600**	**100,0**

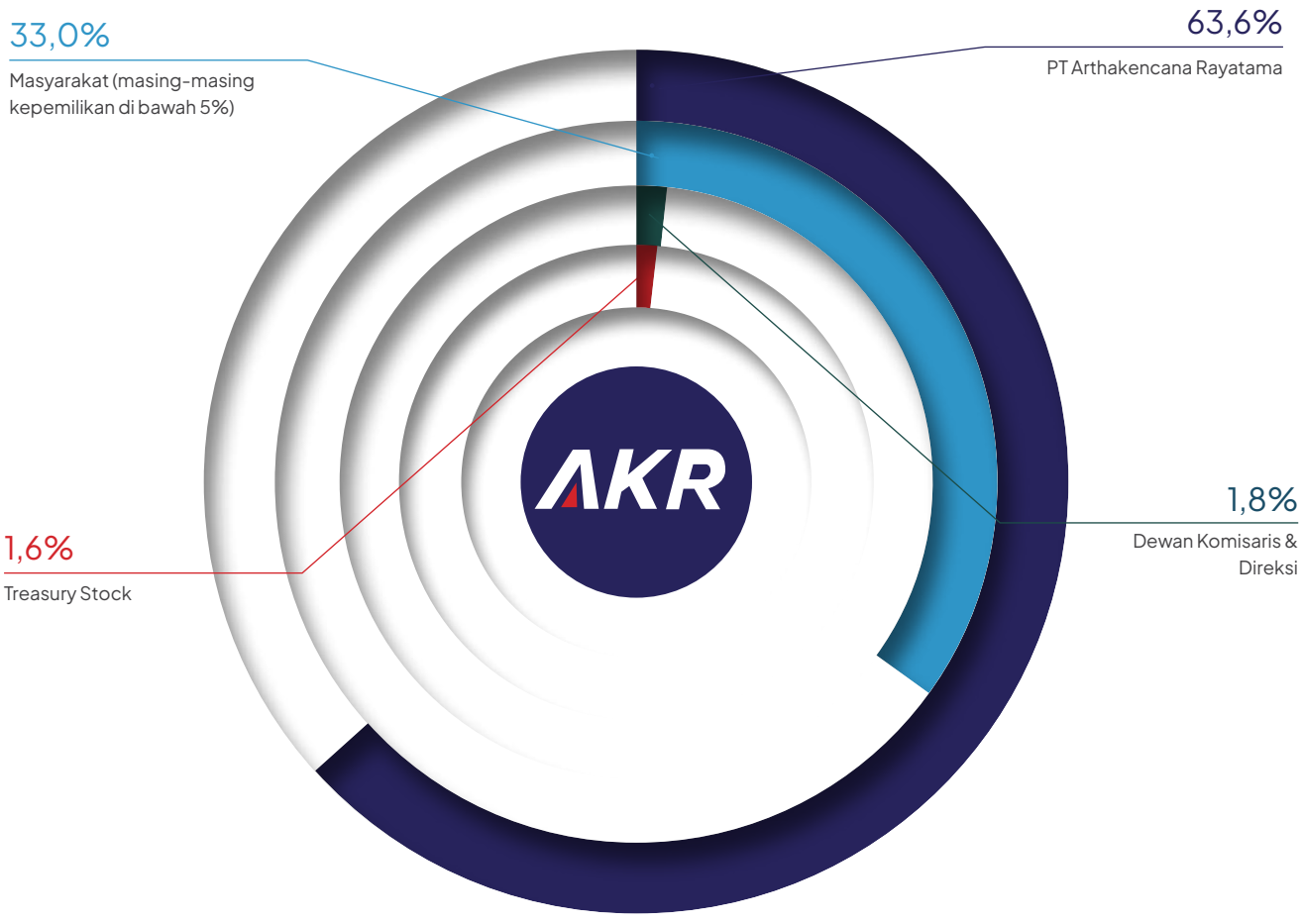

20 Pemegang Saham Terbesar

No	Pemegang Saham	Status	31 Desember 2024	
			Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
1.	PT. ARTHAKENCANA RAYATAMA	PERUSAHAAN TERBATAS	12.768.961.300	63,61%
2.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	MALAYSIA - TAX TREATY	647.500.000	3,23%
3.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	NORWAY - GOVERNMENT_TAX_ TREATY	270.236.700	1,35%
4.	BP2S LONDON S/A ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC	INSTITUTION - FOREIGN	230.174.200	1,15%
5.	HARYANTO ADIKOESOEMO	INDIVIDUAL - DOMESTIC	205.604.600	1,02%
6.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 2	NORWAY - GOVERNMENT_TAX_ TREATY	151.232.200	0,75%
7.	CITIBANK LONDON S/A PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	INSTITUTION - FOREIGN	134.822.300	0,67%
8.	PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DYNAMIC EQUITY MONEY RUPIAH	INSURANCE NPWP	129.690.600	0,65%
9.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	UNITED STATES OF AMERICA - TAX TREATY	112.572.807	0,56%
10.	SSB 2Q27 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF -2183966403	UNITED STATES OF AMERICA - TAX TREATY	111.674.100	0,56%
11.	DB SPORE SES CLT A/C FOR PANGOLIN ASIA FUND-864134001	INSTITUTION - FOREIGN	111.173.600	0,55%
12.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	UNITED STATES OF AMERICA - TAX TREATY	109.373.725	0,54%
13.	SOEGIARTO ADIKOESOEMO	INDIVIDUAL - DOMESTIC	101.604.800	0,51%
14.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	INSURANCE NPWP	76.122.900	0,38%
15.	CITIBANK EUROPE PLC LUX BRANCH S/A ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	INSTITUTION - FOREIGN	74.367.300	0,37%
16.	CITIBANK SINGAPORE S/A ART A/C PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND	MALAYSIA - TAX TREATY	72.300.000	0,36%
17.	BNYMSANV RE BNYMIL RE PACIFIC HORIZON INV TRT PLC-2039844235	INSTITUTION - FOREIGN	72.074.700	0,36%
18.	HSBC BANK PLC RE: LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND	INSTITUTION - FOREIGN	70.559.000	0,35%
19.	DANA PENSIUN ASTRA DUA	PENSION FUND	67.381.700	0,34%
20.	JPMCB NA RE-TFL PENSION FUND	INSTITUTION - FOREIGN	67.006.736	0,33%
	Jumlah		**15.584.433.268**	**77,64%**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan

Pemegang Saham	1 Januari 2024			31 Desember 2024		
	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Pemodal Domestik						
Perorangan	13.427	846.634.183	4,22%	24.816	965.300.583	4,81%
Institusi Domestik						
Perseroan Terbatas	53	12.487.201.590	62,21%	73	13.163.594.263	65,58%
Reksadana	199	852.353.988	4,25%	162	492.390.077	2,45%
Asuransi	153	861.048.400	4,29%	137	636.411.500	3,17%
Yayasan	58	191.999.500	0,96%	59	272.246.100	1,36%
Koperasi & Lain-lain	1	25.000	0,00%	0	0	0,00%
Sub-Jumlah Institusi Domestik	464	14.392.628.478	71,71%	431	14.564.641.940	72,56%
Jumlah Pemodal Domestik	13.891	15.239.262.661	75,92%	25.247	15.529.942.523	77,37%
Pemodal Asing						
Perorangan	78	33.048.400	0,16%	77	10.684.100	0,05%
Institusi Asing						
Badan Usaha	326	4.801.163.539	23,92%	304	4.532.847.977	22,58%
Jumlah Pemodal Asing	404	4.834.211.939	24,08%	381	4.543.532.077	22,63%
Jumlah	**14.295**	**20.073.474.600**	**100,00%**	**25.628**	**20.073.474.600**	**100,00%**

Persentase Kepemilikan Saham AKR Berdasarkan Status

Pemilik Saham	2020	2021	2022	2023	2024
Ritel Domestik	6,34	4,45	3,77	4,22	4,81
Institusi Domestik	72,95	68,57	72,77	75,92	72,56
Ritel Asing	0,26	0,18	0,18	0,16	0,05
Institusi Asing	20,45	26,81	27,23	24,08	22,63

Persentase Pemegang Saham Domestik

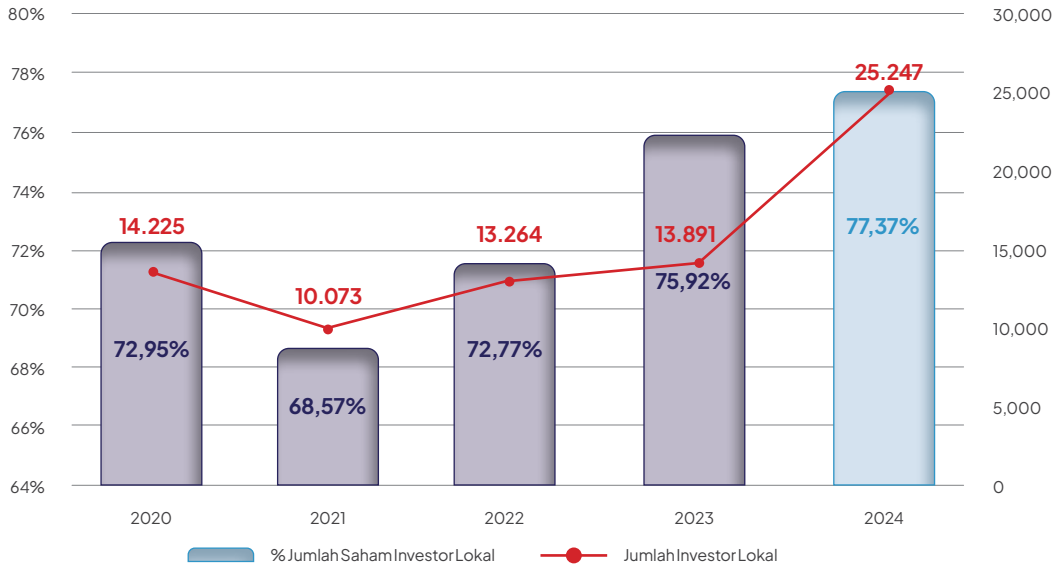

Informasi *Stock Split*

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 November 2021, AKR meminta persetujuan pemecahan saham AKRA dengan perbandingan 1:5. Lalu, persetujuan bulat atas *stock split* 1:5 tersebut berdasarkan pada RUPSLB tanggal 20 Desember 2021 dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Setelah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB, Perseroan mengajukan permohonan pencatatan saham pada tanggal 24 Desember 2021, dan berlaku efektif pada 12 Januari 2022. Pasca *stock split*, nilai nominal AKRA menjadi Rp20/saham dari sebelumnya sebesar Rp100/saham. Jumlah saham AKRA bertambah menjadi 20.073.474.600 saham dari 4.014.694.920 saham.

Kepemilikan Saham Langsung Dewan Komisaris dan Direksi

No	Pemegang Saham	Jabatan	1 Januari 2024		31 Desember 2024	
			Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Dewan Komisaris						
1	Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	100.604.800	0,50%	101.604.800	0,51%
2	Sofyan A. Djalil	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

No	Pemegang Saham	Jabatan	1 Januari 2024		31 Desember 2024	
			Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Direksi						
4	Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	203.604.600	1,01%	205.604.600	1,02%
5	Jimmy Tandyo	Direktur	37.500.000	0,19%	39.000.000	0,19%
6	Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	3.780.000	0,02%	4.780.000	0,02%
7	Mery Sofi	Direktur	603.000	0,003%	2.303.000	0,011%
8	Suresh Vembu	Direktur	3.627.500	0,02%	3.727.500	0,02%
9	Nery Polim	Direktur	450.000	0,002%	1.050.000	0,005%
10	Termurti Tiban	Direktur	50.000	0,0002%	450.000	0,0022%
Jumlah			**350.219.900**	**1,74%**	**358.519.900**	**1,79%**

Profil Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Nama Perusahaan

PT Arthakencana Rayatama (AKRT)

Riwayat Singkat

PT Arthakencana Rayatama (AKRT) adalah entitas induk Perseroan yang memegang kepemilikan 63,61% saham Perseroan. AKRT didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas AKRT No. 297 tanggal 23 November 1992, yang dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2–10481.HT.01.01.Th.92 tanggal 26 Desember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 51 tanggal 25 Juni 1993, Tambahan Berita Negara No. 2860/1993.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AKRT No. 23 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. 0088097.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 April 2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar AKRT yang termuat dalam Akta No. 23 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, ruang lingkup kegiatan usaha AKRT meliputi Aktivitas Perusahaan Holding; Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas serta Produk Terkait; Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia; Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya; Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi; Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum dan Barang Khusus, serta Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Sungai, dan Danau; Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi untuk Mobil, Bus, Truk, Sejenisnya, serta Alat Transportasi Udara; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; serta *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.

Kepengurusan	**Dewan Komisaris**		**Direktur**	
	Presiden Komisaris	: Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Direktur	: Haryanto Adikoesoemo
	Komisaris	: Yuwono Ongkowijoyo	Direktur	: Jimmy Tandyo
	Komisaris	: Irawati Adikoesoemo	Direktur	: Cynthia Theresia Buniardi
	Komisaris	: Sintawati Ongkowijoyo		

Alamat Perusahaan

AKR Tower Lantai 26,
Jl. Panjang No 5, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat 11530,
Telp: 021 5311110

Struktur Kepemilikan per 31 Desember 2024

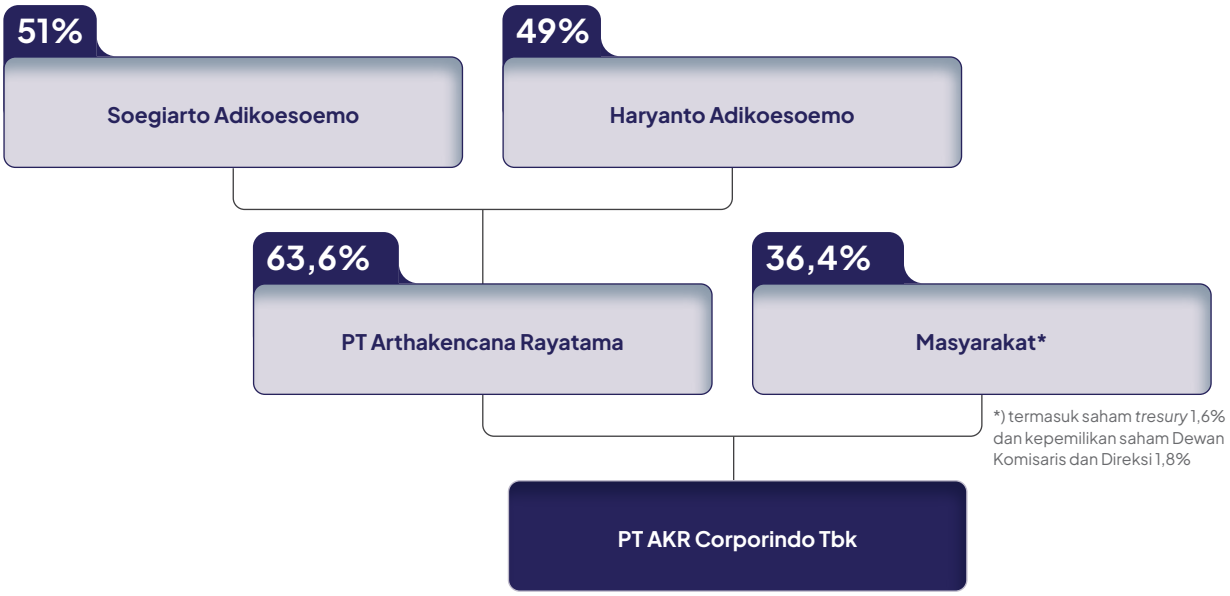

Kronologis Pencatatan Saham

AKR resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994. Kronologi pencatatan saham Perseroan hingga 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tanggal	Aksi Korporasi	Nominal/ Saham (Rp)	Tambahan Saham yang Diterbitkan	Jumlah Saham Beredar	Pencatatan
3 Oktober 1994	Penawaran Umum Perdana Saham @ Rp1.000	1.000	15.000.000	65.000.000	Bursa Efek Indonesia
27 Februari 1996	Saham Bonus 6 : 10	1.000	39.000.000	104.000.000	Bursa Efek Indonesia
25 September 1996	Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 : 1	500	104.000.000	208.000.000	Bursa Efek Indonesia
1 Oktober 2004	Penawaran Umum Terbatas 1 : 2 @ Rp500	500	416.000.000	624.000.000	Bursa Efek Indonesia
27 Juli 2007	Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 : 5	100	2.496.000.000	3.120.000.000	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2008	Konversi MSOP 2007 Tahap I	100	5.400.000	3.125.400.000	Bursa Efek Indonesia
Oktober 2009	Konversi MSOP 2007 Tahap I dan II	100	12.892.500	3.138.292.500	Bursa Efek Indonesia
29 Januari 2010	Penawaran Umum Terbatas II 1 : 5 @ Rp860	100	627.658.500	3.765.951.000	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2010	Konversi MSOP 2007 Tahap I, II, dan III	100	26.985.000	3.792.936.000	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2011	Konversi MSOP 2007 Tahap II, III, dan IV	100	29.050.000	3.821.986.000	Bursa Efek Indonesia
April 2012	Konversi MSOP 2007 Tahap III, IV, dan V	100	29.457.500	3.851.443.500	Bursa Efek Indonesia
April 2013	Konversi MSOP 2007 Tahap IV dan V; dan Konversi MSOP 2011 Tahap I	100	29.284.000	3.880.727.500	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2014	Konversi MSOP 2007 Tahap V; dan Konversi MSOP 2011 Tahap I dan II	100	32.910.174	3.913.637.674	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2015	Konversi MSOP 2011 Tahap I dan II, dan Konversi MSOP 2014	100	35.392.561	3.949.030.235	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2016	Konversi MSOP 2011 Tahap II, Konversi MSOP 2014 dan Konversi MSOP 2015	100	42.750.935	3.991.781.170	Bursa Efek Indonesia
April dan Oktober 2017	Konversi MSOP MSOP Plan I (2015) Atas Program MSOP 2015 dan Konversi MSOP Plan II (2016) Atas Program MSOP 2015	100	14.548.250	4.006.329.420	Bursa Efek Indonesia

Tanggal	Aksi Korporasi	Nominal/ Saham (Rp)	Tambahan Saham yang Diterbitkan	Jumlah Saham Beredar	Pencatatan
April 2018	Konversi MSOP MSOP Plan I (2015) Atas Program MSOP 2015, Konversi MSOP Plan II (2016) Atas Program MSOP 2015 dan Konversi MSOP Plan III (2017) Atas Program MSOP 2015	100	8.365.500	4.014.694.920	Bursa Efek Indonesia
2019	Tidak ada aksi korporasi sepanjang tahun 2019	100	0	4.014.694.920	Bursa Efek Indonesia
16 Maret 2020 - 12 Juni 2020	Pembelian Kembali Saham		(67.261.000)	4.014.694.920	Bursa Efek Indonesia
12 Januari 2022	Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 : 5	100		20.073.474.600	Bursa Efek Indonesia
1 Agustus 2024	Konversi MSOP Plan I (2024)	499	15.650.000	20.073.474.600	Bursa Efek Indonesia

Informasi tentang Sukuk dan Obligasi Konversi

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan tidak menerbitkan sukuk dan obligasi konversi. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*) tidak diungkapkan dalam laporan tahunan ini.

Struktur Grup Perusahaan

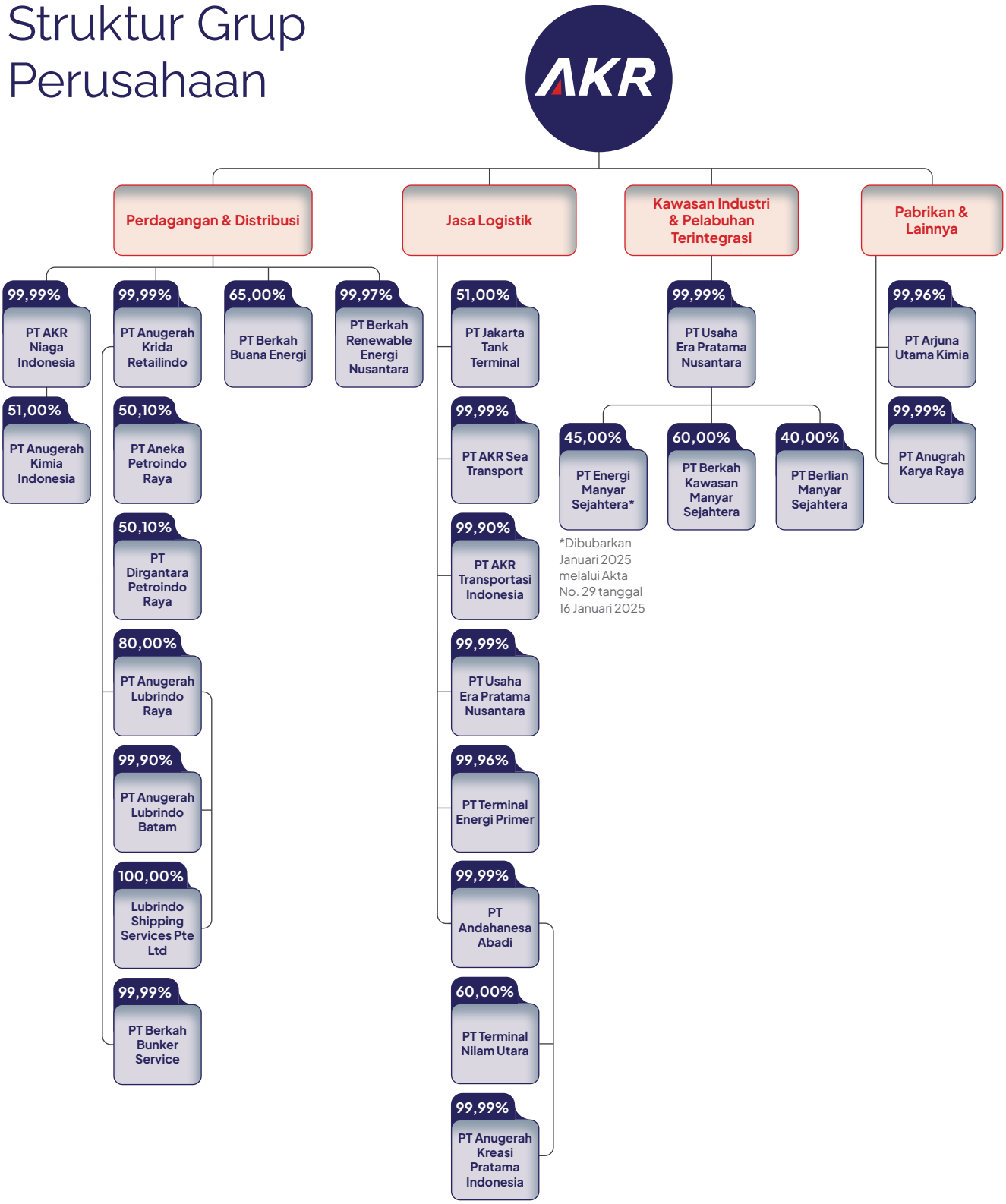

*Dibubarkan Januari 2025 melalui Akta No. 29 tanggal 16 Januari 2025

Our Joint Venture

- PT Anugerah Kimia Indonesia
- PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
- PT Berlian Manyar Sejahtera
- PT Aneka Petro Indo Raya
- PT Dirgantara Petroindo Raya
- PT Jakarta Tank Terminal

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Entitas Anak	Bidang Usaha	Alamat	% Kepemilikan AKR	Status Operasi	Tahun Mulai Operasi	Tahun Penyertaan Modal	Total Aset (Rp Juta)
Kepemilikan Langsung							
PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN)	Jasa Logistik bongkar muat barang dari dan ke kapal	Surabaya, Jawa Timur	99,99	Beroperasi	2000	2000	12.171.806
PT Andahanesa Abadi (Andahanesa)	Jasa Logistik	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99	Beroperasi	1982	2007/1982	612.297
PT Arjuna Utama Kimia (Aruki)	Pabrikan Bahan Perekat	Surabaya, Jawa Timur	99,96	Beroperasi	1976	1996/1976	377.797
PT Anugrah Karya Raya (Anugrah)	Pertambangan dan Perdagangan Batu Bara	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99	Beroperasi	2011	2009	756
PT Jakarta Tank Terminal (JTT)	Terminal Tangki Penyimpanan (pengelolaan dan penyewaan tangki penyimpanan BBM termasuk turunannya)	Jakarta Utara, DKI Jakarta	51,00	Beroperasi	2010	2005	1.179.575
PT AKR Sea Transport (AST)	Pelayaran Domestik (jasa transportasi laut)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99	Beroperasi	2013	2011	867.263
PT AKR Niaga Indonesia (ANI)	Perdagangan Kimia Dasar	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,90	Beroperasi	2013	2012	79.595
PT AKR Transportasi Indonesia (ATI)	Jasa Logistik (jasa transportasi darat)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,90	Beroperasi	2013	2013	255.182
PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA)	Perdagangan Umum	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99	Beroperasi	2018	2016	2.107.729
PT Berkah Buana Energi (BBE)	Perdagangan & Distribusi Gas	Jakarta Barat, DKI Jakarta	65,00	Belum Beroperasi	-	2021	54.898
PT Berkah Renewable Energi Nusantara (BREN)	Pembangkitan, Pengoperasian, Konstruksi dan Instalasi Tenaga Listrik	Gresik, Jawa Timur	99,97	Belum Beroperasi	-	2024	30.914
PT Terminal Energi Primer	Jasa Logistik Energi	Gresik, Jawa Timur	99,99	Belum Beroperasi	-	2024	25.083
Chemical Petroleum International Trading PTE. LTD	Perdagangan Kimia Dasar dan BBM	Singapura	100	Beroperasi	2024	2024	84.000

Entitas Anak	Bidang Usaha	Alamat	% Kepemilikan AKR	Status Operasi	Tahun Mulai Operasi	Tahun Penyertaan Modal	Total Aset (Rp Juta)
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN)							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)	Kawasan Industri	Gresik, Jawa Timur	60,00	Beroperasi	2015	2012	11.671.519
PT Berlian Manyar Sejahtera	Kawasan Pelabuhan	Gresik, Jawa Timur	40,00	Beroperasi	2015	2002	1.909.184
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Andahanesa Abadi							
PT Terminal Nilam Utara (TNU)	Jasa Logistik	Surabaya, Jawa Timur	60,00	Beroperasi	2018	2013	373.079
PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia (AKPI)	Pergudangan dan Penyimpanan	Gresik, Jawa Timur	99,99	Belum Beroperasi	-	2023	232.826
PT Krida Jasa Utama (KJU)	Jasa Logistik	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,80	Belum Beroperasi	-	-	459
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA)							
PT Aneka Petroindo Raya (APR)	Perdagangan (Pemasaran BBM Ritel)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	50,10	Beroperasi	2018	2017	1.912.311
PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR)	Perdagangan (Pelayanan Jasa terkait Bandar Udara di Indonesia)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	50,10	Beroperasi	2019	2017	75.481
PT Anugerah Lubrindo Raya (ALR)	Perdagangan (Pemasaran Minyak Pelumas)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	80,00	Beroperasi	2019	2019	98.335
PT Berkah Bunker Service (BBS)	Pelayanan Kepelabuhan Laut	Jakarta Utara, DKI Jakarta	99,99	Belum Beroperasi	-	-	20.060
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Anugerah Lubrindo Raya (ALR)							
PT Anugerah Lubrindo Batam (ALB)	Perdagangan (Pemasaran Minyak Pelumas)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,90	Beroperasi	2019	2019	4.313
Lubrindo Shipping Services Pte, Ltd (LSS)	Perdagangan Umum (Pemasaran Minyak Pelumas)	Singapura	100	Beroperasi	2019	2019	7.915
Melalui PT AKR Niaga Indonesia							
PT Anugerah Kimia Indonesia (AKI)	Perdagangan Besar Barang dan Bahan Kimia Dasar	Jakarta Barat, DKI Jakarta	51,00	Beroperasi	2021	2020	78.527

Kantor Akuntan Publik

Untuk Tahun Buku 2024, AKR menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai pihak eksternal independen untuk memberikan opini atas kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan aturan OJK No. 13/OJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2024 yang berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam melaksanakan audit, KAP yang ditunjuk wajib bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan untuk memastikan independensi dan kualitas hasil audit. KAP bertanggung jawab memberikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perseroan terhadap SAK yang berlaku umum.

Mekanisme Penunjukkan Akuntan Publik

Mekanisme penunjukan Akuntan Publik yang diimplementasikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik.
2. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dilaporkan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Dewan Komisaris mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS Tahun 2024 untuk mendapatkan persetujuan.

KAP dan Akuntan Publik Selama 5 Tahun Terakhir

KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penunjukan ini ditetapkan melalui Keputusan RUPS Tahunan No. 17 tanggal 29 April 2024 terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024. Informasi mengenai KAP dan Akuntan Publik selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Biaya
2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Benyanto Suherman	Rp1.700.000.000
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Benyanto Suherman	Rp1.460.000.000
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Feniwati Chendana, CPA	Rp1.390.000.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Feniwati Chendana, CPA	Rp1.390.000.000
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Feniwati Chendana, CPA	Rp1.390.000.000

Jasa Lain yang Diberikan

Pada periode Tahun Buku 2024, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja juga memberikan jasa prosedur yang disepakati terkait Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank (Laporan KPPK). Biaya yang dikeluarkan untuk jasa ini adalah sebesar Rp190 juta.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Nama Lembaga/ Profesi	Alamat	Jasa yang Diberikan	Periode Penugasan
Biro Administrasi Efek			
PT Raya Saham Registra	Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48 Jakarta 12930 021–2525666 021–2525028 usi@registra.co.id www.registra.co.id	Jasa Administrasi Saham	2024
Wali Amanat			
PT Bank Mega Tbk Capital Market Services (CAMS)	Bank Mega Lt. 16, Jl. Kapten P. Tendean No.12–14A Jakarta 021–2525666 021–79175000 021–7990720 waliamanat@bankmega.com www.bankmega.com	Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017	2017–2024
Pemeringkat Efek			
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Panin Tower Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora Jakarta Pusat 12220 021–72782380 021–7278–2370 www.pefindo.com	Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017	2024
Konsultan Hukum			
Makes & Partners Law Firm	Menara Batavia 7th Floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220, Indonesia 021–574–7181 021–574–7180 makes@makeslaw.com www.makeslaw.com	Jasa konsultasi Hukum	2024
Notaris			
Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn	Menara Sudirman Lt. 18, Jl Jend Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 021 - 5204778	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan AKR 2024	2024
Informasi Perdagangan Saham dan Efek			
PT Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower Jl. Jend. Sudirman Kav 52–53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia 0800–100–9000 (Free)	Pencatatan Saham	2024


2
BIO SOLAR
RON
KAMI ADA UNTUK ANDA

Situs Web Perusahaan

AKR memiliki situs web yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan di alamat www.akr.co.id. Keberadaan situs web ini merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan terhadap keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Situs web Perseroan senantiasa ditingkatkan dari segi kualitas maupun fungsinya dalam rangka mempermudah akses informasi bagi pemangku kepentingan. Perseroan secara berkala memperbarui situs web tersebut agar seluruh pihak dapat mengakses informasi terkini mengenai Perseroan dan produknya. Informasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan tujuan yang jelas dan mencakup berbagai hal terkait Perseroan, antara lain:

1. Informasi/Profil Perusahaan
   - Sejarah Perusahaan
   - Struktur Bisnis
   - Profil Dewan Komisaris dan Direksi
   - Nilai Perusahaan
   - Informasi Auditor
   - Profil Komite Audit

2. Bisnis Utama
   - Perdagangan & Distribusi Bahan Kimia Dasar
   - Perdagangan dan Distribusi BBM Industri
   - Pelumas
   - Logistik
   - JIIPE

3. Investor
   - Kontak Investor
   - Informasi Stok
   - Informasi Pemegang Saham
   - Informasi Dividen
   - Kalender Acara
   - Laporan Tahunan
   - Laporan Keberlanjutan
   - Laporan Keuangan Triwulan
   - Presentasi Perusahaan
   - Berita terbaru mengenai AKR
   - Public Expose
   - Daftar Jangkauan dan Rekomendasi Analis
   - Keterbukaan informasi terkait pemegang saham, RUPS, dan RUPSLB

4. GCG
   - Laporan Tata Kelola Perusahaan
   - Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
   - Kebijakan Perusahaan
   - Sekretaris Perusahaan
   - Komite Audit
   - Internal Audit
   - Anggaran Dasar
   - Piagam Komite Audit
   - Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
   - Piagam Internal Audit
   - Kode Etik
   - Kebijakan Perusahaan (Manajemen Risiko, Anti Korupsi, Seleksi Pemasok, dan Hak-Hak Kreditur)
   - ASEAN Corporate Governance Scorecard
   - *Whistleblowing System*

5. ESG (Environmental, Social, and Governance)
6. Penghargaan
7. *Microsite HR Department*
8. *Microsite Retail*

Situs web ini juga menyajikan berbagai informasi lainnya yang relevan untuk mendukung kebutuhan pemangku kepentingan.

WWW.AKR.CO.ID



Uraian	Ketersediaan di Website AKR	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Tersedia	https://www.akr.co.id/shareholding-information
Struktur Grup Perusahaan	Tersedia	https://www.akr.co.id/business-structure
Isi Kode Etik	Tersedia	https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/code-of-conduct-2
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Tersedia	https://www.akr.co.id/shareholders-agm-eogm
Laporan Keuangan Tahunan	Tersedia	https://www.akr.co.id/quarterly-financial-report
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Tersedia	https://www.akr.co.id/board-of-commissioners-directors
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal	Tersedia	https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/audit-committee-charter https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/nomination-remuneration-charter https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/internal-audit-charter
Whistleblowing system	Tersedia	https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/ whistleblowing-system-anti-corruption-policy https://wbs.akr.co.id/

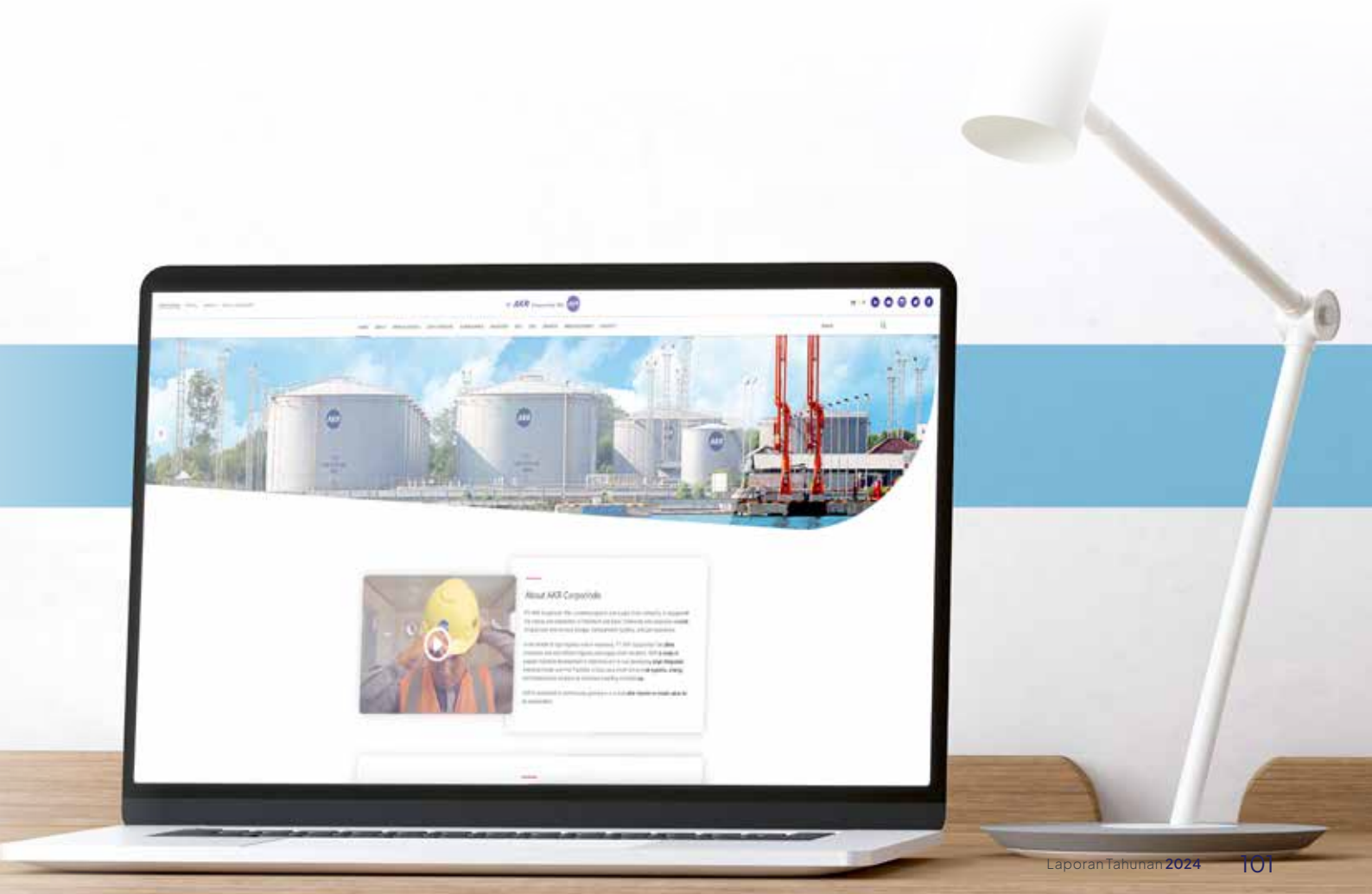

Wilayah Operasional dan Daftar Alamat Kantor



Kantor Pusat

PT AKR Corporindo Tbk
AKR Tower Lt 26
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia
Telp : +62 21 531 1110
Fax : +62 21 531 1388, 531 1185

Kantor Cabang/Perwakilan

West Region

BANDUNG
Kawasan Industri Cimareme V No. 5 Ngamprah,
Bandung Barat 40553, Indonesia
Telp : +62 22 686 5000
Fax : +62 22 686 4649

CIWANDAN
Jl. Pelindo II Ciwandan
Cilegon Banten
Telp : +62 254 602088/87/131
Fax : +62 251 602130, 602132

LAMPUNG
Jl. Sumatera, Komplek Pelindo II
Panjang Bandar Lampung 35241, Indonesia
Telp : +62 721 343100, 341650
Fax : +62 721 343333

MEDAN
Jl. Road 3 Gabion (Samping Semen Padang)
Medan Belawan, 20414
Telp : 061-6945001

PALEMBANG
Jl. Belabak 36A/ 3 Ilir
Palembang 30116, Indonesia
Telp : +62 711 717636, 717644, 717645
Fax : +62 711 710072

PONTIANAK
Jl Raya Wajok Hilir km 16, Desa Wajok Hilir
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kalimantan Barat, 78111
Telp : 0561-763771

East Region

BALI
Jl. Ikan Tuna 1, Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Bali, Indonesia
Telp : +62 361 720743
Fax : +62 361 720563

BALIKPAPAN
Gedung BRI Lt.5,
Jl. Jend. Sudirman No.37, Balikpapan,
Kalimantan Timur 76112, Indonesia
Telp : +62 542 736771

BANJARMASIN
Pelabuhan Martapura Baru Trisakti,
Kawasan Pelindo Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70119, Indonesia
Telp : +62 511 442 3279
Fax : +62 511 442 3289

MANADO dan Sekitarnya
Grand Kawanua Novotel Manado Lt III,
Jl. AA Maramis - Kayuwatu / Kairagi II Manado 95254,
Sulawesi Utara
Telp : +62 431 818 911-12

SURABAYA
Jl. Sumatera No. 51-53
Surabaya 60281, Indonesia
Telp : +62 31 503 4871/72
Fax : +62 31 328 4726

MOROWALI
Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahomotefe
Kecamatan Bungku Timur, Morowali, Sulawesi Tengah, 94973



Terminal/Transportasi/Gudang

TANJUNG PRIOK
Jl. Aceh, Pelabuhan Tanjung Priok,
Pos E Samping PT. Bimoli, Jakarta Utara, Indonesia
Telp : +62 21 4372318
Fax : +62 21 43930017

MARUNDA 1
Jl. Ambon Blok A1 No. 5,6,7
KBN Marunda Jakarta Utara, Indonesia
Telp : +62 21 440 6569, 440 6570
Fax : +62 21 440 6571

MARUNDA 2
Jl Semarang Blok A6 No. 2
KBN Marunda, Jakarta Utara, Indonesia
Telp : +62 21 441 5979, 441 5977

NILAM TIMUR
Terminal AKR I
Jl. Nilam Timur, No. 21, Surabaya, Indonesia
Telp : +62 31 328 2965, 329 1979
Fax : +62 31 329 1977

NILAM UTARA
Terminal AKR II
Jl. Nilam Utara, No.2, Surabaya, Indonesia
Telp : +62 31 329 5008, 3292 252
Fax : +62 31 329 2252

PALARAN
Terminal AKR II
JL Trikora RT 25, Jembatan Kuning,
Kelurahan Handil Bakti, Palaran, Samarinda,
Kalimantan Timur, Indonesia
Telp : +62 541 6522 204, 6522 544

STAGEN
JL Raya Stagen
Komplek PELINDO III - Stagen Pulau Laut Utara - Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan - 72151, Indonesia
Telp : +62 518 607 2372

SURABAYA
Jl. Margomulyo 44
Pergudangan Suri Mulia Kav. A6–8, Surabaya, Indonesia
Telp : +62 31 749 1041
Fax : +62 31 749 1045, 748 2241

BITUNG
Jl. Wolter Monginsidi KM 4
Kelurahan Paceda, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia
Telp : +62 438 2230734, 2230733

SEMARANG
Grand Kawanua Novotel Manado Lt III,
Jl. AA Maramis - Kayuwatu / Kairagi II Manado 95254,
Sulawesi Utara
Telp : +62 431 818 911–12

MEDAN
Jl. Anggada 1, Pelabuhan Ujung
Baru Belawan, Medan 20411, Indonesia
Telp : +62 61 694 4091
Fax : +62 61 649 4268





PT AKR Corporindo Tbk

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Ekonomi dan Industri

Analisis Ekonomi Global dan Nasional

Pada tahun 2024, perekonomian global menunjukkan pertumbuhan yang moderat sebesar 3,2%, sejalan dengan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) dalam Laporan World Economic Outlook periode Januari 2025, yang tidak mengalami perubahan sejak Juli 2024. Meskipun inflasi global mengalami tren penurunan, diperkirakan mencapai 4.4% pada tahun 2024 dan 4,2% pada 2025, pemulihan ekonomi tetap menghadapi tantangan signifikan. Ketidakpastian geopolitik, meningkatnya proteksionisme, serta tingginya tingkat utang publik menjadi faktor utama yang menekan laju pertumbuhan.

Proyeksi Pertumbuhan Update Januari 2025

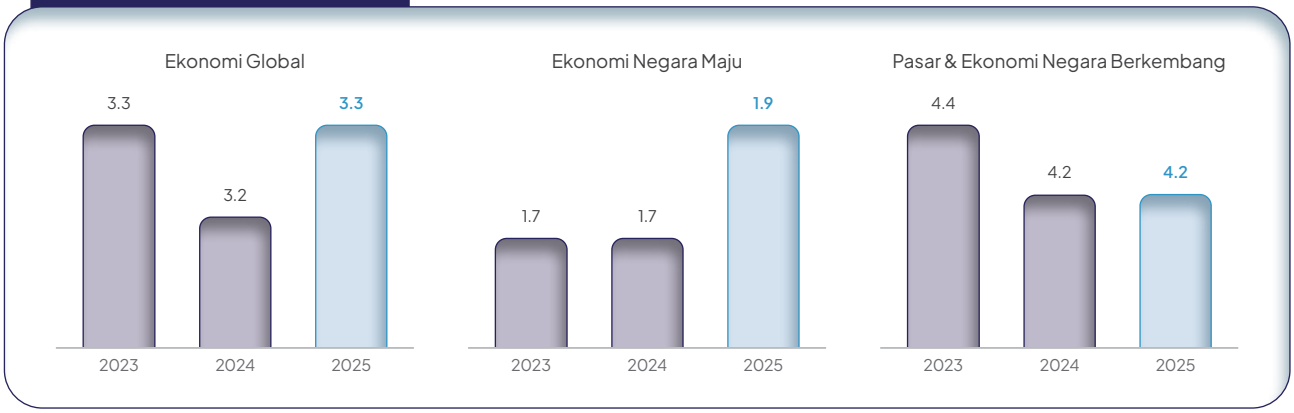

Ketengangan geopolitik yang meningkat, termasuk konflik dan risiko politik di berbagai belahan dunia, berdampak negatif pada stabilitas pasar global dan arus perdagangan internasional. Selain itu, terjadi peningkatan kebijakan di sejumlah negara seperti pembatasan perdagangan dan investasi, menghambat rantai pasok global dan mengurangi efisiensi ekonomi. IMF memperingatkan risiko jangka panjang terkait potensi stagnasi ekonomi akibat jalur pertumbuhan yang rendah dan beban utang yang tinggi, yang dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di berbagai negara.

Meskipun menghadapi ketidakpastian dalam dinamika ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dalam kisaran 4.95% - 5.11%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5% pada tahun 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif didorong oleh peningkatan investasi pada triwulan IV 2024, seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) serta investasi swasta yang mendapat dukungan insentif dari pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diproyeksikan tumbuh positif, didorong oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang stabil di angka 127,7, dengan Indeks Kondisi Ekonomi mencapai 116,0 dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 139,5.

Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan lonjakan aktivitas pengeluaran pada akhir tahun. Namun, ekspor non-migas diprediksi mengalami perlambatan, seiring dengan pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung dan belum sepenuhnya menguat.

Analisis Industri dan Posisi Perusahaan dalam Industri

Fluktuasi harga minyak global pada tahun 2024 terus menjadi faktor utama yang memengaruhi industri distribusi BBM di Indonesia. Di tengah upaya negara-negara produsen minyak yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya (OPEC+) untuk menstabilkan pasar dengan kebijakan pemangkasan produksi, harga minyak dunia mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan perubahan permintaan global.

Pada triwulan I tahun 2024, Pemerintah Indonesia menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD80,33 per barel, meningkat dibandingkan dengan Desember 2023. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global dan gangguan suplai akibat risiko geopolitik yang berlanjut di kawasan Laut Merah. Sebagai perbandingan, harga minyak jenis *Dated Brent* pada periode yang sama tercatat sebesar USD80,23 per barel.

Ketegangan di Timur Tengah, yang berlangsung hingga Juli 2024, berkontribusi pada kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini semakin dipengaruhi oleh kebijakan moneter AS, di mana suku bunga yang lebih rendah menyebabkan tekanan inflasi, yang mendorong kenaikan harga komoditas energi. Akibatnya, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) mencapai USD 80,54 per barel. Namun, dari Agustus hingga Desember 2024, harga minyak mentah mulai mengalami penurunan, sebagian disebabkan oleh pelambatan ekonomi di China yang mengurangi permintaan minyak global.

AKR mengimpor BBM dari kilang internasional dan penyedia berdasarkan kebutuhan pasar seraya mengelola risiko harga. Alih-alih mengambil posisi langsung terhadap harga minyak global, Perseroan mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS), yang membantu mengurangi dampak volatilitas harga yang disebabkan oleh konflik geopolitik, kebijakan OPEC+, dan gangguan pasar lainnya. Strategi ini memungkinkan AKR untuk menjaga kestabilan harga bahan bakar bagi pelanggan.

Di dalam negeri, Pemerintah Indonesia semakin mendorong transisi energi dengan meningkatkan mandatori biodiesel dari B35 menjadi B40 untuk masa mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil serta menekan impor minyak mentah, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Sebagai pelaku utama dalam distribusi energi, AKR turut mendukung implementasi program ini dengan memastikan kesiapan infrastruktur serta rantai pasok yang andal dalam mendistribusikan biodiesel ke berbagai sektor industri dan transportasi.

Dengan infrastruktur logistik yang kuat, strategi diversifikasi bisnis, dan keterlibatan dalam pengembangan energi bersih serta kawasan industri, AKR berada dalam posisi yang solid di tengah tantangan industri distribusi BBM, bahan kimia, dan logistik pada tahun 2024. Fleksibilitas dalam adaptasi terhadap dinamika pasar dan kebijakan pemerintah menjadikan Perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam industri logistik dan *supply chain* di Indonesia.

Tinjauan Operasional

Segmen Bisnis yang Dilayani Perseroan

Hingga saat ini, Perseroan dan Entitas Anak Usaha mengelola 4 (empat) segmen operasi, diantaranya:

1. **Perdagangan dan Distribusi**
   Perseroan mendistribusikan produk BBM dan beragam jenis bahan kimia dasar, termasuk *caustic soda*, *sodium sulfat*, PVC resin, dan *soda ash*.
2. **Jasa & Logistik**
   Perseroan menyediakan beragam jasa logistik seperti penyewaan tangki penyimpanan dan gudang, jasa pengepakan, bongkar muat dan jasa transportasi, terutama untuk produk-produk kimia cair dan padat di Indonesia serta produk BBM.
3. **Pabrikan**
   Perseroan memproduksi bahan perekat oleh Entitas Anak, yakni Aruki.
4. **Kawasan Industri**
   Kawasan industri yang merupakan segmen Kelompok Usaha di bawah BMKS, Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui UEPN. Kawasan ini merupakan bagian dari proyek JIIPE yang dikembangkan oleh AKR Corporindo dan Pelindo melalui Entitas Anak Usaha UEPN dan BJTI.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Operasi Terhadap Penjualan dan Pendapatan Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Persentase (%)
Perdagangan dan Distribusi	35.532	92%	38.213	91%	(2.680)	-7%
Jasa Logistik	1.165	3%	994	2%	171	17%
Pabrikan	652	2%	558	1%	94	17%
Kawasan Industri	1.381	4%	2.323	6%	(942)	-41%
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Konsolidasian	**38.729**	**100%**	**42.087**	**100%**	**(3.357)**	**-8%**

Hingga akhir tahun 2024, segmen perdagangan dan distribusi tetap menjadi pilar utama pendapatan Perseroan, dengan kontribusi sebesar 92%, meningkat 1% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 91%. Kinerja segmen ini pada tahun 2024 dipengaruhi oleh normalisasi harga jual rata-rata dan kondisi ekonomi makro. Volume penjualan BBM dan kimia dasar tetap stabil, yang menunjukkan ketahanan Perseroan.

Segmen kawasan industri menyumbang 4% dari total pendapatan, turun dari 6% di tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan sebesar 41%, segmen ini tetap memberikan kontribusi positif berkat strategi pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Dengan prospek permintaan lahan yang masih kuat dan strategi pemasaran yang proaktif, Perseroan optimistis terhadap pertumbuhan segmen ini di masa depan.

Segmen jasa logistik menyumbang 3% dari total pendapatan, meningkat dari 2% pada tahun 2023. Pendapatan dari segmen ini tumbuh 17%, dengan kontribusi yang meningkat terutama karena berkurangnya pendapatan dari segmen lain. Segmen jasa logistik mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya volume produk yang didistribusikan. Namun, peningkatan kontribusi segmen ini didorong oleh naiknya volume distribusi pada periode tertentu serta peningkatan pendapatan dari jasa penyimpanan.

Sementara itu, pabrikan mengalami peningkatan kontribusi dari 1% menjadi 2%, dengan pertumbuhan pendapatan 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan permintaan terhadap produk manufaktur.

Kinerja Masing-Masing Segmen Bisnis

Perdagangan dan Distribusi

Segmen bisnis perdagangan dan distribusi di AKR berfokus pada penjualan dan pendistribusian 2 (dua) produk utama, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar, yang didistribusikan ke berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, pertambangan, energi, transportasi, serta sektor lainnya yang membutuhkan pasokan bahan bakar dan bahan kimia dalam operasionalnya.

Pendapatan Masing-Masing Produk Segmen Perdagangan & Distribusi | dalam Miliar Rupiah



Bahan Bakar Minyak

Perseroan berfokus pada sektor distribusi BBM dan tidak menjalankan aktivitas produksi. Oleh karena itu, tidak terdapat data mengenai proses maupun kapasitas produksi yang dapat dilaporkan.

Pendistribusian bahan bakar secara umum terbagi menjadi:
1. Biodiesel non-subsidi dan produk BBM lainnya untuk pelanggan industri;
2. Biodiesel bersubsidi untuk pelanggan ritel dengan kuota yang dialokasikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
3. BBM nonsubsidi dan pelayaan non-bbm untuk pelanggan ritel; dan
4. Bahan bakar penerbangan.

Menyesuaikan dengan kebutuhan distribusi produk BBM di Indonesia, Perseroan telah mengembangkan model bisnis yang kokoh dengan mekanisme yang efisien dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik. Fluktuasi harga minyak dunia serta nilai tukar mata uang dikelola secara strategis agar dapat disesuaikan dan ditransfer kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko berbasis prinsip kehati-hatian, termasuk strategi pengelolaan *net open position* yang efektif guna meminimalkan dampak volatilitas pasar terhadap kinerja keuangan.

Perseroan memastikan pasokan produk esensial BBM didistribusikan secara tepat waktu dan efisien kepada pelanggan industri di seluruh kepulauan Indonesia. Keberhasilan distribusi ini didukung oleh jaringan logistik yang kuat serta rantai pasokan yang terintegrasi, mencakup pelabuhan, terminal penyimpanan, dan sistem transportasi yang modern. Selain itu, penerapan teknologi monitoring berbasis Teknologi Informasi memungkinkan pengelolaan distribusi yang lebih akurat dan responsif, menjadikan sistem logistik Perseroan semakin andal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pemanfaatan bahan bakar berbasis energi bersih dalam program B35 melalui biodiesel terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi produksi biodiesel tahun 2024 mampu menghemat devisa sebesar USD9,33 miliar atau Rp147,5 triliun, dan menyerap tenaga kerja lebih dari 14 ribu orang (off-farm) dan 1,95 juta orang (on-farm).

AKR menjalankan mandat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai agen dalam Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (P3JBT), sekaligus mendukung kebijakan pencampuran biodiesel yang dicanangkan pemerintah. Melalui peran ini, AKR berkomitmen memastikan distribusi biodiesel yang efisien dan tepat sasaran guna mendukung ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Proses distribusi tersebut didukung oleh jaringan outlet dengan sistem teknologi yang memungkinkan pemantauan produk secara *real-time* dari tangki penyimpanan atau *nozzle* dispenser hingga ke pelanggan. Selain itu, sistem pemantauan digital diterapkan untuk mengontrol dan memastikan distribusi solar bersubsidi tepat sasaran, sehingga dapat menjangkau target konsumen secara efisien dan transparan.

Ke depan, program mandatori biodiesel akan terus diperluas hingga B40 dan seterusnya, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel dengan rasio pencampuran yang terus meningkat, guna mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam pengembangan jaringan BBM ritel non-subsidi, Perseroan berkerja sama dengan bp Global melalui pembentukan *Joint Venture* (JV). Per 31 Desember 2024, JV telah membuka 15 gerai baru, sehingga terdapat 61 SPBU yang berlokasi di Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Malang, dan *Toll Rest Area*.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap penghapusan BBM beroktan rendah guna mencapai target *Net-Zero Emission*. Kebijakan ini mendorong peralihan konsumen di Indonesia ke produk bahan bakar dengan spesifikasi lebih tinggi. Sejalan dengan perubahan pasar tersebut, melalui JV, AKR menghadirkan bahan bakar berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Selain menyediakan BBM, gerai ritel AKR juga menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih unggul dengan menghadirkan berbagai layanan non-BBM, seperti minuman, mini market, serta fasilitas perawatan ringan kendaraan, dilengkapi dengan area parkir yang nyaman dan memadai.

Penjualan Bahan Bakar Minyak
dalam Miliar Rupiah



Penjualan BBM sepanjang tahun 2024 mencapai Rp28.934 miliar, mengalami penurunan sebesar 9% dari Rp31.869 miliar pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga acuan dasar produk petroleum.

Kimia Dasar

Kegiatan usaha Perseroan di segmen kimia dasar terbatas pada pendistribusian, sehingga tidak terdapat data terkait proses produksi maupun kapasitas produksi yang dapat disajikan. Perseroan berperan sebagai distributor utama bagi produsen kimia dasar internasional di Indonesia, memastikan ketersediaan pasokan bagi berbagai sektor industri.

Produk kimia dasar yang didistribusikan digunakan sebagai bahan baku utama di beragam industri, termasuk nikel, tekstil, kimia, *pulp* dan kertas, barang konsumsi, pupuk, produk olahan kayu, makanan, farmasi, alumina, serta sektor industri lainnya.

Penjualan Kimia Dasar
dalam Miliar Rupiah



Pada tahun 2024, penjualan kimia dasar mencapai Rp6.598 miliar, mengalami peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.344 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan atas produk kimia dasar.

Manufaktur

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak Perusahaan yang bergerak di segmen manufaktur, yakni PT Arjuna Utama Kimia (Aruki) yang merupakan produsen perekat kayu di Surabaya. Aruki memproduksi perekat kayu berkualitas tinggi untuk industri kayu dan kertas dengan jumlah kapasitas produksi sebesar 100,000 MT.

Aruki senantiasa berkomitmen menjalankan kegiatan usaha yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan melalui penerapan ISO9001–2015 *Quality Management System* dan ISO 14001–2004 *Environment Management System*.

Pendapatan Segmen Manufaktur
dalam Miliar Rupiah



Pendapatan segmen manufaktur sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp652 miliar, meningkat 17% dari tahun sebelumnya sebesar Rp558 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan permintaan terhadap produk adhesive ARUKI.

Jasa Logistik

Segmen jasa logistik menyediakan pelayanan terhadap pelanggan pihak ketiga di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Segmen tersebut mencakup operasi pelabuhan, transportasi, penyewaan tangki penyimpanan, penyewaan gudang, dan lainnya.

Jasa Logistik Perseroan mencakup jasa penyewaan tangki untuk produk curah cair, termasuk *Crude Palm Oil* (CPO) dan kimia cair, serta penyewaan gudang untuk menyimpan produk curah kering, meliputi kimia kering, gula, pupuk, hingga pakan ternak. Kegiatan penyewaan dijalankan berdasarkan kontrak jangka panjang dengan pelanggan.

Selain itu, Perseroan menyediakan jasa kepelabuhan (*port handling*), kepengurusan pabean, bongkar muat barang/peti kemas dari kapal menggunaan *Harbor Mobile Crane*, penyimpanan (pergudangan), transportasi menggunakan armada truk, dan pengantongan (bagging) di pelabuhan-pelabuhan Medan, Surabaya, Semarang, dan Jakarta (Ciwadan dan Priok).

Salah satu Entitas Anak AKR, PT Jakarta Tank Terminal (JTT), menyediakan jasa penyewaan terminal tangki penyimpanan BBM berkapasitas 350.000 cbm di Tanjung Priok, Jakarta. JTT merupakan salah satu terminal tangki swasta terbesar di Indonesia dilengkapi dengan *jetty* dan pipa bawah laut.

Kapasitas Infrastruktur Logistik

Kapasitas infrastruktur logistik di Indonesia disajikan pada bagian Jaringan Infrastruktur Logistik di Pendahuluan pada Laporan Tahunan ini.

Pendapatan Segmen Jasa Logistik
dalam Miliar Rupiah



Pendapatan segmen logistik mencapai Rp 1.165 miliar, naik 17% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp994 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume aktivitas logistik dan transportasi

Jumlah masing-masing kinerja segmen logistik adalah segmen operasi pelabuhan dan transportasi sebesar Rp813 miliar, segmen jasa penyimpanan sebesar Rp289 miliar, dan segmen lain-lain sebesar Rp63 miliar. Secara umum, masing-masing segmen mengalami peningkatan, kecuali segmen lain-lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kawasan Industri JIIPE

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE adalah kawasan industri terintegrasi yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan industri berbasis hilirisasi dan berorientasi ekspor. KEK JIIPE merupakan hasil kolaborasi antara PT AKR Corporindo Tbk dan PT Pelindo (Persero), mencakup zona industri, pelabuhan laut dalam, serta kawasan perumahan dan komersial.

Sebagai kawasan industri hijau, KEK JIIPE menawarkan fasilitas utilitas berstandar internasional, termasuk pasokan listrik, air bersih, gas, serta akses logistik yang efisien melalui pelabuhan laut dalam. Kawasan ini juga menjadi lokasi smelter tembaga terbesar di dunia, yang mendukung pertumbuhan industri bernilai tambah di Indonesia.

Pendapatan KEK JIIPE
dalam Miliar Rupiah

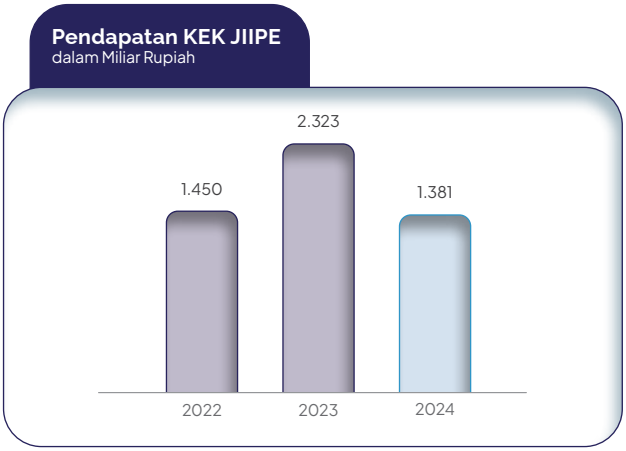

Pendapatan kawasan industri JIIPE pada tahun 2024 sebesar Rp1.381 miliar, turun 41% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp2.323 miliar yang terbagi menjadi:
1. Penjualan lahan industri sebesar Rp877 miliar
2. Pendapatan sewa tanah industri sebesar Rp185 miliar
3. Layanan utilitas (*recurring income*) sebesar Rp318 miliar

KEK JIIPE memiliki cakupan lahan seluas 3.000 hektar yang mencakup kawasan industri dengan pusat logistik dan fasilitas berikat. Kawasan ini terhubung dengan pelabuhan multiguna yang terkoneksi dengan perdagangan, baik antar pulau maupun internasional. Kawasan ini didukung oleh pusat komersial dan kawasan perumahan yang akan menjadi hub industri strategis terkemuka di Indonesia dan Asia Pasifik.

Dengan lokasi sekitar 24 km dari Surabaya, KEK JIIPE memiliki keunggulan geo-ekonomi yang strategis untuk mendukung kegiatan industri, ekspor-impor, serta aktivitas ekonomi lainnya yang berdaya saing tinggi. Fasilitas dan infrastruktur berstandar internasional yang ditawarkan KEK JIIPE memungkinkan efisiensi logistik yang optimal, dengan konektivitas yang kuat antara pasar domestik dan internasional.

Easy Access Creates Low Logistic Costs

JIIPE memiliki lokasi yang strategis yakni di muara Selat Madura, jalur utama yang menghubungkan Surabaya dengan Laut Jawa. Pelabuhan terpadu JIIPE, akan menjadi yang terdalam di Jawa Timur, dengan kedalaman -16 LWS. Dilengkapi dengan empat dermaga dengan area berlabuh gabungan seluas 6.200 meter, pelabuhan ini dapat menampung kapal pengangkut curah besar hingga 100.000 DWT. Konektivitas multimoda ini memastikan aliran rantai pasokan yang optimal dengan biaya yang kompetitif.

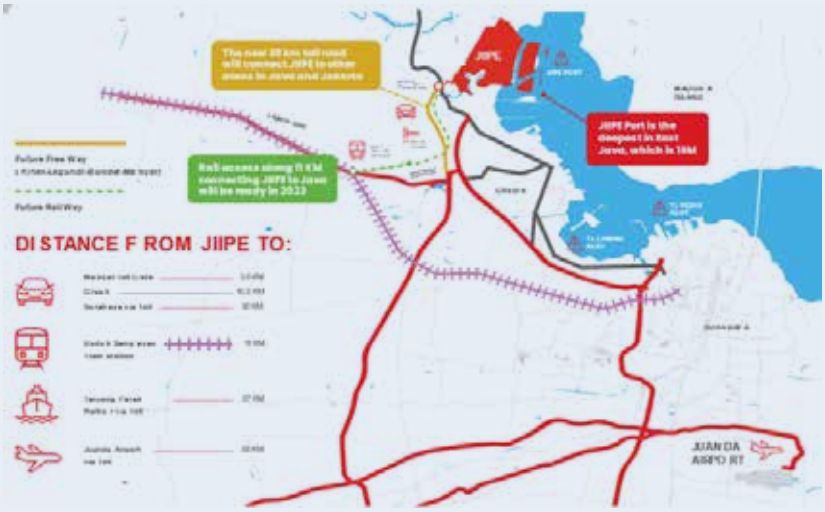

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, JIIPE ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Teknologi & Manufaktur dan resmi bernama KEK JIIPE Gresik. Kemudian, pada tanggal 20 November 2022, KEK JIIPE resmi menerima sertifikat operasional berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nomor 1 tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi KEK Gresik yang disahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional.

Dengan diresmikannya sertifikat operasional, KEK JIIPE memperoleh berbagai fasilitas dan insentif, termasuk kantor administrasi KEK serta kemudahan dalam pelayanan perizinan satu atap. Selain itu, KEK JIIPE juga mendapatkan insentif fiskal, seperti keringanan pajak penghasilan dan bea cukai, serta insentif non-fiskal, seperti kemudahan arus barang dan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja.

Penunjukan JIIPE sebagai KEK menjadikannya kawasan industri yang kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus mendukung target pemerintah dalam menekan biaya logistik serta operasional. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), KEK JIIPE memiliki lokasi strategis, infrastruktur yang memadai, serta dukungan regulasi, sehingga berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi.

Tenant yang Telah Bergabung dalam Kawasan Industri JIIPE


Freeport Cooper Smelter & PMR


Xinyi Glass Factory


Xinyi solar Indonesia


Hailiang Nova Material


AKR Corp-Tank Storage


Nippon Sari Roti Bread Factory


Unichem Salt Factory


Clariant Specialty Chemical


Fertilizer Inti Tech Fertilizer


Adhimix Precast


Cahaya Maju Lestari Castor Oil


Bank Indonesia Cash Depot & Data Centre


Waskita Beton-Precast

***Tenant* lain:**

- Rodamas
- Pangansari Utama-Food
- Hebang Biotechnology Indonesia
- Sumberbaja Sejati Light
- BJTI-Port Services
- Aneka Tambang
- Steel Manufacturer
- Tirtamas-Warehouse

KEK JIIPE menyediakan klasterisasi sesuai dengan aktivitas operasional *tenant* berdasarkan PP No. 7/2021 terkait penunjukkan JIIPE sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Per 31 Desember 2024, total proyek yang telah berjalan di JIIPE sebanyak 21 tenant.

Salah satu proyek yang tengah dikembangkan ialah proyek gas alam yang dirancang untuk menyediakan pasokan gas alam bagi *tenant*. Adapun potensi kelebihan kapasitas dapat dimanfaatkan untuk memasok jaringan pipa gas di Jawa Timur. Proyek tersebut merupakan bentuk kerja sama Perseroan dengan BP GAS & Power Investments Limited. Proyek ini diharapkan dapat beroperasi secara aktif pada tahun 2028 bertepatan dengan dimulainya banyak proyek yang membutuhkan konsumsi gas yang signifikan di JIIPE.

Dengan konektivitas dan berbagai keunggulan yang ditawarkan, KEK JIIPE berhasil menarik banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sepanjang tahun 2024, KEK JIIPE telah menjual lahan seluas 38 hektar, dengan akumulasi jumlah lahan terjual dan disewakan seluas 384 hektar.

Utilitas

KEK JIIPE menyediakan fasilitas utilitas berstandar internasional untuk mendukung kebutuhan industri di dalamnya. Infrastruktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi operasional, keberlanjutan, serta daya saing bagi para pelaku usaha. Berbagai fasilitas meliputi pembangkit listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, koneksi pipa gas, hingga sistem telekomunikasi dengan jaringan fiber optik.

1. Pembangkit listrik
   JIIPE telah memiliki lisensi untuk menghasilkan dan menyalurkan listrik sebesar 515 MW secara langsung ke *tenant*. Hingga tahun 2024, JIIPE menyediakan pembangkit listrik bertenaga gas sebesar 23 MW beserta tenaga gas yang dilengkapi dengan jaringan pipa gas dari Perusahaan Gas Negara sebagai pemasok gas yang mengalirkan gas alam ke kawasan.

   Melalui pemasangan PLTS Atap di kawasan industrinya ini, JIIPE mampu menghemat 483,917 kWh dan menekan produksi CO_2 sebesar 451,978 kg setiap tahunnya. Jumlah CO_2 tersebut setara dengan menanam 5.671 pohon selama 10 tahun dan penggunaan 126.236 liter bensin selama satu tahun.

2. Pengelolaan Air
   Sistem pengelolaan air di JIIPE menggunakan desalinasi *Sea Water Reverse Osmosis* berkapasitas 2.400 m^3/hari. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pasokan air industri di kawasan JIIPE.

3. Pengelolaan Air Limbah
   Pada tahun 2024, air limbah di kawasan JIIPE rata-rata dikelola dengan Instalasi pengelolaan air limbah dengan kapasitas 2.500 m^3/hari. Instalasi tersebut menggunakan teknologi *Membran Bio Reactor* yang memastikan limbah cair telah memenuhi standar keamanan dan kualitas sesuai peraturan pemerintah dengan penggunaan lahan seminimal mungkin.

   Kemudian, limbah akan diproses ulang dalam unit *Ultra Filtration* dan *Reserve Osmosis*. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan air bersih bagi tenant di kawasan dan meminimalisir ekstraksi alami dari sumber daya alami.

4. Internet & Komunikasi
   Berkolaborasi dengan provider jasa telekomunikasi di Indonesia, Perseroan menyediakan jaringan telekomunikasi dan internet broadband kawasan JIIPE yang berbasis fiber optic. Untuk memastikan keamanannya, kawasan JIIPE memiliki tim pemadam kebakaran yang siaga selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.



Gas Powered Power Plant with Rooftop Solar Panel



Water Treatment & Waste Water Treatment Plant

Mode Konektivitas JIIPE yang Unik

Mode konektivitas JIIPE menyesuaikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. JIIPE terkoneksi dengan jalur transportasi laut, darat, dan udara. Pelabuhan tersebut dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) yang memiliki konsesi dari Kementerian Transportasi untuk melakukan pelayanan pelabuhan di Terminal Manyar, Pelabuhan Gresik, Jawa Timur hingga 2094. Jasa yang dilayani mencakup pelabuhan & logistik multi layanan untuk pengangkutan, kontainer, mobil/kendaraan, kargo umum, halaman kontainer, multiguna, industri perikanan, kargo cair dan massal, pusat logistik berikat, pemeliharaan lepas pantai.

Profitabilitas Masing-Masing Pilar Bisnis

dalam Miliar Rupiah

Segmen Perdagangan dan Distribusi				
Uraian	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	35.532	38.213	(2.680)	-7%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	32.903	34.935	(2.031)	-6%
Laba Bruto	**2.629**	**3.278**	**(649)**	**-20%**
Marjin Laba Bruto	7,4%	8,6%	-1,2%	

Pada tahun 2024, Perseroan mencatat profitabilitas laba bruto dari segmen perdagangan dan distribusi sebesar Rp2.629 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp649 miliar atau 20% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.278 miliar. Marjin laba bruto mengalami normalisasi menjadi 7,4% pada tahun 2024, hampir sama dengan marjin di tahun 2022.

dalam Miliar Rupiah

Segmen Manufaktur				
Uraian	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	652	558	94	17%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	356	323	33	10%
Laba Bruto	**296**	**234**	**62**	**26%**
Marjin Laba Bruto	45,4%	42,0%	3,4%	

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan mencatat laba bruto dari segmen manufaktur Rp296 miliar, meningkat Rp62 miliar atau 26% dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen manufaktur juga mencatat peningkatan marjin laba bruto menjadi 45,4% dibandingkan 42% di tahun 2023, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional.

dalam Miliar Rupiah

Segmen Logistik				
Uraian	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	1.165	994	171	17%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan (Tanpa Penyusutan)	931	798	133	17%
Laba Bruto (Tanpa Penyusutan)	**234**	**195**	**39**	**20%**
Marjin Laba Bruto (Tanpa Penyusutan)	20%	19,7%	0,4%	

Di segmen logistik, laba bruto tanpa penyusutan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp234 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp39 miliar atau 20% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp195 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume aktivitas logistik dan transportasi.

dalam Miliar Rupiah

Segmen Kawasan Industri				
Uraian	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	1.381	2.323	(943)	-41%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	783	1.341	(558)	-42%
Laba Bruto	**597**	**981**	**(384)**	**-39%**
Marjin Laba Bruto	43,3%	42,3%	1%	

Pada segmen kawasan industri, AKR mencatatkan laba bruto tahun 2024 sebesar Rp597 miliar. Meskipun mengalami penurunan sebesar Rp384 miliar atau 39% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp981 miliar, segmen ini tetap memberikan kontribusi positif didorong oleh strategi pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.

Tinjauan Keuangan

Pembahasan kinerja keuangan dalam uraian Analisis dan Pembahasan Manajemen mengacu pada Informasi data keuangan dari Laporan Keuangan Audited PT AKR Corporindo Tbk untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) pada laporannya tertanggal 18 Maret 2025 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material".

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

AKR mencatatkan laba bersih sebesar Rp2.225 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dibandingkan dengan Rp2.780 miliar pada tahun sebelumnya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan mencatatkan CAGR sebesar 25%.

Aset

Total aset AKR tercatat sebesar Rp33.109 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2.812 miliar atau 9% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp30.297 miliar. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan aset lancar akibat peningkatan persediaan tanah kawasan industri untuk mengantisipasi penjualan lahan pada tahun 2025.

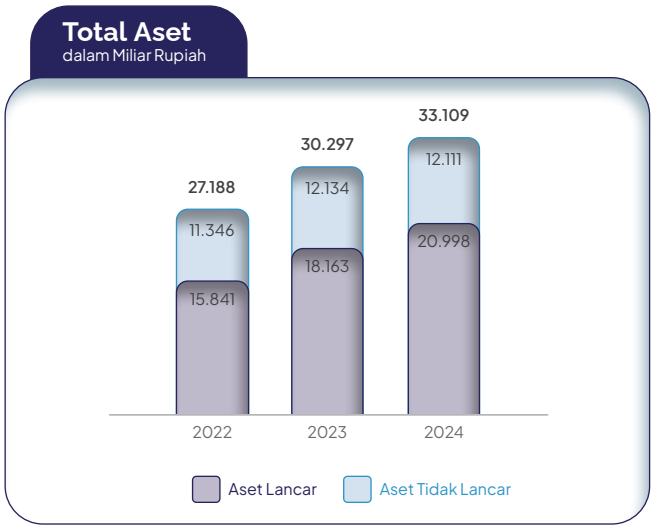

Aset Lancar

dalam Miliar Rupiah

Aset Lancar	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Kas dan Setara Kas	5.366	26%	6.536	36%	(1.170)	-18%
Piutang Usaha	7.563	36%	6.403	35%	1.160	18%
Piutang Lain-Lain	44	0%	56	0%	(12)	-22%
Persediaan	3.463	16%	3.134	17%	329	11%
Persediaan Tanah Kawasan Industri dalam Pengembangan	3.757	18%	1.621	9%	2.136	132%
Pajak Dibayar di Muka	147	1%	90	0%	57	63%
Biaya Dibayar di Muka	82	0%	74	0%	8	11%
Uang Muka	147	1%	85	0%	62	73%
Aset Lancar Lainnya	428	2%	164	0%	264	161%
Jumlah Aset Lancar	**20.998**	**100%**	**18.163**	**100%**	**2.835**	**16%**

Pada tahun 2024, AKR mencatatkan jumlah aset lancar sebesar Rp20.998 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2.835 miliar atau 16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.163 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan tanah kawasan industri dalam pengembangan dan piutang usaha.

Kas dan Setara Kas

dalam Miliar Rupiah

Kas dan Setara Kas	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Kas	17	0%	27	0%	9	37%
Bank – Pihak Ketiga						
Rupiah	2.254	42%	3.274	52%	(1.020)	-31%
Dolar Amerika Serikat	2.621	49%	2.972	48%	(351)	-12%
Lainya	2	0%	1	0%	1	38%
Jumlah Kas pada Bank	4.877	91%	6.247	91%	(1.370)	-22%
Deposito Berjangka – Pihak Ketiga						
Rupiah	416	8%	262	4%	154	59%
dolar	56	1	0	0%	56	17929%
Jumlah Deposito Berjangka	**472**	**9%**	**262**	**4%**	**210**	**80%**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**5.366**	**100%**	**6.536**	**100%**	**(1.170)**	**-18%**

Perseroan mencatatkan jumlah kas dan setara kas pada tahun 2024 mencapai Rp5.366 miliar. Angka tersebut menurun sebanyak Rp1.170 miliar atau 18% dibanding tahun 2023 sebesar Rp6.536 miliar. Jumlah kas dan setara kas terdiri atas kas di bank sebanyak Rp4.877 miliar, serta deposito berjangka sebanyak Rp472 miliar.

Piutang Usaha

dalam Miliar Rupiah

Piutang Usaha	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Belum Jatuh Tempo	6.903	88%	6.202	91%	701	11%
Jatuh Tempo:						
1 - 30 hari	372	5%	147	2%	225	153%
31 - 60 hari	132	2%	63	1%	69	110%
> 60 hari	581	7%	501	7%	80	16%
Sub Total	**7.988**	**102%**	**6.913**	**102%**	**1.075**	**16%**
WAPU PPN	47	1%	63	1%	(16)	-25%
Dikurangi:						
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(99)	-1%	(94)	-1%	5	5%
Penyesuaian Nilai Wajar	(68)	-1%	(90)	-1%	(22)	-24%
Piutang Usaha Neto	**7.868**	**100%**	**6.791**	**100%**	**1.077**	**16%**

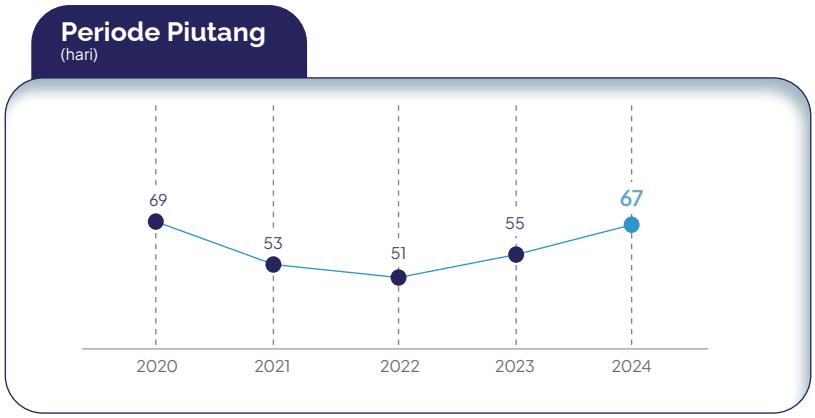

Catatan: DSO dihitung berdasarkan rerata piutang dan rerata pendapatan triwulanan.

Rata-rata periode penagihan piutang usaha pada tahun 2024 meningkat menjadi 67 hari dibandingkan 55 hari pada tahun 2023. Terdapat sebesar Rp6.903 miliar masih belum jatuh tempo atau 88% jumlah piutang usaha bersih. Manajemen melakukan pendekatan kehati-hatian terhadap piutang. Secara kumulatif, Perseroan mengakumulasikan Rp99 miliar sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dan mencatat penyesuaian nilai wajar piutang usaha sebesar Rp68 miliar.

Jumlah piutang usaha per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.868 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.077 miliar atau 16% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp6.791 miliar. Hal tersebut terutama dikarenakan oleh peningkatan penjualan dan perubahan kebijakan kredit.

Periode Persediaan
(hari)



Periode persediaan per 31 Desember 2024 sedikit meningkat menjadi 24 hari dari 21 hari di tahun 2023. Manajemen terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan dan perputaran barang yang lebih cepat.

Aset Tidak Lancar

dalam Miliar Rupiah

Aset Tidak Lancar	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Piutang Usaha Jangka Panjang dari Pihak Ketiga-Neto	304	3%	387	3%	(83)	-21%
Investasi pada Entitas Asosiasi	492	4%	446	4%	46	10%
Aset Pajak Tangguhan	188	2%	201	2%	(13)	-6%
Properti Investasi	1.817	15%	1.817	15%	0	0%
Aset Tetap	6.365	53%	5.466	45%	899	16%
Aset Hak Guna - Neto	793	7%	618	5%	175	28%
Estimasi Tagihan Pajak Penghasilan	16	0%	16	0%	0	0%
Persediaan Tanah Kawasan Industri dalam Pengembangan	1.983	16%	3.026	25%	(1.043)	-34%
Uang Muka	27	0%	43	0%	(16)	-37%
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	75	1%	67	1%	8	12%
Aset Tidak Lancar Lainnya	50	0%	46	0%	4	9%
Jumlah Aset Tidak Lancar	**12.111**	**100%**	**12.134**	**100%**	**(23)**	**-0%**

Aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar Rp23 miliar atau 0,2% dari jumlah pada tahun 2023 sebesar Rp12.134 miliar menjadi Rp12.111 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan tanah kawasan industri dalam pengembangan dan piutang usaha jangka panjang.

Aset Tetap

dalam Miliar Rupiah

Aset Tetap	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Hak Atas Tanah	689	11%	689	13%	0	0%
Bangunan, Dermaga, Gudang dan Tangki Penyimpanan	5.251	82%	4.849	89%	402	8%

Aset Tetap	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Mesin dan Peralatan	1.219	19%	1.016	19%	203	20%
Peralatan Gudang dan Peralatan Pembongkaran di Pelabuhan	628	10%	599	18%	29	5%
Kendaraan	469	7%	423	8%	46	11%
Pengembangan Gedung yang Disewa	97	2%	96	2%	1	1%
Renovasi Gedung	611	10%	585	11%	26	4%
Peralatan Kantor	170	3%	168	3%	2	1%
Kapal	957	15%	775	14%	182	23%
Aset dalam Penyelesaian	838	13%	432	8%	406	94%
Akumulasi Penyusutan	(4.564)	-72%	(4.166)	-76%	(398)	-10%
Jumlah Aset Tetap	**6.365**	**100%**	**5.466**	**100%**	**899**	**16%**

AKR mencatat aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp6.365 miliar, naik sebesar Rp899 miliar atau 16%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.466 miliar. Faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut adalah penambahan konstruksi fasilitas terminal dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta aset armada transportasi truk tangki,dan kapal.

Persediaan Tanah Kawasan Industri Dalam Aset Lancar

Per 31 Desember 2024, persediaan tanah kawasan industri yang siap untuk dijual tercatat sebesar Rp3.757 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp2.136 miliar atau 132% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.621 miliar. Hal tersebut terutama didorong oleh strategi manajemen untuk menarik calon investor dan mengantisipasi pembelian tanah secara langsung dengan jumlah yang besar.

Liabilitas

AKR mencatatkan peningkatan liabilitas sebesar Rp2.231 miliar atau 14% dari tahun 2023 sebesar Rp16.254 miliar menjadi Rp18.485 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha dan pengembangan JIIPE.

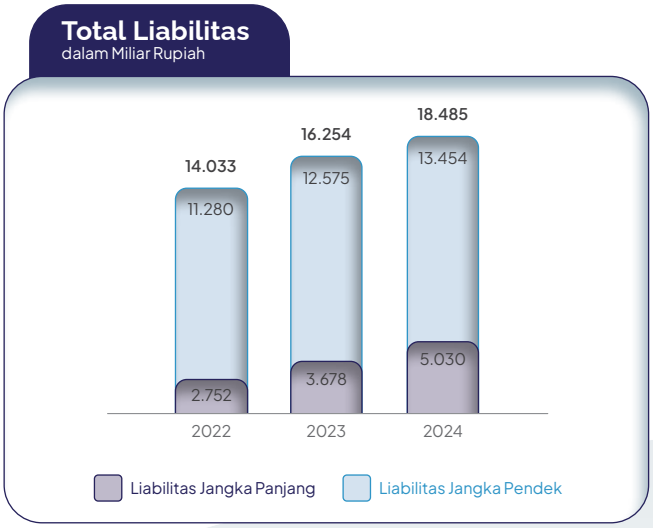

Liabilitas Jangka Pendek

dalam Miliar Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Hutang Bank Jangka Pendek dan Lainnya	7	0%	5	0%	2	40%
Hutang Usaha – Pihak Ketiga	10.392	77%	9.519	76%	873	9%
Hutang Lain-Lain – Pihak Ketiga	464	3%	350	3%	114	33%
Hutang Pajak	403	3%	492	4%	(89)	-18%
Biaya Masih Harus Dibayar	586	4%	572	5%	14	2%
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	144	1%	188	1%	(44)	-23%
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	45	0%	43	0%	2	5%
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek	272	2%	225	2%	47	21%
Hutang Bank Jangka Panjang dan Lainnya yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.141	8%	1.089	9%	52	5%
Hutang Obligasi yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	0	0%	37	0%	(37)	-100%
Hutang Dividen	1	0%	56	0%	(55)	-98%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**13.454**	**100%**	**12.575**	**100%**	**879**	**7%**

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan liabilitas jangka pendek sebesar Rp13.454 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp879 miliar atau 7% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.575 miliar. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan hutang usaha dan hutang lain-lain pihak ketiga.



Hutang usaha pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp10.801 miliar, naik sebesar Rp932 miliar atau 9% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.869 miliar. Selain itu, periode hutang meningkat menjadi 88 hari.

Liabilitas Jangka Panjang

dalam Miliar Rupiah

Liabilitas Jangka Panjang	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	26	1%	18	0	8	44%
Hutang Bank Jangka Panjang dan Lainnya	3.645	72%	3.117	85%	528	17%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	179	3%	177	5%	2	1%
Liabilitas Kontrak Jangka Panjang	631	12%	20	1%	612	3221%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	479	9%	337	9%	142	42%
Hutang Dividen	54	1%	0	0%	54	n.m
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	16	0%	9	0%	7	78%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**5.030**	**100%**	**3.678**	**100%**	**1.352**	**37%**

Hutang Bank Jangka Panjang dan Lainnya

Per 31 Desember 2024, hutang bank jangka panjang dan lainnya tercatat sebesar Rp3.645 miliar, mengalami peningkatan sebanyak Rp528 miliar atau 17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.117 miliar. Peningkatan ini berasal dari pendanaan yang ditujukan untuk pengembangan KEK JIIPE Gresik.

Ekuitas

dalam Miliar Rupiah

Ekuitas	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Modal Saham	401	401	0	0%
Tambahan Modal Disetor	1.301	1.287	14	1%
Saham Treasuri – 320.655.000 Saham	(113)	(118)	5	4%
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	4	4	0	0%
Tidak Ditentukan Penggunaannya	9.647	9.393	254	3%
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	252	226	26	12%
Bagian Atas Perubahan Lainnya dari Ekuitas Entitas Anak	69	69	0	0%
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**11.562**	**11.263**	**299**	**3%**
Kepentingan Non-Pengendali	**3.061**	**2.780**	**282**	**10%**
Jumlah Ekuitas	**14.624**	**14.043**	**581**	**4%**

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan ekuitas sebesar Rp14.624 miliar, meningkat sebesar Rp581 miliar atau 4%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.043 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan Laba Rugi	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	38.729	42.087	(3.358)	-8%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	(35.220)	(37.613)	(2.393)	-6%
Laba Bruto	3.509	4.473	(964)	-22%
Beban Usaha	(975)	(975)	0	0%
Beban Umum dan Administrasi	(873)	(878)	(5)	-1%
Beban Penjualan	(101)	(97)	4	4%
Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya				
Laba (Rugi) Atas Penghapusan dan Penjualan Aset Tetap - Neto	4	15	(11)	-75%
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto	14	6	8	133%
Pendapatan Usaha Lainnya	39	49	(10)	-20%
Beban Usaha Lainnya	**(12)**	**(8)**	**4**	**50%**
Laba Usaha	**2.578**	**3.561**	**(983)**	**-28%**
Penghasilan Keuangan	353	197	156	79%
Pajak Final Terkait Penghasilan Keuangan	(54)	(36)	(18)	50%
Beban Keuangan	(85)	(68)	25	17%
Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi	47	35	11	35%
Laba Sebelum Beban Pajak	**2.839**	**3.687**	**(848)**	**-23%**
Pajak Final	**(27)**	**(20)**	**7**	**-35%**
Beban Pajak - Neto	(413)	(589)	176	-30%
Laba Tahun Berjalan	2.399	3.078	(679)	22%
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	50	(20)	69	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	4	(12)	16	-
Pajak Tangguhan Terkait Penghasilan Keuangan	(1)	1	(2)	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	53	(30)	83	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.452**	**3.048**	**(596)**	**-20%**
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	2.225	2.780	(555)	-20%
Kepentingan Non-Pengendali	174	298	(124)	-42%
Laba Tahun Berjalan	2.399	3.078	(679)	-22%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	2.254	2.761	(507)	-18%
Kepentingan Non-Pengendali	199	287	(88)	-31%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.452**	**3.048**	**(596)**	**-20%**
Laba Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	112,7	140,9	(28,2)	-20%

Per 31 Desember 2024, AKR mencatatkan laba bruto sebesar Rp3.509 miliar, mengalami penurunan sebesar 22% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.473 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan.

Jumlah laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk di tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.225 miliar, mengalami penurunan sebesar 20% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.780 miliar.

Penjualan dan Pendapatan

dalam Miliar Rupiah

Penjualan dan Pendapatan	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
BBM	28.934	75%	31.869	76%	(2.935)	-9%
Kimia Dasar	6.598	17%	6.344	15%	254	4%
Sub-Jumlah	**35.532**	**92%**	**38.213**	**91%**	**(2.681)**	**-7%**
Pabrikan						
Pabrikan - Pihak Ketiga Adhesive	652	2%	558	1%	94	17%
Sub-Jumlah	**652**	**2%**	**558**	**1%**	**94**	**17%**
Produk Lainnya						
Jasa Logistik						
Operasi Pelabuhan dan Transportasi	813	2%	639	2%	174	27%
Penyewaan Tangki Penyimpanan	289	1%	280	1%	9	3%
Lain-Lain	59	0%	75	0%	(16)	21%
Sub-Jumlah	**1.165**	**3%**	**994**	**2%**	**175**	**17%**
Kawasan Industri	1.381	4%	2.323	6%	(942)	-41%
Jumlah Penjualan dan Pendapatan	**38.729**	**100%**	**42.087**	**100%**	**(3.358)**	**-8%**

Pada tahun 2024, pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp38.729 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp3.358 miliar atau 8% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.087 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya performa segmen perdagangan dan distribusi serta kawasan industri.

Analisis penjualan dan pendapatan setiap segmen usaha disajikan dalam Tinjauan Operasional di dalam Laporan Tahunan ini.

Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan

dalam Miliar Rupiah

Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Perdagangan dan Distribusi	32.903	93%	34.935	93%	(2.032)	6%
Pabrikan	356	1%	323	1%	33	10%
Jasa Logistik	1.178	3%	1.014	3%	164	16%
Tanah Kawasan Industri	783	2%	1.341	4%	(558)	-42%
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	**35.220**	**100%**	**37.613**	**100%**	**(2.393)**	**-6%**

Beban pokok penjualan dan pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp35.220 miliar, menurun sebesar Rp2.393 miliar atau 6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.613 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga produk BBM dan kimia dasar yang dibeli oleh Perseroan, dan menurunnya penjualan tanah di segmen kawasan industri.

Laba Bruto

dalam Miliar Rupiah

Laba Bruto	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Perdagangan dan Distribusi	2.629	75%	3.278	73%	(649)	-20%
Pabrikan	296	8%	234	5%	62	26%
Jasa Logistik	(13)	0%	(20)	0%	7	35%
Tanah Kawasan Industri	597	17%	981	22%	(384)	-39%
Jumlah Laba Bruto	**3.509**	**100%**	**4.473**	**100%**	**(964)**	**-22%**

Perseroan mencatatkan laba bruto sebesar Rp3.509 miliar pada tahun 2024, dengan penurunan sebesar Rp964 miliar atau 22% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.473 miliar. Penyesuaian ini terjadi oleh strategi yang diambil Perseroan ketika aktifitas dari pelanggan menurun guna menjaga level penjualan yang optimal, serta menurunnya penjualan tanah dibandingkan tahun lalu.

Beban Usaha

dalam Miliar Rupiah

Beban Usaha	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Beban Umum dan Administrasi						
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan	593	61%	561	58%	32	6%
Cadangan Penurunan Nilai Kerugian atas Piutang Usaha	7	1%	67	7%	(60)	90%
Perjalanan Dinas dan Transportasi	40	4%	38	4%	2	5%
Beban Kantor	54	5%	42	4%	12	29%
Penyusutan	41	4%	38	4%	3	8%
Penyusutan dan Amortisasi Aset Hak-Guna	3	0%	3	0%	0	0%
Prasarana dan Telekomunikasi	12	1%	14	2%	(2)	-14%
Biaya Profesional	40	4%	41	4%	(1)	-2%
Sewa Kantor	8	1%	9	1%	(1)	-11%
Perbaikan dan Pemeliharaan	9	1%	9	1%	0	0%
Pajak dan Perizinan	19	2%	15	1%	4	27%
Biaya Bank dan Administrasi	2	0%	5	1%	(3)	-60%
Asuransi	5	0%	4	1%	1	25%
Perlengkapan Kantor	3	0%	3	0%	0	0%
Pengiriman	1	0%	1	0%	0	0%
Lain-lain	37	4%	28	7%	9	32%
Sub-Jumlah	**873**	**89%**	**878**	**90%**	**(5)**	**-1%**
Beban Penjualan						
Transportasi	18	2%	14	1%	4	29%
Perjamuan	4	0%	4	0%	0	0%

Beban Usaha	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Penyusutan	1	0%	1	0%	0	0%
Iklan dan Promosi	18	6%	24	2%	(6)	-25%
Lain-lain	60	6%	54	5%	6	11%
Sub-Jumlah	**101**	**11%**	**97**	**10%**	**4**	**4%**
Jumlah Beban Usaha	**975**	**100%**	**975**	**100%**	**0**	**0%**

Laba (Rugi) Selisih Kurs

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat untung selisih kurs sebesar Rp14 miliar, naik sebesar Rp8 miliar atau 133% dari tahun sebelumnya rugi sebesar Rp6 miliar di tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Penghasilan (Beban) Keuangan

AKR mencatat peningkatan beban keuangan pada tahun 2024 sebesar Rp16 miliar atau 24% dari tahun 2023, yakni dari Rp68 miliar menjadi Rp85 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang bank jangka panjang.

Manfaat (Beban) Pajak

Beban pajak neto dan final pada tahun 2024 sebesar Rp439 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp170 miliar atau 28% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp609 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak serta efektivitas dalam pengelolaan pajak perusahaan.

Pendapatan Komprehensif Lain

dalam Miliar Rupiah

Pendapatan Komprehensif Lain	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	50	94%	(20)	65%	70	n.m
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	4	8%	(12)	39%	16	n.m
Pajak Tangguhan Terkait	(1)	-2%	1	-4%	(2)	n.m
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Terjalan Setelah Pajak	**53**	**100%**	**(30)**	**100%**	**83**	**n.m**

Perseroan mencatatkan pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi untuk tahun mendatang sebesar Rp53 miliar di 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat rugi sebesar Rp30 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

dalam Miliar Rupiah

Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Laba tahun berjalan	2.399	98%	3.078	101%	(679)	-22%
Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	53	2%	(30)	-1%	83	n.m
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**2.452**	**100%**	**3.048**	**100%**	**(596)**	**-20%**

Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.452 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp596 miliar atau 20% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp3.048 miliar. Meski demikian, Perseroan mencatat keuntungan dari selisih kurs yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.225 miliar dengan marjin laba bersih di angka 5,75%.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Laporan Arus Kas	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	1.347	3.502	(2.155)	-62%
Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1.173)	(584)	589	101%
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.470)	(648)	822	127%
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(1.296)	2.270	(3.566)	-157%
Dampak Perubahan Selisih Kurs	127	(72)	199	276%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	6.536	4.338	2.198	51%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**5.366**	**6.536**	**(1.170)**	**-18%**

Kas dan Setara Kas

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan membukukan kas dan setara kas sebesar Rp5.366 miliar, turun sebesar Rp1.170 miliar atau 18% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp6.535 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya arus kas dari aktivitas operasi akibat penurunan penerimaan kas dari pelanggan, peningkatan arus kas dari aktivitas investasi untuk infrastruktur, dan penambahan hutang jangka panjang.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.347 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2.155 miliar atau 62% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.502 miliar. Hal ini terutama dikarenakan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perseroan mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 sebesar Rp1.173 miliar, meningkat Rp589 miliar atau 101% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp584 miliar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperkuat infrastruktur melalui perolehan aset tetap, termasuk bangunan, dermaga, gudang, dan tangki penyimpanan, serta penambahan armada kapal guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2024 sebesar Rp1.470 miliar, naik sebesar Rp822 miliar atau 127% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp648 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran hutang jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk pelunasan hutang obligasi.



Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan AKR dalam memenuhi kewajiban keuangan diukur melalui rasio gearing bersih, rasio liabilitas terhadap total aset, serta rasio EBITDA terhadap utang berbunga. Untuk menjaga stabilitas keuangan, Perseroan secara aktif memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan serta mengelola struktur permodalan secara optimal.

Selain itu, strategi mitigasi risiko diterapkan melalui pengelolaan kas yang prudent, efisiensi biaya, serta diversifikasi sumber pendanaan guna memastikan likuiditas tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Rasio Gearing Bersih

Rasio gearing bersih mencerminkan kemampuan ekuitas Perseroan dalam membayar utang tanpa memperhitungkan kas, yang pada tahun 2024 telah mencapai angka negatif. Stabilitas rasio liabilitas dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi keuangan yang solid.

Saat ini, Perseroan berada dalam posisi net cash dan berhasil mempertahankan peringkat idAA dengan prospek stabil dari lembaga pemeringkat terkemuka, PEFINDO Indonesia. Peringkat ini mencerminkan keunggulan Perseroan dalam jaringan infrastruktur logistik yang luas, profil keuangan yang solid, serta tingginya permintaan terhadap bahan bakar minyak dan kimia dasar.

Rasio *Gearing* Bersih
(x)



Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset

Hingga akhir tahun 2024, liabilitas membiayai sekitar 55,8% dari aset Perseroan, naik sebanyak 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Konsistensi rasio liabilitas mencerminkan manajemen keuangan yang *prudent*. Dengan aset yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban, Perseroan terus menjaga struktur keuangan yang sehat dan berdaya tahan.

Rasio EBITDA terhadap Hutang Berbunga

AKR mencatat Rasio EBITDA terhadap hutang berbunga pada tahun 2024 adalah 0,65 kali, lebih kecil dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 0,95 kali. Didukung oleh ekuitas yang kuat, manajemen keuangan yang *prudent*, serta proyeksi pendapatan yang positif, Perseroan terus meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan dan menjaga stabilitas struktur permodalan

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Rincian Struktur Modal

AKR berkomitmen untuk mengelola struktur modal yang sehat guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan operasional yang stabil. Struktur modal Perseroan terdiri dari kombinasi liabilitas jangka panjang dan ekuitas, yang dikelola secara optimal untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan profitabilitas.

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat jumlah kontribusi ekuitas terhadap struktur modal sebesar Rp14.624 miliar, naik sebesar 74%. Jumlah sumber dana jangka panjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp19.654 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.933 miliar atau 11% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp17.721 miliar.

dalam Miliar Rupiah

Struktur Modal	2024		2023		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Liabilitas Jangka Panjang	5.030	26%	3.678	21%	1.352	37%
Ekuitas	14.624	74%	14.043	79%	581	4%
Jumlah Sumber Dana Jangka Panjang	**19.654**	**100%**	**17.721**	**100%**	**1.933**	**11%**

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan secara berkala mengelola struktur permodalan untuk memastikan keberlangsungan usaha dan optimalisasi nilai bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko keuangan, sekaligus mengurangi biaya modal secara efisien.

Dalam mendanai belanja modal dan proyek-proyek baru, Perseroan mengutamakan penggunaan kas internal, serta mempertimbangkan pendanaan melalui utang jangka panjang atau penerbitan obligasi jika diperlukan. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan rasio laba terhadap ekuitas (*Return on Equity*/ROE) yang sehat guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

AKR menetapkan kebijakan struktur modal berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap stabilitas keuangan, efisiensi biaya modal, serta profil risiko. Dalam pengelolaannya, Perseroan menyeimbangkan penggunaan ekuitas dan utang untuk memastikan likuiditas yang memadai, menjaga tingkat leverage yang optimal, serta mengurangi risiko keuangan jangka panjang. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, suku bunga, dan akses terhadap sumber pendanaan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi struktur modal yang fleksibel dan adaptif.

Selain menjaga keseimbangan keuangan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan rasio keuangan yang sehat, termasuk ROE, guna memastikan tingkat pengembalian yang kompetitif. Dengan pendekatan ini, Perseroan dapat mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menjaga kepercayaan pasar terhadap kinerja keuangan yang solid.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Investasi barang modal (*capital expenditure*) merupakan pengeluaran dana untuk pembelian aset tetap atau penambahan barang yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Perseroan secara strategis mengalokasikan investasi ini guna mendukung pertumbuhan usaha dan efisiensi operasional. Hingga akhir tahun 2024, AKR dan Entitas Anak tidak memiliki ikatan investasi barang modal yang bersifat material, yaitu sebesar 20% dari nilai ekuitas.

Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2024, Perseroan merealisasikan investasi barang modal sejumlah Rp1.266 miliar, naik sebesar Rp333 miliar atau 36% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp933 miliar, yang terutama ditujukan untuk mendukung operasional Perseroan. Adapun realisasi investasi barang modal secara detail disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Investasi	Tujuan Investasi	Nilai Investasi (Rp Miliar)
Bangunan, Dermaga, Gudang dan Tangki Penyimpanan	Pendukung Operasional	86
Mesin dan Peralatan	Pendukung Kapasitas Infrastruktur	48
Peralatan Gudang dan Peralatan Pembongkaran di Pelabuhan	Pendukung Kapasitas Infrastruktur	2
Kendaraan	Peningkatan Kapasitas Armada	42
Renovasi Gedung	Pendukung Operasional	1
Peralatan Kantor	Pendukung Operasional	9
Kapal	Peningkatan Kapasitas Armada	182
Aset dalam Penyelesaian	Konstruksi Fasilitas Kapal dan Tangki	896
Jumlah Investasi		**1.266**

Target dan Realisasi 2024

Pada tahun 2024, AKR menyesuaikan target strategisnya guna menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Perseroan menetapkan target pertumbuhan laba bersih sebesar 4%–7%, yang didukung oleh proyeksi peningkatan laba kotor sebesar 1%–3% di segmen Perdagangan dan Distribusi, serta target penjualan lahan seluas 100 hektare pada bisnis Kawasan Industri.

Namun demikian, tekanan makroekonomi dan ketidakpastian di pasar domestik maupun global menyebabkan penurunan aktivitas pelanggan yang berdampak pada kinerja pendapatan. Sebagai respons, Manajemen secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk menjaga profitabilitas, termasuk menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga lebih terjangkau dan dapat mempertahankan pangsa pasar.

Secara khusus, segmen Ritel BBM menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didorong oleh ekspansi outlet BBM ritel di pusat-pusat kota utama, yang memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan dan laba kotor segmen ini. Meskipun target tahunan awal belum sepenuhnya tercapai, AKR berhasil mempertahankan tingkat profitabilitas yang solid, dengan laba bersih mencapai Rp2,25 triliun, mencerminkan efektivitas penyesuaian strategi dan inisiatif pengelolaan biaya yang dilakukan.

AKR tetap berkomitmen untuk memperluas jangkauan pasar, dengan fokus pada akuisisi pelanggan baru dan promosi JIIPE (*Java Integrated Industrial and Port Estate*) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus unggulan. JIIPE menawarkan keunggulan kompetitif berupa insentif fiskal dan non-fiskal, infrastruktur modern, serta utilitas berstandar internasional, menjadikannya destinasi investasi menarik bagi investor dalam dan luar negeri.

Proyeksi 2025

Prospek industri pada tahun 2025 tetap optimistis dengan penuh kehati-hatian di tengah tantangan global seperti volatilitas harga komoditas, suku bunga tinggi, gangguan rantai pasok, dan risiko terkait iklim. Pertumbuhan PDB global diperkirakan sebesar 3,2%, sementara Indonesia diprediksi tumbuh stabil di kisaran 4,7%–5,5%, sejalan dengan capaian tahun 2024.

Tingkat inflasi diperkirakan tetap terkendali pada 2,5% ± 1%, didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2025, BI 7-Day Reverse Repo Rate diturunkan menjadi 5,75%, dengan penyesuaian suku bunga Fasilitas Simpanan dan Fasilitas Pinjaman masing-masing menjadi 5,00% dan 6,50%. Langkah-langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong konsumsi domestik, serta mendukung peningkatan aktivitas investasi.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi struktural melalui 17 program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, serta inisiatif ekonomi hijau. Strategi hilirisasi, khususnya di sektor mineral dan energi, diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan sektor industri nasional.

Pengakuan terhadap JIIPE sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Terbaik oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencerminkan kepercayaan dan dukungan kuat pemerintah. Hal ini memperkuat proposisi nilai JIIPE di mata investor, dengan adanya smelter dan industri hilir yang telah beroperasi dalam kawasan tersebut, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja AKR melalui peningkatan penjualan lahan dan pendapatan jasa berulang.

Di sektor energi, peluncuran program biodiesel B40 pada Januari 2025 menjadi langkah penting menuju target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060. Program ini mencakup distribusi 15,6 juta kiloliter biodiesel secara nasional, yang didukung oleh 24 badan usaha BBN (biofuel). Dalam program ini, AKR mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan 167.515 kiloliter BBM subsidi pada tahun 2024, memperkuat peran strategis Perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Proyeksi Perusahaan 2025

Pada tahun 2025, AKR berada dalam posisi yang siap untuk mencatat kinerja yang lebih kuat, meskipun di tengah ketidakpastian makroekonomi global. Laba bersih diproyeksikan tumbuh sebesar 8%–15%, didorong oleh pemulihan di seluruh segmen bisnis, ketahanan operasional, serta investasi strategis.

Segmen Perdagangan dan Distribusi diperkirakan mencatat pertumbuhan laba kotor sebesar 5%–8%, seiring meningkatnya permintaan atas bahan kimia dasar dan produk BBM, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sektor pertambangan, yang merupakan basis pelanggan utama distribusi BBM, diproyeksikan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas pre-stripping dan ekstraksi mineral. Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi serta meningkatnya permintaan global atas mineral hijau strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga turut mendorong peningkatan permintaan.

Infrastruktur logistik AKR mencakup terminal penyimpanan, armada kapal, dan truk tangki yang didukung oleh platform teknologi informasi yang inovatif akan meningkatkan efisiensi pengiriman dan daya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan.

Segmen Ritel BBM akan terus berkembang melalui ekspansi outlet baru, promosi bahan bakar berkualitas tinggi, serta inisiatif pemasaran lokal yang ditujukan untuk pasar urban dan semi-urban.

Bisnis Kawasan Industri di JIIPE diproyeksikan mencatat penjualan lahan sebesar 80–110 hektare, meningkat dari 37 hektare pada tahun 2024. Pemasaran yang agresif, dikombinasikan dengan proposisi nilai JIIPE sebagai kawasan industri terintegrasi, diperkirakan akan menarik investasi asing langsung maupun domestik. Mulainya operasional smelter tembaga dan industri berskala besar lainnya di kawasan tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap utilitas dan layanan pelabuhan, yang diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan pendapatan berulang.

Untuk menjaga profitabilitas yang berkelanjutan, AKR akan mengedepankan pengelolaan modal kerja yang ketat, peningkatan produktivitas, serta penerapan teknologi digital di seluruh lini operasional. Perusahaan juga akan fokus pada efisiensi energi dan program keberlanjutan guna meningkatkan kinerja ESG, sejalan dengan harapan investor dan pemangku kepentingan.

Seluruh inisiatif ini secara kolektif menempatkan AKR pada jalur pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen Perusahaan terhadap keunggulan operasional, inovasi, dan tanggung jawab lingkungan.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (MESOP)

Mengacu pada Rencana Pengalihan Saham Buyback AKR yang disampaikan melalui surat No.027/L-AKRCS/2024 pada tanggal 20 Maret 2024, Perseroan mengajukan pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali melalui Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP).

Rencana pengalihan saham tersebut disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 29 April 2024. Pemegang saham menyetujui rencana pengalihan sebagian saham treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Manajemen dan karyawan kunci Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli saham AKRA melalui program MESOP tersebut.

Harga pelaksanaan program MESOP adalah senilai Rp499 per saham. Pada tanggal pelaksanaan suatu hak opsi, peserta harus melakukan pembelian saham treasuri sesuai dengan jumlah saham MESOP yang dialokasikan bagi masing-masing peserta (sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian hak opsi) dengan harga pembayaran per saham sesuai dengan harga pelaksanaan.

MESOP	Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang Diberikan	Jumlah Opsi Saham yang Dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang Hangus	Harga Pelaksanaan (Rp)
2024	I (2024)	156.500.000	15.650.000	15.650.000	-	499,00

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Pada tanggal 15 Januari 2025, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dimana BRI setuju untuk menyediakan fasilitas berupa:

1. Fasilitas kredit dengan total US$200.000.000 dengan sub-limit: KMK Buyer, LC/SKBDN, Kredit Jangka Pendek, BG/SBLC, SCF A/P;
2. Fasilitas *Forex Line* dengan sebesar US$20.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2026.













Prospek Usaha

Prospek Perdagangan & Distribusi BBM

Perseroan menerapkan strategi distribusi BBM yang konsisten untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan dan mengukir warisan keberlanjutan di masa depan. Dengan mengadopsi pendekatan formula berbasis harga (*formula-based pricing*) yang mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS), Perseroan menjaga stabilitas harga dan memastikan efisiensi operasional. Melalui mekanisme *pass-through*, dampak perubahan harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar dapat dialihkan kepada pelanggan, sehingga mengamankan risiko nilai tukar secara efektif.

Pada tahun 2025, distribusi BBM untuk segmen industri dan bisnis diproyeksikan mencatat pertumbuhan pesat. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah timur yang menjadi pusat hilirisasi mineral dan proyek nasional strategis lainnya. Langkah ini memperkuat kontribusi Perseroan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

1. **Pertambangan**
   Strategi distribusi BBM Perseroan menyasar sektor pertambangan yang terus berkembang. Dengan proyeksi produksi batu bara nasional mencapai 735 juta ton serta mineral lainnya pada 2025, kebutuhan BBM untuk aktivitas pre-stripping dan operasional tambang diperkirakan meningkat signifikan. Selain itu, program hilirisasi pemerintah dan permintaan global untuk material energi hijau mendorong pertumbuhan produksi mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga.
2. ***Smelter***
   Pemerintah memprioritaskan pengembangan industri smelter dengan target 35 *smelter* nikel beroperasi pada akhir 2024. Strategi Perseroan mendukung percepatan hilirisasi dengan memastikan distribusi BBM yang efisien, yang memperkuat rantai nilai sektor ini. Selain itu, peningkatan kapasitas *smelter* tembaga dan bauksit, sejalan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menciptakan kebutuhan energi yang lebih besar.
3. **Perkebunan**
   Perseroan turut mendukung kebijakan mandatori biodiesel B35 yang mulai berlaku awal 2024 dan rencana implementasi B40 pada semester kedua. Dengan proyeksi konsumsi domestik minyak sawit mentah (CPO) meningkat dari 19,64 juta ton pada 2024 menjadi 56,63 juta ton pada 2025, distribusi BBM menjadi bagian integral dalam mewujudkan keberhasilan program ini. Keberhasilan Indonesia dalam gugatan WTO atas kebijakan deforestasi Uni Eropa juga memperluas peluang ekspor CPO.
4. **Pelayanan Bunker**
   Perseroan merancang strategi untuk menangkap peluang dari peningkatan permintaan BBM di sektor perikanan dan pertambangan. Dukungan kebijakan pemerintah terkait pengawasan kelautan dan kemudahan operasional nelayan menjadi katalisator pertumbuhan sektor ini.













5. **Pasar Umum**
   Ekspansi di sektor manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi mendorong permintaan BBM yang didistribusikan oleh Perseroan. Proyek-proyek besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi peluang strategis bagi Perseroan untuk memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional.
6. **Pembangkit Listrik**
   Perseroan berkomitmen mendukung pertumbuhan sektor energi dengan menyediakan BBM bagi pembangkit listrik pemerintah dan swasta. Peningkatan konsumsi listrik nasional akibat hilirisasi industri mempertegas posisi Perseroan sebagai mitra strategis dalam penyediaan energi.
7. **Ritel**
   Untuk menciptakan nilai lebih di sektor ritel, Perseroan mengoperasikan SPBU melalui Gerai Ritel AKR dan kemitraan dengan AKR-bp. Dengan target penambahan 15 SPBU pada 2025, Perseroan berupaya meningkatkan aksesibilitas energi bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga RON 92 diproyeksikan mendorong peningkatan volume penjualan.
8. **Bahan Bakar Penerbangan**
   Perseroan memanfaatkan peluang di sektor avtur melalui PT Dirgantara Petroindo Raya, kerja sama strategis antara AKR dan Air BP. Distribusi avtur ini diharapkan terus berkembang, memperkuat kehadiran Perseroan di sektor penerbangan.

Prospek Perdagangan & Distribusi Bahan Kimia Dasar

Strategi jangka panjang Perseroan di sektor bahan kimia dasar berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan. Permintaan kaustik soda dan bahan kimia lainnya terus meningkat, didorong oleh program hilirisasi tambang dan kebutuhan industri *smelter*. Dengan mempertahankan kinerja keuangan yang solid, Perseroan optimis untuk terus memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan hingga 2025.

Prospek Manufaktur

Perseroan, melalui Aruki, memanfaatkan dinamika pasar properti dan furnitur untuk menciptakan peluang pertumbuhan. Proyeksi ekspor furnitur mencapai USD 5 miliar pada 2025, memberikan peluang strategis bagi Aruki untuk memperluas pasar domestik dan global. Dengan memanfaatkan tren positif di sektor furnitur dan properti, Aruki siap menjadi motor pertumbuhan dalam portofolio bisnis Perseroan.

Prospek Logistik

Sebagai bagian dari warisan keberlanjutan, Perseroan terus berinvestasi dalam armada kapal, truk, dan fasilitas logistik untuk mendukung pertumbuhan pasar Indonesia Timur. Hingga akhir 2024, dengan pengoperasian 17 pelabuhan dan rencana ekspansi lebih lanjut, Perseroan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor logistik nasional.

1. **Tangki Penyimpanan & Transportasi BBM**
   Strategi logistik Perseroan mencakup distribusi BBM melalui armada kapal dan truk dengan penambahan kapasitas operasional yang dirancang untuk memenuhi peningkatan permintaan.
2. **Jakarta Tank Terminal (JTT)**
   Kapasitas JTT yang strategis akan terus ditingkatkan untuk mendukung distribusi BBM di Pulau Jawa, menciptakan efisiensi rantai pasok yang berkelanjutan.
3. **Curah dan Kontainer**
   Terminal Manyar, di bawah manajemen PT Berlian Manyar Sejahtera, sedang memperluas kapasitas *jetty* untuk mendukung operasi smelter tembaga di kawasan JIIPE Gresik, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri nasional.

Prospek Kawasan Industri

Sebagai proyek strategis dengan luas 3.000 hektar, JIIPE dirancang untuk menciptakan konektivitas bisnis yang berkelanjutan. Dengan tiga segmen utama penjualan lahan, utilitas, dan pelabuhan JIIPE memposisikan diri sebagai pusat industri terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2025, pendapatan dari kawasan ini diproyeksikan meningkat signifikan melalui kemitraan strategis dengan berbagai industri besar, termasuk *smelter* tembaga dan pabrik kaca. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menciptakan warisan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tiga segmen utama JIIPE penjualan lahan, utilitas, dan pelabuhan diperkirakan menjadi pendorong utama pendapatan berulang (*recurring income*), memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan.

Pada tahun 2025, pendapatan dari KEK JIIPE diharapkan meningkat berkat beberapa faktor utama:

1. Penjualan lahan kepada berbagai industri besar, baik dari investor domestik maupun internasional.
2. Peningkatan pendapatan dari segmen utilitas, didukung oleh beroperasinya *tenant* utama seperti *smelter* tembaga, pabrik kaca, dan pabrik pengolahan produk tembaga lanjutan yang akan mempercepat penggunaan listrik, air, dan gas di kawasan tersebut.

Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa kawasan industri ini akan terus berkembang dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi di JIIPE, menjadikannya salah satu pusat industri terkemuka di Indonesia.

Dividen

Kebijakan Dividen

AKR berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kebijakan dividen yang seimbang antara distribusi keuntungan dan kebutuhan ekspansi bisnis. Perseroan secara konsisten membagikan dividen dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, posisi kas, proyeksi pertumbuhan, tingkat kesehatan Perseroan, serta tanpa mengurangi hak dari RUPS guna mendukung strategi jangka panjang.

Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 1994, AKR memiliki kebijakan untuk membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham setidaknya satu kali dalam setahun. Kebijakan dividen Perseroan ditetapkan minimal 30% dari laba neto tahun sebelumnya (jika laba melebihi Rp50 miliar).

Kronologi Pembagian Dividen

Sesuai dengan RUPS Tahunan 2024 yang diselenggarakan pada 29 April 2024, pemegang saham menyetujui dan menetapkan pembagian dividen sebesar 88,73% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang sebesar Rp2.780 miliar. Untuk itu, pembagian dividen Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp2.467 miliar dengan jumlah dividen per saham sebesar Rp125.

Dividen final yang akan dibayarkan ke seluruh pemegang saham adalah setelah dikurangi jumlah dividen interim pertama dan kedua yang telah dibagikan sebelumnya. Dividen interim pertama ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp50 per saham dan dividen interim kedua berdasarkan keputusan rapat Direksi tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp25 per saham.

Dengan demikian, dividen yang masih akan dibayarkan sebesar Rp987 miliar atau Rp50 per saham dengan jumlah saham yang beredar sebesar 19.737.169.600 saham, setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 336.305.000 saham. Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan dengan penetapan *recording date* yaitu 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Adapun jadwal pembagian dividen tunai sebagai berikut:
1. Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 8 Mei 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 13 Mei 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 14 Mei 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 15 Mei 2024
5. *Recording Date* yang berhak atas Dividen tanggal 14 Mei 2024
6. Pembayaran Dividen tanggal 27 Mei 2024

Kronologi pembagian dividen AKR sepanjang 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Bersih	Dividen	Dividen per Saham	Payout Ratio	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran
2023	Rp2.780 miliar	Rp2.467 miliar	Rp125	88,73%	29 April 2024	27 Mei 2024
2022	Rp2.403 miliar	Rp1.480 miliar	Rp75	61,59%	28 April 2023	24 Mei 2023

Aspek Pemasaran

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional, AKR mengedepankan strategi inovatif dan peningkatan layanan berbasis nilai guna mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi pemasaran dirancang dengan fokus pada penguatan posisi Perseroan di segmen bisnis utama, menciptakan manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan, serta membangun warisan keberlanjutan jangka panjang. Detail strategi pemasaran AKR diuraikan sebagai berikut:

Bahan Bakar Minyak (BBM)
1. **Meningkatkan pangsa pasar industri**
   AKR memperluas penetrasi pasar melalui pendekatan berbasis infrastruktur fisik dan digital, yang memungkinkan efisiensi distribusi dan layanan berkualitas tinggi. Strategi ini memastikan pelanggan industri memperoleh pasokan yang andal dengan biaya kompetitif.
2. **Mengembangkan peluang pasar baru**
   Fokus diarahkan pada wilayah Indonesia Timur dan segmen ritel melalui kerja sama dengan bp, menyediakan BBM berkualitas tinggi, produk pelumas, dan bahan bakar penerbangan, yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Kimia Dasar
Sebagai distributor utama Asahimas Chemical Group, strategi bisnis Perseroan mencakup:
1. **Ekspansi pasar**: memperluas basis konsumen baru sembari mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan setia.
2. **Mendukung hilirisasi mineral**: menawarkan produk kimia dasar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor smelter yang berkembang pesat di Indonesia, sekaligus mendukung transformasi industri nasional.
3. **Harga kompetitif dan layanan unggul**: AKR memastikan harga yang kompetitif serta SLA yang akurat, mencerminkan komitmen pada kepuasan pelanggan.
4. **Peningkatan kapasitas penyimpanan**: memperbesar kapasitas tangki guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat, memastikan kelancaran pasokan dalam jangka panjang.

Pabrikan Perekat Kayu
1. Menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan besar berpotensi tinggi.
2. Melakukan pemasaran proaktif untuk menarik konsumen baru, menciptakan basis pelanggan yang lebih luas.
3. Memperluas distribusi ke pasar internasional guna memperkuat daya saing global.

Logistik
1. Meningkatkan kapasitas layanan curah kering dan cair di seluruh Indonesia untuk mendukung rantai pasok yang andal.
2. Menawarkan layanan terpadu (*one-stop service*) untuk pelanggan BBM dan kimia dasar, menciptakan nilai tambah melalui efisiensi operasional.

Kawasan Industri
1. **Target industri berat dan teknologi tinggi**: mengoptimalkan JIIPE sebagai pusat ekosistem industri berat dan berteknologi tinggi, termasuk sektor peleburan tembaga.
2. **Pengembangan kawasan industri hijau**: mengintegrasikan energi terbarukan dan bersih untuk memenuhi kebutuhan *tenant* yang memprioritaskan keberlanjutan.
3. **Menciptakan pendapatan berulang**: mengembangkan utilitas berkapasitas besar yang memenuhi kebutuhan *tenant*, mendorong pertumbuhan pendapatan jangka panjang dan stabil.

Strategi tersebut tidak hanya memperkuat daya saing AKR di semua segmen bisnis, tetapi juga memastikan manfaat berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, sekaligus menciptakan warisan yang relevan dengan masa depan.

Pangsa Pasar yang Dilayani

AKR berkomitmen memperluas pangsa pasar melalui infrastruktur logistik terintegrasi yang mendukung rantai pasok nasional. Dengan jaringan meliputi 13 pelabuhan laut, 6 pelabuhan sungai, dan 21 lokasi tangki penyimpanan dan gudang di seluruh Indonesia, AKR memastikan kebutuhan domestik dan kawasan industri terpenuhi dengan efisiensi maksimal.

Adapun pangsa pasar AKR meliputi pemenuhan domestik (Indonesia) untuk pasokan BBM dan internasional untuk cakupan kawasan industri JIIPE.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga akhir tahun 2024, AKR tidak melakukan penerbitan saham baru maupun obligasi/sukuk/subordinasi. Dengan demikian, informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak disajikan dalam Laporan Tahunan 2024.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2024, terdapat aktivitas investasi AKR dan Entitas Anak sebagai berikut:
1. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 8 tanggal 5 Januari 2024, AKR dan UEPN mendirikan satu entitas baru, PT Berkah Renewable Energi Nusantara (BREN). AKR memiliki 99,97% kepemilikan di BREN dan sisanya dimiliki oleh UEPN, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp30.000.000. BREN akan bergerak dalam bidang pembangkitan, pengoperasian, konstruksi dan instalasi tenaga listrik. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 004/L-AKR-CS/2024 tanggal 9 Januari 2024 ke OJK dan BEI.
2. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 13 tanggal 8 Januari 2024, PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp821.165.000 menjadi Rp949.165.000 dimana Perseroan mengambil keseluruhan

kenaikan saham tersebut sebesar Rp128.000.000. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 005/L-AKR-CS/2024 tanggal 10 Januari 2024 ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 11 tanggal 8 Januari 2024, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp205.950.000 menjadi Rp355.950.000 dimana Perseroan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp150.000.000. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 006/L-AKR-CS/2024 tanggal 10 Januari 2024 ke OJK dan BEI.
4. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 12 tanggal 8 Januari 2024, PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia (AKPI) meningkatkan modal dasar dari Rp100.000.000 menjadi Rp500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp30.000.000 menjadi Rp180.000.000 dimana Andahanesa mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp150.000.000.
5. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 63 tanggal 23 Februari 2024, PT AKR Sea Transport (AST) meningkatkan modal dasar dari Rp300.000.000 menjadi Rp500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp274.900.000 menjadi Rp404.900.000 dimana Perseroan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp130.000.000. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 017/L-AKR-CS/2024 tanggal 27 Februari 2024 ke OJK dan BEI.
6. Pada tanggal 12 April 2024, AKR mendirikan satu entitas baru, Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. (CPIT) di Singapura. AKR memiliki 100% kepemilikan di CPIT. CPIT akan bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi produk kimia dan bahan bakar minyak. Total modal disetor dan ditempatkan CPIT sebesar US$5.000.134,72. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 040/L-AKR-CS/2024 tanggal 17 April 2024 dan No. 055/L-AKR-CS/2024 tanggal 4 Juni 2024 ke OJK dan BEI.
7. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 33 tanggal 12 Juli 2024, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp355.950.000 menjadi Rp356.449.000 dimana Perseroan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp499.000. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 073/L-AKR-CS/2024 tanggal 18 Juli 2024 ke OJK dan BEI.
8. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 167 tanggal 25 September 2024, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp949.165.000 menjadi Rp967.165.000 dimana Perseroan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp18.000.000. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 108/L-AKR-CS/2024 tanggal 26 September 2024 ke ke OJK dan BEI.
9. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 188 tanggal 2 Oktober 2024, PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp142.904.600 menjadi Rp158.309.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp7.717.905, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp7.687.095.
10. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 16 tanggal 3 Oktober 2024, PT Berkah Bunker Service (BBS) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.000.000 menjadi Rp20.000.000 dimana AKRIDA mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp10.000.000.
11. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 32 tanggal 7 Oktober 2024, Perseroan dan PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) mendirikan satu entitas baru, PT Terminal Energi Primer (TEP). Perseroan memiliki 99,99% kepemilikan di TEP dan sisanya dimiliki oleh UEPN dengan modal dasar TEP sebesar Rp100.000.000. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000, dimana Perseroan mengambil bagian dari modal yang disetor Rp24.990.000, sedangkan pemegang saham lainnya, UEPN, mengambil sisa saham sebesar Rp10.000. TEP akan bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan, penyimpanan minyak dan gas bumi, dan aktivitas penunjang lainya.
12. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 151 tanggal 29 Oktober 2024, APR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.683.713.448 menjadi Rp1.833.790.860 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp75.188.783, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp74.888.629.
13. Akta Notaris Yulia, S.H., No. 126 tanggal 26 November 2024, AKRIDA meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp967.165.000 menjadi Rp1.039.165.000 dimana Perseroan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp72.000.000. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 120/L-AKR-CS/2024 tanggal 11 Desember 2024 ke OJK dan BEI.



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi secara transparan dan berdasarkan persyaratan yang telah disetujui bersama. Seluruh transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan yang menyiapkan laporan keuangannya yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
   c. personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas adalah anggota dari Kelompok Usaha (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota Kelompok Usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang diidentifikasi dalam huruf (a);
   d. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   e. Entitas, atau anggota dari Kelompok Usaha dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari Kelompok Usaha tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kebijakan Mekanisme Review Kewajaran dan Pemenuhan Peraturan atas Transaksi Pihak Berelasi

Perseroan berpegang teguh pada prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*) dalam setiap transaksi yang dilakukan, termasuk dengan pihak berelasi atau transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Seluruh transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi keuangan.

Perseroan dan Entitas Anak menjalankan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh transaksi afiliasi dilakukan melalui prosedur yang memadai dengan pengawasan Direksi, serta direviu oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk memastikan kesesuaiannya dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*).

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait transaksi dengan pihak berelasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Tujuan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung operasional yang lebih efisien, memastikan kesinambungan rantai pasok, serta mengoptimalkan sinergi dalam grup usaha. Transaksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*) dan Governansi Perusahaan.

Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan guna memperoleh layanan, barang, atau pendanaan dengan kondisi yang kompetitif serta untuk mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Perseroan memastikan bahwa seluruh transaksi tersebut dilakukan secara transparan, sesuai regulasi, serta diawasi oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit agar tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tetap memberikan manfaat optimal bagi Perseroan.

Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi merupakan entitas atau individu yang memiliki keterkaitan dengan Perseroan, baik melalui kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan signifikan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan berelasi dapat mencakup induk perusahaan, entitas anak, perusahaan asosiasi, personel manajemen kunci, serta pihak lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan dan operasional Perseroan.

Rincian lengkap mengenai sifat hubungan berelasi yang terjadi sepanjang tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Komersial Logistik Nusantara	Transaksi dengan entitas di bawah pengendalian yang sama	Sewa kantor
PT AKR Land Development	Transaksi dengan entitas di bawah pengendalian yang sama	• *Service charge* kepada Perusahaan dan Entitas Anak • Penjualan bahan bakar minyak (BBM) • Pendapatan transportasi • Jual beli tanah
PT Berlian Manyar Sejahtera	Transaksi dengan entitas asosiasi	• Penjualan bahan bakar minyak (BBM) • Manajemen fee • Sewa tanah

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Realisasi transaksi AKR dengan pihak berelasi untuk tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

dalam Ribu Rupiah

Uraian	2024	2023
PT Komersial Logistik Nusantara		
Sewa Kantor	24.000	12.000
PT AKR Land Development		
Service charge kepada Perusahaan dan Entitas Anak	6.097.978	5.453.356
Persentase terhadap beban usaha	0,6%	0,6%
Penjualan bahan bakar minyak (BBM)	485.017	313.356
Persentase terhadap penjualan	0,0%	0,0%
Pendapatan transportasi	8.800	4.800
Persentase terhadap pendapatan	0,0%	0,0%
Jual Beli Tanah	(54.828.597)	54.828.597
Persentase terhadap liabilitas	0,5%	-
Perolehan aset tetap	44.987.200	-
Persentase terhadap aset	0,14%	-
PT Komersial Logistik Nusantara		
Sewa kantor	24.000	12.000
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan	0,0%	0,0%
PT Berlian Manyar Sejahtera		
Penjualan bahan bakar minyak (BBM)	1.169.559	1.301.511
Persentase terhadap penjualan	0,0%	0,0%
Management fee kepada Perusahaan dan Entitas Anak	3.578.736	1.573.310
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan	0,2%	0,1%
Sewa tanah	2.844.703	2.142.823

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Per 31 Desember 2024, terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada kegiatan usaha Perseroan. Peraturan OJK No 4 Tahun 2024 (POJK 4/2024) tentang Laporan Kepemilikan Saham dan Perubahan Saham Perusahaan Terbuka. Dengan diterbitkannya peraturan ini, AKR memperbarui kebijakan terkait laporan kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan No. 001/R-AKR-CS/2024. Dimana laporan perubahan kepemilikan tersebut juga wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak pada Perseroan

AKR telah menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian, mencerminkan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku.

Efektif per 1 Januari 2024, terdapat beberapa revisi standar akuntansi yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian kelompok usaha, di antaranya:

1. **Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan**
   Penomoran baru untuk setiap PSAK dan ISAK diurut ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode akuntansi yang dimulai pada dan setelah 1 Januari 2024. Isi dari PSAK dan ISAK terkait tidak berubah dan tidak menimbulkan dampak akuntansi pada laporan keuangan konsolidasi.

2. **Amandemen PSAK 201 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan**
   Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:
   - hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan;
   - hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan;
   - klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas; dan
   - bahwa jika derivatif melekat pada liabilitas yang dapat dikonversi dianggap sebagai instrumen ekuitas, maka ketentuan liabilitas ini tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai lancar atau tidak lancar.

   Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika liabilitas, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

3. **Amandemen PSAK 116 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik**
   Amandemen PSAK 116: Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

4. **Amandemen PSAK 207 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 2) dan PSAK 107 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok**
   Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen tersebut tidak memiliki dampak terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian AKR.

Informasi Kelangsungan Usaha

AKR menunjukkan ketahanan operasional di tengah dinamika bisnis melalui strategi berbasis infrastruktur, teknologi digital, serta hubungan pelanggan yang kuat. Dukungan model bisnis tangguh dan posisi keuangan solid memastikan Perseroan mampu memberikan kinerja positif secara konsisten. Dalam menghadapi potensi risiko, AKR terus memantau dinamika industri dan mengadaptasi strategi bisnis untuk memitigasi hambatan yang muncul, termasuk dengan mengoptimalkan efisiensi operasional, diversifikasi portofolio bisnis, serta memperkuat governansi perusahaan guna memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan.

Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya, termasuk dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan energi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Upaya ini tidak hanya memperkuat daya saing AKR di industri, tetapi juga memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, Perseroan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan yang berpotensi menghambat pertumbuhan pada tahun 2024. Selain itu, Perseroan terus melanjutkan strategi dan model bisnis yang telah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan.

Ke depan, AKR akan terus mempertahankan fleksibilitas dalam merespons perubahan pasar, mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru, serta memperkuat fundamental bisnis guna memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Assessment yang Dilakukan Manajemen

Sepanjang tahun 2024, evaluasi bersama Dewan Komisaris dan Komite Audit menegaskan bahwa AKR berada dalam kondisi prima dengan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Fokus pada segmen BBM dan bahan kimia dasar, yang didukung oleh kerja sama strategis serta infrastruktur unggul, terus menciptakan peluang ekspansi di pasar domestik maupun internasional.

Transformasi KEK JIIPE menjadi ekosistem industri hijau membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan melalui pengembangan utilitas berstandar internasional serta pemanfaatan energi terbarukan. Dengan mengedepankan inovasi dan prinsip keberlanjutan, AKR tidak hanya memastikan daya saing bisnis di era modern, tetapi juga membangun warisan yang relevan dengan kebutuhan saat ini serta mendukung masa depan yang lebih hijau dan inklusif.

Potensi Pengembangan Usaha

Sejalan dengan Surat Keputusan Penugasan dari BPH Migas, Perseroan kembali menyalurkan BBM bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2024, yang mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas AKR dalam mendistribusikan energi secara efisien dan tepat sasaran. Dengan dukungan infrastruktur logistik yang terintegrasi serta jaringan distribusi yang luas, Perseroan terus memperluas jangkauan layanan guna memastikan ketersediaan BBM bagi sektor-sektor yang membutuhkan, sekaligus memperkuat posisi AKR sebagai pemain utama dalam industri energi nasional.

Potensi pengembangan usaha semakin terbuka seiring dengan berkembangnya ekosistem hilirisasi di Indonesia, yang didorong oleh beroperasinya *Smelter* Tembaga Terbesar di dunia di JIIPE serta pertumbuhan ekosistem industri lainnya. Kehadiran *smelter* ini menjadi katalis bagi pertumbuhan industri bernilai tambah, menciptakan peluang baru dalam rantai pasok nasional, serta memperkuat daya saing manufaktur domestik.

Selain itu, ketersediaan utilitas industri kelas dunia yang dioperasikan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS), serta layanan pelabuhan laut dalam yang dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) memberikan kemudahan dan akses strategis bagi para tenant di JIIPE. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi, tetapi juga memperkuat daya tarik JIIPE sebagai kawasan industri terpadu yang mampu mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.


AKR
NILAM UTARA
AKR
KAP. 3500
17



05

Fungsi Penunjang Bisnis

Sumber Daya Manusia

> Peran SDM menjadi kunci keberhasilan AKR dalam melaksanakan transformasi sejak berdiri hingga kini. Dedikasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh Insan memungkinkan Perseroan terus berkembang, menghadapi tantangan pasar, serta mempertahankan reputasi sebagai mitra bisnis yang andal dan terpercaya.

Strategi dan Kebijakan Umum Pengelolaan SDM

Tahun 2024 merupakan tahun yang penting di dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk pencapaian target-target Perseroan. SDM yang kompeten dan profesional merupakan pilar dari pertumbuhan dan kestabilan perusahaan.

Melalui program-program pengembangan kompetensi SDM, seperti pelatihan teknis, peningkatan soft skill, dan kesempatan pengembangan karir, AKR memastikan setiap individu dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. AKR telah menyiapkan program pengembangan kompetensi melalui rekomendasi yang diberikan oleh atasan masing-masing karyawan sesuai kebutuhan. Pengembangan karir di AKR mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang jenjang karir karyawan. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan karyawan dengan menyediakan program kesehatan, penghargaan pencapaian individu maupun tim, dan program remunerasi.

Untuk mendukung implementasi pengelolaan SDM, Perseroan menjalankan operasional bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai Perseroan yaitu *Be Entrepreneurial*, *Collaboration*, *Be Agile*, *Reward for Performance*, *Empower your Team* dan *Zero Tolerance*. Perseroan juga memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk mengembangkan karir dan potensinya di dalam organisasi. Secara berkala, Perseroan selalu melakukan evaluasi dan meninjau kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengikuti kondisi lapangan kerja di Indonesia.

Struktur Organisasi Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Departemen *Human Resources* (Departemen HR) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SDM Perseroan. Tugas utama Departemen HR meliputi memastikan setiap proses pengelolaan dan pengembangan SDM, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program kerja dilaksanakan dengan baik, terstruktur, dan efisien. Profil Kepala Departemen HR, Felix Abednego, disajikan secara lengkap pada Bab 3 Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

Tujuan Pengelolaan SDM

Departemen HR menerjemahkan kebijakan pengelolaan SDM menjadi tujuan strategis pengembangan SDM, yang dirancang untuk mendukung pencapaian target bisnis jangka menengah maupun jangka panjang. Departemen HR juga tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan keselarasan antara pengelolaan SDM dan visi strategis Perseroan, tetapi juga dalam menciptakan program-program inovatif yang mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Adapun tujuan pengelolaan SDM, antara lain:

1. Mempersiapkan karyawan dari semua level untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
2. Mengutamakan talent internal untuk mengisi posisi yang ada di perusahaan, terutama untuk posisi-posisi yang memerlukan kemampuan khusus dan pengetahuan yang mendalam terkait dengan industri dan pasar.
3. Menyelaraskan *Key Performance Indicator* (KPI) departemen dan individu dengan strategi Perseroan, serta meningkatkan proses review kinerja secara konsisten.
4. Memastikan kecepatan proses rekrutmen SDM baru untuk mengisi posisi-posisi yang muncul akibat pertumbuhan perusahaan.
5. Memanfaatkan teknologi IT dalam otomasi dan analisa dalam pengambilan keputusan.
6. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis.
7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.

Strategi dan Program Kerja Pengelolaan SDM

Strategi, inisiatif kunci, dan program kerja telah disusun Departemen HR dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta *roadmap* ke depan. Program kerja untuk mendorong pencapaian tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM, antara lain:

1. Program *on boarding* dijalankan untuk membekali dan memantau perkembangan karyawan selama masa *probation*, memastikan mereka dapat menyesuaikan ritme kerja serta memahami cara kerja yang sesuai dengan pencapaian target perusahaan. Perseroan percaya bahwa *Onboarding* yang baik di dalam masa percobaan adalah kunci dari keberhasilan, dan dengan begitu karyawan baru dapat lebih cepat berkontribusi
2. *Key Performance Indicator* (KPI) terus diperbaiki setiap tahun untuk memastikan keselarasan antara setiap posisi dengan target dan objektif perusahaan. *Performance Evaluation* dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan semangat keterbukaan terhadap *feedback* untuk memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
3. *Performance Improvement Plan* diterapkan bagi karyawan yang belum mencapai standar kinerja. Program ini mencakup *coaching* intensif oleh atasan untuk mendorong perubahan cara kerja yang lebih efektif.
4. *Talent Management* & Rekrutmen dilakukan dengan mengidentifikasi talenta internal saat *manpower planning* serta mengisi lowongan akibat ekspansi bisnis atau *turnover* karyawan. Perusahaan juga mendorong pengisian posisi kosong melalui *Internal Fulfillment* guna memberikan kesempatan bagi talenta yang ada untuk berkembang melalui *fit and proper test*.
5. Pelatihan & pengembangan kompetensi diberikan kepada karyawan, mencakup pelatihan teknis, keselamatan kerja, serta kepemimpinan dan manajemen, terutama bagi *new and young leaders* agar dapat berkembang secara optimal.
6. Integrasi *Corporate Values* dalam kinerja diterapkan dengan memasukkan penilaian terkait implementasi nilai perusahaan dalam *performance review*.
7. Optimalisasi teknologi dalam proses SDM, termasuk administrasi absensi, lembur, cuti, dan kesehatan, guna meningkatkan efisiensi operasional.

Pencapaian Kinerja Departemen HR

Selama tahun 2024, Departemen HR berhasil mencatat berbagai pencapaian yang mendukung pengelolaan SDM secara strategis dan berkelanjutan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Departemen HR dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat nilai budaya Perseroan, serta mendukung target bisnis melalui berbagai program inovatif dan terukur. Adapun berbagai pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. 95% dari pemenuhan tenaga kerja dapat memenuhi *standard recruitment time*.
2. Lebih dari 40% posisi vacant diisi oleh *talent* internal, melalui proses *fit and proper test*.
3. Terlaksananya *Leadership Training* untuk meningkatkan kompetensi para *leader*.
4. Berhasil melaksanakan digitalisasi proses *Performance Evaluation*.
5. Pemenuhan Sumber Daya Manusia di lokasi kerja dan unit kerja baru.

Komposisi Karyawan

Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak mencapai 2.452 orang, mengalami penurunan sebesar 361 orang atau 12,8%, dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2023 sebanyak 2.813 orang. Adapun Informasi detail terkait jumlah karyawan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Dewan Komisaris	3	0,1%	3	0,1%
Direksi	7	0,3%	7	0,2%
Pejabat Selevel Komisaris	5	0,2%	7	0,2%
Pejabat Selevel Direktur	23	0,9%	25	0,9%
General Manager – Senior Manager	72	2,9%	59	2,1%
Manager	130	5,3%	137	4,9%
Asisten Manager	158	6,4%	148	5,3%
Supervisor dan Staf	803	32,7%	937	33,3%
Operator	1.251	51,0%	1.490	53,0%
Jumlah	**2.452**	**100,0%**	**2.813**	**100,0%**

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perempuan	299	12,2%	419	14,9%
Laki-laki	2.153	87,8%	2.394	85,1%
Total	**2.452**	**100,0%**	**2.813**	**100,0%**

Berdasarkan Usia

Usia	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
>56 tahun	64	2,6%	65	2,3%
47–55 tahun	397	16,2%	359	12,8%
40–46 tahun	515	21,0%	502	17,8%
33–39 tahun	708	28,9%	687	24,4%
26–32 tahun	608	24,8%	776	27,6%
<25 tahun	160	6,5%	424	15,1%
Total	**2.452**	**100,0%**	**2.813**	**100,0%**

Berdasarkan Level Pendidikan

Level Pendidikan	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Strata 3	3	0,1%	4	0,1%
Strata 2	103	4,2%	100	3,6%

Level Pendidikan	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Strata 1	977	39,8%	912	32,4%
Diploma	194	7,9%	202	7,2%
Sekolah Menengah Atas	874	35,6%	1.334	47,4%
Sekolah Menengah Pertama	83	3,4%	82	2,9%
Sekolah Dasar	11	0,4%	8	0,3%
Profesi	186	7,6%	171	6,1
Lainnya	21	0,9%	-	-
Total	**2.452**	**100,0%**	**2.813**	**100,0%**

Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Permanen	2.100	85,6%	2.011	71,5%
Karyawan Kontrak	352	14,4%	802	28,5%
Total	**2.452**	**100,0%**	**2.813**	**100,0%**



Pengelolaan dan Pengembangan SDM yang Komprehensif

Perseroan senantiasa berkomitmen dalam mempersiapkan tenaga kerja yang unggul untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan. Pengelolaan dan pengembangan SDM yang dilakukan mencakup pendekatan strategis yang terintegrasi guna memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan industri. Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM meliputi *Manpower Planning*, rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta program remunerasi dan kesejahteraan karyawan.

Strategi Perencanaan Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Manpower Planning atau proses perencanaan tenaga kerja adalah langkah strategis yang dijalankan Perseroan untuk memastikan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategi Perseroan. AKR menyusun secara sistematis rancangan kebutuhan tenaga kerja dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis.

AKR mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dengan mengacu pada proyeksi beban kerja, struktur organisasi, dan pertumbuhan bisnis. Penyusunan anggaran perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan rencana target usaha, termasuk penghitungan kebutuhan karyawan untuk satu tahun mendatang. Proses ini melibatkan evaluasi produktivitas karyawan yang ada saat ini serta penetapan target yang ingin dicapai, guna memastikan alokasi tenaga kerja yang efisien dan mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Departemen HR mewajibkan karyawan mengisi formulir permintaan yang mencakup uraian pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, indikator kinerja utama, dan perhitungan beban kerja. Formulir tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Departemen HR dan Kepala Divisi terkait sebelum ditinjau dan disetujui oleh Business Unit CEO. Tim Manajemen turut berperan aktif dalam proses perencanaan tenaga kerja, termasuk evaluasi penggantian karyawan yang mengundurkan diri, untuk memastikan sinergi dan efisiensi dalam penempatan tenaga kerja.

Menciptakan Talenta Unggul melalui Proses Rekrutmen Memadai

Proses rekrutmen di AKR dirancang untuk menjaring talenta terbaik yang selaras dengan kebutuhan Perseroan yang divalidasi oleh *Top Management*. Kebutuhan tersebut dibagi dalam beberapa kriteria seperti *technical skill*, *soft skill*, kompetensi, dan nilai-nilai Perseroan. Untuk memastikan seluruh kriteria tersebut terpenuhi maka dilakukan panel *interview* baik oleh atasan langsung maupun atasan dari atasan langsung. Tes psikologi dan referensi kandidat pun dilakukan sebagai metode dalam memastikan kompetensi dari kandidat.

Dalam pelaksanaannya, AKR memanfaatkan platform digital, seperti portal karir dan media sosial profesional, untuk memperluas jangkauan pencarian kandidat potensial. Selain itu, program kerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan juga menjadi bagian dari strategi rekrutmen untuk mendapatkan talenta muda berbakat.

AKR berkomitmen membuka kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan gender, suku, ras, etnis atau agama tertentu, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setiap tahapan rekrutmen diawasi dengan ketat guna memastikan objektivitas dan kualitas hasil seleksi. Dengan proses rekrutmen yang sistematis dan terstruktur, AKR tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara tepat tetapi juga membangun tim yang kompeten dan berkontribusi pada keberlanjutan pertumbuhan Perseroan.

Strategi yang tepat untuk menarik talenta terbaik yang telah ditentukan oleh AKR meliputi:
1. Transparansi dalam berkomunikasi yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai budaya kerja, gambaran pekerjaan dan tantangan dari pekerjaan yang ditawarkan.
2. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen yaitu menggunakan platform *online* rekrutmen dalam melakukan tes dan *interview*.
3. Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam mencari kandidat untuk program *Management Trainee*.
4. Memanfaatkan teknologi dan sosial media untuk promosi pekerjaan pada lokasi tertentu.
5. Menggunakan referensi terutama untuk *group* pekerjaan tertentu (*engineering*, *crew*, dan kapal).
6. Melakukan *internal job* posting untuk posisi tertentu.

Tahapan yang harus dilalui setiap karyawan baru dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan di lingkup Perseroan sebagai berikut:
1. *Recruitment Department* melakukan proses *sourcing* dengan mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasinya melalui semua *channel* yang ada, termasuk *e-sourcing* melalui media sosial dan situs web AKR.
2. Pada tahapan seleksi kandidat akan dipanggil untuk melewati serangkaian asesmen psikologis (aspek kecerdasan perilaku dan sikap kerja) dan wawancara menggunakan pendekatan kompetensi. Jenis dan tahapan asesmen, proses wawancara secara panel disesuaikan dengan level jabatan yang dibutuhkan. Semua proses asesmen dan wawancara dilakukan secara digital.
3. Perseroan juga melakukan proses verifikasi dokumen dan cek referensi bagi karyawan yang telah lolos tahapan seleksi. Setelah verifikasi lengkap maka kandidat akan mengikuti proses *Medical Check Up*. Setelah karyawan dinyatakan *fit* untuk bekerja, karyawan akan menjalani proses *job offer* dan penandatanganan perjanjian kerja.

Rekrutmen SDM Masa Depan

Program Management Trainee (MT) AKR adalah inisiatif strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan pemimpin masa depan yang akan menjadi bagian integral dari kesuksesan Perseroan. Program MT dirancang sebagai jalur percepatan untuk mengembangkan manajemen menengah dalam waktu 1–3 tahun setelah lulus masa MT.

Program MT ditujukan untuk lulusan baru unggulan dari berbagai universitas negeri dan swasta yang akan dibekali berbagai pengetahuan mengenai AKR. Peserta MT menerima pembekalan teknis dan non-teknis mencakup gambaran umum AKR, proses bisnis, pengetahuan produk, dan operasional bisnis. Para peserta MT akan mendapatkan

pelatihan intensif, pembinaan dari para eksekutif senior, serta tantangan nyata yang akan mempersiapkan mereka untuk posisi kepemimpinan di masa depan.

Program pelatihan MT meliputi pelatihan di kelas (*classroom training*) dan pelatihan langsung (*on-the-job training*), yang diawasi oleh Direktur atau Kepala Divisi untuk memastikan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar tertinggi. Para peserta MT juga diberikan proyek khusus yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) serta target-target Perseroan.

Pada tahun 2024, AKR membuka program MT dalam 2 (dua) *batch*, yakni pada Januari dan September. Program MT mengalami peningkatan di AKR dan unit bisnisnya, disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan yang telah divalidasi oleh Manajemen Tingkat Atas. Jumlah peserta MT yang direkrut sebanyak 34 orang dari total 20.154 pelamar.

Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan di AKR bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan Perseroan. AKR meyakini bahwa SDM unggul dan berkualitas merupakan kunci untuk kesuksesan jangka panjang Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus berinvestasi dalam program pengembangan yang dapat memperkaya pengetahuan teknis, meningkatkan *soft skill*, dan memperkuat kepemimpinan di semua tingkatan.

Penentuan program pelatihan untuk karyawan dilakukan bersama Kepala Departemen terkait yang dituangkan dalam *training matrix* sesuai dengan *job role* atau fungsi pekerjaan dari masing-masing karyawan. *Training matrix* ini berisikan program pelatihan mandatori baik yang dikembangkan secara internal ataupun mengikuti pelatihan eksternal yang diadakan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKR.

Program pelatihan tersebut adalah *Training Mandatory Internal* (TMI) dan *Training Mandatory External* (TME) yang berupa *safety training* dan *technical training*. *Training Mandatory Internal* dilaksanakan oleh Internal *Trainer* AKR yang merupakan training wajib bagi seluruh karyawan di Terminal, *Warehouse*, *Retail Operations*, dan *Land Transport*.

Pelatihan internal antara lain *Safety & Operational Tank Terminal, Safety & Operational Warehouse, Retail Operations, Permit to Work, Lock Out Tag Out, Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control,* dan *Incident Investigation*. Selain itu, pelatihan yang berkaitan dengan land transportation seperti *Truck Knowledge*, *Material Safety Data Sheet*, *Loading Unloading*, dan *Defensive Driving Course* juga masuk ke dalam kurikulum pelatihan teknikal wajib untuk personel *Land Transport* di Perseroan.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak internal memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dari sisi *skill* dan *knowledge* sesuai dengan tanggung dan jawabnya. Pelatihan tersebut akan diperbarui dalam 1–2 tahun sekali dengan materi yang terupdate untuk memastikan karyawan mendapatkan pengetahuan yang terbaru mengenai *Standar Operational Procedure* (SOP) dan instruksi kerja (*Working Instruction*).

Sedangkan untuk pelatihan wajib eksternal, merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Perseroan bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan ataupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi. Sertifikat dari pelatihan eksternal ini merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan Darat, Laut, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan personel yang mengikutinya memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional. Beberapa contoh sertifikasi pelatihan eksternal ini antara lain *Loading Master*, *Fire Fighting*, *Basic First Aid*, IMDG Code, Ahli K3 Umum, dan lain-lain.

Selain program pelatihan teknikal, Perseroan juga memberikan pelatihan khusus untuk pengembangan level kompetensi kepemimpinan bagi karyawan di level Kepala Divisi dan Kepala Departemen. Sedangkan penentuan jenis *training* lainnya ditentukan langsung oleh Direksi sesuai dengan program pengembangan *talent*.

Departemen HR membagi program pelatihan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. ***Leadership dan Soft Skills Training***
   Program pelatihan ditujukan untuk individu pada level Manajemen Tingkat Menengah dan Manajemen Lini Pertama. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung rencana pengembangan bagi individu secara spesifik di dalam tugas dan pekerjaannya. Pelatihan *soft skill* ini meliputi beberapa area seperti: *Leadership*, *Problem Solving & Decision Making*, *Business Presentation Skill*, *Time Management*, *Communication* dan *Building Effective Interpersonal Skill*.

2. ***Business Skills Training untuk Middle Management***
   Pelatihan yang bertujuan untuk membekali peserta di level *Middle Management* dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung peran dan fungsinya di dalam pekerjaan. Beberapa *training* spesifik yang termasuk di dalam kategori ini adalah: *Business Acumen*, *Risk Management*, *Project Management*, *Financial Modelling for Feasibility Study*.

3. ***Technical Training***
   Training ini merupakan program pelatihan yang bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan bidang teknikal di bidang operasional seperti: *Tank Terminal, Warehouse, Land Transport, Retail Operations*, *Distribution Planning*, dan SHE (*Safety, Health, and Environment*). Pelatihan teknikal ini disampaikan oleh pengajar internal dan ditujukan untuk seluruh karyawan di bidang *operations*.

4. ***Mandatory Certification***
   Program ini merupakan pelatihan dan sertifikasi pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga eksternal untuk memenuhi standar sertifikasi kompetensi nasional di bidang-bidang tertentu.

Perseroan mengalokasikan anggaran pelatihan secara tahunan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan dan tujuan strategis Perseroan. Hingga akhir tahun 2024, Perseroan berinvestasi pada program pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.315.852.074, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.187.257.448.

Perseroan telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi, baik internal maupun eksternal. Program-program ini dirancang khusus berdasarkan level jabatan karyawan, mencakup pengembangan keterampilan yang relevan untuk setiap posisi.

Pelatihan Karyawan Baru

AKR menyelenggarakan rangkaian pelatihan yang dirancang khusus untuk karyawan baru guna mempercepat proses adaptasi terhadap lingkungan kerja dan budaya Perseroan. Melalui program *on boarding*, Perseroan mendorong inisiatif setiap karyawan untuk mendapatkan pelatihan dan pengetahuan baru khususnya mengenai AKR.

AKR memiliki *on boarding* program atau NEOP (*New Employee Orientation Program*) yang dirancang untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami budaya Perseroan, dan menjalankan tugas dengan efektif. NEOP mencakup *Company Profile* AKR, Visi dan Misi, konsep 5K di AKR, *Corporate Value*, administrasi *Human Resource Information System* (HRIS), Peraturan Perusahaan, *Whistle Blowing System* (WBS), *Basic Safety Training* di lingkungan kerja, *IT Security*, dan informasi-informasi yang dibutuhkan karyawan baru.

Kemudian karyawan baru AKR juga mendapatkan Program *On the Job Training* program ini adalah rangkaian pembelajaran karyawan baru selama 3 (tiga) bulan, yang bertujuan untuk mendorong kesiapan dalam memahami dan mencapai *Key Performance Indicator* (KPI) dan target utama yang telah ditetapkan. Program *On the Job Training* membahas secara spesifik materi penting mengenai peran yang diemban, target pembelajaran selama masa probation, dan target yang harus dicapai selama periode tersebut.

Target pembelajaran dalam Program *on boarding* mencakup pelatihan teknikal wajib yang harus diikuti sesuai dengan *training matrix* untuk setiap posisi. Pelatihan ini bertujuan membantu karyawan baru memahami proses bisnis, alur kerja, *Standard Operational Procedure* (SOP), dan *Working Instruction* (WI) di lingkungan kerjanya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tugasnya, karyawan baru diharapkan mampu mencapai target kerja yang telah ditetapkan.

Selama masa *probation*, Departemen Rekrutmen dan Training akan melakukan *monthly review* untuk memantau *progress* pembelajaran dari program *on boarding* sesuai dengan target kerja yang sudah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melakukan *cross check* atas pencapaian target pembelajaran dan target kerja sesuai *timeline*. Apabila teridentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan, langkah-langkah korektif akan segera diambil untuk memastikan kembali kepatuhan terhadap jalur yang telah direncanakan.

Sebagai bagian dari NEOP, Karyawan baru juga dibekali dengan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab, indikator kinerja, serta pelatihan langsung (*On-the-Job Training*) untuk memastikan mereka dapat segera berkontribusi kepada Perseroan. Di akhir masa percobaan, setiap karyawan diwajibkan untuk menyusun *Probation Report* yang akan dievaluasi oleh atasan langsung dan manajemen. Evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung dan Departemen HR menjadi dasar untuk keputusan pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap.

Pelatihan Khusus untuk *Driver* Baru

AKR memiliki program khusus *driver* baru yaitu *on boarding* selama 1 bulan yang dirancang untuk memberikan pembekalan dasar. Program ini sebagai upaya Perseroan mempersiapkan *driver* baru dengan pengetahuan mengenai unit truk yang akan dikendarai, produk yang akan diangkut, teknik penanganan produk, dan teknik mengemudi defensif.

Keberhasilan penerapan teknik-teknik tersebut akan diverifikasi melalui hasil dari penilaian *incabin*. Penilaian *incabin* merupakan evaluasi terhadap *driver* baru saat mengemudi dalam jarak tertentu. Apabila penilaian incabin mencapai standar yang telah ditetapkan, maka *driver* baru diberikan kesempatan melakukan *solo driving* yaitu mengantarkan produk kepada customer secara mandiri. Aspek-aspek yang masuk dalam proses penilaian, antara lain:

- Penerapan Teknik mengemudi defensif
- Prinsip dasar mengemudi: Mengamati, Memahami, dan Mematuhi
- Rambu lalu lintas
- Pengetahuan berkendara yang baik dan benar

Level Jabatan	Durasi Pelatihan (jam)
Manajemen Tingkat Menengah	416
Manajemen Lini Pertama	2.900
Staf	2.134
Operator	9.376
Jumlah	**14.826**

*) Hanya Mencakup AKR BU

Penilaian Kinerja Karyawan

AKR menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan terstruktur untuk memastikan setiap karyawan memiliki pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi dan target kerja. Proses penilaian kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme *Key Performance Indicator* (KPI) yang disesuaikan dengan tujuan strategis Perseroan. *Monitoring* kinerja dilakukan oleh Atasan berdasarkan KPI yang telah ditetapkan setiap awal tahun.

Pencapaian kinerja setiap karyawan di akhir tahun akan diukur dan dinilai secara objektif. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait program *reward*, pengembangan karir, pelatihan, dan strategi retensi dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan serta mencapai tujuan Perseroan.



Penentuan Target Kerja (KPI)
Seluruh karyawan wajib mengetahui perihal Target Kerja Individu yang meliputi *Performance* dan Kompetensi ataupun prioritas lain yang ditugaskan kepada karyawan bersangkutan.



***Performance Monitoring* (by Atasan)**
Atasan melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh pekerjaan bawahan, untuk mengukur pencapaian kinerja sesuai dengan KPI yang sudah ditentukan sebelumnya.



Performance Evaluation
Pencapaian atau hasil final kinerja karyawan akan dievaluasi pada tengah dan akhir tahun untuk mendapatkan penilaian atas hasil kerja setiap karyawan untuk diproses lebih lanjut oleh HR.

Internalisasi Nilai Perseroan

AKR berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai inti Perseroan sebagai fondasi utama dalam setiap aspek operasional dan budaya kerja. Internalisasi nilai-nilai inti Perseroan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pelatihan, komunikasi internal, dan aktivitas karyawan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai inti Perseroan dalam setiap tindakan dan keputusan.

Terdapat beberapa program internalisasi nilai-nilai inti Perseroan di tahun 2024, antara lain:

1. *Newsletter*
   Perseroan menggunakan *newsletter* dalam menanamkan nilai-nilai Perseroan kepada karyawan. Melalui media ini, Perseroan dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, menyajikan tema-tema yang mencerminkan nilai inti seperti Integritas, *Collaboration*, *Reward for Performance*, serta nilai-nilai lainnya. Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk artikel, cerita, atau wawancara dengan anggota Direksi dan Kepala Departemen. Selain itu, *newsletter* juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait program pelatihan dan pengembangan karyawan serta inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR), guna meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Perseroan.
2. *Performance Appraisal*
   Pada tahun 2024, proses penilaian kinerja karyawan mengacu pada nilai-nilai utama Perseroan sebagai kriteria evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan karyawan memahami kontribusi mereka secara langsung dalam pencapaian tujuan organisasi, sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Perseroan.
3. *Management Communication*
   Management communication memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai Perseroan. Melalui interaksi langsung dengan karyawan, manajemen memastikan bahwa visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan tersampaikan secara efektif, baik melalui *Director's Message* maupun berbagai metode komunikasi lainnya.

Hubungan Industrial

AKR menjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan seluruh karyawan sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perseroan secara aktif mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan mengedepankan dialog terbuka untuk menjaga komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan.

Sebagai upaya menjaga hubungan industrial yang baik, AKR melibatkan karyawan dalam diskusi terkait kebijakan Perseroan melalui forum-forum komunikasi. Selain itu, Perseroan juga mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang transparan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, guna memastikan kesejahteraan karyawan dan mendukung produktivitas kerja secara berkelanjutan.

AKR memahami bahwa Perseroan dan karyawan adalah satu kesatuan, sehingga berupaya menegakkan hubungan industrial yang sehat. Hal ini diwujudkan melalui hubungan kerja yang didasarkan pada saling percaya, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan Perseroan. Untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis, Perseroan juga melaksanakan berbagai program kesejahteraan, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, remunerasi yang kompetitif, dan inisiatif lainnya.

Program Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan berkomitmen penuh memberikan penghargaan yang adil dan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Seluruh hak-hak normatif karyawan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup gaji yang kompetitif, insentif berbasis kinerja, imbalan kerja, dan manfaat lainnya yang disesuaikan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing karyawan.

Imbalan kerja atau remunerasi bagi setiap individu dan entitas anak, baik pria atau wanita mendapatkan rasio yang sama dan adil, yakni 1:1. Besaran remunerasi ditentukan oleh serangkaian proses yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan pencapaian kinerja serta tanggung jawab yang dimiliki.

AKR juga menyediakan fasilitas pendukung seperti program kesehatan dan kegiatan kesejahteraan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan. Dengan pendekatan ini, Perseroan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga sejahtera, sehingga karyawan dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan Perseroan.

Perseroan mengambil beberapa langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan karyawan dalam hal remunerasi, promosi, dan pengembangan karir, yaitu:

1. Perseroan mengikuti kaidah dan ketentuan dari pemerintah terkait upah minimum, perhitungan lembur dan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan karyawan seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.



2. Perseroan memiliki kebijakan terkait *grading* karyawan dan menyesuaikan tingkat pengupahan yang kompetitif mempertimbangkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.
3. Penyesuaian upah dan pemberian *reward* disesuaikan dengan kondisi Perseroan, dan kinerja masing-masing individu.
4. Memberikan kesempatan rotasi kerja atau ekspansi tanggung jawab guna meningkatkan pengalaman dan pengembangan profesional.
5. Menyelenggarakan pelatihan serta program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
6. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang memenuhi kriteria.

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

AKR berkomitmen untuk menciptakan budaya kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku. Perseroan juga memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari potensi bahaya bagi karyawan.

Perseroan menjalankan berbagai inisiatif kesehatan dan keselamatan kerja, seperti *Medical Check-Up* (MCU) tahunan, kampanye kesehatan oleh dokter profesional, pelatihan keselamatan rutin, serta penerapan prosedur standar untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, Perseroan juga melakukan tes tambahan untuk mengidentifikasi risiko diabetes pada karyawan berisiko tinggi guna mendukung pengelolaan kesehatannya.

Secara berkelanjutan, AKR terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan menerapkan standar tertinggi dalam aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Komitmen tersebut diwujudkan dengan pencapaian angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) dan tidak terdapatnya penyakit akibat kerja.

Driver AKR adalah tenaga kerja yang memiliki peran vital dalam mendukung distribusi produk dan logistik, mengangkut produk dengan aman dan tepat waktu ke berbagai lokasi, serta memastikan kondisi kendaraan dan barang yang dibawa tetap dalam keadaan baik. Untuk meningkatkan keselamatan kerja, Perseroan mewajibkan seluruh *driver* untuk menjalani pemeriksaan *fit to work* setiap hari sebelum memulai tugas. Langkah ini bertujuan memastikan para *driver* dalam kondisi fisik yang optimal dan siap bekerja dengan aman, sehingga keselamatan karyawan, lingkungan, dan produk dapat terjaga. Kampanye kesiap-sediaan saat mengemudi, dan tips/trik untuk menghindari kondisi kerja yang tidak aman, dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, Perseroan juga secara aktif memberikan edukasi kesehatan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media. Salah satu bentuk edukasi ini adalah penerbitan *newsletter* kesehatan yang dirilis secara rutin setiap tiga bulan sekali. Perseroan juga memasang poster-poster kesehatan di berbagai area kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya kesehatan.






















PT AKR Corporindo Tbk

06

Governansi Perusahaan

> Kesuksesan AKR dalam beradaptasi dan bertransformasi tidak terlepas dari konsistensi Perseroan dalam menerapkan governansi. AKR dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika industri yang terus berubah serta mendorong peningkatan kinerja yang konsisten di berbagai fase.

Pencapaian Governansi Perusahaan

Mempertahankan kinerja keuangan AKR secara konsisten di tengah berbagai siklus ekonomi dan dinamika politik, dengan mencatatkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) laba netosebesar 16% sejak tahun 2005.

AKR tetap menjadi konstituen utama dalam Indeks ESG utama di Bursa Efek Indonesia.

Tingkat kepercayaan investor saham AKRA terlefleksi dari peningkatan kapitalisasi pasar 2024 dan terjadi peningkatan harga saham sebesar secara rerata 8% dan peningkatan jumlah investor lokal yang signifikan mencapai 25.247.

Konsistensi jumlah investor yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik di tahun 2024, bahkan dinobatkan sebagai KEK terbaik.

Aktivitas perdagangan saham AKRA berjalan dengan wajar dan Perseroan tidak mendapatkan teguran dari regulator dan bursa.

ESG Sustainalytics terjaga di Medium Risk **20,3**

ESG SnP Global meningkat menjadi **37**, terjaga di atas rata-rata industri

AKR dapat menjaga posisinya di dalam konstituen Indeks saham utama dan ESG:

- Index LQ 45
- IDX 30
- Investor 33
- Bisnis 27
- MSCI SMALL CAPS INDEX
- IDX Sharia Growth
- Kompas100
- Pefindo I-Grade 30
- TOP 8 IDX ESG Star Listed Company
- ESG Quality 45 IDX KEHATI
- ESG Sector Leaders IDX KEHATI
- IDX LQ45 Low Carbon Leaders

Penghargaan:

1. **Top 20 GCG Awards 2024**
   The Iconomics
2. **Outstanding Achievement in Sustainability & Governance**
   SPEx2 Award 2024
3. **Top 50 Big Capitalization Public Listed Company 2024**
   IICD
4. **The Best Indonesia Annual Report Award 2024**
   Gold Predicate (Excellent)
   by Economic Review
5. **The Best Execution Winner in Distribution & Logistic Industry**
   SPEX2 Award 2024
6. **TOP 3 Best Biodiversity Disclosure**
   7th Global Conference ESG Management & Sustainability
7. **The Best Logistics Company in Oil and Gas Distribution Category**
   from Bisnis Indonesia Logistics Awards 2024
8. **Badan Usaha BBM Terbaik Kategori Besar**
   BPH Migas Awards 2024
9. **Indonesia Biggest Companies 2024**
   by Fortune Indonesia 100



AKR menetapkan standar tinggi dalam menerapkan governansi perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. Penerapan governansi perusahaan terus dilakukan secara konsisten guna memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan mencakup pemegang saham, karyawan, konsumen, *supplier*, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat umum.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan industri yang semakin kompleks, AKR bertekad untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan struktur, proses, dan mekanisme sesuai dengan dinamika yang terjadi. Perseroan secara berkala melakukan review untuk memastikan penerapan *best practices* yang selaras dengan standar yang berlaku dalam lingkup nasional dan internasional yaitu POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), dan ASEAN Corporate Governance Scorecard revised October 2023.

Komitmen nyata AKR dalam menerapkan governansi perusahaan diwujudkan melalui Visi dan Misi, Nilai Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi, Deklarasi Pakta Integritas, Pedoman Etika dan Perilaku, serta kebijakan governansi lainnya. Selain itu, AKR juga menerapkan sustainability dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aspek Lingkungan Hidup, Ekonomi, dan Tata Kelola/*Environmental*, *Social*, and *Governance* (ESG).

Aktivitas governansi perusahaan sepanjang tahun 2024 meliputi:

1. Melaksanakan RUPS tanggal 29 April 2024 yang menyetujui beberapa hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai kinerja Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
   b. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
   c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris.
   e. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya Direksi.
   f. Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program*/MESOP)
2. Pembagian dividen sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 27 Mei 2024 untuk dividen 2023 dan pada tanggal 15 Agustus 2024 untuk dividen interim 2024, dengan rasio >50%.
3. Memperbaharui kebijakan laporan kepemilikan saham AKRA atau setiap perubahan yang dimiliki oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tanggal 5 Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan POJK No. 4 Tahun 2024, di mana pelaporan transaksi dirubah dari 10 hari kalender menjadi 3 hari kerja.
4. Mengeluarkan kebijakan *Sustainable Procurement*.
5. Mengeluarkan kebijakan Perlindungan Anti Korupsi.
6. Pelaksanaan sosialisasi kode etik terbaru ke seluruh karyawan AKR BU mencakup kantor cabang, diikuti dengan penandatanganan pakta integritas oleh 1.654 karyawan.

Komitmen Membangun Governansi Perusahaan

AKR berkomitmen untuk memperkuat governansi perusahaan sebagai dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan operasional. Sebagai penyedia layanan logistik dan rantai pasok terkemuka, Perseroan memegang peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan memfasilitasi perdagangan produk-produk esensial di berbagai industri. AKR bertekad untuk memberikan nilai tambah, memenuhi kebutuhan pelanggan, berperan sebagai mitra strategis bagi pemasok, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta menciptakan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sekretaris Perusahaan memegang peran krusial dalam menjaga transparansi dan kepatuhan. Sekretaris Perseroan bertanggung jawab untuk mengomunikasikan informasi terkait regulasi dan bisnis kepada badan governansi Perseroan. Seiring dengan perkembangan regulasi dan korporasi, Sekretaris Perusahaan memastikan penyebaran informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan eksternal secara tepat waktu, guna mendorong transparansi serta keselarasan dengan tujuan Perseroan.

Governansi perusahaan merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan AKR, yang memastikan praktik bisnis yang etis dan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi. Karyawan mengakui bahwa governansi perusahaan merupakan pendorong utama keunggulan operasional dan penciptaan nilai jangka panjang. Untuk menerapkan praktik terbaik, AKR memastikan bahwa setiap badan governansi menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku, dengan berlandaskan prinsip etika, integritas, serta komitmen untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan.

Landasan Penerapan Governansi Perusahaan

AKR menerapkan governansi perusahaan dengan berpedoman dan berlandaskan pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Struktur Perseroan & Hak Pemegang Saham:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
   c. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014).
2. Governansi & Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
   b. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
3. Praktik Terbaik Governansi & Standar Regional:
   a. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
   b. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF); dan
   c. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip Penerapan Governansi Perusahaan

AKR terus memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip governansi secara konsisten dan komprehensif berlandaskan pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021. Sebagai bentuk aktualisasi dari prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kewajaran, PUGKI 2021 merupakan pemutakhiran dari PUGKI 2019 guna menyusun budaya governansi internal setiap korporasi.

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi atas perkembangan praktik governansi perusahaan sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam menyempurnakan penerapan governansi di lingkungan AKR. Penerapan governansi perusahaan berlandaskan pada 4 (empat) pilar yaitu:



Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kerangka governansi Perseroan dan memperkuat dedikasinya terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.



Prinsip Dasar dan Pedoman Implementasi

Prinsip	Penjelasan Prinsip Dasar	Pedoman Pokok Pelaksanaan
Perilaku Beretika	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	• Perseroan membuka akses terhadap informasi dan memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan. • Perseroan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. • Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karir tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain.
Transparansi	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan Informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	• Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. • Perseroan mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan hal penting bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda Pembangunan berkelanjutan.	Perseroan mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dapat terpelihara dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Selain pilar-pilar tersebut, Perseroan juga menerapkan 8 (delapan) prinsip governansi perusahaan antara lain; peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; komposisi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris; perilaku etis; manajemen risiko, pengendalian *intern*, dan kepatuhan; pengungkapan dan transparansi; hak-hak pemegang saham; dan hak-hak pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok:
1. Kelompok prinsip pertama, kedua, dan ketiga adalah prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kelompok prinsip keempat, kelima, dan keenam adalah prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Kelompok prinsip ketujuh dan kedelapan adalah prinsip yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Prinsip-prinsip governansi perusahaan dijelaskan dalam tabel berikut:

Definisi	Pedoman Pokok Pelaksanaan
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.	Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.
Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.
Perilaku Etis	
Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.
Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan	
Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.
Pengungkapan dan Transparansi	
Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.	Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.

Definisi	Pedoman Pokok Pelaksanaan
Hak-hak Pemegang Saham	
Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.
Hak-Hak Pemangku Kepentingan	
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Tujuan Governansi Perusahaan

Penerapan governansi di lingkungan Perseroan bertujuan untuk:
1. Mengoptimalkan potensi dan nilai perusahaan serta Insan yang ada di dalamnya agar memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga integritas serta kredibilitas di mata seluruh pemangku kepentingan.
2. Menjaga pengelolaan perusahaan yang profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi Organ-organ perusahaan.
3. Menjaga Organ perusahaan agar dapat merumuskan keputusan yang independen dilandasi nilai moral serta asas kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong kesadaran insan perusahaan terhadap tanggung jawab kepada pemangku kepentingan serta keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
5. Mendorong penciptaan benefit di setiap wilayah operasional perusahaan maupun di setiap bidang bisnis yang dikembangkan.

Kerangka Governansi Perusahaan

AKR menerapkan governansi perusahaan melalui 3 (tiga) kerangka kerja (*governance framework*) yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* untuk meningkatkan *best practices*. Kerangka kerja yang menjadi landasan atas dasar semua tindakan Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip governansi antara lain:

Struktur Governansi Perusahaan	Proses Governansi Perusahaan	Hasil Governansi Perusahaan
• Organ Utama • Organ Pendukung • Infrastruktur	• Pemenuhan hak Pemegang Saham dan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham. • Pemenuhan hak Pemangku Kepentingan. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. • Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.	• Memaksimalkan nilai Perseroan. • Meningkatkan daya saing Perseroan. • Mendorong pengelolaan Perseroan secara transparan dan efisien. • Mendorong organ Perseroan agar menjalankan perusahaan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. • Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ Perseroan. • Mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan. • Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Struktur Governansi Perusahaan

Organ governansi perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keberadaan organ tersebut fundamental dalam menetapkan visi, misi, serta capaian Perseroan, sehingga penting untuk menjaga sinergi dan harmonisasi antara organ-organ Perseroan.

AKR juga memiliki organ pendukung sebagai bagian dari pembagian wewenang yang jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar governansi perusahaan secara efektif. Tujuan pembentukan organ governansi adalah untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip governansi yang terstruktur dan sistematis, di mana setiap organ diharapkan memahami fungsi dan tugasnya secara jelas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

1. **RUPS**
   RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. **Dewan Komisaris**
   Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
   Untuk mendukung pengawasan governansi, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite berikut:
   a. Komite Audit;
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. **Direksi**
   Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
   Organ Pendukung:
   a. Sekretaris Perusahaan;
   b. Audit Internal;
   c. Hubungan Investor.

Struktur Tata Kelola

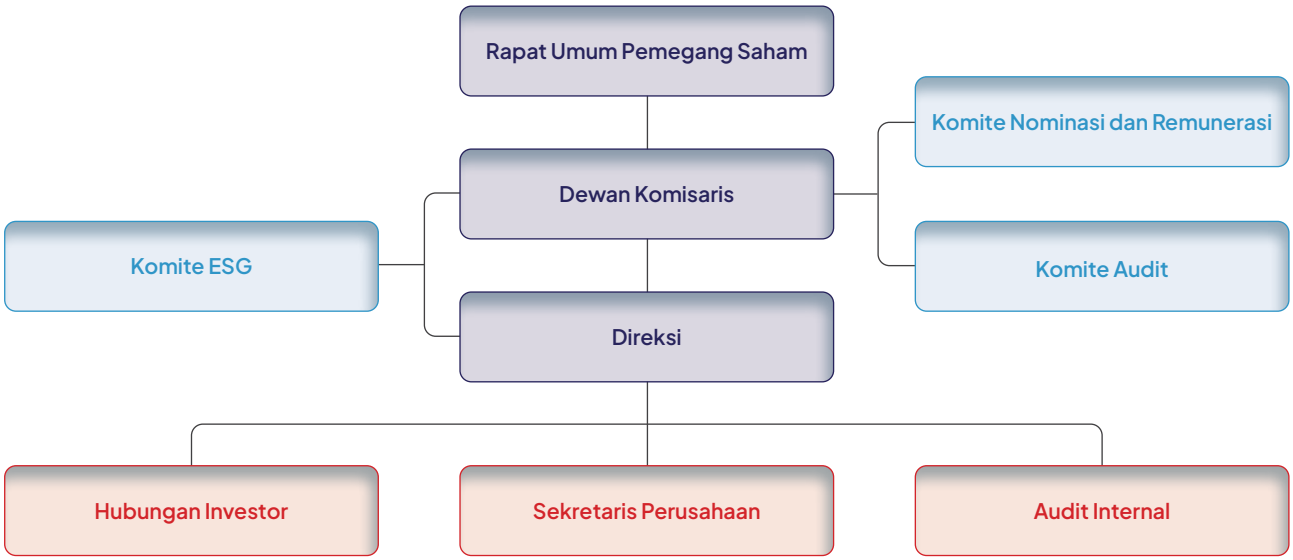

Governance Soft Structure

Keberadaan struktur governansi harus didukung oleh perangkat kebijakan atau *governance soft structure* agar penerapan governansi dapat berjalan efektif dan terarah. Perangkat kebijakan dan pedoman di AKR berfungsi sebagai panduan bagi setiap Insan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. AKR telah menetapkan perangkat kebijakan yang telah disepakati bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Perangkat kebijakan dan Pedoman mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh organ di lingkungan Perseroan yang mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan serta undang-undang yang berlaku. Perangkat kebijakan governansi perusahaan yang telah ditentukan AKR antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Piagam Komite Audit;
4. Piagam Audit Internal;
5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Kebijakan Manajemen Risiko;
7. *Whistleblowing System* & Kebijakan Anti Korupsi; dan
8. Kode Etik.

Mekanisme Governansi Perusahaan

AKR membentuk mekanisme governansi untuk mengatur harmonisasi setiap organ Perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan organ pendukung yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Di sisi lain, fungsi pengelolaan dijalankan oleh Direksi dibantu oleh organ pendukung yakni Unit Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Hubungan Investor.

Dalam menjalankan bisnisnya, AKR mendorong penguatan internalisasi budaya governansi kepada seluruh Insan Perseroan. Melalui penerapan kebijakan yang konsisten, Perseroan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan jangka panjang. Pelaksanaan governansi di AKR difokuskan pada 3 (tiga) hal utama yaitu:

Compliance	*Confidence*	*Transparency*
Merupakan prinsip kepatuhan Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik di semua aspek, termasuk penerapan kebijakan Perseroan.	Merupakan penanaman sikap optimis dan percaya diri bahwa Perseroan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh Pemangku Kepentingan.	Menunjukkan bahwa Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi investor.

Perseroan berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip governansi perusahaan melalui 2 (dua) pendekatan utama yaitu internalisasi nilai-nilai tata kelola kepada seluruh karyawan di setiap proses bisnis, serta penguatan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal. Adapun rincian dari kedua pendekatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Internalisasi Perseroan	*Exposure* Eksternal Perseroan
• Prosedur Pengadaan Barang • Prosedur Seleksi Pegawai • Prosedur Penerimaan • Prosedur Pelaporan • Prosedur Pemasaran	• Kegiatan hubungan investor (*briefing* laporan triwulanan, presentasi investor, konferensi, *roadshow*, pertemuan khusus yang dihadiri oleh investor dan analis). • Paparan publik tahunan. • Penyampaian keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI. • Update *website* Perseroan secara berkala (www.akr.co.id). • Penyebaran informasi secara berkala berupa *news release* kepada para pemangku kepentingan.



Penilaian Penerapan Governansi Perusahaan

AKR secara berkala melakukan penilaian penerapan governansi perusahaan sebagai bagian dari mekanisme check and balance untuk mengukur kualitas implementasi tata kelola. Penilaian governansi memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku serta standar etika bisnis. Selain itu, Penilaian governansi juga berperan dalam membangun dan memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penilaian GCG dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu *self-assessment* berdasarkan peraturan OJK oleh internal Perseroan dan penilaian yang mengadopsi Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Metode tersebut menggunakan parameter yang diakui secara umum untuk memastikan penilaian yang objektif dan kredibel.

Self-Assessment

Penilaian penerapan governansi perusahaan berbasis *self-assessment* berdasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Penilaian dilakukan dengan sistematis dan komprehensif melalui berbagai aspek yaitu struktur governnasi (*governance structure*), governansi proses (*governance process*), dan hasil governansi (*governance outcome*).

1. Struktur Governansi
   Perseroan menilai kecukupan struktur dan infrastruktur governansi yang dimiliki dalam menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. Proses Governansi
   Perseroan menilai efektivitas proses penerapan prinsip governansi sebagaimana didukung dengan kecukupan struktur dan infrastruktur, agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Governansi
   Perseroan menilai kualitas hasil governansi untuk melihat struktur dan proses governansi telah dilakukan dengan baik dan sesuai harapan pemangku Kepentingan.

Self-assessment di AKR melibatkan Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor untuk menghasilkan penilaian yang efektif dan efisien. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan untuk keperluan *self-assessment* terkait kecukupan dan efektivitas penerapan governansi perusahaan. Berbagai temuan yang ada akan menjadi benchmark bagi AKR untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi agar dapat meningkatkan kualitas governansi di lingkup Perseroan.

AKR melakukan telaah terhadap temuan yang ada serta tindak lanjutnya dari pihak internal dan eksternal mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, *Human Resource*, Internal Audit, dan Komite ESG, serta menampung berbagai temuan dari pemegang saham, lembaga rating, masyarakat, media dll.

Rekomendasi dan tindak lanjut atas *self-assessment* tahun 2024 penerapan governansi perusahaan di antaranya:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Memastikan pelaporan kepemilikan saham oleh Direksi/ Dewan Komisaris sesuai dengan POJK Terbaru.	Memperbaharui kebijakan laporan kepemilikan saham untuk menyesuaikan pelaporan sesuai dengan POJK No. 4 tahun 2024 dan ASEAN Scorecard.
Memotivasi seluruh insan AKR untuk terlibat dalam memonitor pelaksanaan governansi di dalam Perseroan.	Mensosialisasikan *whistleblowing system* yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan Perseroan.
Memastikan Direksi dan Dewan Komisaris selalu mengedepankan prinsip-prinsip governansi perusahaan.	Memberikan update kepada Direksi dan Dewan komisaris mengenai pedoman tata kelola terbaru dan standar-standar keberlanjutan yang dijadikan acuan oleh investor/pemegang saham.

Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal yang dilakukan oleh AKR adalah penilaian berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mengadopsi standar penilaian praktik governansi berdasarkan prinsip *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). ACGS adalah instrumen penilaian tata kelola yang dikembangkan oleh A*SEAN Capital Market Forum* (ACMF).

AKR melakukan penilaian ACGS terakhir pada tahun 2021 dari Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD) dan PT RSM Indonesia Konsultan. Penilaian tersebut didasarkan pada informasi publik, terutama pada Laporan Tahunan 2021 dan situs web Perseroan. Berdasarkan penilaian tersebut, penerapan governansi perusahaan telah melampaui kepatuhan terhadap persyaratan minimal dan mengadopsi

sebagian standar internasional yang isyaratkan ACGS. Total skor AKR sebesar 84,45 (Level 3: *Good*) berada jauh di atas rata-rata skor BigCap100 73,63 dan mid cap 65,38 untuk ACGS 2021.

Untuk Tahun Buku 2024, Perseroan belum melaksanakan penilaian terbaru berdasarkan kriteria ACGS. Meskipun demikian, Perseroan terus berupaya mempertahankan hasil penilaian sebelumnya dengan memperhatikan setiap aspek yang dinilai serta melakukan penyempurnaan secara berkala pada setiap parameter guna memastikan penerapan governansi yang optimal.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur governansi AKR yang berfungsi sebagai sarana bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak dan wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS sebagai forum untuk melaporkan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi, dan lain-lain.

Para pemegang saham dalam RUPS memiliki hak untuk memutuskan hal-hal material yang berkaitan dengan keberlanjutan Perseroan dan memberikan pendapat serta memperoleh Informasi terkait Perseroan. Pengambilan Keputusan dalam RUPS diambil secara wajar dan transparan melalui musyawarah atau mekanisme pemungutan suara dari pemegang saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan.

Kepentingan seluruh pemegang saham minoritas senantiasa diperhatikan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan gagasan dan ide yang membangun bagi Perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan memiliki mekanisme tertentu yang melibatkan Komisaris Independen dimana tidak mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas tertentu.

Penyelenggaraan RUPS mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan Anggaran Dasar Perseroan, meliputi:

1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun; dan
2. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai kebutuhan apabila diperlukan oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris/pemegang saham.

Untuk meningkatkan keterlibatan pemegang saham dan memastikan penerapan transparansi, Departemen Hubungan Investor secara proaktif mengirimkan undangan guna mendorong partisipasi pemegang saham menghadiri RUPS, Selain itu, *Investor Relation* juga berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu ISS *Research* untuk mendapatkan suara awal dari pemegang saham

Wewenang RUPS

RUPS adalah organ utama dalam governansi yang memiliki wewenang, meliputi:

1. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan.
5. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
6. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit keuangan Perseroan.
8. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
9. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
10. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Prosedur pelaksanaan RUPS diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan berpedoman pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka meliputi:

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ke OJK melalui surat Perseroan.
2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam daftar Pemegang Saham Perseroan.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme:
   a. hadir dalam rapat secara fisik atau
   b. hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Perseroan akan memastikan para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat menggunakan haknya dengan:
   a. Mengotorisasi proxy elektronik ("e-Proxy") melalui platform Elektronik Sistem Rapat Umum (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang dapat diakses melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan https://easy.ksei.co.id ("Aplikasi eASY.KSEI"), sebagai mekanisme e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat dan tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Tata cara e-Proxy dapat diakses melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
   b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah di situs Perseroan dan dapat diunduh di situs Perseroan, memberikan kuasa kepada penerima kuasa (untuk hadir dan memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat) pada situs www.akr.co.id dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat.
7. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk:
   a. Melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.00 – 09.30 dengan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya.
8. Kuorum kehadiran dan mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat.
   a. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. (Pasal 11 ayat 3 anggaran dasar Perseroan).
   b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan (Pasal 11 ayat 2 anggaran dasar Perseroan).
   c. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 11 ayat 3 anggaran dasar Perseroan).
   d. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 11 ayat 14 anggaran dasar Perseroan). Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
   e. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat 18 anggaran dasar Perseroan).
9. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
   a. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami yang akan membagikan formulir pertanyaan.
   b. Pertanyaan diberikan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki.
   c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya.
   d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung.
   e. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
   f. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu, dan dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
   g. Demi kelancaran jalannya Rapat dan untuk efisiensi waktu, Ketua Rapat berhak untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan pada setiap Mata Acara Rapat.

10. Tata Cara Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
    a. Untuk setiap mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
    b. Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan serta setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.
    c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
    d. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat).
    e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat.

Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Perseroan telah mengatur hak-hak pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Pemegang Saham atau kuasa mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan Mata Acara RUPS dan hal-hal lain yang berhubungan Mata Acara RUPS yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
4. Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara dalam RUPS. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.



Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

RUPS Tahunan

AKR menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2024 secara *hybrid* – fisik dan *online* yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham dan perwakilan dari lembaga/profesi penunjang pasar modal. Keputusan Rapat dituangkan dalam Akta No. 17 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Proses Pelaksanaan RUPST		
Hari/Tanggal		Senin, 29 April 2024
Waktu		10.11 s.d 12.02 WIB
Tempat		AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia.
Kehadiran		**Dewan Komisaris** **Soegiarto Adikoesoemo*** Presiden Komisaris **Sofyan A. Djalil** Komisaris **Mohamad Fauzi Maulana Ichsan** Komisaris Independen **Direksi** **Haryanto Adikoesoemo** Presiden Direktur **Jimmy Tandyo** Direktur **Bambang Soetiono Soedijanto*** Direktur **Mery Sofi*** Direktur **Suresh Vembu** Direktur **Nery Polim** Direktur **Termurti Tiban** Direktur *) Hadir melalui media telekonferensi pada Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").
	Pemegang Saham hadir secara langsung/ melalui kuasa	17.264.646.770 saham (87,472759%) hadir di Rapat dari total 19.737.169.600 saham (total saham yang beredar dikurangi jumlah treasury stock sebesar 336.305.000 saham). Perhitungan ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 April 2024 sampai Pukul 16.00 WIB. Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal: 1. Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat) dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. 2. Bapak Harsoyo dan Ibu Lusiany Lugina dari PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan). 3. Bapak Benyanto Suherman, dari Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*). 4. Konsultan Hukum, Bapak Iwan Setiawan S.H. dari Makes & Partners Law Firm.

Tahapan Pelaksanaan RUPST	
Pemberitahuan RUPST kepada OJK	13 Maret 2024 Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Maret 2023 melalui surat Nomor 022/L-AKR-CS/2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk.
Pengumuman RUPST	20 Maret 2024 • Dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. • Dipublikasikan pada situs *website* resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan *website* resmi Perseroan yaitu www.akr.co.id
Pemanggilan dan Informasi mengenai Mata Acara RUPST	5 April 2024 Dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan RUPST.
Pelaksanaan RUPST	29 April 2024 Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI menyediakan platform E-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Rapat diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sehingga Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Agenda ke-1				
Mata Acara	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	392.052.881 (2,270842%)	16.863.960.789 (97,679153%)	8.633.100 (0,050005%)	**17.256.013.670** **(99,949996%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00252/2.1032/AU.1/05/0685-4/1/III/2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-2				
Mata Acara	Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	218.096.688 (1,263256%)	17.046.549.982 (98,736743%)	100 (0,000001%)	**17.264.646.670 (99,999999%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp2.780.349.511.000,00, sebagai berikut: a. sebesar Rp200.000.000,00 untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; b. sebesar Rp2.467.146.200.000,00 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,73% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan 2 (dua) kali sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan: Dividen Interim 1 • Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp986.858.480.000,00 atau Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu. Dividen Interim 2 • Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp493.429.240.000,00 atau Rp25,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat ini. Jumlah Saham yang Beredar adalah 19.737.169.600 saham, setelah dikurangi treasury stock sejumlah 336.305.000 saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. sedangkan sisanya sejumlah Rp313.003.311.000,00 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-3				
Mata Acara	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	218.096.688 (1,263256%)	15.555.907.360 (90,102668%)	1.490.642.722 (8,634076%)	**15.774.004.048 (91,365924%)**
Keputusan RUPST	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. 2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-4				
Mata Acara	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	218.096.688 (1,263256%)	15.829.506.341 (91,687403%)	1.217.043.741 (7,049341%)	**16.047.603.029 (92,950659%)**
Keputusan RUPST	1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan sebanyak 13× dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 29 April 2023 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-5				
Mata Acara	Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau MESOP) dengan jumlah sebanyak 156.500.000 saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	290.171.688 (1,680728%)	13.669.479.360 (979,176131%)	3.304.995.722 (19,143141%)	**13.959.651.048 (80,856859%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian Saham Treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atau disebut sebagai Program MESOP, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi yang tergabung di dalam Komite MESOP Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			



Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

RUPS Tahunan

AKR menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 28 April 2023 secara *hybrid* – fisik dan *online* oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham dan perwakilan dari lembaga/profesi penunjang pasar modal. Keputusan Rapat dituangkan dalam Akta No. 46 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H, Notaris di Jakarta.

Proses Pelaksanaan RUPST		
Hari/Tanggal		Jumat, 28 April 2023
Waktu		09.14 s.d 11.01 WIB
Tempat		AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia.
Kehadiran		**Dewan Komisaris** **Soegiarto Adikoesoemo*** Presiden Komisaris **I Nyoman Mastra** Komisaris **Mohamad Fauzi Maulana Ichsan** Komisaris Independen **Direksi** **Haryanto Adikoesoemo** Presiden Direktur **Jimmy Tandyo** Direktur **Bambang Soetiono Soedijanto*** Direktur **Mery Sofi*** Direktur **Suresh Vembu** Direktur **Nery Polim** Direktur **Termurti Tiban** Direktur *) Hadir melalui media telekonferensi pada Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").
	Pemegang Saham hadir secara langsung/ melalui kuasa	16.693.420.654 saham (84,57859%) hadir di Rapat dari total 19.737.169.600 saham (total saham yang beredar dikurangi jumlah treasury stock sebesar 336.305.000 saham). Perhitungan ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2023 sampai Pukul 16.00 WIB. Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal: 1. Notaris Aulia Tufani, S.H (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat) dari Kantor Notaris Aulia Tufani, S.H. 2. Bapak Sapto Budi dan Ibu Lusiany Lugina dari PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan). 3. Bapak Benyanto Suherman, dari Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*). 4. Konsultan Hukum, Bapak Antonius Setianto SH., LL.M., dari Makes & Partners Law Firm.

Tahapan Pelaksanaan RUPST	
Pemberitahuan RUPST kepada OJK	14 Maret 2023 Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 009/L-AKR-CS/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk.
Pengumuman RUPST	21 Maret 2023 • Dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. • Dipublikasikan pada situs *website* resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan *website* resmi Perseroan yaitu www.akr.co.id
Pemanggilan dan Informasi mengenai Mata Acara RUPST	6 April 2023 Dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan RUPST.
Pelaksanaan RUPST	28 April 2023 Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI menyediakan platform E-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Rapat diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sehingga Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Agenda ke-1				
Mata Acara	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	314.163.455 (1,88196%)	16.360.189.049 (98,00381%)	19.068.150 (0,11423%)	**16.674.352.504** **(99,88577%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 21 Maret 2023 Nomor 00305/2.1032/AU.1/05/0685-1/1/III/2023. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2023.			

Agenda ke-2				
Mata Acara	Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	113.296.400 (0,67868%)	16.580.123.254 (99,32131%)	1.000 (0,00001%)	**16.693.419.654 (99,99999%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp2.403.334.889.000,00 (dua triliun empat ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) a. sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; b. sebesar Rp1.480.287.720.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 61,593% (enam puluh satu koma lima sembilan tiga persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, setelah dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan: Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp493.429.240.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) atau Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar saat itu adalah 19.737.169.600 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham, setelah dikurangi treasury stock sejumlah 336.305.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu) saham. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar saat ini adalah 19.737.169.600 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham, setelah dikurangi treasury stock sejumlah 336.305.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu) saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. sedangkan sisanya sejumlah Rp922.847.169.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2023.			

Agenda ke-3				
Mata Acara	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	113.296.500 (0,67869%)	15.393.140.633 (92,21082%)	1.186.983.521 (7,11049%)	**15.506.437.133 (92,88951%)**
Keputusan RUPST	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2023 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. 2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2023, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2023.			

Agenda ke-4				
Mata Acara	Perubahan susunan pengurus Perseroan.			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	113.296.400 (0,67869%)	16.569.267.854 (99,25628%)	10.856.400 (0,06503%)	**16.682.564.254 (99,93497%)**
Keputusan RUPST	1. Menerima pengunduran diri Bapak I Nyoman Mastra sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian Perseroan mencatat pengabdian berharga yang diberikan oleh Bapak I Nyoman Mastra dan menyampaikan harapan terbaik serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan jasa-jasa yang telah diberikan Bapak I Nyoman Mastra khususnya selama menjabat sebagai Komisaris dan Komite Nominasi Remunerasi Perseroan. 2. Mengangkat Bapak Sofyan Djalil sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2025. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2023.			

Agenda ke-5				
Mata Acara	Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya Direksi Perseroan			
Hasil dari Pemungutan Suara	Abstain	Setuju	Tidak setuju	**Total setuju**
	120.414.400 (0,72133%)	16.540.912.412 (99,08642%)	32.093.842 (0,19225%)	**16.661.326.812 (99,80775%)**
Keputusan RUPST	1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan sebanyak 13× dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 29 April 2023 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2023.			

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara kolektif kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan. Segala bentuk pengawasan dan pemberian keputusan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan terbaik Perseroan serta pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan bisnis AKR dan mendorong efektivitas penciptaan nilai jangka panjang.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan prinsip-prinsip governansi secara efektif. Dewan Komisaris senantiasa berperan dalam mengarahkan strategi Perseroan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*)

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah bagian dari struktur kebijakan atau *governance soft structure* di lingkungan AKR yang menjadi pedoman khusus bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Charter* Dewan Komisaris telah disahkan pada tanggal 30 November 2015. Pengesahan ini telah ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Direksi sebagai perwakilan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

Board Charter Dewan Komisaris berisi tentang tata laksana kerja serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhadap *Board Charter* dan pemutakhiran jika dipandang perlu, sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi *Board Charter* Dewan Komisaris membahas perihal:
1. Landasan Hukum & Ketentuan Umum
2. Akuntabilitas
3. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
4. Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Nilai, Etika, dan Waktu Kerja
7. Benturan Kepentingan
8. Transparansi
9. Rapat Dewan Komisaris
10. Penilaian dan Pertanggungjawaban
11. Lain-lain

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal dan Board Charter Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham melalui keputusan RUPS dengan memperhatikan visi dan misi Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Dewan Komisaris dapat menjabat kembali untuk periode jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Presiden Komisaris, Komisaris, dan Komisaris Independen. Tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga keanggotaan Dewan Komisaris hingga batas waktu penyampaian Laporan Tahunan ini disajikan pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	Dasar Pengangkatan Pertama	Tanggal Pengangkatan Kembali	Akhir Masa Jabatan
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	Indonesia	RUPS 21 November 1992	RUPS 30 April 2020	2025
Sofyan A. Djalil	Komisaris	Indonesia	RUPS 28 April 2023	-	2025
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen	Indonesia	RUPS 30 April 2020	-	2025

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan *Board Charter* Perseroan, antara lain:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan sesuai regulasi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha di antaranya berdasarkan:
   a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
   b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
   c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
   d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
   e. Rencana strategis Perseroan.
   f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.
   g. Menyetujui dan mereview secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Perseroan.
5. Dewan Komisaris memastikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi, sebagai bentuk penerapan bisnis berkelanjutan.
6. Dewan Komisaris menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas penerapan Strategi, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan Perseroan yang diperlukan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta Keberlanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk:
   a. Komite Audit
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi
   c. Komite lain yang diperlukan dalam mengawasi Tata Kelola Perusahaan

   Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Piagam Komite masing-masing.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
10. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
12. RUPS sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
14. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal.
15. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
17. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris akan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

Nilai-Nilai

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpegang pada nilai-nilai yang telah ditetapkan Perseroan meliputi:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi nilai-nilai yang diberlakukan di Perseroan, yaitu:
   a. Memiliki Jiwa Kewirausahaan
   b. Berkolaborasi
   c. Menghargai Kinerja Tinggi
   d. Tangkas
   e. Memberdayakan Tim
   f. Tidak Berkompromi
2. Setiap anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan governansi perusahaan serta Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas- tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
6. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.
7. Anggota Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat melakukan pinjaman kepada Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kolektif dengan pembagian peran yang jelas untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap kinerja Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki tugas spesifik yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman masing-masing, baik dalam mengawasi aspek keuangan, operasional, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, maupun aspek strategis lainnya. Pembagian tugas ini dilakukan agar pengawasan berjalan optimal serta mampu memberikan rekomendasi yang tepat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris juga senantiasa memastikan komite penunjang fungsi pengawasan yang telah dibentuk menjalankan tugasnya sejalan dengan rencana kerja Dewan Komisaris dan *Board Charter*. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan anggota pada komite penunjang Dewan Komisaris. Pendelegasian anggota Dewan Komisaris pada komite mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pada masing-masing komite tersebut. Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris. 3. Menelaah laporan-laporan dan usulan yang diterima dari anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
Sofyan A. Djalil	Komisaris	1. Menelaah dan melakukan pengawasan terkait rencana bisnis yang disampaikan oleh Direksi, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha Perseroan. 2. Menelaah dan melakukan pengawasan terkait pengembangan usaha dan kegiatan operasional logistik yang dijalankan oleh Direksi Perseroan.
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen	1. Menelaah dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perseroan dan anak-anak perusahaan. 2. Menelaah dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan. 3. Menelaah hasil-hasil diskusi dari Komite Audit dengan Direksi, Internal Audit dan Auditor Independen yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Benturan kepentingan Dewan Komisaris terjadi ketika terdapat potensi kepentingan pribadi anggota Dewan Komisaris yang berlawanan dengan tujuan Perseroan dalam menghasilkan laba, mewujudkan visi misi Perseroan, dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan yang berpotensi terhadap keberlangsungan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai langkah mitigasi untuk menghindari potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
3. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi.
   b. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
   c. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
   d. Memastikan Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan keterbukaan informasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS, jika diperlukan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap keputusan strategis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan Perseroan. Keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. Penunjukkan Pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Pembagian Dividen Interim
3. Pendirian Perusahaan
4. Fasilitas Pinjaman

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Melalui rapat-rapat yang direalisasikan, Dewan Komisaris meninjau perihal manajemen Perseroan, mengevaluasi kinerja Perseroan, serta laporan dari Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan, diskusi, dan arahan kepada Direksi mengenai rencana strategis Perseroan untuk tahun 2024, di antaranya:

1. Pemantauan atas kondisi persaingan bisnis dan kondisi ekonomi makro serta kesesuaian strategi pertumbuhan.
2. Pemantauan transisi pemerintahan dan pengambil kebijakan dan langkah antisipatif yang diperlukan.
3. Pengawasan terhadap perubahan peraturan dan pelaksanaan inisiatif keberlanjutan.
4. Pengawasan terhadap antisipasi Perseroan atas dampak perubahan iklim dan perkembangan bisnis energi terbarukan di JIIPE.
5. Pengawasan atas pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi kepada investor.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan implementasi whistleblowing system.

Keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai keputusan dan persetujuan dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	21 Maret 2024	178/C-CL/2024	Penunjukkan Pimpinan RUPS 2024
2	29 Juli 2024	522/C-CL/2024	Persetujuan Pembagian Dividen Interim Tahun buku 2024 AKR
3	9 Agustus 2024	506/C-CL/2024	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
4	9 Agustus 2024	507/C-CL/2024	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
5	9 Agustus 2024	508/C-CL/2024	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
5	9 Agustus 2024	506/C-CL/2024	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
6	9 Agustus 2024	507/C-CL/2024	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
7	9 Agustus 2024	508/C-CL/2024	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit

Rekomendasi Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi terhadap laporan kinerja, kajian risiko, serta pemantauan terhadap pencapaian target Perseroan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan selaras dengan visi dan misi Perseroan, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan nasihat penting kepada Direksi di antaranya:

1. Mengawal kesesuaian kinerja dengan arahan yang telah ditentukan.
2. Mengedepankan netralitas dan sikap supportif untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintahan baru.
3. Memperhatikan risiko Keuangan dan menjaga kedisiplinan penerapan business model.
4. Memperhatikan risiko dampak perubahan iklim terhadap bisnis Perseroan.
5. Mempersiapkan informasi yang tepat kepada investor terkait perkembangan kinerja Perseroan.
6. Memperkuat tata Kelola Perusahaan dan kekuatan manajemen di tengah ketatnya kompetisi.
7. Menjalankan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang dimonitor di dalam AKR Horizon 2030.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi bertujuan untuk mempercepat pemahaman Dewan Komisaris terhadap visi, misi, strategi, serta operasional Perseroan. Program ini dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai struktur organisasi, model bisnis, kinerja keuangan, aspek hukum dan regulasi, serta prinsip governansi perusahaan yang diterapkan oleh Perseroan. Melalui program orientasi ini, anggota Dewan Komisaris dapat lebih cepat beradaptasi dan menjalankan perannya secara efektif dalam fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, sehingga program orientasi tidak dilaksanakan. Seluruh anggota Dewan Komisaris tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

AKR berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris guna memastikan efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan workshop yang mencakup aspek governansi, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta tren dan dinamika industri. Partisipasi dalam forum diskusi dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi bagian dari upaya untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap isu-isu strategis yang relevan bagi Perseroan.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan kompetensi yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama dan Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Penyelenggara
1.	**Mohamad Fauzi Maulana Ichsan** Komisaris Independen	Persiapan dan Implementasi PSAK 117 Kontrak Asuransi	23 Juli 2024	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penilaian Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris

Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi merupakan komite penunjang Dewan Komisaris AKR yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas masing-masing komite mengacu pada pedoman kerja yang telah ditetapkan, dengan fokus utama pada pengawasan aspek keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, serta pengelolaan suksesi dan imbal balik.

Penilaian kinerja komite dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap komite menjalankan tugasnya secara optimal dan sesuai dengan prinsip governansi. Evaluasi ini mencakup kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif, komitmen dan integritas, kemampuan melakukan analisis terhadap aspek-aspek finansial dan operasional Perseroan, serta kualitas saran/rekomendasi yang terkait dengan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan.

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk penguatan peran komite, penyempurnaan mekanisme kerja, penentuan masa tugas, serta peningkatan kompetensi anggota komite guna memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memadai, termasuk dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif terkait evaluasi risiko dan pemantauan pelaksanaan kebijakan keuangan dan operasional. Komite Audit juga secara aktif melakukan kajian atas laporan keuangan, memastikan transparansi dalam proses audit, serta berkoordinasi dengan auditor internal dan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Di sisi lain, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi yang memadai berdasarkan hasil review yang dilakukan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi terhadap struktur remunerasi, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan prinsip kehati-hatian, serta mendukung retensi dan motivasi terbaik bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tugas utama Komisaris Independen adalah memberikan perspektif yang objektif dan tidak bias dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam melaksanakan perannya, Komisaris Independen diharapkan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Perseroan senantiasa mengedepankan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, serta menjaga integritas dan transparansi dalam governansi perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris AKR telah mematuhi peraturan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan bahwa terdapat minimal satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen harus memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan perspektif objektif dalam pengambilan keputusan. Kriteria atau persyaratan Komisaris Independen mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan menetapkan Komisaris Independen yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya.
2. Komisaris independen diangkat berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
   b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
   c. Komisaris Independen juga tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen Perseroan, antara lain:

Pernyataan Independensi	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.	✓

Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab secara kolegial kepada RUPS atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi senantiasa menjaga kepentingan Perseroan dan mendorong pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta menerapkan prinsip governansi perusahaan di seluruh tingkatan organisasi.

Pelaksanaan tugas Direksi dilakukan secara efektif dengan berfokus pada pengelolaan operasional, pengambilan keputusan strategis, serta peningkatan efisiensi dan daya saing usaha. Dengan manajemen yang terstruktur dan berbasis prinsip kehati-hatian, Direksi berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan serta memastikan pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis AKR di tengah dinamika industri dan tantangan pasar.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (*Board Charter*)

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi adalah bagian dari struktur kebijakan atau *governance soft structure* di lingkungan AKR yang menjadi pedoman khusus bagi Direksi dalam menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Charter* Direksi telah disahkan pada tanggal 30 November 2015. Pengesahan ini telah ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Direksi sebagai perwakilan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

Board Charter Direksi berisi tentang tata laksana kerja serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Direksi secara berkala melakukan *review* terhadap *Board Charter* dan pemutakhiran jika dipandang perlu, sesuai kebutuhan Direksi dan perkembangan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Charter* memuat informasi mengenai:

1. Landasan Hukum & Ketentuan Umum
2. Akuntabilitas
3. Komposisi dan Kriteria Direksi
4. Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi
5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
6. Nilai, Etika, dan Waktu Kerja
7. Benturan Kepentingan
8. Transparansi
9. Rapat Direksi
10. Penilaian dan Pertanggungjawaban
11. Lain-lain

Komposisi Direksi

Komposisi dan jumlah Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal dan *Board Charter* Direksi. Komposisi Direksi ditetapkan oleh pemegang saham melalui keputusan RUPS dengan memperhatikan visi dan misi Perseroan sehingga dapat memastikan efektivitas dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis. Direksi dapat menjabat kembali untuk periode jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

Direksi Perseroan terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan komposisi seorang Presiden Direktur dan beberapa anggota Direksi. Komposisi Direksi diupayakan agar menunjukkan keberagaman keahlian/pengalaman/pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin dan independensi.

Di tahun 2024, Direksi beranggotakan 7 (tujuh) orang di mana terdapat 1 (satu) Presiden Direktur, 6 (enam) Direksi. Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, sehingga komposisi Direksi hingga 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	Dasar Pengangkatan Pertama	Tanggal Pengangkatan Kembali	Akhir Masa Jabatan
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	Indonesia	RUPS 21 November 1992	RUPS 30 April 2020	2025
Jimmy Tandyo	Direktur	Indonesia	RUPS 26 Januari 1985	RUPS 30 April 2020	2025
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 5 April 1994	RUPS 30 April 2020	2025
Mery Sofi	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 27 Juni 2006	RUPS 30 April 2020	2025

Nama	Jabatan	Warga Negara	Dasar Pengangkatan Pertama	Tanggal Pengangkatan Kembali	Akhir Masa Jabatan
Suresh Vembu	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 18 Mei 2009	RUPS 30 April 2020	2025
Nery Polim	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 15 Mei 2012	RUPS 30 April 2020	2025
Termurti Tiban	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 5 Mei 2015	RUPS 30 April 2020	2025

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab diuraikan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Direksi merumuskan strategi bisnis dan kebijakan sejalan dengan visi misi Perseroan dan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul dengan selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial serta tata kelola dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sebagai bentuk penerapan bisnis berkelanjutan.
4. Direksi melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja Perseroan agar tetap dalam koridor rencana strategis dan keselarasan dengan bisnis lainnya maupun rencana anggaran, melalui rapat secara berkala dengan Manajemen Senior Perseroan.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Keberlanjutan, Direksi Perseroan membentuk:
   a. Internal Audit, *Quality Assurance*, & *Risk Management*;
   b. Satuan Kerja ESG dan Komite ESG.
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. Mendapatkan barang-barang tidak bergerak dengan harga pasar di atas Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
   b. Melepaskan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan yang jumlahnya di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) baik nilai pasar maupun nilai buku atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
   c. Meminjam uang atas nama Perseroan;
   d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta;
   e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg/avalist*);
   f. Mendirikan anak-anak perusahaan;
   g. Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
   h. Membuat perjanjian atas nama Perseroan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun serta bernilai melebihi 5% (lima persen) dari total nilai Pendapatan Perseroan.
7. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
10. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
11. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur dan di dalam hal Presiden Direktur tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
15. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Direksi akan diatur tersendiri oleh Direksi dalam suatu Keputusan Direksi berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi dilakukan berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas fungsi tertentu guna memastikan efektivitas pengelolaan Perseroan serta pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Meskipun setiap anggota Direksi memiliki tugas spesifik, keputusan tetap diambil secara kolegial dalam rapat Direksi untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan Perseroan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, Direksi dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, meningkatkan koordinasi, serta mengoptimalkan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	1. Menentukan visi dan misi Perseroan, dan memastikan agar visi dan misi Perseroan dilaksanakan oleh seluruh manajemen Perseroan termasuk anak-anak perusahaan. 2. Menyetujui Rencana Bisnis baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha, sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan akhir. 3. Memastikan terlaksananya rencana-rencana strategis Perseroan melalui sistem pengendalian dan evaluasi rencana kerja dan anggaran. 4. Melakukan penyempurnaan dan penerapan manajemen risiko, dan memastikan agar jalannya Perseroan dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. 5. Memastikan agar kegiatan Perusahaan mengadopsi ketentuan *Safety, Health & Environment*, termasuk mengadopsi langkah-langkah untuk perlindungan Lingkungan yang mencakup pengurangan penggunaan energi dan meningkatkan distribusi energi bersih/terbarukan. 6. Untuk tanggung jawab tersebut, Presiden Direktur dibantu oleh 6 orang direktur yang masing masing mengelola direktorat yang berbeda.
Jimmy Tandyo	Direktur	1. Memastikan agar visi dan misi *Business Unit* dilaksanakan oleh seluruh manajemen Perseroan. 2. Menyetujui rencana Bisnis Perseroan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha, sebelum diajukan kepada Presiden Direktur. 3. Memastikan terlaksananya rencana-rencana strategis Perseroan melalui sistem pengendalian dan evaluasi rencana kerja dan anggaran. 4. Memastikan agar Rencana Bisnis *Business Unit* yang telah ditetapkan dapat dicapai. 5. Memastikan agar jalannya *Business Unit* dilakukan sesuai dengan *Good Corporate Governance*. 6. Memastikan agar kegiatan *Business Unit* mengadopsi ketentuan *Safety, Health & Environment*. 7. Memastikan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan nilai Perusahaan. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	1. Bertanggung jawab atas pengelolaan supply chain dan logistik Perseroan. 2. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasi logistik Perusahaan (*supply chain*). 3. Memastikan kegiatan operasi logistik mengadopsi ketentuan *Safety, Health & Environment*. 4. Secara berkala melakukan improvement dan inovasi guna efisiensi dan meningkatkan kinerja operasi logistik. 5. Melakukan pengembangan fasilitas logistik untuk menunjang peningkatan kegiatan usaha Perusahaan. 6. Menyempurnakan SOP terkait dengan kegiatan operasi logistik dari waktu ke waktu. 7. Bertanggung jawab atas proyek Kawasan industri dan Pelabuhan terintegrasi JIIPE, mencakup operasional, pemasaran, dan hubungan dengan pihak eksternal. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Mery Sofi	Direktur	Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar antara lain: 1. Bertanggung jawab atas trading dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar. 2. Melakukan pengembangan Produk dan usaha di bidang BBM dan kimia. 3. Menjalin hubungan jangka panjang dengan para pemasok dan para pelanggan. 4. Menjalankan manajemen risiko terkait kegiatan trading dan distribusi yang meliputi diantaranya pengendalian biaya, ketersediaan barang, dan prosedur pengiriman barang. 5. Bersama-sama dengan Direktur Keuangan melakukan pengendalian terhadap risiko akibat dari penentuan biaya, harga maupun perpajakan. 6. Memberikan arahan terkait kegiatan operasional pemasaran untuk meningkatkan kualitas layanan. 7. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk melakukan analisa bisnis melalui peningkatan sistem IT dan digitalisasi. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Suresh Vembu	Direktur	Bertanggung jawab atas *Corporate Finance*, hubungan investor serta divisi *Corporate Secretary* Perseroan, antara lain: 1. Mengembangkan dan menerapkan strategi komersial dan mengembangkan divisi bisnis perusahaan bersama-sama dengan mitra dan mengawasi pencapaian tujuan bisnis. 2. Berkolaborasi dengan mitra untuk membangun dan menjaga bisnis yang menguntungkan, menetapkan target keuangan, dan memantau kinerja. 3. Tanggung jawab keseluruhan untuk memantau Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa pemegang saham, otoritas pasar modal, investor, analis, dan publik menerima informasi yang tepat waktu, lengkap dan akurat tentang semua hal yang material.
Nery Polim	Direktur	1. Menyusun strategi penjualan bersama Kepala Kantor Cabang dan bagian komersial. 2. Mendorong pencapaian target penjualan di Kantor Cabang. 3. Menanamkan manajemen dan operasi cabang praktik terbaik di seluruh wilayah. 4. Memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan operasi divisi/wilayah masing-masing. 5. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan lingkungan kerja yang kondusif di Region. 6. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Termurti Tiban	Direktur	1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perseroan. 2. Memastikan agar pengelolaan keuangan Perseroan dilakukan dengan kehati-hatian dengan meminimalisasi risiko keuangan. 3. Mengelola modal kerja Perseroan. 4. Memastikan agar biaya-biaya keuangan (*cost of fund*) dan lain-lain dapat ditekan seminimal mungkin. 5. Melakukan pengelolaan terhadap Pajak Perseroan termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. 6. Mengkoordinasi penyusunan budget Perseroan dan melakukan kontrol atas penggunaan budget yang sudah ditetapkan. 7. Memastikan Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan PSAK dan POJK serta dilaporkan tepat waktu. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.

Nilai-Nilai

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpegang pada nilai-nilai yang telah ditetapkan Perseroan meliputi:

1. Etika kerja Direksi berpedoman kepada Pedoman Etika dan Perilaku PT AKR Corporindo Tbk.
2. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:
   a. Memiliki Jiwa Kewirausahaan
   b. Berkolaborasi
   c. Menghargai Kinerja Tinggi
   d. Tangkas
   e. Memberdayakan Tim
   f. Tidak Berkompromi
3. Setiap anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.
4. Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan governansi perusahaan serta Anggaran Dasar Perseroan.
5. Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
6. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
7. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan benturan kepentingan dilakukan melalui penerapan kebijakan tata kelola yang ketat, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pedoman etika bisnis yang berlaku di Perseroan.

Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan yang berpotensi terhadap keberlangsungan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Adapun prinsip yang diterapkan Direksi sebagai upaya menghindari konflik kepentingan dan implikasi lanjutan yang mungkin ditimbulkan, sebagai berikut:

1. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
2. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ekonomis yang bertentangan dengan kepentingan ekonomis pribadi seorang anggota Direksi yang dapat merugikan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
3. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Hingga akhir tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2025 & evaluasi strategi Perseroan 2024.
2. Melakukan identifikasi risiko Perseroan dan menyusun strategi dalam memasuki tahun 2024 & 2025.
3. Menetapkan langkah strategis dalam menghadapi kompetisi segmen perdagangan dan distribusi.
4. Menetapkan target dan strategi pemasaran JIIPE.
5. Menetapkan AKR Horizon 2030 sebagai AKR Sustainability Progress Tracker.
6. Menelaah rencana program promosi dan rotasi serta remunerasi.
7. Melakukan pengawasan atas kinerja Anak Perusahaan.
8. Melaksanakan pembayaran dividen atas kinerja tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024.
9. Mengevaluasi strategi penggunaan *Artificial Intellegence* dalam mencapai *operational excellence*.
10. Mengevaluasi proyek ekspansi ke Indonesia bagian timur.
11. Menetapkan strategi pengembangan bisnis yang mendukung perkembangan JIIPE, di antaranya dengan membentuk JV yang akan membantu pelayanan logistik dan penyediaan energi.
12. Mengevaluasi strategi ekspansi dan pemasaran bp AKR.
13. Menyusun strategi komunikasi investor.
14. Mengadakan *Public Expose* Tahunan dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Investor dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Keputusan Direksi

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah memberikan berbagai keputusan dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal
1.	18 Maret 2024	Keputusan Direksi terkait Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2024
2.	23 Juli 2024	Keputusan Pembagian Dividen Interim AKR 2024
3.	13 Desember 2024	Keputusan Anggaran Perseroan untuk Tahun 2025

Program Orientasi Direksi

AKR menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat guna mempercepat pemahaman mereka terhadap struktur organisasi, model bisnis, strategi, serta governansi perusahaan yang diterapkan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai Perseroan. Dengan adanya program orientasi ini, Direksi diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan Perseroan.

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, sehingga tidak melaksanakan program orientasi.

Pengembangan Kompetensi Direksi

AKR berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi Direksi guna memastikan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seminar, serta *workshop* yang mencakup aspek kepemimpinan, governansi perusahaan, regulasi, manajemen risiko, keuangan, serta tren industri yang relevan.

Selain itu, Direksi juga didorong untuk mengikuti forum bisnis, konferensi nasional maupun internasional, serta sertifikasi profesional guna memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap tantangan bisnis yang dihadapi. Adapun keikutsertaan Direksi dalam program pelatihan, sertifikasi, seminar atau *workshop* hingga akhir tahun 2024, antara lain:

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1.	**Suresh Vembu** Direktur	ESG Investing : What is it and why investors care about it?"	25 April 2024	Zoom	IDX
		Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem	27 Juni 2024	Zoom	IDX
		Indonesia International Sustainability Forum 2024	5 September 2024	Jakarta	• Kemenko Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan • KADIN • Mckinsey
		ESG Risk Ratings - Benefits of Navigating Material ESG Risks and Communicating Material ESG Risks with Stakeholders	18 September 2024	Zoom	IDX
		CDP's Webinar "Advancing Nature-based Finance in Asia	22 Oktober 2024	Zoom	CDPnature
		Responsible Supply Chain	3 Desember 2024	Zoom	IDX

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
2.	**Termurti Tiban** Direktur	Sosialisasi AEO	29 Januari 2024	Jakarta	Pihak DJBC AEO
		Permata Market Outlook : Anticipacing the Return of twin deficit and the Fed's Long and Winding Road	1 April 2024	Jakarta	PERMATA
		S&P Global Ratings and PEFINDO 2nd Annual Indonesia Credit Spotlight: Credit Trends Under A New Administration	15 Mei 2024	Jakarta	PEFINDO
		Undangan Rakerkonas APINDO	29 Agustus 2024	Surabaya	APINDO
		Sosialisasi PDP (Perlindungan Data Pribadi)	16 Oktober 2024	Jakarta	ADCO Law
		Training PBTaxand - Core Tax dan Nota Dinas No. 14 (Juklak Natura)	18 November 2024	Jakarta	PB Taxand
		Economic Outlook Permata "Beyond Commodities : Unveiling Indonesia's Economic Potential"	3 Desember 2024	Jakarta	PERMATA
		Forum Group Discussion dengan BPH Migas	6 Desember 2024	Jakarta	AKR

Penilaian Kinerja Komite Penunjang Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, AKR tidak memiliki komite penunjang Direksi. Namun, terdapat organ pendukung Direksi yakni Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Hubungan Investor.

Perseroan secara berkala melakukan penilaian kinerja terhadap organ pendukung Direksi guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengelolaan Perseroan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator, termasuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, komitmen dan integritas, kemampuan melakukan analisis terhadap aspek-aspek finansial dan operasional Perseroan, serta kualitas saran/rekomendasi yang terkait dengan pengelolaan Perseroan.

Pelaksanaan tugas organ pendukung Direksi mengacu pada pedoman kerja yang telah ditetapkan, memastikan bahwa tugasnya dilaksanakan secara terarah dan efisien. Direksi menilai dan mengevaluasi kinerja organ pendukung yang dilakukan secara individual ataupun kolegial. Hasil dari evaluasi kinerja ini kemudian dijadikan dasar oleh Direksi dalam penentuan masa tugas masing-masing anggota organ pendukung.

Di tahun 2024, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Hubungan Investor telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditentukan. Ketiga fungsi ini berperan penting dalam mendukung efektivitas governansi perusahaan, transparansi, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Sekretaris Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta kelancaran komunikasi antara Perseroan dan pemegang saham. Audit Internal telah menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Sementara itu, Hubungan Investor berperan dalam menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek bisnis Perseroan.

Independensi dan Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan serta setiap perubahan kepemilikan sahamnya di Perseroan. AKR telah memiliki kebijakan terkait laporan kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan No. 001/R-AKR-CS/2024, dengan mekanisme penyampaian laporan sebagai berikut:

1. Rencana transaksi jual beli saham AKRA oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan, dapat dilaporkan dalam bentuk *range* tanggal, melalui Formulir Rencana Transaksi Saham dilengkapi Pernyataan Perjanjian.
2. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham AKRA perlu mengisi dan menandatangani *Form* Pernyataan Perubahan Kepemilikan Saham dan menyampaikan kepemilikan saham tersebut kepada Perseroan yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada Sekretaris Perusahaan.
3. Pelaporan tersebut dilakukan dengan menyerahkan bukti transaksi saham segera setelah terjadi transaksi (H-0) atau paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah terjadinya transaksi.
4. Sekretaris Perusahaan akan memberikan *Form* Pernyataan Perubahan Kepemilikan Saham yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang dikuasakan secara pribadi. Kemudian laporan perubahan kepemilikan atau perubahannya tersebut ke OJK akan dibuat sesuai format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang ditandatangani oleh yang bersangkutan untuk disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.
5. Sekretaris Perusahaan juga akan mengedarkan *Form* Pernyataan Kepemilikan Saham secara berkala setiap tahun untuk memantau pergerakan kepemilikan saham Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan keluarganya. *Form* ini wajib dikembalikan kepada Sekretaris Perusahaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diedarkan.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah terjadinya transaksi. Laporan perubahan kepemilikan tersebut juga wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Adapun kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi di AKR per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di AKR
Dewan Komisaris		
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	101.604.800
Sofyan A. Djalil	Komisaris	-
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen	-
Direksi		
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	205.604.600
Jimmy Tandyo	Direktur	39.000.000
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	4.780.000
Mery Sofi	Direktur	2.303.000
Suresh Vembu	Direktur	3.727.500
Nery Polim	Direktur	1.050.000
Termurti Tiban	Direktur	450.000

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi AKR senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Seluruh hubungan afiliasi yang dimiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi masih memenuhi peraturan yang berlaku.

Nama	Dewan Komisaris			Direksi							Pemegang Saham Pengendali	
	GIK	SDJ	FIC	HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER	GIK	HAR
Dewan Komisaris												
Soegiarto Adikoesoemo	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
Sofyan A. Djalil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direksi												
Haryanto Adikoesoemo	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Jimmy Tandyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bambang Soetiono Soedijanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mery Sofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suresh Vembu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nery Polim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termurti Tiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan

√ : Ya
- : Tidak
GIK : Soegiarto Adikoesoemo
SDJ : Sofyan A. Djalil
FIC : Mohamad Fauzi Maulana Ichsan

HAR : Haryanto Adikoesoemo
JTA : Jimmy Tandyo
BSU : Bambang Soetiono Soedijanto
MES : Mery Sofi
SVE : Suresh Vembu
NPO : Nery Polim
TER : Termurti Tiban

- Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris: Presiden Direktur Perseroan, Bapak Haryanto Adikoesoemo, adalah putera dari Bapak Soegiarto Adikoesoemo yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali: Presiden Direktur Perseroan, Bapak Haryanto Adikoesoemo, adalah Presiden Direktur dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Ayah beliau, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, merupakan Presiden Komisaris dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama.
- Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali: Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, adalah salah satu pemegang saham dan Presiden Komisaris di PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Putera beliau, Bapak Haryanto Adikoesoemo, merupakan Presiden Direktur dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan mengatur kebijakan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi guna memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal tanpa adanya konflik kepentingan atau penurunan efektivitas kerja. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki rangkap jabatan di entitas lain wajib memastikan bahwa keterlibatan tersebut tidak mengganggu kinerja dan komitmennya terhadap Perseroan. Selain itu, setiap rangkap jabatan harus dilaporkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta menjaga transparansi dalam struktur kepemimpinan Perseroan.

Ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan rangkap jabatan Direksi

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
2. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi AKR telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan yang telah ditetapkan POJK. Pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 telah diungkapkan pada bab 3 Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan menerapkan prinsip keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi guna memastikan adanya perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan strategis. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis kelamin, pengalaman, latar belakang profesional, serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Saat ini 3 (tiga) dari 7 (tujuh) anggota Direksi atau 42,8% di antaranya adalah Perempuan.

Persentase Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Jenis Kelamin



Dengan keberagaman dalam struktur kepemimpinan, Perseroan dapat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika industri serta mengoptimalkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Kombinasi antara pengalaman yang luas dan keahlian yang spesifik memungkinkan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan dengan lebih efektif, sehingga dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman
Dewan Komisaris					
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	Pria	87	Sekolah Menengah Atas	Mendirikan PT AKR Corporindo Tbk di tahun 1960–an.
Sofyan A. Djalil	Komisaris	Pria	71	Ph.D di bidang Hukum dan Kebijakan Pasar Modal dari Fletcher School of Law and Diplomacy – Tufts University	Memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di sektor publik maupun swasta di pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri di berbagai bidang.
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen	Pria	55	Master of Science, Development Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, USA	Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pemerintahan (baik sebagai pembuat maupun pengatur kebijakan), riset ekonomi dan pasar, serta di bidang perbankan dan keuangan.
Direksi					
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	Pria	62	Executive Management Program dari Harvard Business School	Berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang perdagangan, manajemen, pengembangan bisnis dan keuangan.
Jimmy Tandyo	Direktur	Pria	73	Advanced Management Program dari Harvard Business School	Berpengalaman lebih dari 50 tahun di manajemen dan pengembangan bisnis.
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	Pria	63	Sarjana Akuntansi STIE Surabaya	Berpengalaman lebih dari 30 tahun di manajemen, keuangan dan pengembangan bisnis.
Mery Sofi	Direktur	Wanita	58	Advanced Management Program, Northwestern University	Berpengalaman lebih dari 25 tahun di keuangan, manajemen dan pengembangan bisnis.
Suresh Vembu	Direktur	Pria	60	Bachelor of Commerce dari Bangalore University dan Chartered Accountant dari Indian Institute of Chartered Accountants	Berpengalaman lebih dari 35 tahun di keuangan, manajemen dan kepatuhan.
Nery Polim	Direktur	Wanita	60	Sarjana Ekonomi dari California State University of Bakersfield	Berpengalaman lebih dari 30 tahun di manajemen sumber daya manusia, manajemen dan pengembangan bisnis.
Termurti Tiban	Direktur	Wanita	54	Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti	Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan dan akuntansi.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk membahas kinerja Perseroan, memberikan arahan strategis, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam dua bulan dan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan.

Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hal ini didasarkan pada Pedoman Kerja atau *Board Charter* dan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Ketentuan dan tata tertib rapat Dewan Komisaris secara lengkap dimuat dalam *Board Charter* Dewan Komisaris.

Setiap rapat didokumentasikan melalui risalah rapat yang mencatat agenda pembahasan, keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang diperlukan. Risalah rapat tersebut akan ditandatangani pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir. Syarat pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus memenuhi peserta minimal 2/3 (kuorum).

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat		
			GIK	SDJ	FIC
1.	21 Maret 2024	Penunjukan Pemimpin RUPS Tahunan pada 29 April 2024	✓	✓	✓
2.	29 Juli 2024	Persetujuan Pembayaran Dividen Interim	✓	✓	✓
3.	9 Agustus 2024	Persetujuan Fasilitas Pinjaman	✓	✓	✓
Jumlah Rapat			3	3	3
Jumlah Kehadiran			3	3	3
% Kehadiran			100%	100%	100%

Keterangan

GIK : Soegiarto Adikoesoemo
SDJ : Sofyan A. Djalil
FIC : Mohamad Fauzi Maulana Ichsan

Adapun Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan uraian agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat									
			Kehadiran Dewan Komisaris			Kehadiran Direksi						
			GIK	SDJ	FIC	HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
1.	18 Maret 2024	Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan Auditor Independen PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
2.	23 April 2024	Pembahasan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2024 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit) PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat									
			Kehadiran Dewan Komisaris			Kehadiran Direksi						
			GIK	SDJ	FIC	HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
3.	23 Juli 2024	Pembahasan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2024 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit) PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	23 Oktober 2024	Pembahasan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada yanggal tersebut (tidak diaudit) PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Kehadiran			4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
% Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%

Keterangan

GIK : Soegiarto Adikoesoemo
SDJ : Sofyan A. Djalil
FIC : Mohamad Fauzi Maulana Ichsan
HAR : Haryanto Adikoesoemo
JTA : Jimmy Tandyo
BSU : Bambang Soetiono Soedijanto
MES : Mery Sofi
SVE : Suresh Vembu
NPO : Nery Polim
TER : Termurti Tiban

Pelaksanaan Rapat Direksi

Direksi secara rutin mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja operasional, membahas strategi bisnis, serta mengambil keputusan penting dalam pengelolaan Perseroan. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh anggota Direksi atau permintaan Dewan Komisaris, dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Ketentuan dan tata tertib rapat Direksi secara lengkap dimuat dalam *Board Charter*.

Setiap rapat didokumentasikan melalui risalah rapat yang mencatat agenda, hasil diskusi, keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang diperlukan. Risalah rapat tersebut dibuatkan oleh Sekretaris Perusahaan yang telah ditandatangani pimpinan rapat serta seluruh anggota Direksi yang hadir. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir. Syarat pengambilan keputusan dalam rapat Direksi harus memenuhi peserta minimal 2/3 (kuorum).

Pada tahun 2024, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dan rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat Direksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat						
			HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
1	22 Januari 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	20 Februari 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	20 Maret 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	22 April 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	20 Mei 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
6	21 Juni 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
7	19 Juli 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	28 Agustus 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	20 September 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	21 Oktober 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	21 November 2024	Tinjauan kinerja bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat			11	11	11	11	11	11	11
Jumlah Kehadiran			11	11	11	11	9	11	11
% Kehadiran			100%	100%	100%	100%	82%	100%	100%

Keterangan

HAR : Haryanto Adikoesoemo
JTA : Jimmy Tandyo
BSU : Bambang Soetiono Soedijanto
MES : Mery Sofi
SVE : Suresh Vembu
NPO : Nery Polim
TER : Termurti Tiban

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self assessment* atau dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga. Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
2. Tingkat kehadiran dan keaktifan dalam rapat Dewan Komisaris;
3. Tingkat kehadiran dan keaktifan dalam rapat Komite (jika menjadi anggota Komite);
4. Saran dan masukan yang diberikan dalam proses pengawasan Perseroan;
5. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu; dan
6. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

Di sisi lain, penilaian kinerja Direksi baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna memastikan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Perseroan atau individu Direksi, baik dengan menilai kewajaran laporan keuangan, pencapaian rasio-rasio keuangan dan pangsa pasar, maupun pencapaian komponen-komponen lain yang tercantum dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi.

Adapun indikator penilaian kinerja Direksi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Pedoman Kerja Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;

3. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS;
4. Pencapaian kinerja Perseroan
   a. Aspek keuangan;
   b. Aspek operasional;
   c. Aspek administrasi;
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

Proses penilaian dilakukan berdasarkan parameter yang objektif, termasuk kontribusi individu dan kolektif, efektivitas pengawasan dan pengelolaan, serta pencapaian kinerja keuangan dan operasional. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kapasitas, penyempurnaan strategi, serta penguatan governansi perusahaan. Dengan mekanisme penilaian yang transparan dan sistematis, Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dapat terus berkontribusi dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Hasil penilaian akan dilaporkan kepada pemegang saham yang memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam melalui mekanisme RUPS.

Adapun sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini didasarkan pada kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* governansi perusahaan. Selain itu, Perseroan dapat menjaga kinerja keuangan dan operasional yang positif dengan mencatat laba neto dalam 15 tahun terakhir sebesar 19%.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Nominasi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta integritas calon yang sesuai dengan kebutuhan strategis Perseroan. Nominasi dilakukan secara transparan dan objektif, mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip governansi perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam melakukan telaah dan rencana suksesi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Proses ini mencakup evaluasi kualifikasi, rekam jejak, serta kesesuaian calon dengan visi dan misi Perseroan. Keputusan akhir mengenai pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS guna memastikan legitimasi serta dukungan penuh dari pemegang saham terhadap kepemimpinan Perseroan.

Pengangkatan dan Kriteria Dewan Komisaris

Melalui mekanisme RUPS, Perseroan memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan termasuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris. Kemudian, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membahas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat dalam rapat nominasi termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.

Kriteria dan persyaratan pengangkatan kandidat Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kandidat Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria akan dipilih, kemudian diangkat dengan persetujuan RUPS, adapun kriteria tersebut antara lain:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Satu orang dimana anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan diupayakan agar menunjukkan keberagaman keahlian/pengalaman/pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin dan independensi.
4. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
5. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

6. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - Pernah menyebabkan sebuah perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada otoritas Jasa Keuangan.
   e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
   f. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
   g. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

Pengangkatan dan Kriteria Direksi

Wewenang penuh atas pengangkatan dan pemberhentian Direksi termasuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi, hanya dimiliki oleh forum RUPS. Pemegang saham pengendali dapat memberikan rekomendasi kandidat anggota Direksi. Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membahas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS.

Kriteria dan persyaratan pengangkatan kandidat Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kandidat Direksi sesuai dengan kriteria yang akan dipilih, kemudian diangkat dengan persetujuan RUPS, adapun kriteria tersebut antara lain:

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya.
3. Komposisi Direksi Perseroan diupayakan agar menunjukkan keberagaman keahlian/pengalaman/pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin dan independensi.
4. Mempunyai akhlak, moral, integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
5. Cakap melakukan perbuatan hukum.
6. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
   b. Tidak pernah menjadi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
9. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
10. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
11. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
    a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
    b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. dan/atau
    c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara transparan dan objektif dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing anggota dalam pengelolaan dan pengawasan Perseroan. Proses ini mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik governansi perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan pemegang saham dalam RUPS. Pengajuan usulan dan besaran remunerasi diberikan oleh Dewan Komisaris. Perseroan memastikan bahwa kebijakan remunerasi tetap kompetitif, sejalan dengan pencapaian kinerja Perseroan, serta mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam kepemimpinan perusahaan. Prosedur remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi digambarkan sebagai berikut:



Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi pada tahun 2024 yang dikelompokkan berdasarkan imbalan jasa kerja dan imbalan pasca kerja sebagai berikut:

dalam Ribuan Rupiah

Deskripsi	2024		2023	
	Imbalan Jangka Pendek	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Jangka Pendek	Imbalan Pasca Kerja
Dewan Komisaris	24.366.897	-	21.074.204	-
Direksi	107.379.782	2.326.944	97.898.811	2.652.036

Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi, yang beroperasi sesuai dengan Piagam atau *Board Charter* masing-masing komite. Setiap komite memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai serta latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite pendukung yang berperan dalam mengawasi penerapan governansi perusahaan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan akuntan publik, dengan mempertimbangkan aspek independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, setiap Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk memiliki Komite Audit.

Berpedoman pada peraturan tersebut, Perseroan memiliki Komite Audit yang berperan mendukung tugas Dewan Komisaris, termasuk menelaah informasi keuangan, manajemen risiko, efektivitas audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal.

Piagam Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada 29 Desember 2004. Piagam ini telah mengalami beberapa pembaruan, dengan revisi terakhir yang disahkan pada 18 Maret 2024. Secara berkala, Piagam Komite Audit dievaluasi dan diperbaharui agar tetap selaras dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Piagam tersebut mengatur berbagai aspek, antara lain:

1. Pendahuluan
2. Maksud dan Tujuan
3. Tanggung Jawab
4. Sasaran Tugas
5. Wewenang
6. Program Kerja
7. Struktur dan Keanggotaan
8. Rapat-Rapat
9. Pelaporan
10. Penutup

Komposisi Komite Audit

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, salah satunya adalah Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua. Anggota lainnya wajib memenuhi persyaratan independensi, di antaranya tidak menjadi karyawan Perseroan dalam satu tahun terakhir dan tidak merangkap jabatan di komite lain dalam periode yang sama. Berikut adalah komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Ketua/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 139 tanggal 11 Mei 2020	2020–2025
Sahat Pardede	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 139 tanggal 11 Mei 2020	2020–2025
Djisman Simandjuntak	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 092 tanggal 16 Maret 2020	2020–2025

Profil Anggota Komite Audit



Mohamad Fauzi Maulana Ichsan

Ketua Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Mei 2020

Periode Masa Jabatan
Periode ke-1, Tahun 2020–2025

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.



Sahat Pardede

Anggota Komite Audit

Masa Jabatan
Periode ke-2, Tahun 2020–2025

Tempat Tanggal Lahir
Balige, 3 Oktober 1961

Usia
63 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 139 tanggal 11 Mei 2020

Riwayat Pendidikan
- Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1989); dan
- MBA dari Universitas Saint Mary di Kanada (1993).

Riwayat Jabatan
- Partner dari KAP Independen Sahat Handoko & Partners (2001 - sekarang);
- Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1983– 2000).

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Audit PT Petrosea Tbk (2022–sekarang);
- Anggota Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2021–sekarang);
- Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (2020–sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.



Djisman Simandjuntak

Anggota Komite Audit

Masa Jabatan
Periode ke-1, Tahun 2020–2025

Tempat Tanggal Lahir
Sipahutar - Tapanuli Utara, 1 Januari 1947

Usia
78 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 092 tanggal 16 Maret 2020

Riwayat Pendidikan
- Ph.D Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, University of Cologne, Jerman (1983);
- Diploma Monetary Economic and Public Finance, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, University of Cologne, Jerman (1979);
- Sarjana Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1973).

Riwayat Jabatan
- Co-Founder, Chairman, Advisory Board, The Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD) (1999–2011);
- Research Consultant, Asian Development Bank (1980–1990);
- Auditor, Sgv-Utomo, Jakarta (1973 – 1974).

Rangkap Jabatan
- Presiden dan Independen Komisaris PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2018–sekarang);
- Professor of Business Economic dan Rektor Universitas Prasetiya Mulya (2016–sekarang);
- Presiden Komisaris PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2015–sekarang);
- Komisaris Independen PT Asuransi MSIG Indonesia (2012–sekarang);
- Chairman, Board of Directors, Centre For Strategic And International Studies (CSIS) Foundation (2005 – sekarang);
- Presiden Komisaris PT Indomarco Prismatama Tbk (2000–sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit telah memenuhi standar independensi yang ditetapkan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara profesional, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tabel berikut menunjukkan tingkat independensi masing-masing anggota Komite Audit.

Aspek Independensi	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Sahat Pardede	Djisman Simandjuntak
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan pada AKR, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada AKR	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Piagam Komite Audit memuat rincian mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Audit, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris tentang perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan.
4. Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjutnya atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi.

Komite Audit memiliki wewenang antara lain:

1. Mengakses data, dokumen, dan informasi lainnya tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan audit internal dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Bila diperlukan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas tanggungan Perseroan. Kewenangan ini atas izin Dewan Komisaris.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi Komite Audit

Komite Audit memiliki fungsi utama antara lain:

1. Melaporkan hasil evaluasi pengelolaan risiko kepada Dewan Komisaris untuk menanggulangi potensi terjadinya risiko yang dapat mengganggu berjalannya usaha.
2. Mengevaluasi kinerja Perseroan dan anak perusahaannya secara rutin (triwulan, semester, dan tahunan) mengenai pencapaian target usaha, kondisi pasar dan tren, prediksi kinerja di masa mendatang, juga melaporkan temuan serta memberi saran demi terjadinya peningkatan kinerja Komisaris.
3. Menyampaikan laporan yang telah dilakukan Direksi secara profesional dan independen.
4. Bersama Audit Internal, memberikan penilaian prosedur dokumentasi dan pelaksanaan pengelolaan yang disarankan oleh bagian operasional untuk meningkatkan kinerja transaksi keuangan dan sistem pelaporan.
5. Membahas pengembangan lingkungan usaha dengan mengidentifikasi potensi pengembangan kinerja Perseroan.
6. Memastikan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan.
7. Memastikan berjalannya sistem kontrol internal, proses pelaporan keuangan, dan pelaksanaan GCG yang baik di Perseroan.

Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa rapat dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Hingga akhir tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan 10 rapat dengan agenda dan rekapitulasi rapat sebagai berikut:

Tanggal	Pembahasan Rapat	Kehadiran Komite Audit		
		FIC	SP	DS
15 Februari 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit untuk periode Oktober - Desember 2023	✓	✓	✓
4 Maret 2024	*Update Progress Audit Meeting with* AC - PT AKR Corporindo Tbk	✓	✓	✓
18 Maret 2024	AC *Meeting for the Financial Statements for the Fiscal Year* 2023	✓	✓	✓
23 April 2024	AC *Pre-Meeting for the Financial Statements Q1 2024*	✓	✓	✓
7 Mei 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit untuk periode Januari - Maret 2024	✓	✓	✓
22 Juli 2024	AC *Pre-Meeting for the Financial Statements Q2 2024*	✓	✓	✓
26 Juli 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit untuk periode April -Juni 2024	✓	✓	✓
23 Oktober 2024	AC *Pre-Meeting for the Financial Statements Q3 2024*	✓	✓	✓
13 November 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit Untuk periode Juli - September 2024	✓	✓	✓
9 Desember 2024	*Schedule of Audit Meetings for* PT AKR Corporindo Tbk	✓	✓	✓
Jumlah Rapat		10	10	10
Jumlah Kehadiran		10	10	10
Persentase Kehadiran		100%	100%	100%

Keterangan

FIC : Mohamad Fauzi Maulana Ichsan
SP : Sahat Pardede
DS : Djisman Simandjuntak

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung Dewan Komisaris serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit. Hingga 31 Desember 2024, Komite Audit berhasil mencapai beberapa sasaran atau target sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Proses Pelaporan Keuangan. Komite Audit telah melakukan penelaahan atas laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan perusahaan sebelum dipublikasikan untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik – KAP). Komite Audit telah melakukan oversight atas proses audit yang dilakukan KAP dalam audit atas laporan keuangan tahunan termasuk lingkup dan metodologi audit yang digunakan untuk menjaga kualitas audit serta membahas temuan audit untuk memastikan laporan keuangan disusun secara wajar.
3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Perusahaan. Komite Audit memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk kebijakan internal yang berlaku di perusahaan.
4. Penelaahan atas Manajemen Risiko dan Efektivitas Pengendalian Internal. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi risiko yang dihadapi perusahaan serta efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan serta evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal.
5. Evaluasi terhadap Kinerja Audit Internal. Komite Audit telah menelaah dan menyetujui rencana kerja Audit Internal, menelaah hasil audit, serta memberikan masukan terkait peningkatan efektivitas fungsi Audit Internal dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit secara rutin mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, seperti auditor independen, unit audit internal, dan Manajemen Perseroan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal terkait proses bisnis pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi independensi auditor independen, serta memberikan pendapat objektif jika terjadi perbedaan pandangan antara manajemen dan auditor independen terkait layanan yang diberikan.

Rekomendasi Komite Audit

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Komite Audit memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup pengawasan Komite Audit. Pada akhir tahun 2024, beberapa rekomendasi yang telah diberikan antara lain:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	001–L-AUKOM-2024	22 April 2024	Rekomendasi KAP untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT AKR Corporindo Tbk dan entitas anaknya tahun buku 2024.
2.	002–L-AUKOM-2024	14 Juni 2024	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk atas pelaksanaan audit atas laporan keuangan Konsolidasi Perusahaan untuk tahun buku 2023.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, AKR mendorong partisipasi Komite Audit dalam program pelatihan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Hingga akhir tahun 2024, Komite Audit telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1.	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan **Ketua Komite Audit**	Persiapan dan Implementasi PSAK 117 Kontrak Asuransi	23 Juli 2024		Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.	Sahat Pardede **Anggota Komite Audit**	PSAK Terkini sesuai Konvergensi IFRS	14–17 Mei 2024	Hotel Bintang Bali Resort, Bali	Ikatan Akuntansi Indonesia
		PPL Khusus OJK - IAPI Tahun 2024 bagi Akuntan Publik Terdaftar dI OJK Sektor Perbankan Batch 3	13 November 2024	Jakarta	Institut Akuntan Publik Indonesia
		Financial Modeling dan Pengambilan Keputusan Stratejik Bidang Keuangan	25 Oktober 2024	Jakarta	Institut Akuntan Publik Indonesia

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
		PPL Wajib Akuntan Publik 2024 - Batch 6	17 Agustus 2024	Jakarta	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan
		PPL Sektor Pasar Modal OJK – IAPI Manajemen Risiko dan Pertimbangan Khusus dalam Audit Laporan Keuangan di Sektor Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah	5 Juni 2024	Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris guna membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris serta Direksi. Peran Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa proses seleksi, evaluasi kinerja, serta penetapan remunerasi dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

AKR membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan merujuk pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, serta mekanisme kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Maret 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala dievaluasi dan diperbaharui, mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup berbagai aspek terkait tugas dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

1. Pendahuluan
2. Struktur Organisasi
3. Persyaratan Anggota Komite
4. Tanggung Jawab
5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
6. Wewenang, Hak dan Kewajiban
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
8. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
9. Penutup

Kriteria Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam proses pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan menetapkan kriteria yang sesuai serta melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk dijadikan dasar dalam menentukan remunerasi, yang kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yakni sebagai berikut:

1. Memahami dengan baik visi, misi dan budaya kerja PT AKR Corporindo Tbk.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai.
3. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
4. Mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dan efektif.
6. Khusus untuk ketua komite yang juga sebagai Komisaris Independen, berlaku ketentuan umum bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan; anggota Direksi; anggota Dewan komisaris atau pemegang saham utama serta tidak mempunyai saham di Perseroan.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Ketua/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 140 Tanggal 11 Mei 2020.	2020–2025
Soegiarto Adikoesoemo	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 140 Tanggal 11 Mei 2020.	2020–2025
Felix Abednego	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 082 Tanggal 18 Maret 2022.	2022–2025

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Mohamad Fauzi Maulana Ichsan

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan
Periode ke-1, Tahun 2020–2025

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 140 Tanggal 11 Mei 2020.

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Soegiarto Adikoesoemo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan
Periode ke-1, Tahun 2020–2025

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 140 Tanggal 11 Mei 2020.

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Felix Abednego

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan
Periode ke-1, Tahun 2020–2025

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No.082 Tanggal 18 Maret 2022.

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak manapun untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme, tanpa intervensi dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat sebagai Komisaris Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi memuat rincian mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan uraian sebagai berikut:

Terkait dengan nominasi

1. Mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan budaya kerja yang diterapkan di perusahaan; pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional

perusahaan secara menyeluruh; yang berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan; kesesuaian dengan strategi dan inovasi yang dilaksanakan serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dilaksanakan pembahasan untuk menetapkan usulan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baru kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan nominasi, yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Terkait dengan remunerasi

1. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional Perseroan secara menyeluruh, berkaitan dengan pencapaian aktual Perseroan; keselarasan kerja antara visi dan misi Perseroan; kesesuaian antara strategi dan inovasi serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
2. Berdasarkan hal di atas, kemudian melaksanakan pembahasan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan ataupun informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan bagian personalia, keuangan dan bagian yang terkait dengan bidang tugasnya.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi perusahaan. Setiap dokumen, data maupun informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan hal-hal seperti kinerja keuangan perusahaan; prestasi kerja individual; kewajaran; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
6. Komite nominasi dan remunerasi membuat rencana kerja yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Komite nominasi dan remunerasi wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur bahwa rapat harus dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hingga akhir tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda dan rekapitulasi rapat sebagai berikut:

Tanggal	Pembahasan Rapat	Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi		
		FIC	SA	FA
19 Januari 2024	Pembahasan Struktur Remunerasi dan Besaran Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
25 Juli 2024	Pembahasan Evaluasi Kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	✓	✓	✓
18 Desember 2024	Pembahasan Besaran Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024	✓	✓	✓
Jumlah Rapat		3	3	3
Jumlah Kehadiran		3	3	3
Persentase Kehadiran		100%	100%	100%

Keterangan

FIC : Mohamad Fauzi Maulana Ichsan
GIK : Soegiarto Adikoesoemo
FA : Felix Abednego

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap hubungan antara Komisaris dan Direksi, evaluasi atas kinerja Direksi dan pencapaian perusahaan, serta penilaian terkait remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2024, pencapaian pelaksanaan tugas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan struktur remunerasi dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024;
2. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan
3. Memberikan masukan terkait proses pengembangan talenta di Perusahaan, terutama untuk mengisi posisi-posisi strategis Perusahaan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Perseroan menerapkan kebijakan suksesi Direksi guna memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang efektif dan mendukung pencapaian strategi jangka panjang. Kebijakan suksesi dirancang untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan kandidat potensial yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta nilai-nilai kepemimpinan yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam menilai dan memberikan rekomendasi terkait perencanaan suksesi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Proses nominasi dilakukan dengan transparansi penuh, mengacu pada kebutuhan dan kondisi Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program suksesi Direksi yang dimiliki Perseroan sebagai berikut:
1. Program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan di internal Perseroan atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
2. Pendelegasian wewenang.
3. Pelaksanaan *fit and proper test* terhadap kandidat baru yang akan menggantikan salah satu anggota Direksi.
4. Pengesahan keputusan pengangkatan anggota Direksi baru oleh Pemegang Saham.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan mendorong keikutsertaan setiap anggota komite tersebut dalam program pelatihan baik yang bersifat formal maupun informal. Hingga akhir tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1.	**Mohamad Fauzi Maulana Ichsan** Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Persiapan dan Implementasi PSAK 117 Kontrak Asuransi	23 Juli 2024	-	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Komite-Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris yang Dimiliki oleh Perusahaan

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki komite tambahan di bawah Dewan Komisaris selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Oleh karena itu, informasi terkait komite lainnya, seperti identitas anggota, independensi, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, serta frekuensi pertemuan, tidak tersedia.



Komite Penunjang Direksi

Komite ESG

Komite ESG merupakan komite yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi strategi keberlanjutan dalam operasional Perseroan. Pembentukan Komite ESG merupakan bentuk komitmen dan dukungan Perseroan terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG).

Tugas utama Komite ESG meliputi penyusunan kebijakan keberlanjutan, pemantauan kepatuhan terhadap standar ESG, serta evaluasi kinerja inisiatif keberlanjutan. Komite ESG telah menyusun dan menandatangani Piagam pada tanggal 20 Januari 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kedudukan Komite ESG

Dalam struktur organisasi, Komite ESG berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Komite ESG bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi dalam perumusan strategi, kebijakan, serta pengawasan implementasi aspek ESG. Komite ESG berfungsi sebagai penasihat Direksi dalam memastikan bahwa seluruh inisiatif ESG sejalan dengan visi, misi, serta strategi keberlanjutan Perseroan.

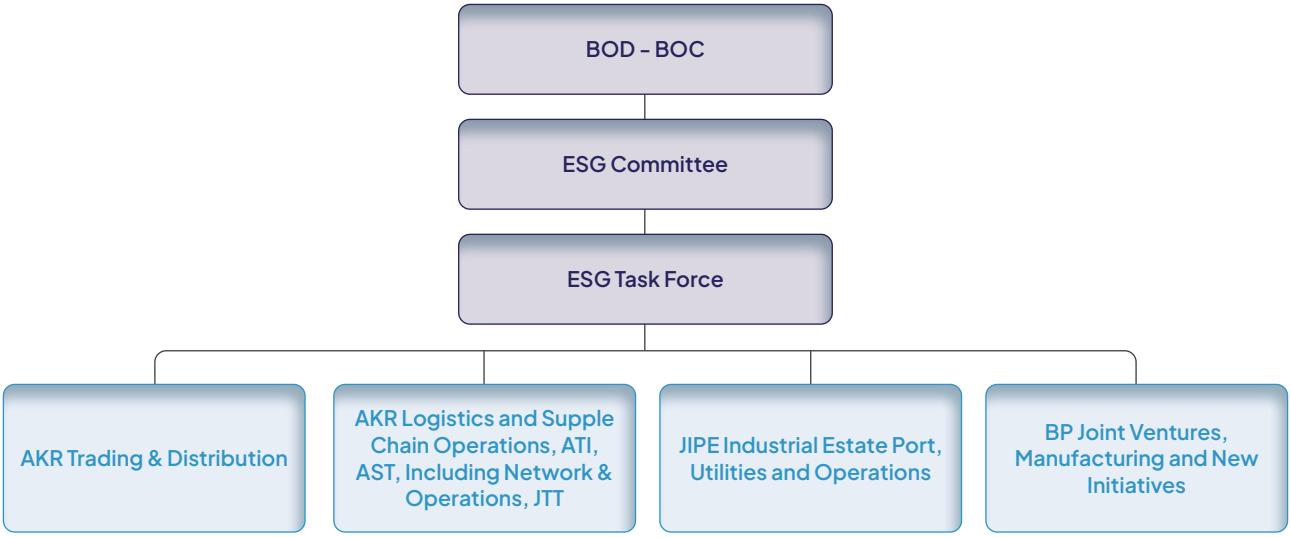

Komposisi Komite ESG

Untuk memastikan pelaksanaan keberlanjutan yang optimal, Ketua Komite ESG melapor langsung kepada Direktur Utama, dengan pengawasan dari Komisaris Independen. Dengan delegasi yang diberikan dalam menjalankan inisiatif keberlanjutan, AKR mendukung penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh unit bisnis, seiring melakukan pengawasan agar setiap langkah dilaksanakan dengan efektif.

Komite ESG juga memimpin ESG Task Force (Gugus Tugas ESG), yang terdiri dari karyawan senior dari berbagai divisi. ESG *Task Force* berfungsi sebagai tim kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan inisiatif keberlanjutan di seluruh lini operasional Perseroan. Berikut adalah komposisi anggota Komite ESG dengan profil masing-masing anggota Komite ESG dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini:

Nama	Jabatan
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen
Haryanto Adikoesoemo	Ketua Komite ESG dan Presiden Direktur
Anggota	
Jimmy Tandyo	CEO AKR Business Unit
Mery Sofi	Deputi CEO AKR Business Unit

Nama	Jabatan
Bambang Soetiono Soedijanto	CEO Segmen Kawasan Industri,
Suresh Vembu	Group Director & Corporate Secretary
Felix Abednego	Head of Human Resource Division

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ESG berperan dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengawasi berbagai aspek terkait ESG, termasuk dampak perubahan iklim, energi, konservasi sumber daya alam, lingkungan, rantai pasokan, hak asasi manusia, keragaman dan inklusi, serta isu-isu ESG lainnya yang relevan bagi Perseroan. Komite ESG bertindak sebagai pengarah bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta mengawasi pembentukan strategi ESG Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi terhadap keberlanjutan, Komite ESG bekerja sama dengan gugus tugas untuk menentukan strategi keberlanjutan, merumuskan target, melakukan penelaahan dampak dan risiko dari penerapan strategi berdasarkan standar yang diberlakukan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Strategi keberlanjutan dikembangkan melalui komunikasi dua arah antara Komite ESG dan Gugus Tugas. Komite ESG memberikan rekomendasi kepada pimpinan tertinggi gugus tugas ESG, sementara Gugus Tugas menyampaikan laporan mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Komite ESG, antara lain:

1. Mengkaji proses bisnis dan mengidentifikasi serta mengelola dampak operasi AKR terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.
2. Mengamati dan mencermati peraturan dan perkembangan standar keberlanjutan Indonesia dan internasional, serta menentukan material yang relevan bagi AKR dan memberikan rekomendasi kepada level tertinggi gugus tugas ESG untuk merumuskan strategi, kebijakan, target dan pedoman keberlanjutan yang sesuai bagi AKR.
3. Mengkaji strategi, kebijakan, target dan pedoman keberlanjutan AKR secara berkala.
4. Mengkaji kinerja keberlanjutan AKR pada seluruh aspek Komitmen Keberlanjutan AKR secara berkala.
5. Mengkaji efektivitas komunikasi dalam mensosialisasikan kebijakan keberlanjutan AKR kepada pihak internal dan eksternal AKR.
6. Turut berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik terkait dampak perubahan iklim dan lingkungan.

Pelaksanaan Tugas Komite ESG

Komite ESG bersama ESG Task Force AKR telah mengembangkan AKR Sustainability House: PROGRESSING WITH PURPOSE, yang terdiri dari 4 (empat) pilar utama. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan, yaitu:

1. *Our Business Portfolio*
2. *Our People*
3. *Our Communities*
4. *Our Conduct*

Sepanjang tahun 2024, Komite ESG telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, di antaranya:

1. Merumuskan AKR Horizon 2030 sebagai AKR Sustainability Progress Tracker.
2. Memonitor pelaksanaan program ESG tahun 2024.
3. Mengarahkan penyesuaian program ESG dan target yang diperlukan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga reputasi Perseroan serta membangun komunikasi yang efektif dan hubungan baik dengan berbagai pihak. Sebagai penghubung antara AKR dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam membantu Direksi untuk menjalankan hubungan yang baik antara Perseroan sebagai Emiten dengan Regulator, lembaga penunjang pasar modal, investor, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis Perusahaan. Penunjukan Sekretaris Perusahaan AKR dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan peran strategis ini, Sekretaris Perusahaan turut menjaga integritas dan transparansi operasional Perseroan.

Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Proses pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilaporkan kepada OJK. Secara keseluruhan, mekanisme pengangkatan Sekretaris Perusahaan di AKR meliputi langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi kebutuhan Sekretaris Perusahaan yang baru dari Perseroan.
2. Evaluasi kandidat dari karyawan Perseroan.
3. Seleksi kandidat melalui mekanisme *fit and proper test* dengan melibatkan Direksi AKR.
4. Hasil *fit and proper test* diproses oleh tim terkait untuk memulai rencana penerbitan mutasi jabatan.
5. Pengukuhan Sekretaris Perusahaan disertai dengan penyerahan Surat Keputusan Direksi.
6. Menyampaikan laporan mengenai pengangkatan/ pemberhentian *Corporate Secretary* kepada OJK.

Profil Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Bapak Suresh Vembu sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 1/L-HR/11/2019 tanggal 1 November 2019. Profil lengkap Bapak Suresh Vembu dapat ditemukan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memegang peran penting dalam penerapan Governansi Perusahaan. Fungsi utama yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Website Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Hingga akhir tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang terbaru yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan *update* terkait peraturan dan isu-isu terbaru yang relevan dengan bisnis Perseroan kepada Direksi dan Komisaris.
3. Menjalin komunikasi dengan regulator, dan menyerahkan semua laporan yang diperlukan kepada Kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pengatur kebijakan bursa seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
4. Memperbaharui Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris sesuai dengan POJK 04 tahun 2024.
5. Mengkoordinasikan Rapat Direksi serta membuat, menyimpan dan mendokumentasikan Risalah Rapat Direksi.
6. Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024 secara hybrid via easy KSEI dengan menerapkan protokol kesehatan.
8. Menjadi fasilitator ESG melalui dengan mengawasi pelaksanaan ESG di Perusahaan, dan menyelenggarakan *workshop* bagi ESG *taskforce*.
9. Memperbaharui Piagam Direksi dan Komisaris.
10. Menyusun kebijakan-kebijakan ESG yang diperlukan sebagai pernyataan tertulis Perseroan.
11. Ikut serta dalam acara *Public Expose Live* 2024, sebagai pengganti dari *Public Expose* Perseroan Tahun 2024 yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Jakarta melalui Webinar Zoom *Online*.
12. Pelaksanaan Pembagian Dividen Final 2023 dan Dividen Interim tahun 2024.
13. Menjalin komunikasi eksternal dengan pemegang saham, ESG *Rating Agency*, komunitas terkait ESG dan governansi, press dan media, serta turut mengedukasi dan mempromosikan governansi perusahaan.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, AKR mendorong partisipasi dalam program pelatihan yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Hingga akhir tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Pendidikan/Pelatihan/Seminar	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1	ESG Investing : What is it and why investors care about it?"	25 April 2024	Zoom	IDX
2	Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem	27 Juni 2024	Zoom	IDX
3	Indonesia International Sustainability Forum 2024	5 September 2024	Jakarta	1. Kemenko Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan; 2. KADIN; 3. Mckinsey
4	ESG Risk Ratings - Benefits of Navigating Material ESG Risks and Communicating Material ESG Risks with Stakeholders	18 September 2024	Zoom	IDX
5	CDP's Webinar "Advancing Nature-based Finance in Asia	22 Oktober 2024	Zoom	CDPnature
6	Responsible Supply Chain	3 Desember 2024	Zoom	IDX
7	Sosialisasi Pilar Governansi Etak (Perilaku Beretika, Transparansi Akuntabilitas, Keberlanjutan) dan Annual Report Award 2023	6 Mei 2024	Jakarta	IDX & KNKG

No	Pendidikan/Pelatihan/Seminar	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
8	Value and Benefits of 2024 S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)	13 Agustus 2024	Zoom	IDX
9	Empowering Transformation: Shaping Sustainable Future Leaders	6–7 Augustus 2024	Surabaya	1. Center for Environmental, Social, & Governance Studies (CESGS) 2. International ESG Association (IESGA) 3. Korea University ESG Research Institute 4. APRU Sustainable Waste Management Program (APRU SWM)
10	Peran dan Layanan Jasa KSEI pada Industri Pasar Modal Indonesia	26 Agustus 2024	Zoom	ICSA
11	Memahami Sustainability Assurance "SR Assurance Berdasarkan Standar AA 1000 & SR Assurance Berdasarkan ISAE 3000	29 Okober 2024	Zoom	AEI
12	"Interdisciplinary Approaches to Developing Sustainable Leadership"	6 Desember 2024	Bali	Center for Environmental, Social, & Governance Studies (CESGS)
13	Sosialisasi SPE-IDXnet terkait Pengembangan Form Pelaporan AP/KAP, Waran terstruktur dan ESG	13 Desember 2024	Zoom	IDX

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal adalah organ yang mendukung Direktur Utama dalam merealisasikan sasaran Perseroan dengan memastikan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko, serta governansi perusahaan. Pembentukan Unit Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Unit Audit Internal melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang independen serta objektif, dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Unit Audit Internal menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, serta pengelolaan Perseroan yang baik.

Pedoman Pelaksanaan Unit Audit Internal

Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Unit Charter*) menjadi pedoman bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Unit Audit Internal pertama kali diterbitkan dan disahkan oleh Presiden Direktur pada 30 Desember 2009, dan sejak itu telah diperbarui beberapa kali. Pembaruan terakhir dilakukan pada 13 Agustus 2015.

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan relevansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, piagam Unit Audit Internal dievaluasi secara berkala. Setiap revisi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 yang mengatur mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal. Piagam Unit Audit Internal mengatur berbagai hal, yang terdiri dari:

1. Visi dan Misi Unit Audit Internal
2. Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Audit Internal
3. Persyaratan dan Pengembangan Unit Audit Internal
4. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal
5. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit dan etika Unit Audit Internal
6. Pembatasan Unit Internal Audit serta Penetapan dan Persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris

Visi dan Misi Unit Audit Internal

Visi

Menjadi unit yang independen, objektif, profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung Manajemen Perseroan dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya.

Misi

- Membantu Manajemen Perseroan dalam mencapai kinerja Perseroan dengan melakukan aktivitas konsultasi sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perseroan.
- Menjalankan fungsi assurance sehingga tercapai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *Operational Excellence*.

Struktur Organisasi Internal Audit

Unit Internal Audit berada di bawah pengawasan langsung Direksi, dengan tugas utama untuk melakukan audit secara independen terhadap operasional, keuangan, dan kepatuhan perusahaan. Unit Audit Internal merupakan bagian dari struktur organisasi Perseroan dengan posisi sebagai berikut:

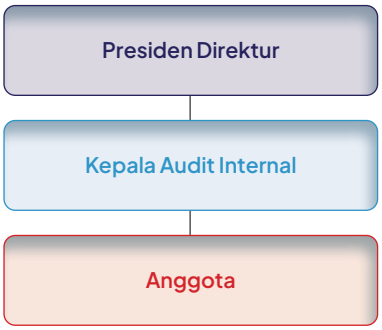

Pihak yang Mengelola dan Memberhentikan Kepala Unit Audit Internal

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Proses ini mengikuti mekanisme pengangkatan yang telah ditetapkan untuk Kepala Unit Audit Internal di AKR, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan Kepala Unit Audit Internal yang baru dari Perseroan.
2. Evaluasi kandidat dari karyawan Perseroan maupun kandidat eksternal.
3. Seleksi kandidat melalui mekanisme *fit and proper test* dengan melibatkan Direksi AKR dan pertimbangan khususnya dari Dewan Komisaris yang dibantu Komite Audit.
4. Hasil *fit and proper test* diproses oleh tim terkait untuk memulai rencana penerbitan mutasi jabatan.
5. Pengukuhan Kepala Unit Audit Internal disertai dengan penyerahan SK Pengangkatan.

Profil Kepala Unit Audit Internal



Antonius Setiawan

Kepala Unit Audit Internal

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 28 April 1982

Usia
42 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang Selatan, Banten

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. 35/L-HR/XI/2019 Tanggal 8 November 2019.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi pada bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya Jakarta (2004).

Sertifikasi
ISO 9001 Auditor

Riwayat Jabatan
- Accounting – Section Head, PT Asuransi Adira Dinamika (2004–2009)
- Internal Audit Group – Manager, PT Djarum (2010–2015)
- Internal Audit Group – Senior Manager, PT Tiphone Mobile Indonesia (2016)
- Internal Audit Group – Senior Manager, PT Central Cipta Murdaya (2016–2019)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Fungsi dan Wewenang Unit Audit Internal

Fungsi Unit Audit Internal:
1. Melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.
2. Membantu Manajemen Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Perseroan.

Wewenang Unit Audit Internal:
1. Unit Audit Internal secara struktural dikepalai oleh Kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden Direktur setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Presiden Direktur.
5. Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit tahunan serta rencana pengembangan kemampuan dan keterampilan auditor sehingga selalu *update* dan *inline* dengan perkembangan Perseroan sesuai masukan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Mempersiapkan dan melaksanakan audit kepatuhan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku serta terhadap berbagai peraturan hukum negara yang berlaku.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit operasional untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas semua kegiatan Perseroan.
5. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (*investigative audit*) atas permintaan dari Manajemen.
6. Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem dan prosedur serta kebijakan Perseroan sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.
7. Membuat dan menyampaikan laporan audit, rekomendasi dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit secara independen atas persetujuan Presiden Direktur.

2. Mempunyai akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sistem, fisik aset dan informasi milik Perseroan terkait objek audit yang dilaksanakannya.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
4. Menyampaikan hambatan dan tindak lanjutnya kepada Presiden Direktur secara langsung.
5. Melakukan pertemuan secara rutin dan tidak rutin dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Audit Eksternal.
7. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Komite Audit.

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi

Keanggotaan Unit Audit Internal di AKR telah disusun sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan mencakup anggota dengan keahlian teknis di bidang audit serta keterampilan umum yang mendukung pelaksanaan tugas mereka. Pada tahun 2024, Unit Audit Internal terdiri dari 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Unit Audit Internal, 3 (tiga) manager, 1 (satu) asisten manager dan 1 (satu) supervisor.

Berikut adalah rincian jumlah pegawai dan sertifikasi yang dimiliki oleh karyawan di divisi Unit Audit Internal:

No.	Nama	Pendidikan	Pengalaman	Sertifikasi
1.	Agung Cahyono	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.	Auditor Senior di Kantor Akuntan Publik Drs. Hanny, Wolfrey & Rekan	ISO 9001 Auditor.
2.	Eko Romero	Sarjana Teknik dari Universitas Bung Hatta.	• Section Head PT Nipress Energy Otomotif (member of Johnson Controls Inc.) • Internal Audit PT PGN Gagas, anak perusahaan PT PGN Tbk (Persero) • Quality Assurance and Quality Control PT Sucofindo • Staff Teknik PT Benefita	• Certified Forensic Auditor (CFrA). • Lie Detector Workshop • ISO 9001 Auditor • Special Soft Skill for Investigator.
3.	William Teguh Karya Putra	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (konsentrasi Audit) dari Kwik Kian Gie School of Business d/h Institute Bisnis dan Informatika Indonesia	• Specialist, Financial Fraud Investigation – Profit Protection Fraud Investigation – Corporate Risk and Integrity, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk • Asisten Manajer, Operation Controller, PT Sinarmas Distribusi Nusantara • Asisten Manajer, Special Investigation and Forensic Audit, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk • Staff Senior Internal Audit, PT Permata Andalan Abadi (Distributor Tunggal Semen Tiga Roda) • Staff Operation Compliance Executive, PT Soho Global Health • Staff Akunting, CV Permata Sejati • Staff Asset Management, PT Bentara Sinergies Multifinance	• Brevet A dan B (IAI) • Fraud Risk Management Workshop (AFCE)
4.	Rambo Tornando Silaban	Sarjana Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	• Claims And Demurrage Analyst Tanker, Waruna Shipping Group • Claim Adjuster, Charles Taylor Adjusting PLC • PT Surveyor Indonesia (Persero) • Marine Surveyor (2014 to 2019) a. Inspector Import Technical Verification (VPTI) (2016 -2019) b. Inspector - OHS Specialist for Chemicals (2017 -2018) c. Diesel & Hydro Power Plant Inspector (2016–2019) d. Pressure Vessel & Boiler Inspector (2018 – 2019)	• Internal auditor ISPS Code • Inspector Occupational health and safety expert of boiler and pressure vessel safety expert (AK3 PUBT). • Inspector OHS expert of chemicals (AK3 Kimia). • Inspector Import Technical Verification (VPTI). • Inspector electrical generators & excitation systems. • Inspector diesel powerplant level 2. • Inspector electrical generators & excitation systems. • Inspector hydro power level 2.

No.	Nama	Pendidikan	Pengalaman	Sertifikasi
5	Nanda Puji Nugroho	Sarjana Komputer jurusan Sistem Informasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.	• Manajer IT Audit di PT Smartfren Telecom Tbk • IT Auditor Senior di PT Astra International Tbk	Certified Data Protection Officer (CDPO)
6	Edi Setiawan	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta.	• Senior Supervisor Audit, PT Modernland Realty Tbk • Supervisor Audit, PT Nusindo (Group of Rajawali Nusantara Indonesia) • Staf Audit, PT Koperasi Nusantara	Fraud Management & Prevention (Pelindo)

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Tahun 2024

Unit Audit Internal menjalankan rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur Perseroan. Kegiatan audit tersebut mencakup audit regular dan audit khusus di seluruh cabang Perseroan dan entitas anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Unit Audit Internal bertugas untuk menelaah proses bisnis, mengidentifikasi risiko, dan menggali penyebab utama (*root cause*) guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, serta peraturan yang berlaku bagi Perseroan. Penelaahan meliputi pengamanan dan pemanfaatan aktiva, penilaian terhadap efisiensi sumber daya yang digunakan, serta identifikasi potensi kerugian dan pemborosan dalam menghasilkan suatu output. Unit ini juga memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Seluruh kegiatan Audit Internal dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku, dengan fokus pada pengelolaan risiko yang tepat, pengendalian internal yang efektif, dan menghindari potensi kecurangan. Hasil dari proses audit ini akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak Manajemen dan Komite Audit untuk ditindaklanjuti serta *monitoring* hasil.

Selain itu, laporan hasil audit juga disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Audit
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit

Realisasi Audit 2024

Pada tahun 2024, Unit Audit Internal menghasilkan sebanyak 580 rekomendasi, dengan 73 rekomendasi yang masih belum jatuh tempo hingga 31 Desember 2024. Semua rekomendasi yang telah jatuh tempo telah ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun rekapitulasi tindak lanjut hasil audit oleh Unit Audit Internal diuraikan pada tabel berikut ini:

Tahun	Rekomendasi	Closed	In Progress	Persentase Penyelesaian
2022	158	151	7	96%
2023	342	318	24	93%
2024	580	507	73	87%

Proses audit dilaksanakan oleh 6 (enam) auditor yang bekerja bersama Kepala Unit Audit Internal, dengan cakupan yang mencakup operasional, perdagangan dan distribusi, logistik, manufaktur, serta keuangan. Selain itu, hingga 31 Desember 2024, Unit Audit Internal juga melakukan rapat internal dengan Direksi dan Dewan Komisaris/Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali.

Rincian agenda dan rekapitulasi rapat sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Topik Rapat
1	15 Februari 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit untuk periode Oktober - Desember 2023
2	7 Mei 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit untuk periode Januari - Maret 2024
3	19 Juni 2024	Sharing Session Internal Audit & Risk Management
4	1 Juli 2024	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Internal Audit Semester 1 2024
5	26 Juli 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit untuk periode April - Juni 2024
6	4 November 2024	Sharing Session Internal Audit & Risk Management
7	13 November 2024	Pelaporan Hasil Internal Audit Untuk periode Juli – September 2024
8	16 Desember 2024	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Internal Audit Semester 2 2024

Temuan dan Tindak Lanjut

Unit Audit Internal melaksanakan audit operasional dan audit khusus yang mencakup proses bisnis yang signifikan, seperti penjualan, pergudangan, akuntansi, operasional terminal tangki dan gudang, serta operasional truk dan kapal yang berada dalam pengawasan unit.

Di tahun 2024, temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dibahas bersama penanggung jawab setiap unit dan dilaporkan kepada Manajemen Perseroan. Unit Audit Internal kemudian menindaklanjuti proses perbaikan yang telah disepakati dengan unit terkait untuk memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul.

Berikut adalah inisiatif kunci yang dilakukan oleh Unit Audit Internal sepanjang tahun 2024 dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi dan temuan yang ada:
1. Unit Audit Internal melakukan kegiatan audit dengan pendekatan *risk-based,* sehingga memfokuskan audit pada area/proses/produk tertentu.
2. Melakukan *follow-up* hasil rekomendasi dan temuan secara berkala untuk memastikan rekomendasi dijalankan oleh pihak yang diaudit sesuai dengan *deadline*.
3. Melakukan koordinasi dengan Department di Kantor Pusat untuk beberapa rekomendasi yang memerlukan *action* dari Kantor Pusat.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa operasional berjalan dengan efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan SPI dilakukan di seluruh lini bisnis melalui sistem berjenjang, mulai dari tahap awal hingga kompilasi pelaporan.

Proses pengendalian internal bertujuan untuk melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang akurat, serta meningkatkan efektivitas manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pengendalian internal juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta meminimalkan risiko, kerugian, dan potensi pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Untuk menjalankan pengendalian internal secara optimal, Perseroan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mengidentifikasi dan menilai risiko inheren yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perseroan. Dengan demikian, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan lebih efisien, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pencapaian tujuan dapat dikelola dengan lebih baik. SPI dirancang, dilaksanakan, dan diawasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta melibatkan secara aktif anggota manajemen dan seluruh karyawan Perseroan dalam penerapan kontrol yang efektif dan berkesinambungan.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

AKR mengimplementasikan SPI melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu pengendalian keuangan dan operasional. Sistem ini memastikan transparansi informasi keuangan yang dapat diakses oleh semua tingkatan manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Adapun pengendalian keuangan yang diterapkan oleh AKR adalah sebagai berikut:
1. Mengamankan Aset Perseroan
   Sebagai entitas usaha, Perseroan memastikan pengamanan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan aset lainnya, mulai dari perencanaan, pengotorisasian, pencatatan, penyaluran, pencairan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
2. Menguji Keandalan Laporan Keuangan
   Pertanggungjawaban pengelolaan usaha tercermin dalam laporan keuangan. Perseroan memastikan adanya sistem dan prosedur yang meningkatkan kualitas penyusunan serta penyajian laporan keuangan, seperti pemisahan fungsi penyelenggara keuangan.
3. Mendorong Efektivitas Penggunaan Anggaran
   Melalui pengendalian internal, Perseroan memantau dan mendorong penggunaan anggaran secara efektif agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian operasional dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan, serta memastikan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. AKR menjalankan pengendalian operasional sebagai berikut:
1. Perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur yang berperan sebagai pedoman atau panduan kegiatan operasional, sistem, teknologi, pelaporan keuangan, serta kepatuhan.
2. Perseroan menerapkan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional, pelaporan keuangan, pelaporan manajemen, dan pelaporan eksternal.
3. Perseroan melalui Unit Audit Internal melakukan pengujian atau efektivitas sistem pengendalian internal dan memantau tindakan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian yang teridentifikasi.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Penyusunan kerangka SPI Perseroan mengacu pada kerangka kerja yang diakui secara internasional, yaitu *Internal Control Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Kerangka ini mengidentifikasi bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh personil terkait. Pendekatan ini sejalan dengan Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di Perseroan, yang terus mengembangkan kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia di AKR.

Perseroan menjalankan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang cukup mengenai pencapaian 3 (tiga) tujuan utama berikut:
1. Efektifitas dan efisiensi operasi;
2. Keandalan pelaporan keuangan; dan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

AKR memandang pengendalian internal sebagai serangkaian langkah yang mencakup seluruh proses dalam operasional bisnis Perseroan. Pengendalian internal terintegrasi dalam proses manajemen dasar, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Komponen-komponen dari sistem pengendalian internal di lingkungan Perseroan antara lain terdiri dari:
1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) yang meliputi integritas, nilai etik, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan bisnis sesuai dengan arahan manajemen.
2. Penaksiran risiko (*risk assessment*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas bisnis Perseroan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*) yang senantiasa dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan bisnis Perseroan tercapai.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasional Perseroan.
5. Pemantauan (*monitoring*) dengan tujuan untuk menilai mutu kinerja Perseroan. Hal ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

Kesesuaian Dengan Standar COSO

Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal, Perseroan mengacu pada kerangka kerja internasional yang diakui, yaitu *Committee of the Sponsoring Organizations* (COSO) *of the Treadway Commission - Internal Control Integrated Framework*. Kerangka ini mencakup 5 (lima) komponen utama sistem pengendalian internal yang secara terintegrasi membentuk sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Berikut merupakan penerapan prinsip COSO di AKR:

No	Prinsip COSO	Penerapan di AKR
1.	***Control Environment*** Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *Internal Control* di seluruh organisasi. Terdapat 5 (lima) prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu: a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. b. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan *Internal Control*. c. Komisaris dan Manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. d. Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan. e. Organisasi memegang individu yang bertanggungjawab terhadap *Internal Control* dalam rangka pencapaian tujuan.	Perseroan memiliki pengendalian internal yang mencerminkan secara keseluruhan sikap, kesadaran dan tindakan oleh Direksi serta tentang pentingnya pengendalian internal di Perseroan. Elemen lingkungan pengendalian dijalankan dalam bentuk pengawasan di seluruh tingkatan yaitu, pengendalian di tingkat entitas maupun pengendalian di tingkat aktivitas serta didukung dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seluruh karyawan termasuk Direksi harus menghayati nilai-nilai Perseroan. Karyawan juga diharuskan untuk menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. b. Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan senantiasa memberikan masukan atas isu-isu yang dihadapi Perseroan terutama yang berkaitan dengan pengendalian internal. c. Struktur organisasi, pelaporan tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan untuk mencapai strategi bisnis telah didefinisikan dengan jelas. Walaupun demikian, Perseroan secara terus menerus melakukan perubahan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan agar struktur organisasi lebih responsif dan efisien.

No	Prinsip COSO	Penerapan di AKR
		d. Sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, seluruh karyawan menjalani *Performance Evaluation* setiap 6 bulan untuk mengetahui kinerja mereka selama periode tersebut dan bagaimana memperbaiki kinerja mereka ke depan. Pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab diberikan secara berkesinambungan. Selanjutnya, penerimaan karyawan baru selalu didasari dengan mencari kandidat yang terbaik dan dapat menjadi *High Performer* ketika sudah masuk sebagai karyawan Perseroan. e. Secara organisasi, Audit Internal bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap pengendalian internal. Tim Audit Internal melakukan audit terhadap semua aspek usaha dan proses bisnis Perseroan dan hasil audit tersebut dilaporkan kepada Presiden Direktur, Direksi dan Komite Audit. Tim Audit Internal juga bertanggung jawab untuk menindak lanjuti temuan dan perbaikan yang diperlukan.
2.	***Risk Assessment*** Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko agar mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat 4 (empat) prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu: a. Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan. b. Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan. c. Organisasi mempertimbangkan potensi *fraud* dalam penilaian risiko. d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan memengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.	a. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pendekatan *top-down* yang melibatkan Direksi dalam melakukan identifikasi dan evaluasi atas risiko-risiko utama secara keseluruhan agar sejalan dengan visi, misi dan tujuan strategis Perseroan dan juga *bottom-up* dalam proses operasional sehingga mendapatkan profil risiko terkini dari sudut pandang Unit/ Divisi/Departemen. b. Tim ERM berkoordinasi dengan pemilik risiko untuk melakukan penilaian kembali dan konsolidasi atas risiko-risiko utama yang teridentifikasi dan memantau kemajuan rencana mitigasi risiko serta menyampaikan laporan kepada Direksi dan Komite Audit. c. Dalam proses identifikasi risiko, dilakukan dengan melihat risiko dari 4 (empat) kategori yaitu strategis, operasional, kepatuhan dan keuangan. Kemudian atas risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat risiko inheren (*risk impact x likelihood*), tingkat efektivitas kontrol dan tingkat risiko residu. d. Setelah mengidentifikasi dan menetapkan tingkat risiko, akan diperoleh risiko prioritas yang menjadi perhatian utama dan ditentukan rencana mitigasi risiko yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko residu atas suatu risiko yang mana untuk status perkembangannya akan dimonitor secara regular.
3.	***Control Activities*** Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam komponen ini yaitu: a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan. b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan. c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur dalam pengimplementasiannya.	a. Perseroan mempunyai kebijakan dan prosedur yang jelas sebagai panduan seluruh karyawan untuk mencapai objektif strategis yang telah ditentukan. Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat menjadi hambatan pencapaian kinerja Perseroan. Direksi dan pihak terkait bertanggung jawab untuk membuat rencana mitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Tim ERM berkoordinasi dengan Audit Internal untuk melakukan pengujian atas pengendalian internal terhadap risiko yang signifikan. Sarana pengendalian intern yang diterapkan antara lain kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur, *authorization limit*, dan pemisahan tanggung jawab yang memadai.

No	Prinsip COSO	Penerapan di AKR
		b. Perseroan memiliki informasi teknologi untuk keseluruhan bisnis proses, sehingga dapat meminimalisasi proses manual. Arsitektur dan *Framework IT* mengikuti prinsip matriks kontrol. c. Perseroan menerapkan dan terus menyempurnakan SOP dan Kebijakan sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan internal maupun eksternal. Melalui komitmen pimpinan Perseroan beserta jajaran *manager* setiap departemen, segala kebijakan disosialisasikan dan diimplementasikan ke setiap level proses bisnis.
4.	***Information and Communication*** Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab *Internal Control* dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Internal Control* sehari-hari. Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam komponen ini yaitu: a. Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam Internal Control. b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab IC dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dari *Internal Control*. c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam *Internal Control*.	a. Perseroan telah mengimplementasikan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dan digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas seluruh karyawan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Sistem akuntansi yang dianut Perseroan merupakan metode pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. b. Untuk pengumpulan data yang diperlukan, Perseroan memiliki informasi teknologi yang memadai untuk menghasilkan, antara lain, laporan kegiatan usaha, laporan keuangan dan laporan lainnya yang diperlukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menjalani tugas mereka di Perseroan. Perseroan telah mengendalikan risiko-risiko yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi seperti, data *backup and recovery*, *physical/logical access*, serta pengendalian terhadap aplikasi termasuk kesesuaian dan keakuratan data yang diproses, prosedur validasi, prosedur pengendalian dan akses serta pengamanan yang menyimpang. Dengan demikian, Perseroan memastikan bahwa isi dari informasi yang dilaporkan adalah benar, tepat waktu, relevan dan tersedia kepada pihak yang berkepentingan. c. Perseroan telah memiliki saluran komunikasi yang baik dan mendorong semua karyawan untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai forum. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perseroan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga seluruh karyawan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Direksi juga berkomunikasi dengan pihak eksternal yang sejalan dengan prinsip keterbukaan supaya pihak eksternal mengetahui keadaan Perseroan.
5.	***Monitoring Activity*** Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen *Internal Control* tersedia dan berfungsi. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam komponen ini yaitu: a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen *Internal Control* tersedia dan berfungsi. b. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi *Internal Control* pada pihak yang bertanggung jawab agar diambil tindakan korektif.	Dengan kesadaran bahwa sistem dan prosedur berubah sewaktu waktu akibat perubahan eksternal maupun internal, perubahan proses bisnis, perubahan personil, aplikasi IT dan teknologi yang baru dan faktor faktor lainnya, Direksi dan pimpinan unit bisnis mengevaluasi secara berkesinambungan dan memastikan bahwa pengendalian internal Perseroan masih relevan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas pemantauan terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal secara berkala dan hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Presiden Direktur, Direksi dan Komite Audit. Tim Audit Internal juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti *corrective action* yang dilakukan terhadap kelemahan pengendalian internal yang ditemukan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian yang berlaku, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh yang menunjukkan kualitas sistem yang berjalan dengan baik. Efektivitas pengendalian internal tercermin dalam 2 (dua) proses utama, yaitu:

1. **Proses level Entitas**
   Terealisasinya peningkatan hasil pengawasan internal pada level entitas. Unit Audit Internal Perseroan semakin meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan audit terhadap kinerja pada setiap departemen, cabang dan proyek. Perseroan juga akan langsung menindaklanjuti setiap kritik dan saran yang ditujukan kepada Perseroan, sehingga semua pegawai pada setiap tingkat dapat berkontribusi dengan ikut mengawasi dan melaporkan terjadinya ketidakjujuran pada tiap-tiap wilayah kerja dalam Perseroan. Untuk menjaga komitmen penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip kode etik secara berkesinambungan pada setiap tingkat pekerja.
2. **Proses level Bisnis**
   Adanya peningkatan cakupan pengawasan internal dalam proses level bisnis telah berdampak pada laporan keuangan, terutama dari segi pengenalan risiko yang kini dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih akurat dan *accountable*. Hal ini terlihat jelas dari adanya pengawasan internal pada proses persediaan, pelaporan keuangan, penjualan dan piutang

Evaluasi efektivitas SPI dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi Perseroan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah SPI dapat mendeteksi dan mencegah risiko secara tepat waktu, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2024, evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) menghasilkan keputusan bahwa SPI masih selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian yang berlaku. Secara keseluruhan, SPI telah memperlihatkan kualitas yang baik dan efektif dalam mendukung operasional Perseroan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa SPI yang diterapkan oleh Perseroan pada tahun 2024 telah cukup memadai dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik secara internal maupun melalui audit eksternal, SPI Perseroan masih selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian yang berlaku dan mampu memastikan bahwa operasional Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga memastikan bahwa SPI telah berfungsi secara efektif untuk melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kami meyakini bahwa sistem pengendalian internal yang ada dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan, meminimalkan risiko, dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.



Manajemen Risiko

Manajemen risiko memiliki peranan yang penting untuk memastikan kelancaran proses bisnis dan mendukung pencapaian target serta realisasi rencana Perseroan. Salah satu strategi utama dalam meminimalkan gangguan atau risiko terhadap operasional adalah dengan memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan memadai.

Pengelolaan risiko dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dijalankan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pengelolaan risiko juga bertujuan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip governansi perusahaan, terutama dalam menjalankan praktik bisnis yang sehat dan memberikan nilai tambah sesuai harapan para pemangku kepentingan.

Perseroan terus mengembangkan rangkaian prosedur dan metodologi manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko, dengan harapan dapat memberikan jaminan dan ketenangan bagi para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengelola Risiko Korporat

Seluruh insan Perseroan secara aktif berperan dalam pengelolaan risiko usaha yang dihadapi. Proses pengelolaan risiko dilakukan dengan pendekatan *top-down*, di mana Direksi terlibat dalam evaluasi risiko utama secara keseluruhan, serta pendekatan *bottom-up* yang melibatkan Pemimpin Departemen, Cabang, dan Entitas Anak untuk menilai risiko-risiko yang spesifik di masing-masing unit atau bisnis.

Perseroan memberikan tanggung jawab pengelolaan risiko kepada Departemen ERM di Kantor Pusat, yang mengacu pada kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Departemen ERM

Departemen ERM bertanggung jawab untuk mengelola risiko-risiko usaha yang telah diidentifikasi oleh seluruh pihak di Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Departemen ERM mencakup:

1. Mengembangkan serta mengusulkan konsep dan kerangka kerja manajemen risiko, *appetite* risiko, filosofi risiko, toleransi risiko, kebijakan & prosedur, struktur manajemen risiko yang akan diimplementasikan kepada Presiden Direktur yang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.
2. Mengimplementasi dan mengkomunikasikan kebijakan & prosedur manajemen risiko secara berkelanjutan dan konsisten.
3. Memastikan bahwa seluruh risiko-risiko utama/signifikan Perusahaan telah diidentifikasi, diukur, dan mitigasi secara tepat.
4. Mengajukan risiko prioritas yang perlu mendapat perhatian segera dari Manajemen atas profil risiko yang ada, dengan mempertimbangkan dampak (*impact*) dan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) risiko setelah dilakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal yang ada.
5. Memastikan dan memantau secara terus menerus implementasi dari rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan target waktu yang ada.
6. Mengkaji dan memberikan masukan kepada para pemimpin Cabang/Divisi/Departemen/Entitas Anak terkait rencana mitigasi risiko termasuk bilamana timbul isu baru dalam proses implementasi rencana mitigasi yang telah ditetapkan.
7. Melakukan validasi dan verifikasi (terutama atas risiko utama) terkait kontrol risiko yang ada serta perkembangan implementasi rencana mitigasi/*action plan* risiko melalui kunjungan langsung lapangan ke Cabang/Divisi/Departemen/Entitas Anak.
8. Melakukan sosialisasi berkelanjutan untuk mengembangkan budaya peduli, memiliki dan kesadaran risiko dengan menekankan bahwa risiko adalah tanggung jawab seluruh insan di AKR.
9. Membuat dan melaporkan Laporan Manajemen Risiko Konsolidasi kepada Presiden Direktur dan Direktur terkait secara periodik.

Risiko yang dihadapi Perseroan dan Upaya Pengelolaan Risiko

AKR telah mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi sepanjang tahun 2024 dan telah menyusun langkah-langkah untuk mengelola risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Risiko dan Penjelasan	Upaya Pengelolaan Risiko
1.	**Risiko Negara** Kondisi makro ekonomi Indonesia, kondisi politik, dan peraturan pemerintah mempengaruhi Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia.	a. Risiko ekonomi dan geopolitik Pada tahun 2024, adanya krisis di Timur Tengah turut mempengaruhi kondisi ekonomi global dan berdampak pada kenaikan harga komoditas (minyak dan kimia dasar) serta berpengaruh terhadap rantai pasokan. Hal ini sangat mempengaruhi Perseroan jika tidak dimitigasi dengan baik. Selain itu, kondisi tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, perpajakan, dan berbagai perkembangan di bidang politik dan ekonomi lainnya di Indonesia juga menjadi faktor-faktor risiko yang perlu diperhatikan. b. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Perseroan menghadapi risiko perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat menghambat dan juga membuka peluang dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan di dalam negeri. Perubahan kebijakan Pemerintah baik dalam hal perpajakan, kontrol mata uang, tingkat suku bunga, pembatasan ekspor impor, formulasi BBM subsidi, ketenagakerjaan, perizinan dan investasi dapat memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan. Hampir seluruh produk BBM dan sebagian produk bahan kimia dasar yang diperdagangkan dan didistribusikan oleh Perseroan diimpor dari luar negeri.
2.	**Risiko Industri** Pasokan dan permintaan dari industri tempat Perseroan beroperasi juga mempengaruhi kinerja Perseroan.	Segmen perdagangan dan distribusi dipengaruhi oleh permintaan atas bahan kimia dasar dan BBM. Permintaan dari bahan kimia dasar dan BBM juga bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia, baik secara nasional maupun regional. Risiko ketergantungan kepada permintaan juga dihadapi oleh segmen jasa logistik. Perseroan memberikan jasa logistik dan fasilitas infrastruktur distribusi kepada pihak ketiga di Indonesia. Perlambatan ekonomi di Indonesia dan dunia dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang selanjutnya akan menyebabkan penurunan pada aktivitas pengapalan dan permintaan akan jasa logistik. Selain risiko atas tingkat permintaan dan pasokan, Perseroan juga menghadapi risiko persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan. Untuk mengantisipasi risiko ini, Perseroan terus meningkatkan infrastruktur logistik dalam distribusi energi & bahan baku industri, mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
3.	**Risiko Operasional** Risiko Operasional timbul apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi prosedur operasi standar, gagalnya manajemen pegawai, gangguan pada sistem, dan faktor atau kejadian eksternal seperti perubahan cuaca, bencana alam, putusnya rantai pasokan. Risiko-risiko ini terkait dengan operasional harian Perseroan.	Perseroan menetapkan prosedur standar operasional yang senantiasa diperbarui dan disempurnakan agar kemungkinan risiko berkurang dan agar Perseroan sejalan dengan permintaan usaha dan teknologi. Perseroan juga membangun teknologi dan sistem operasi cadangan apabila sistem utama gagal beroperasi. Sistem IT terpusat mendukung pemantauan dalam penyimpanan & distribusi produk. Pegawai yang bertanggung jawab akan sistem tersebut akan diberikan pelatihan berkala untuk menyempurnakan keahlian dan kewaspadaan mereka dalam menangani sistem dan alat operasional lainnya. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko operasional berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka Perseroan mengaplikasikan *Three Lines of Defense*, yaitu (a) bisnis unit yang mengelola risiko operasional sehari-hari sebagai kontrol preventif, (b) *Risk Management* sebagai kontrol detektif dan (c) *Quality Assurance/Internal Audit* sebagai kontrol korektif.

No	Jenis Risiko dan Penjelasan	Upaya Pengelolaan Risiko
4.	**Risiko Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan** Perseroan mungkin menemui risiko Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (*Safety, Health and Environment*/SHE) mengingat Perseroan bergerak di bidang usaha bahan kimia dasar dan bahan bakar minyak, pabrikan, dan logistik. Risiko-risiko ini mencakup kebakaran, tumpahan produk, kesalahan dalam penanganan limbah, peralatan yang tidak berfungsi, kegagalan sistem, dan sebagainya. Risiko SHE tidak hanya mempengaruhi Perseroan namun juga mempengaruhi masyarakat di sekitar daerah operasional.	Dalam rangka menghindari risiko-risiko berbahaya tersebut, Perseroan menerapkan peraturan ketat dan terperinci mengenai keselamatan kerja dan menyediakan pelatihan untuk pegawai dalam rangka menangani kondisi yang tidak diinginkan. Prosedur SHE senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah dan organisasi serta sertifikasi di daerah tertentu.
5.	**Risiko Keuangan** Risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas.	Terkait risiko kredit, Perseroan menerapkan *monitoring* yang ketat dalam pemberian kredit ke *customer*. Atas risiko fluktuasi harga komoditas & nilai tukar mata uang asing, Perseroan menerapkan bisnis model yang stabil dengan formula berbasis harga dan pengelolaan risiko *forex* melalui *hedging*. Manajemen risiko keuangan Perseroan diuraikan secara rinci dalam laporan keuangan konsolidasian yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*member firm of Ernst & Young*).

Laporan Manajemen Risiko Tahun 2024

No	Risiko	Key Initiatives
1.	Risiko kepatuhan dan perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah	• AKR proaktif dalam pertemuan-pertemuan dengan pemerintah terkait industri yang digeluti AKR untuk mengantisipasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. • *Monitoring* & analisa perubahan-perubahan hukum dan regulasi yang berdampak pada bisnis AKR. • Melakukan sosialisasi ke pihak internal yang terkait terhadap adanya perubahan regulasi pemerintah dengan tepat waktu. • Penggunaan sistem dalam melakukan *monitoring renewal*/ pembaharuan izin & lisensi.
2.	Risiko SHE	• Menjalankan Prosedur Operasi Standar (SOP) Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan. • Training & sosialisasi untuk mengingatkan akan pentingnya penerapan SHE. • Pelaksanaan *safety Observation*/SOR & SOP/WI compliance audits. • Pembaharuan kebijakan maupun SOP sesuai dengan perkembangan yang ada. • Melakukan *checklist* peralatan *safety* dan fasilitas *safety* secara periodik.
3.	Risiko perubahan lingkungan bisnis, kondisi pasar dan pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan (*growth*).	• Proaktif dalam konferensi yang membahas tentang perubahan di lingkungan bisnis. • Memperluas jaringan antar pelaku industri. • *Monitoring* kompetitor bisnis AKR. • Pengembangan sistem guna mempercepat proses Analisa. • Terdapat fungsi *business development* untuk melakukan pengembangan produk baru. • *Monitor sales pipeline*. • Koordinasi dan membina hubungan baik dengan Perusahaan *principal*.

No	Risiko	Key Initiatives
4.	Risiko finansial	1. Risiko Kredit • Batasan kredit (*credit limit*) ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal (analisa 5C). • *Cash before delivery* • Implementasi pemberian kredit diperketat dan direview kembali saat situasi ekonomi global yang mempengaruhi kondisi keuangan *customer*. • *Monitoring* target dan realisasi collection setiap bulan. • Monitor dan *update* terhadap kondisi industri pelanggan. 2. Risiko Likuiditas • Evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in)* dan kas keluar (*cash-out*). • Monitor rasio likuiditas secara periodik. 3. Risiko Pasar • *Monitoring* secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar. • Penentuan harga BBM dengan formula. • Pengelolaan risiko fluktuasi mata uang dengan *hedging*.
5.	Risiko *cyber* & keamanan informasi	• Terdapat kebijakan keamanan informasi. • Anti-virus dan spam. • Pembatasan akses dokumen, pembatasan penggunaan external media (USB, *external hard disk*), pembatasan akses internet yang menyesuaikan dengan kebutuhan/kepentingan pihak yang terkait. • Kampanye terkait *IT Security awareness* secara regular.
6.	Risiko dalam pengembangan *human capital*, termasuk didalamnya terkait perencanaan suksesi & *talent management* and implementasi nilai-nilai Perusahaan (*Corporate Value*)	• Kampanye/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman & implementasi nilai - nilai Perseroan (misal: *newsletter*, *screen saver*). • Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui PDC (*people development committee*). • Pengembangan (*training*) berkelanjutan. • Pengembangan *successor* & *road maps* terutama untuk fungsi-fungsi kritikal.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan terus memperkuat dan mengembangkan kerangka kerja pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dengan pendekatan ini, Perseroan dapat mendeteksi potensi risiko lebih awal yang dapat mempengaruhi kinerja, memungkinkan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalisir risiko.

Peran Manajemen Risiko terbukti sangat penting dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan penerapan governansi perusahaan. Dengan pengelolaan risiko yang terstruktur, Perseroan berhasil mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Keberhasilan ini terlihat dari kualitas, jumlah, dan kecepatan penyelesaian mitigasi risiko yang telah disepakati. Melalui sistem ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih strategis dan didukung oleh informasi yang jelas mengenai dampak terhadap operasional perusahaan dan anak perusahaan.

Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Peran Dewan Komisaris dalam hal manajemen risiko sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direktur dalam mengawasi praktik dan implementasi manajemen risiko di Perseroan.
2. Mengkaji dan memastikan bahwa Perseroan dan entitas anak memiliki kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada.

Peran Direksi dalam hal manajemen risiko sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan pendekatan tone from the top dimana pengembangan budaya risiko dimulai dari Top Management.
2. Memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko seperti memastikannya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan.
3. Mengkaji profil dan laporan risiko Perseroan, hal ini termasuk memastikan & memberikan pandangan terkait risiko-risiko utama yang harus mendapatkan prioritas dalam mitigasi risiko.
4. Mengkaji kontrol mitigasi yang telah ditetapkan guna memastikan realisasi implementasi mencukupi dan tepat waktu.
5. Memastikan kecukupan sumber daya manusia dalam mengelola risiko stratejik termasuk penetapan tingkatan toleransi dan perlakuan risiko untuk masing-masing strategi.

Upaya Peningkatan Budaya Sadar Risiko

AKR terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen risiko guna memastikan identifikasi risiko yang akurat dan pengelolaan yang efektif. Perseroan berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan manajemen risiko di seluruh tingkatan manajemen, menjadikannya bagian integral dari aktivitas bisnis sehari-hari.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat budaya kesadaran risiko, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Melakukan resosialisasi/refreshment mengenai manajemen risiko dan praktiknya kepada *risk owner* di cabang.
2. Melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko dan praktiknya kepada karyawan baru yang bergabung di Perseroan.
3. Melakukan survey untuk mengetahui pemahaman karyawan terhadap budaya sadar risiko.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi terus memberikan perhatian penuh pada penerapan manajemen risiko, mengingat peranannya sebagai lini pertahanan utama Perseroan. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, Direksi secara rutin mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko, termasuk menilai keandalan prosedur, mekanisme, dan infrastruktur yang diterapkan.

Pada tahun 2024, Direksi menilai bahwa sistem manajemen risiko Perseroan telah diterapkan secara efektif dan memadai, dengan semua prosedur, mekanisme, dan infrastruktur yang ada. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut, Direksi memutuskan bahwa tidak ada kebutuhan untuk melakukan perubahan pada kebijakan manajemen risiko yang diterapkan tahun ini. Sehingga pada tahun 2025, belum diperlukan adanya perubahan terhadap kebijakan manajemen risiko yang telah ada.

Permasalahan Hukum

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat perkara hukum baik perdata maupun pidana yang bersifat material yang dihadapi Perseroan, anak Perusahaan, Dewan Komisaris, maupun Direksi.

Permasalahan hukum yang dihadapi entitas anak secara tidak langsung dalam bentuk ikatan perjanjian telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*audited*) pada Catatan 34 huruf C. Tidak terdapat permasalahan hukum yang secara material berpengaruh terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak dikenakan sanksi administratif sehingga tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

AKR berkomitmen untuk menyediakan akses informasi dan data perusahaan yang transparan, akurat, dan tepat waktu bagi pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip governansi perusahaan. Transparansi informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, investor, mitra bisnis, serta masyarakat umum, dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai kinerja, kebijakan, serta keputusan strategis Perseroan.

Pengelolaan dan keterbukaan akan informasi tentang Perseroan sangat penting dalam membangun citra Perseroan di mata publik khususnya para *stakeholder*. Untuk itu, Perseroan berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan Perseroan.

Perseroan menyediakan layanan komunikasi melalui Sekretaris Perusahaan dan Divisi *Investor Relation* untuk memastikan bahwa setiap permintaan informasi yang sah dapat diakomodasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publik dapat mengakses informasi mengenai laporan keuangan, informasi perusahaan, publikasi (siaran pers), informasi produk, dan tindakan korporasi.

Sarana utama untuk menyebarkan informasi adalah melalui situs web Perseroan (www. akr.co.id). Informasi dalam situs web AKR tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain situs web, Perseroan juga memberikan jalur komunikasi melalui email ke ir@akr.co.id atau telepon ke +62 21 531 1110 dan senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui Electronic Reporting kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Akses informasi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Online**
   Situs web Perseroan yang beralamat di https//www.akr.co.id yang tersedia dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris memuat informasi mengenai:
   a. Profil Perseroan
   b. Visi dan Misi
   c. Model Bisnis
   d. Informasi Keuangan
   e. Berita Terbaru
   f. Presentasi Perusahaan
   g. Tata Kelola Perusahaan
   h. Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Governansi
   i. Keterbukaan Informasi, dan lain-lain

2. **Media Sosial**
   a. Youtube
   b. Instagram
   c. Facebook
   d. Twitter
   e. Linkedin

3. **Surat menyurat/Surel**
   Alamat surat-menyurat Perseroan:
   AKR Tower Lantai 26
   Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530.
   Email yang ditujukan ke Corporate Secretary dengan alamat email: corporate.secretary@akr.co.id

4. **Keterbukaan Informasi**
   Surat resmi melalui *Electronic Reporting* kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Jalinan Keterikatan dan Komunikasi Investor

Perseroan senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan investor melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan akses yang transparan terhadap informasi Perseroan, termasuk kinerja keuangan, strategi bisnis, serta kebijakan governansi perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Divisi *Investor Relation* berupaya menjaga komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan eksternal dan Manajemen. Hal ini ditempuh dengan menggunakan berbagai saluran dan acara. Kami melakukan interaksi langsung melalui:

1. Partisipasi dalam paparan publik;
2. Menghadiri konferensi, *non-deal roadshow*, dan pertemuan dengan broker;
3. Mengadakan *briefing* capaian kinerja kuartalan;
4. Pertemuan tatap muka diatur dengan pemegang saham *existing* dan calon pemegang saham; dan
5. Kunjungan ke lokasi operasi.

Informasi terkait Perseroan dapat diakses melalui situs web resmi dan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan pendekatan ini, Perseroan memastikan bahwa investor dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Perseroan juga menggunakan blast email rutin dan platform media sosial lainnya untuk menyebarkan informasi yang tersedia untuk umum. Perseroan senantiasa memastikan keakuratan informasi serta informasi yang disajikan lengkap dan tersedia untuk semua pemangku kepentingan secara bersamaan.



Profil Kepala Investor Relations



Ignatius Teguh Prayoga

Kepala Investor Relations

Bergabung sejak
28 September 2022

Usia
33 tahun

Riwayat Pendidikan

- Master of Business Administration, IE Business School, Madrid and Singapore Management University (2018);
- Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (2009).

Riwayat Jabatan

- Senior Equity Analyst, PT BRI Danareksa Sekuritas (2018–2022);
- Research Assistant, PT BRI Danareksa Sekuritas (2017–2018);
- Foreign Exchange Trading Officer, PT Danareksa Persero (2016–2017);
- Treasury Sales Officer, PT Danareksa Persero (2015–2016).
- Analis Intern, Deparment Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia (2014–2015)

Pelaksanaan Tugas Investor Relation Tahun 2024

Selama tahun 2024, *Investor Relation* melaksanakan berbagai program utama sebagai berikut:
1. Partisipasi dalam paparan publik.
2. Menghadiri konferensi, *non-deal roadshow*, dan pertemuan dengan broker.
3. Mengadakan *briefing* capaian kinerja kuartalan.
4. Pertemuan tatap muka diatur dengan pemegang saham *existing* dan calon pemegang saham.
5. Kunjungan ke lokasi operasi bersama investor dan analis.

Pertemuan dengan Investor

Tanggal	Aktivitas	Pelaksanaan
16 Januari 2024	Konferensi Investor	Nomura ASEAN Conference
25 Januari 2024	Webinar investor retail	Succor Retail Event
29 Februari 2024	Konferensi Investor	UBS Midcap conference
8 Maret 2024	Konferensi Investor	Mandiri Investment Forum 2024
21 Maret 2024	Result Briefing untuk analis	2023 Full Year Result Briefing
25 Maret 2024	Konferensi Investor	DBS Pulse of Asia Conference 2024
25 April 2024	Result Briefing untuk analis	3M24 Result Briefing
6 Mei 2024	Webinar investor retail	Webinar Bersama Trading Influencer Rivan Kurniawan
13–17 Mei 2024	Non-Deal Roadshow	Europe UK Non-Deal Roadshow
5 Juni 2024	Konferensi Investor	Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2024, Singapore
11 Juni 2024	Konferensi Investor	20th CITIC CLSA Asean Forum
4 Juli 2024	Konferensi Investor	J.P. Morgan's Malaysia & ASEAN Forum
25 Juli 2024	Result Briefing untuk analis	6M24 Result analyst Briefing
19–23 Agustus 2024	Non-Deal Roadshow	US Non-Deal Roadshow

Tanggal	Aktivitas	Pelaksanaan
30 Agustus 2024	Public Expose	IDX Public Expose Live 2024
5 September 2024	Konferensi Investor	JP MORGAN INDONESIA FORUM
9 September 2024	Konferensi Investor	31th CITIC CLSA FORUM
25 Oktober 2024	Result Briefing untuk analis	9M24 Result Briefing
8 November 2024	Konferensi Investor	Nomura Verdhana Indonesia Conference

Pedoman Etika dan Perilaku

Perseroan memahami bahwa penerapan governansi perusahaan merupakan strategi yang dapat meningkatkan nilai dan mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, tidak hanya untuk Pemegang Saham, tetapi juga untuk seluruh Pemangku Kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip governansi yang kuat, salah satunya melalui penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pedoman Etika dan Perilaku yang ditandatangani pada November 2015 telah diperbarui pada Desember 2023. Pembaruan ini adalah langkah nyata dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk memperkuat pelaksanaan governansi perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku ini menjadi landasan bagi insan Perseroan dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun pihak eksternal. Kode Etik ini diperkenalkan ke seluruh lapisan organisasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak kerja, yang harus dipahami dan disetujui oleh setiap pegawai. Semua pegawai Perseroan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan menjunjung tinggi kode etik dalam setiap aktivitas sehari-hari mereka.

AKR telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik dan Pakta Integritas sebagai bagian dari upaya untuk menginternalisasi pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perseroan. Sebanyak 1.654 karyawan telah menandatangani Pakta Integritas.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Istilah dan definisi
5. Referensi

Dasar dan Pedoman Etika Usaha
1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Budaya Perusahaan
3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
4. Pedoman Etika (*Code of Ethic*)

Pedoman Perilaku Antar Insan Grup PT AKR Corporindo Tbk
1. Hubungan antar Insan AKR
2. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan

Pedoman Perilaku Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
1. Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa, Mitra Kerja, Kreditur dan Pelanggan
2. Hubungan dengan Pemerintah
3. Persaingan Usaha yang Sehat
4. Hubungan dengan Pemegang Saham
5. Hubungan dengan Masyarakat sekitar Wilayah Operasional
6. Kesetaraan Kesempatan Kerja

Pedoman Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Pengelolaan Lingkungan

Pedoman Perilaku dalam Bekerja
1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
2. Kerjasama Antar Insan AKR

Pedoman Perilaku Perlindungan Aset Perusahaan
1. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan
2. Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
3. Hak atas Kekayaan Intelektual Penggunaan Media Sosial dengan Bijaksana

Pedoman Perilaku atas Benturan Kepentingan, Anti Suap dan Gratifikasi
1. Benturan Kepentingan
2. Anti Suap dan Gratifikasi
3. Aktivitas Politik dan Donasi Politik

Prinsip Kode Etik

Prinsip-prinsip kode etik Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Ketaatan terhadap Peraturan Perseroan Peraturan Perseroan harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh pegawai. Pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib dapat berakibat pada peringatan hingga pemutusan hubungan kerja.
2. Ketaatan untuk menghindari benturan kepentingan Keputusan yang diambil oleh pegawai haruslah dibuat dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Perseroan Semua pegawai tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi yang dapat merugikan Perseroan.

Semua Insan Perseroan tanpa terkecuali diwajibkan untuk:
1. Patuh terhadap peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengambil Keputusan yang sesuai dengan visi misi, budaya Perusahaan, pedoman etika Perusahaan, pedoman perilaku, peraturan Perusahaan, prinsip governansi Perusahaan, ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bertindak profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam melakukan Tindakan yang mengatasnamakan AKR dan/atau Grup AKR, di antaranya dengan tidak menyalahgunakan pengetahuan, jabatan atau wewenang, di antaranya dengan tidak terlibat dalam tindak pidana yang bersifat perorangan maupun Korporasi serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun yang merugikan Grup AKR.
4. Mencegah dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau potensi timbulnya benturan kepentingan dengan AKR dan/atau Grup AKR serta para pemangku kepentingan Perseroan.
5. Saling menghormati dan membina hubungan yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan antar sesama rekan kerja, bawahan, atasan, pemegang saham dan pemangku kepentingan.
6. Segera melaporkan pelanggaran yang terjadi dan/atau akan mungkin terjadi terhadap kode etik, pedoman, perilaku, peraturan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh AKR kepada atasan maupun melalui mekanisme *whistleblowing system*.
7. Siap bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik yang berakibat sanksi hukuman termasuk pada pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Perseroan menerapkan kode etik sebagai pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan di setiap tingkatan. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dalam Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, profesionalisme, serta sesuai dengan prinsip governansi perusahaan. Direksi dan Komite Audit turut memantau serta memastikan bahwa pelaksanaan kode etik berjalan dengan baik untuk mendukung keberlanjutan Perseroan.

Pemberlakuan kode etik dilakukan melalui sosialisasi secara berkala, pelatihan, serta pengawasan kepatuhan untuk memastikan penerapannya dalam aktivitas operasional sehari-hari. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang berlaku guna menjaga budaya kerja yang etis, transparan, dan bertanggung jawab di seluruh organisasi.

Penyebarluasan Kode Etik

Media penyebarluasan kode etik kepada seluruh Insan AKR antara lain melalui:
1. *Website* Perseroan www.akr.co.id;
2. Laporan Tahunan;
3. *Newsletter*;
4. Buku saku;
5. Materi orientasi pegawai baru; dan lain-lain.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap karyawan diwajibkan untuk menandatangani pedoman perilaku pada saat bergabung dengan Perseroan dan diharapkan untuk mengintegrasikannya dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan Perseroan. Secara rutin, Perseroan menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat penerapan kode etik di kalangan seluruh pegawai.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, Perseroan akan menerapkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap organisasi. Sanksi dapat berupa tindakan disipliner mulai dari peringatan tertulis, hingga pemutusan hubungan kerja bagi pelanggaran yang berat. Proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat menjaga integritas dan reputasi perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang etis dan profesional.

Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik

Bagi karyawan yang terbukti melanggar Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Perseroan, AKR berhak memberikan sanksi, antara lain:

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi
1.	Pelanggaran kewajiban tanpa menimbulkan kerugian	Teguran lisan
2.	Pengulangan kesalahan pertama maksimum 2 (dua) kali	Teguran tertulis
3.	Pelanggaran atas kehadiran, kebersihan, dsb.	Surat Peringatan Pertama (SP 1)
4.	Pengulangan kesalahan yang tercantum pada SP I, pada taraf batas yang tercantum pada SP I	Surat Peringatan Kedua (SP II)
5.	Pengulangan kesalahan yang tercantum pada SP II, pada taraf batas yang tercantum pada SP II yang menimbulkan kerugian	Surat Peringatan Kedua (SP III)
6.	Pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada Perusahaan pada taraf berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Hingga akhir tahun 2024, tidak ada pelanggaran terhadap kode etik yang terjadi di lingkungan Perseroan. Hal ini mencerminkan komitmen dan kepatuhan seluruh pihak di dalam organisasi terhadap prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan, serta efektivitas dari sistem pengawasan dan penegakan kode etik yang diterapkan oleh Perseroan.



Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management Employee Stock Option Plan* / MESOP) dengan memberikan hak opsi kepada peserta, yang terdiri dari manajemen dan karyawan kunci Perseroan untuk membeli saham. Program ini mencakup 156.500.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp20, yang setara dengan 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, seluruhnya berasal dari saham treasuri.

AKR melaksanakan program MESOP mengacu pada Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan.

Program MESOP dipilih sebagai salah satu cara pengalihan saham treasuri dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dan profitabilitas Perseroan yang konsisten setiap tahun, didorong oleh kinerja dan komitmen manajemen serta karyawan. Perseroan memandang Program MESOP sebagai insentif sekaligus program retensi bagi manajemen dan karyawan yang memiliki kinerja baik. Adapun tujuan program MESOP, meliputi:

1. Meningkatkan rasa memiliki atas Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta Program MESOP yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
2. Tercapainya harmonisasi kepentingan Perseroan dengan kepentingan peserta Program MESOP.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi peserta Program MESOP sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan Perseroan.
4. Meningkatkan loyalitas peserta Program MESOP serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di kemudian hari.
5. Menarik dan mempertahankan manajemen dan karyawan yang berprestasi dalam Perseroan.

Persyaratan Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris

1. Seorang "Peserta" adalah pihak yang berhak mengikuti Program MESOP menurut penetapan Komite. Untuk menghindari keragu-raguan, yang menjadi Peserta hanya seorang individu yang dapat ditunjuk sebagai seorang Peserta dan bukan pasangan, anak atau saudaranya atau pihak lainnya manapun yang menjadi Afiliasi dari Peserta tersebut.
2. Pihak yang berhak dan dapat menjadi Peserta adalah (i) para Direktur Perseroan; (ii) para Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Independen); atau (ii) para pejabat dan karyawan kunci dari Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Komite dari waktu ke waktu dan telah menandatangani suatu Perjanjian Pemberian Hak Opsi atau kesepakatan lainnya dengan Perseroan.
3. Komite akan menentukan dari waktu ke waktu kriteria Pihak yang berhak menjadi Peserta.

Rencana Periode Pelaksanaan MESOP

Program MESOP akan dilaksanakan oleh seluruh Peserta dengan periode pelaksanaan Hak Opsi sebagai berikut:

1. Tahap I: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
2. Tahap II: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
3. Tahap III.A: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026.
4. Tahap III.B: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026, dengan catatan bahwa porsi saham MESOP yang telah dilaksanakan berdasarkan Tahap III.B ini akan dikenakan larangan untuk dijual oleh Peserta (Larangan Untuk Menjual Saham MESOP) selama satu tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Program ini dan Perjanjian Pemberian Hak Opsi.

Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti korupsi dan gratifikasi yang tegas dalam setiap aspek operasional dan bisnisnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah segala perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Kebijakan anti korupsi AKR mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan mengenai anti korupsi dan gratifikasi AKR diatur dalam *Code of Conduct* dan Pedoman *Whistleblowing System*. Berikut adalah pedoman perilaku terkait anti korupsi dan gratifikasi yang diterapkan:

1. Insan AKR dilarang untuk memberikan atau menjanjikan hadiah atau sejenisnya kepada para pihak yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi atau menggerakkan para pihak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Insan AKR dilarang untuk menerima atau meminta segala bentuk komisi dan/atau bentuk imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaannya.
3. Apabila Insan AKR mendapatkan Gratifikasi dari mitra kerja dan atau pihak yang berkaitan dengan Perseroan, maka yang bersangkutan wajib untuk segera melaporkannya kepada Direksi.
4. Seluruh Insan AKR diwajibkan mendukung segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Perseroan melarang keras pemberian atau penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan kegiatan bisnis, kecuali yang diatur secara jelas dalam peraturan Perseroan. Semua karyawan diharapkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemui indikasi praktik korupsi atau gratifikasi, dengan perlindungan terhadap identitas pelapor. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Perseroan melakukan pelatihan reguler dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan organisasi.

Perseroan senantiasa mendorong penerapan anti korupsi dan gratifikasi kepada karyawan guna mempertegas kebijakan dan peraturan sekaligus sebagai *engagement* karyawan pada komitmen penegakan integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan di seluruh unsur pengelolaan usaha. Perseroan juga mendorong kesadaran dan kewaspadaan seluruh karyawan untuk menjaga lingkungan kerja masing-masing tetap sehat dan bersih dari praktik-praktik kecurangan, melalui penyediaan sarana pelaporan dan pengaduan (*whistleblowing system*).

Whistleblowing System

Whistleblowing System (Sistem Pengaduan Pelanggaran) adalah mekanisme yang digunakan untuk menerima, memproses, menindaklanjuti, dan melaporkan informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Penerapan sistem ini juga merupakan bagian dari prinsip governansi perusahaan guna memastikan operasional yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan visi serta misi Perseroan.

Perseroan senantiasa berupaya mencegah terjadinya *fraud* yang melibatkan setiap insan Perseroan, salah satunya melalui penerapan WBS. Setiap laporan yang disampaikan harus didasari itikad baik dan tidak diperkenankan berupa keluhan pribadi, kehendak buruk, maupun fitnah. Perseroan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk secara profesional dan bertanggung jawab guna menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan berintegritas.

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan *Whistleblowing System* yang baik antara lain adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;

5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum; dan
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Kebijakan *Whistleblowing* ini bertujuan untuk mendorong terciptanya mekanisme *check & balances* di seluruh level Perseroan, serta membangun kesadaran kolektif untuk mencegah kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan penerapan kebijakan yang konsisten dan tegas, Perseroan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan praktik bisnis yang transparan, mematuhi peraturan yang berlaku, dan senantiasa menjunjung tinggi standar etika yang tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pegawai Perseroan dan pihak eksternal lainnya dapat melaporkan dugaan tindakan *fraud*, kejahatan, pelanggaran hukum, perilaku tidak etis, atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan dan pemangku kepentingan, termasuk yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perseroan. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang di dalam Perseroan untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pada tahun 2024, Perseroan menyediakan beberapa saluran pelaporan, antara lain:
1. Sistem pelaporan yang berbasis *website/online form* pada https://wbs.akr.co.id.
2. Email (lapor.haryanto.adikoesoemo@akr.co.id)
3. Aplikasi Whatsapp (0811–1321–911)

Seluruh informasi yang disampaikan melalui saluran pelaporan tersebut akan diterima langsung oleh Presiden Direktur. Dengan 3 (tiga) saluran pelaporan yang tersedia, diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas proses *Whistleblowing System* di Perseroan. Kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran telah diperbarui dan disahkan pada tanggal 6 Oktober 2021.

Pelapor diwajibkan untuk memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan fraud atau pelanggaran yang dilaporkan, lengkap dengan data pendukung (jika ada), yang mencakup:
1. Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*)
2. Pihak yang terlibat (*Who*)
3. Waktu kejadian (*When*)
4. Tempat/lokasi kejadian (*Where*)
5. Bagaimana kejadiannya (*How*)

Pihak yang dapat Melaporkan Pelanggaran

Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan baik internal maupun eksternal. Internal Perseroan berarti seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta eksternal Perseroan berarti termasuk *stakeholders* lainnya (pemasok, konsultan, vendor, *outsourcing*, pelanggan, kreditur, masyarakat, dan lain-lain).

Perlindungan bagi *Whistleblower*

Pelapor atau *whistleblower* berhak menerima perlindungan, dan Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang bertindak dengan itikad baik. Perseroan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan serta menerapkan praktik terbaik dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*. Perlindungan terhadap pelapor ini bertujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran dan memastikan keamanan pelapor, yang meliputi:
1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan, kecuali atas permintaan penegak hukum.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
3. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
4. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman (pidana atau perdata) ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.
5. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.
6. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya kepada Presiden Direktur. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perseroan.

Penanganan dan Pihak Pengelola Pengaduan

Setiap laporan akan diterima langsung oleh Presiden Direktur Perseroan. Proses tindak lanjut akan dilakukan dengan cermat, berdasarkan pedoman yang berlaku di Perseroan serta peraturan yang relevan di Indonesia, oleh tim internal (Unit Pengelola WBS) yang ditunjuk oleh manajemen. Komunikasi dengan pelapor akan dijaga kerahasiaannya oleh petugas Perlindungan Pelapor, dan dilakukan hanya jika diperlukan untuk mengumpulkan informasi atau klarifikasi guna mendukung proses investigasi lebih lanjut.

Jumlah Laporan dan Tindak Lanjut

Per 31 Desember 2024, AKR menerima 4 (empat) laporan pengaduan yang terkait dengan WBS. Dari keseluruhan laporan tersebut, Perseroan telah menyelesaikan dan menindaklanjuti setiap laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Perseroan.

Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan Governansi Perusahaan

AKR terus berkomitmen untuk memperkuat penerapan governansi perusahaan. Keberhasilan yang diraih oleh Perseroan hingga saat ini mencerminkan konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip governansi perusahaan. Kepercayaan yang diberikan oleh para investor juga merupakan hasil dari upaya berkelanjutan Perseroan dalam menerapkan governansi perusahaan yang solid.

Perseroan bertekad untuk terus memperbaiki penerapan tata kelola perusahaan. Berbagai langkah yang akan diambil AKR pada tahun 2024 untuk memperkuat kualitas tata kelola perusahaan antara lain:

1. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menjaga Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Mendistribusikan informasi sebagai bentuk sosialisasi peraturan maupun pedoman baru yang berkaitan dengan governansi dan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3. Menjaga alur komunikasi kepada pihak eksternal dan pihak internal Perseroan dalam rangka menjaga transparansi.
4. Mengikuti seminar dan sosialisasi peraturan dan pedoman baru terkait governansi Perusahaan.

Kebijakan *Insider Trading*

AKR memiliki kebijakan yang tegas terkait larangan praktik *insider trading*, yang melarang seluruh anggota Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, untuk membeli atau menjual saham Perseroan atau melakukan transaksi terkait sekuritas lainnya berdasarkan informasi yang belum dipublikasikan yang dapat mempengaruhi harga saham atau nilai pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi material yang tidak tersedia untuk publik dan untuk menjaga integritas pasar.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, setiap individu yang memiliki akses ke informasi material yang belum dipublikasikan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak mengungkapkan atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Salah satu praktik untuk melindungi hak pemegang saham adalah dengan menerapkan Kebijakan Periode *Blackout* Untuk Transaksi Jual Beli Saham AKR. Periode ini merupakan pembatasan Orang Dalam yang berada di dalam Perseroan, di mana mereka mengetahui Informasi Material yang belum dipublikasikan.

Kebijakan ini menjadi dasar Perseroan untuk memastikan tidak adanya governansi perusahaan maupun peraturan perundang-undangan terkait Orang Dalam Perseroan yang hendak melakukan Transaksi Saham termasuk juga Afiliasinya. Adapun kebijakan tersebut antara lain:

1. Selama Periode *Blackout*, Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Material dilarang melakukan Transaksi Saham, termasuk namun tidak terbatas pada:
   - Memberikan perintah/instruksi untuk melakukan transaksi jual ataupun beli Saham AKRA;
   - Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Transaksi Saham dengan cara memberikan Informasi Material sebagai Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya.
2. Pada saat pengumuman Periode *Blackout*, Orang Dalam yang masih memiliki perintah Transaksi Saham yang belum dilaksanakan wajib membatalkan perintah tersebut. *Corporate Secretary Office* wajib memastikan pembatalan Transaksi Saham sudah dilaksanakan.

Periode *Blackout* untuk umum dilaksanakan 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Laporan Keuangan Perseroan baik kuartalan, tengah tahun, atau tahunan dirilis ke masyarakat melalui Bursa. Periode *Blackout* umum akan berakhir pada hari dirilis laporan keuangan ke Bursa. Sedangkan, untuk periode Blackout insidental dimulai sejak informasi material terkait aksi korporasi dimiliki oleh orang dalam hingga informasi tersebut diumumkan melalui Bursa.

Governansi Teknologi Informasi

Governansi Teknologi Informasi (TI) di Perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi dikelola dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan Perseroan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Kebijakan governansi TI mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang komprehensif atas infrastruktur TI, keamanan data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Optimalisasi penerapan TI dalam proses bisnis AKR, tidak hanya mampu mendukung *cost leadership*, namun juga mendorong keberlangsungan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan sistem TI yang terintegrasi dan otomatisasi proses, AKR dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, pemanfaatan TI yang optimal juga mendukung inovasi dan pengembangan layanan baru, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

Melalui penerapan TI, Perseroan memastikan bahwa operasional bisnis berorientasi pada sistematika cepat tanggap (*Quick Response System*). Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, Perseroan dapat merespons kebutuhan pasar dan perubahan kondisi secara lebih cepat dan tepat. Secara umum, Perseroan mendorong implementasi strategi TI yang mengadopsi kemajuan teknologi yang relevan, guna memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas, serta memastikan keberlanjutan dan inovasi dalam setiap aspek operasional perusahaan.

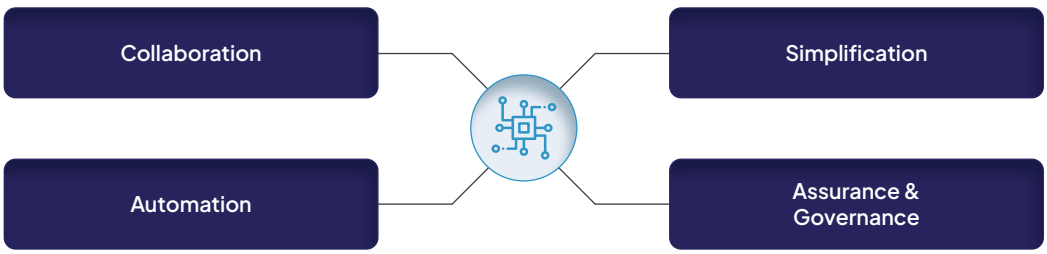

AKR berlandaskan pada 4 (empat) nilai dalam pengembangan sistem TI sebagai berikut:

1. *Collaboration*: Mengembangkan produktivitas lintas proses bisnis. Aspek utama: Mobilitas
2. *Automation*: Menyederhanakan alur kerja dan mempersingkat periode pengerjaan.
3. *Simplification*: Penyederhanaan proses untuk menghilangkan tugas yang tidak bernilai tambah dan tugas yang tidak perlu atau berlebihan.
4. *Assurance & Governance*: Jaminan untuk ketersediaan, keterlacakan dan keamanan serta keselarasan dengan bisnis dan tujuan bisnis secara keseluruhan.

Pengelola TI

Penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI di AKR berada di bawah Departemen Information technology digambarkan melalui bagan berikut:

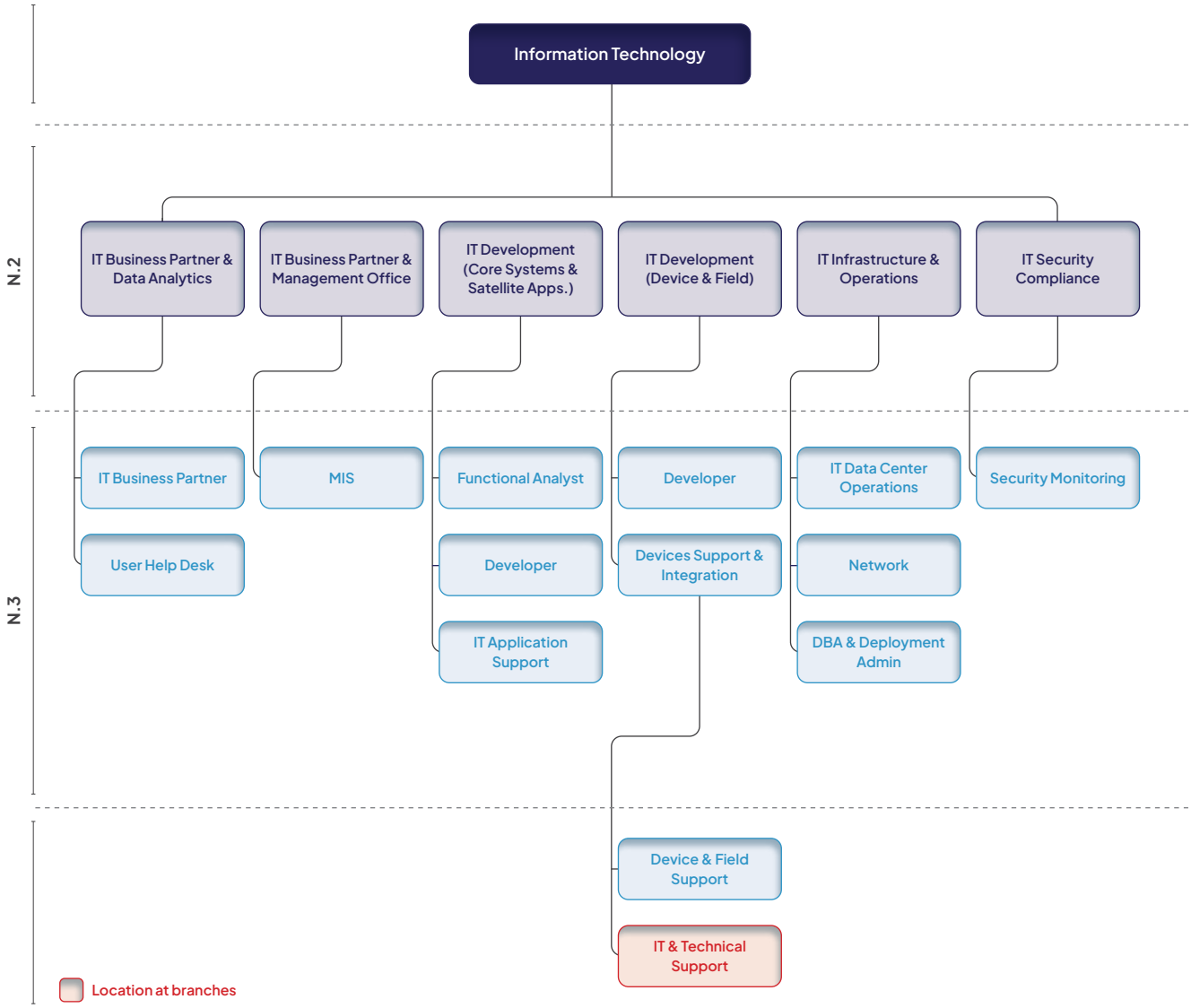

Tantangan dan Program Strategis Divisi TI Tahun 2024

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan tantangan yang dihadapi, upaya untuk menjaga integritas dan akurasi data menjadi semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan berkala guna mengidentifikasi proses yang dapat disederhanakan dan diotomatisasi agar dapat mendukung kelangsungan dan efisiensi proses bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

Divisi IT menilai bahwa stabilitas jaringan konektivitas antara kantor pusat dan kantor cabang perlu ditingkatkan, mengingat operasional Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, mencakup kantor cabang dan transportasi baik di darat maupun di laut. Selain itu, meningkatnya ancaman keamanan siber dan keamanan data menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam penerapan TI sepanjang tahun 2024.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan mendorong pelaksanaan program strategis yang berlandaskan nilai Collaboration, Automation, Simplification, dan Assurance & Governance sebagai berikut:

Integrasi
Divisi IT melakukan review secara menyeluruh untuk integrasi dari semua aplikasi dan sistem yang terimplementasi menjadi satu kesatuan yang terhubung satu dengan lainnya. Aplikasi/sistem tersebut tidak berdiri sendiri dan terkoneksi

satu sama lain dalam melakukan pertukaran data sehingga mempercepat proses secara end-to-end. Dalam hal ini, Divisi IT berupaya menerapkan integrasi yang menyeluruh dalam proses Procure to Pay dan Order to Cash, mulai dari sistem Customer Relationship Management (CRM) yang menghasilkan Sales Order, Enterprise Resource Planning (ERP) yang mengatur Purchase Order, Inventory, penagihan dan pembayaran, Displan system untuk mengatur pengiriman barang ke customer, dan SCADA system untuk proses blending dan filling yang sudah terhubung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi human error dan potensi fraud serta mempercepat proses. Sebagai bagian dari upaya yang berkelanjutan, Divisi IT selalu mencari cara untuk memperbaiki proses agar lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat dari proses sebelumnya tanpa mengorbankan kualitas proses yang sudah ada.

Jaringan

Jaringan dan konektivitas yang merupakan saluran distribusi data merupakan faktor penting dalam suatu proses aplikasi atau sistem untuk memastikan bekerja cepat dan efisien. Oleh karena itu, IT meningkatkan jaringan dengan menggabungkan provider lokal dengan Starlink untuk menjangkau daerah yang sulit ditembus oleh jaringan provider setempat. Dengan adanya Starlink, IT dapat meningkatkan kinerja jaringan sehingga baik di kantor cabang maupun transportasi kapal yang dimiliki oleh Perseroan dapat berfungsi lebih baik dengan biaya yang lebih kompetitif dari sebelumnya.

Keamanan

Perseroan berupaya untuk melakukan peningkatan keamanan dari sisi teknologi dengan melakukan pengawasan terhadap sistem yang ada dan melakukan monitoring secara reguler untuk memastikan keamanan sistem. Divisi IT juga meningkatkan sistem keamanan dengan mengadopsi multi-factor authentication hingga 3 level, yaitu password, token, dan biometrik. Security hardening juga dilakukan untuk menjaga aset digital agar terhindar dari aspek-aspek yang berpotensi merugikan perseroan, termasuk di dalamnya untuk menjaga PDP (Privasi Data Protection). Data Perseroan juga diberikan pengamanan tambahan berupa enkripsi untuk mencegah kebocoran data (data leak) kepada pihak luar serta melakukan upaya pencegahan (preventive) melalui edukasi berupa IT Security Awareness dan Training kepada karyawan Perseroan.

Investasi dan Sosialisasi TI

Perseroan terus berinvestasi dalam pengembangan TI sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Investasi TI ini mencakup pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, peningkatan infrastruktur jaringan, serta implementasi sistem yang lebih canggih untuk mendukung berbagai proses bisnis. Dengan langkah ini, Perseroan memastikan bahwa teknologi yang digunakan selalu *up-to-date*, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan Perseroan yang terus berkembang.

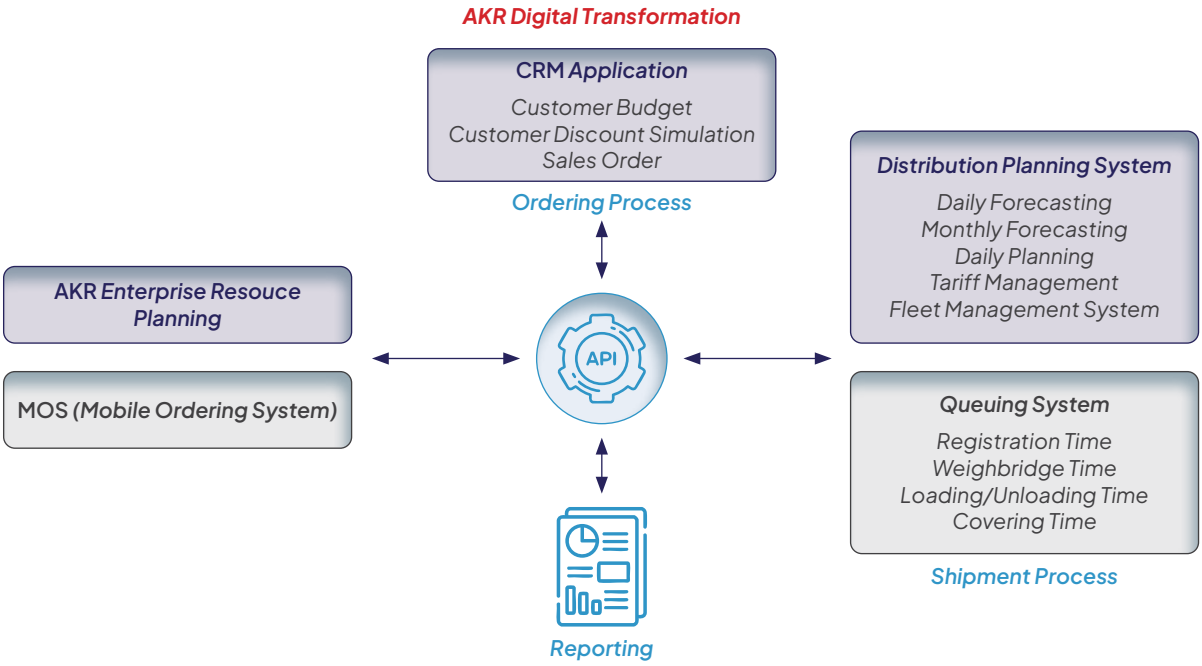

Selain itu, investasi juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas karyawan yang mengelola TI Perseroan. Perseroan secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk karyawan, guna memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem TI yang digunakan. Sosialisasi ini juga mencakup pengedukasian tentang pentingnya keamanan data, privasi informasi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur TI yang ada, untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat mendukung tujuan Perseroan dengan cara yang aman dan efektif.

Pada tahun 2024, Departemen Information Technology sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI di AKR telah menjalankan pelatihan teknis dan sosialisasi terkait keamanan data kepada seluruh karyawan. Salah satunya, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi Compliance Review Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). AKR juga telah menunjuk Divisi Legal dan Divisi IT sebagai Task Force Team dalam menjalankan sosialisasi PDP.

Privasi Data dan Keamanan *Cyber*

AKR menyadari bahwa pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga tantangan, terutama dalam aspek data protection dan cyber security. Perseroan telah memperkuat implementasi perlindungan data dan keamanan siber di seluruh lini operasional. Langkah ini mencakup penerapan kebijakan keamanan siber yang komprehensif untuk mengelola risiko terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam lingkungan Perseroan.

AKR telah memiliki kebijakan, tata kelola, dan standar prosedur terkait privasi data dan keamanan siber yang tertuang dalam:
- ITE-SCO-SCO-POL-001 - IT Security Policy
- ITE-SCO-SCO-PRO-001 - Cyber Security Incident Response

AKR menyadari pentingnya perlindungan data di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta data konsumen, AKR menerapkan berbagai teknologi seperti enkripsi data, multi-factor authentication (MFA), data masking, dan tokenisasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi penting dan untuk meminimalkan potensi kebocoran data. Program pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber untuk menjaga keamanan data juga rutin diberikan kepada karyawan.

AKR menjalankan governansi TI melalui struktur organisasi yang tersusun berdasarkan fungsi, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan operasional digital perusahaan. Masing-masing fungsi memiliki peran strategis, termasuk pengelolaan data center, jaringan, pengembangan aplikasi, dukungan teknis, serta pemantauan keamanan siber. Selain itu, AKR juga menyediakan layanan IT di cabang-cabang untuk memastikan dukungan menyeluruh bagi seluruh operasional bisnis. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menerapkan governansi TI yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis.

Sepanjang tahun 2024, AKR tidak mencatat adanya insiden kebocoran data pribadi pelanggan. Kami terus berupaya untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data melalui penerapan sistem, kebijakan, dan pengawasan yang konsisten guna menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan Tata Kelola TI

Peseroan telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan tata kelola TI. Berikut adalah poin-poin utamanya:

1. **Digital Twin**
   Perseroan memanfaatkan teknologi digital twin untuk meningkatkan tata kelola TI. Ini melibatkan pembuatan replika virtual dari lingkungan fisik untuk memantau dan mengelola aset TI dengan lebih efektif. Digital twin membantu dalam pemetaan system landscape , memberikan pandangan komprehensif tentang potensi masalah dan memungkinkan tindakan proaktif untuk mengurangi risiko.
2. **Manajemen Akses Terpusat**
   Perseroan telah menerapkan manajemen akses terpusat untuk menyederhanakan dan mengamankan akses ke sumber daya TI. Pendekatan ini memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang memiliki akses ke data dan sistem sensitif, mengurangi risiko akses tidak sah dan pelanggaran data.
3. **Penyederhanaan dan penyetaraan Arsitektur**
   Perseroan berfokus pada penyederhanaan arsitektur TI untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas. Ini termasuk mengintegrasikan sistem ERP dan aplikasi satelit lainnya menggunakan manajemen API, yang menciptakan proses ujung ke ujung yang ter-integrasi tanpa intervensi manual. Selain itu, Perseroan meningkatkan sistem pelaporan dan informasi manajemen untuk menyediakan data yang akurat dan andal untuk pengambilan keputusan.
4. **Rekonsiliasi Otomatis**
   Perseroan menggunakan proses rekonsiliasi otomatis untuk memastikan akurasi dan konsistensi data di berbagai sistem. Otomatisasi ini membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian dengan cepat, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan integritas data secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, AKR berkomitmen untuk mempertahankan tata kelola TI yang kuat melalui perbaikan berkelanjutan dan adopsi teknologi canggih. Upaya ini bertujuan untuk memastikan privasi data, keamanan siber, dan ketahanan operasional dalam menghadapi gangguan dan bencana.

Rencana Pengembangan TI ke Depan

Dalam era digital yang semakin maju, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan AI, Perseroan dapat mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan keamanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Oleh karena itu, kami telah merancang peta jalan strategis TI yang berfokus pada penerapan AI untuk mencapai transformasi digital yang berkelanjutan.

AKR telah membagi roadmap TI ke depan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun penjelasan masing-masing strategi sebagai berikut:

1. **Jangka Pendek:** Membangun fondasi digital yang kuat, termasuk standarisasi TI dan peningkatan aplikasi serta infrastruktur. Inisiatif utama meliputi implementasi *digital twin*, peremajaan pusat data, peningkatan *server*, penambahan jaringan, penguatan keamanan siber serta perencanaan untuk melakukan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Test*.
2. **Jangka Menengah:** Mengembangkan ruang kerja digital yang komprehensif, dengan fokus pada otomatisasi dan efisiensi, serta memanfaatkan AI untuk alat operasional harian. Rencana ini mencakup perluasan agen AI untuk berbagai tugas (misalnya, penjualan, manajemen stok), perombakan aplikasi bisnis, dan mengadopsi pendekatan *mobile-first* untuk semua alat bisnis.
3. **Jangka Panjang:** Mencapai transformasi digital melalui inisiatif seperti ONE Ops (*One Operation*), konsolidasi alat bisnis *end-to-end*, AI Ops - AI Operation termasuk didalamnya penggunaan agentic AI dan integrasi *computer vision technology* serta IIoT untuk meminimalkan kesalahan manusia.

Pedoman Penerapan Prinsip Governansi Perusahaan

AKR terus melakukan upaya perbaikan terhadap implementasi prinsip-prinsip governansi perusahaan yang terdiri dari Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan. Hal tersebut dilandasi atas kesadaran Perseroan akan pentingnya penerapan prinsip GCG dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan.

Perseroan menerapkan internalisasi budaya dengan menerapkan nilai-nilai GCG ke dalam seluruh proses bisnis termasuk di dalamnya Prosedur Pengadaan Barang, Prosedur Seleksi Pegawai, Prosedur Penerimaan, Prosedur Pelaporan, serta Prosedur Pemasaran. Secara berkala, Perseroan mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan melalui:

- Kegiatan hubungan investor (*analyst meeting* dan *roadshow* ke berbagai lembaga investasi);
- Paparan publik tahunan;
- *Update website* Perseroan secara berkala (www.akr.co.id);
- Penyebaran informasi secara berkala berupa *news release* kepada para pemangku kepentingan.

Pengenalan dan pemahaman atas komitmen Perseroan terhadap governansi perusahaan kepada seluruh jajaran Perseroan secara berkesinambungan diimplementasikan pada setiap kegiatan usaha Perseroan. Terdapat 3 (tiga) fokus utama yang menjadi perhatian Perseroan atas pelaksanaan governansi perusahaan di Perseroan, antara lain:

1. *Compliance*, merupakan prinsip kepatuhan Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik di semua aspek, termasuk penerapan kebijakan Perseroan.
2. *Confidence*, penanaman sikap optimis dan percaya diri bahwa Perseroan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. *Transparency*, Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi investor.

Dalam implementasi governansi Perusahaan, AKR mengacu pada Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman governansi mencakup 5 aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip governansi perusahaan ini merupakan standar penerapan aspek dan prinsip governansi perusahaan yang harus diterapkan Perseroan dengan pendekatan "*comply or explain*". Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
1.	**Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham.**			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2024, ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah diunggah pada website Perseroan dan telah pula dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum Rapat dimulai. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra serta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.	Terpenuhi
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Dengan memperhatikan Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020, RUPS Tahunan dilakukan seefisien mungkin secara hybrid difasilitasi oleh aplikasi eASY KSEI tanpa mengurangi keabsahannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua anggota Dewan Komisaris mengikuti jalannya RUPS yaitu Soegiarto Adikoesoemo (Presiden Komisaris), Sofyan A. Djalil (Komisaris), dan Mohamad Fauzi Maulana Ichsan (Komisaris Independen). Direksi diwakili oleh Haryanto Adikoesoemo (Presiden Direktur), Jimmy Tandyo (Direktur), Suresh Vembu (Direktur), Nery Polim (Direktur), Termurti Tiban (Direktur) serta Bambang Soetiono Soedijanto (Direktur) dan Mery Sofi (Direktur) mengikuti jalannya RUPS melalui video conference via eASY KSEI.	Tidak Terpenuhi Dengan Penjelasan
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam *website* Perseroan.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Perseroan selalu mengupdate informasi bagi pemegang saham atau investor melalui website Perseroan. Para pemegang saham dapat berkomunikasi langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menghubungi nomor kontak maupun *email Investor Relation* dan/atau *Corporate Secretary* yang terdapat di *website* Perseroan.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor dalam situs web Perseroan. Perseroan juga telah menyiapkan *form Request Information* untuk memudahkan pemegang saham atau investor berkomunikasi dengan Perseroan https://www.akr.co.id/*request*.	Terpenuhi
II.	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan juga sesuai dengan ketentuan POJK No.33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.	Terpenuhi
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan Perseroan dengan baik. Jumlah Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah 3 (tiga) orang.	Terpenuhi
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Perseroan telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.	Terpenuhi
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait.	Terpenuhi
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Nominasi dan Remunerasi telah menerapkan prinsip-prinsip kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
III.	**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi**			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Penentuan jumlah anggota Direksi Perseroan diambil dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan, sesuai Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Terpenuhi
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penentuan komposisi anggota Direksi telah dilakukan dengan memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengurusan Perseroan dengan baik.	Terpenuhi
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Ibu Termurti Tiban, Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki pengalaman, keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Beliau telah melewati proses nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 30 April 2020.	Terpenuhi
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi Perseroan telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.	Terpenuhi
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait.	Terpenuhi
IV	**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan**			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Perseroan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, salah satunya dengan menetapkan kebijakan periode *Blackout* 10 hari sebelum tanggal rilis laporan keuangan, dan mewajibkan lapor ke *corporate secretary* perihal transaksi saham manajemen sebagai orang dalam.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	Perusahaan telah memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud* yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak hak kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	Perseroan telah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan *improvement whistleblowing System* dengan menambah *channel* pelaporan yang sebelumnya hanya sistem pelaporan berbasis *website/ online form*, kini juga dilengkapi melalui *email* dan Whatsapp. Dengan sistem ini, diharapkan dapat mengoptimalkan proses pelaporan *Whistleblowing System* di perusahaan. https://wbs.akr.co.id/	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Perseroan memiliki program MSOP yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen dan Karyawan tertentu). Program MSOP 2015 berakhir pada 8 April 2020.	
V	**Aspek 5: Keterbukaan Informasi**			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Keterbukaan informasi Perseroan telah dilakukan melalui web Bursa Efek Indonesia dan juga Perseroan.	Terpenuhi
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Laporan Tahunan 2020 telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir, Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan >5% dan juga 20 pemegang saham terbesar Perseroan.	

Kesesuaian Penerapan Pedoman Governansi Perusahan

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi		
Rekomendasi			
	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: • berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta • berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*).	Terpenuhi	Dalam pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris AKR, disebutkan nilai-nilai yang WAJIB dipatuhi Direksi dan Dewan Komisaris antara lain: • Integritas • Komitmen • Kerja sama Tim • Komunikasi yang jujur dan terbuka • Mempercayai dan menghargai • Menciptakan nilai • Perbaikan yang berkesinambungan Setiap Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengoptimalkan kemampuannya untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak terkait secara berkesinambungan, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif..	Terpenuhi	Dalam pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris AKR, disebutkan nilai-nilai yang WAJIB dipatuhi Direksi dan Dewan Komisaris, salah satunya adalah Setiap Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengoptimalkan kemampuannya untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak terkait secara berkesinambungan. AKR terus berkembang menyesuaikan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk dapat bertumbuh secara *sustainable*, salah satunya dengan mengoptimalkan sistem IT dalam memonitor pergerakan dan status produk, serta merencanakan distribusi yang efisien. AKR telah membuktikan bahwa Perseroan dapat memberikan performa yang konsisten di berbagai fase krisis dan fase ekonomi, yang juga merupakan bukti kesuksesan AKR dalam menyesuaikan diri serta bertransformasi agar selalu relevan dengan perubahan. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	Terpenuhi	Direksi AKR memastikan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan pendekatan *tone from the top* yang dimulai dari *Top Management*. Direksi AKR memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis Perseroan dengan rutin, mengkaji profil dan laporan risiko Perseroan termasuk memastikan & memberikan pandangan terkait risiko yang menjadi prioritas dalam mitigasi, mengkaji kontrol mitigasi untuk memastikan realisasi implementasi, dan memastikan kecukupan sumber daya manusia dalam mengelola risiko stratejik.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi	Terpenuhi	
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	Terpenuhi	Laporan keberlanjutan telah disusun berdasarkan POJK 51 dan GRI 2021 dengan referensi

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	Terpenuhi	Sistem Teknologi AKR dirancang untuk dapat menjamin kualitas dan kuantitas produk hingga ke tangan konsumen dan menghindari kecurangan yang terjadi dalam proses pendistribusian. Sistem teknologi dalam hal kemudahan bekerja juga diterapkan dengan platform media daring *teams*, *outlook*, dan CRM dengan tetap memberikan jaminan keamanan siber.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	N.A	
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	Terpenuhi	Piagam Direksi dalam bentuk Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani pada tahun 2015 dan dinilai masih relevan untuk dijadikan pedoman kerja Direksi & Komisaris. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Terpenuhi	Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah cliterimanya surat permohonan pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
1.2	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya		
Rekomendasi			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.	Terpenuhi	Dewan Komisaris AKR mengevaluasi kinerja Direksi berdasarkan indikator kesesuaian Pedoman Kerja Direksi, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Pelaksanaan hasil keputusan RUPS; Pencapaian kinerja Perseroan dari aspek keuangan,operasional, dan administrasi; serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	Terpenuhi	• Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad balk, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. • Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat membentuk komite salah satunya komite nominasi & remunerasi . • Tugas komite ini salah satunya adalah mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan budaya kerja yang diterapkan di perusahaan; pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh; yang berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi.
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
Rekomendasi			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	Terpenuhi	• Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi misi Perseroan. • Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad balk, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtgIDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrIOQvemr.pdf
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan	Terpenuhi	Tercantum dalam bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Komisaris
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan *gender*. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	Terpenuhi	Di dalam piagam komite nominasi dan remunerasi dicantumkan bahwa: dalam rangkaian pelaksanaan tugas komite nominasi, dilaksanakan pembahasan untuk menetapkan usulan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baru kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/v2RoTJxNDwvSEdqScKNBGHvnG0ggqJYhVFUmbF57.pdf
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	N.A	

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1.3.5	Dewan Komisaris • mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; • secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Tugas komite terkait remunerasi antara lain: • Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh, berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan ; kesesuaian antara strategi dan inovasi serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham. • Berdasarkan hal diatas, kemudian melaksanakan pembahasan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS. • Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/v2RoTJxNDwvSEdqScKNBGHvnG0ggqJYhVFUmbF57.pdf
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab clan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	Terpenuhi	Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dewan komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama Perseroan, dan melaksanakan pengawasan melalui komite-komite yang dibentuk, untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif, serta memastikan proses *clan* sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Dalam hal ini, internal audit AKR secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Direksi dan Komite Audit Komisaris. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integrasi akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	Terpenuhi	Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	Terpenuhi	Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dewan komisaris wajib meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan, memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta, dan kemudian mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	Terpenuhi	Piagam Dewan Komisaris dalam bentuk Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani pada tahun 2015 dan dinilai masih relevan untuk dijadikan pedoman kerja Direksi & Komisaris.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Terpenuhi	Kriteria Dewan Komisaris AKR antara lain adalah tidak memiliki integritas dan reputasi yang buruk, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja. Seluruh manajemen termasuk organ Perseroan wajib menandatangani Pakta Integritas, yang di dalamnya menyebutkan bahwa bila saya terbukti melanggar Pakta Integritas tersebut, maka yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri tanpa menerima kompensasi apapun dari perusahaan serta bersedia dikenakan sanksi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi administrasi sampai dengan tuntutan ganti rugi baik perdata dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.		Bapak Fauzi Ichsan selaku komisaris Independen selalu mengikuti rapat komite, komisaris, dan rapat gabungan. Beliau aktif memberikan pendapat dan masukkan yang objektif dan terdokumentasi dalam dokumen berita acara rapat internal.
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.	Terpenuhi	Bapak Soegiarto Adikoesoemo selaku Presiden Komisaris selalu memberikan kesempatan kepada anggota komisaris dan direktur untuk memberikan pendapatnya di dalam rapat. Beliau juga aktif memberikan pendapat dan masukan yang objektif dan terdokumentasi dalam dokumen berita acara rapat internal.
1.4	Pembentukan Komite		
Rekomendasi			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	Terpenuhi	Perseroan memiliki Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Internal Audit yang terintegrasi dengan *Risk Management*, yang bekerja di bawah Dewan Komisaris. Kini kami juga memiliki Komite ESG, yang dibentuk untuk membantu Direksi dan Komisaris dalam merumuskan strategi keberlanjutan beserta pelaksanaannya.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan *independent*.	Terpenuhi	Komite Audit Perseroan dibantu oleh Departemen Internal audit yang memiliki visi menjadi unit yang independen, objektif, profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung Manajemen Perseroan dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya. Anggota Komite Audit harus independen, dengan latar belakang pemahaman dan pengetahuan bisnis; Dalam tugasnya, Komite Audit memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris tentang perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan; rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; dan Melakukan penelaahan alas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjutnya alas temuan auditor internal. Komite Audit Perseroan memiliki *background Finance & Accounting* serta pengetahuan bisnis AKR yang kuat, sehingga dapat memberikan pendapat yang objektif atas aspek keuangan dan bisnis AKR. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/gcg-organs/audit-committee
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan	Terpenuhi	Komite Audit AKR diketuai oleh Bapak Fauzi Ichsan selaku Komisaris Independen. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/2UWaLw3umSMsE1JoTEbotvZqcN2H2jNLAx8ODcNL.pdf
1.5	Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya		
Rekomendasi			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.	Terpenuhi	Dewan komisaris melakukan evaluasi secara tahunan atas efektivitas anggotanya, dengan masukkan-masukkan dari komite di bawahnya.
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.		Anggota Direksi AKR tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perseroan. Jika ada penawaran jabatan di luar Perseroan, Direktur wajib meminta pertimbangan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	Terpenuhi	Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: • Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; • Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris		
Rekomendasi			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	Terpenuhi	Sekretaris perusahaan aktif memberikan update peraturan terbaru dan seminar-seminar yang dapat diikuti Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menyegarkan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam hal tata kelola, isu-isu ESG dan ekonomi.
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris		
2.1	Komposisi Direksi		
Rekomendasi			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	N.A	
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	Terpenuhi	Kriteria Direksi dan Komisaris masuk ke dalam *point* pedoman kerja Direksi Komisaris yang telah mengadopsi POJK 33/2014 yang fokus pada kemampuan, kapasitas, dan integritas calon kandidat. AKR juga telah memberikan pernyataan dan komitmen terkait perlindungan kebijakan Hak Asasi Manusia, yang berlaku untuk seluruh manajemen dan organ Perseroan.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Terpenuhi	AKR telah memberikan pernyataan dan komitmen terkait perlindungan kebijakan Hak Asasi Manusia, yang berlaku untuk seluruh manajemen dan organ Perseroan
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Terpenuhi	Dalam hal seleksi dan nominasi komisaris, sepenuhnya dilakukan secara internal: • Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Komisaris sena usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris umuk disampaikan dalam RUPS. • Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Komisaris yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui. • Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtgIDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrIOQvemr.pdf

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	Terpenuhi	Kriteria Direksi dan Komisaris masuk ke dalam *point* pedoman kerja Direksi Komisaris yang telah mengadopsi POJK 33/2014 yang fokus pada kemampuan, kapasitas, dan integritas calon kandidat.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan *gender* yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Komposisi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024: • Soegiarto Adikoesoemo – Presiden Direktur: Founder AKR yang memiliki pengalaman bisnis panjang di industri kimia dan logistik • Sofyan A. Djalil – Komisaris: Memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di sektor publik maupun swasta di pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri di berbagai bidang. • Fauzi Ichsan – Komisaris Independen: memiliki pengalaman di bidang Pemerintahan dan Perekonomian. Ref: https://www.akr.co.id/board-of-commissioners-directors
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.	Terpenuhi	1/3 Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen: Bapak Fauzi Ichsan. Bapak Fauzi Ichsan selaku komisaris Independen selalu mengikuti rapat komite, komisaris, dan rapat gabungan. Beliau aktif memberikan pendapat dan masukkan yang objektif dan terdokumentasi dalam dokumen berita acara rapat internal. Ref: https://www.akr.co.id/board-of-commissioners-directors
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Terpenuhi	Dalam hal seleksi dan nominasi komisaris, sepenuhnya dilakukan secara internal: • Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Komisaris sena usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris umuk disampaikan dalam RUPS. • Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Komisaris yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui • Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrIOQvemr.pdf

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris		
Rekomendasi			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	Terpenuhi	Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dari pengajuan usulan dan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris. Pengajuan usulan tersebut telah mempertimbangkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	Terpenuhi	Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dari pengajuan usulan dan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris. Pengajuan usulan tersebut telah mempertimbangkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dari pengajuan usulan dan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris. Pengajuan usulan tersebut telah mempertimbangkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
3.	Hubungan Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris		
3.1	Sifat Hubungan Kerja		
Rekomendasi			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	Terpenuhi	Direksi dan Dewan Komisaris rutin mengadakan Rapat Gabungan bersama Komite Audit, sebelum rilis laporan keuangan

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	Terpenuhi	Setiap anggota Direksi dan Komisari wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu: • Integritas; • Komitmen; • Kerjasama Tim; • Komunikasi yang jujur dan terbuka; • Mempercayai clan menghargai; • Menciptakan nilai; • Perbaikan yang berkesinambungan. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	Terpenuhi	Sekretaris Korporasi mengambil peran penting dalam memberikan informasi yang terjadi di lingkungan bisnis maupun regulasi yang berlaku, dan mengkomunikasikannya ke organ Perseroan, kemudian mengawal Tindakan perubahan yang diambil untuk kemudian dikomunikasikan kembali ke pemangku kepentingan di luar Perseroan. Perseroan melalui departemen *Corporate Secretary* melakukan *self assessment* atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan berdasarkan Asean Corporate Governance Scorecard dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.
3.2	Akses Informasi Dewan Komisaris		
Rekomendasi			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	Terpenuhi	Direksi AKR selalu memberikan informasi yang dibutuhkan komisaris dengan segera. Sebelum rapat gabungan dilaksanakan, departemen *Corporate Secretary* wajib membagikan bahan rapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3.3	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi		
Rekomendasi			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Terpenuhi	Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: • Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; • Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris AKR diisi oleh profesional yang ahli dalam bidangnya, sehingga dapat objektif dalam pengambilan keputusan di departemennya. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/fpjwtglDzSgLAyrC3hiurL2PFmeuaeAhrlOQvemr.pdf

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
4.	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam :		
Rekomendasi			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. • Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. • Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	Terpenuhi	Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu: • Integritas; • Komitmen; • Kerjasama Tim; • Komunikasi yang jujur dan terbuka; • Mempercayai dan menghargai; • Menciptakan nilai; • Perbaikan yang berkesinambungan Setiap anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi misi Perseroan Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (*anti fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya.	Terpenuhi	Seluruh manajemen termasuk organ Perseroan wajib menandatangani Pakta Integritas, yang di dalamnya menyebutkan bahwa bila saya terbukti melanggar Pakta Integritas tersebut, maka yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri tanpa menerima kompensasi apapun dari perusahaan serta bersedia dikenakan sanksi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi administrasi sampai dengan tuntutan ganti rugi baik perdata dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2	Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi		
Rekomendasi			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporat	Terpenuhi	Nilai perusahaan yang secara berkala disosialisasikan menjadi budaya kerja: • Memiliki Jiwa Kewirausahaan • Berkolaborasi • Menghargai Kinerja Tinggi • Tangkas • Memberdayakan Tim • Tidak Berkompromi
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-Nilai dan Budaya		
Rekomendasi			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	Terpenuhi	Kode Etik Korporasi diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan, di antaranya Peraturan Perusahaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kode etik disosialisasikan secara berkelanjutan agar terus menjadi bagian dari budaya kerja. Dan secara berkala, setiap karyawan diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kepatuhan atas kode etik karyawan. Mitra yang bekerja sama dengan AKR juga diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kepatuhan atas kode etik supplier. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/JCuvXf1kYhlLxDFUmvfwo5rtmS6QaTR57yQLOfyt.pdf
5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan		
Rekomendasi			
5.1.1	Direksi melakukan *review* secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Terpenuhi	Salah satu peran Direksi dalam manajemen risiko adalah memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan. Internal Audit secara berkala memberikan laporan terkait berbagai aspek risiko bisnis beserta mitigasinya kepada Direksi. Dan Direksi mereview serta memberikan masukan perbaikan. Laporan pelaksanaan manajemen risiko dan internal audit dilaporkan ke pemegang saham melalui laporan tahunan.
5.2	Manajemen Risiko		
Rekomendasi			
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	Terpenuhi	Direksi bertanggung jawab memastikan telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama Perseroan. Melalui komite-komite yang dibentuk, Direktur melakukan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang efektif, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan proses dan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	Terpenuhi	Pengelolaan risiko Perseroan dipantau oleh internal audit, yang melapor langsung ke Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit. Perseroan memandang bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam bisnis Perseroan. Komponen sistem pengendalian intern di lingkungan Perseroan antara lain terdiri dari: • Lingkungan pengendalian (*control environment*) • Penaksiran risiko (*risk assessment*) • Aktivitas pengendalian (*control activities*) • Informasi dan komunikasi (*information and communication*) • Pemantauan (*monitoring*)
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan		
Rekomendasi			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	Terpenuhi	Pengelolaan risiko Perseroan dipantau oleh internal audit secara independen, yang melapor langsung ke Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit. Perseroan memandang bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam bisnis Perseroan.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	Terpenuhi	Beberapa bagian terkait kepatuhan di Perseroan bekerja secara independen, Direktur Utama dan Komisaris Utama tidak merangkap bagian ini: • *Corporate Secretary* • *Corporate Legal*
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	Terpenuhi	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara berkala melakukan *review* atas efektivitas penerapan sistem pengendalian di lingkungan Perseroan. *Review* yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris terkait mekanisme, struktur dan kecukupan infrastruktur pengendalian internal.
6.	Pengungkapan dan Transparansi		
6.1	Kebijakan Pengangkatan		
Rekomendasi			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi	Terpenuhi	Perseroan melalui Divisi *Investor Relation* dan Sekretaris Perusahaan secara aktif memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mengakses Informasi. Sarana utama untuk menyebarkan informasi adalah melalui situs web Perseroan (www.akr.co.id). Informasi dalam situs web AKR tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain situs web, Perseroan juga memberikan jalur komunikasi melalui email ke ir@akr.co.id atau telepon ke +62 21 531 1110 dan senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui Electronic Reporting kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Larangan pengungkapan informasi sensitif yang menguntungkan pihak luar Perseroan diatur dalam kode etik Perseroan

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	Terpenuhi	AKR berkomitmen untuk menjaga prinsip Transparansi, diantaranya melalui keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang Perseroan sangat penting dalam membangun citra Perseroan di mata publik khususnya para *stakeholder*. Oleh karenanya, Perseroan berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan Perseroan.
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	Terpenuhi	Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Ref: https://www.akr.co.id/storage/reports/GHzTFPTsXYVdtvdD5kGVZZS3lQaaD2mDsWO3Ahbf.pdf
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	Terpenuhi	Perseroan melaporkan ke Bursa dan OJK laporan Komite Audit atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh eksternal auditor dan rekomendasinya.
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	Terpenuhi	AKR menyusun Laporan Berkelanjutan berdasarkan standar POJK 51 dan GRI 2021 sebagai *references*
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	Terpenuhi	AKR telah menerbitkan laporan keberlanjutan sejak tahun 2013. Dan selama pelaporan 3 tahun terakhir (2021–2023), AKR merilis Laporan Keberlanjutan bersamaan dengan rilis Laporan Tahunan sebagai materi RUPS bagi pemegang saham. AKR menyajikan data 3 tahun terakhir pada Laporan Keberlanjutan AKR.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
6.3	Diseminasi Informasi		
Rekomendasi			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	Terpenuhi	Sarana utama untuk menyebarkan informasi adalah melalui situs web Perseroan (www.akr.co.id). Informasi dalam situs web AKR tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain situs web, Perseroan juga memberikan jalur komunikasi melalui email ke ir@akr.co.id atau telepon ke +62 21 531 1110 dan senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui Electronic Reporting kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). AKR kini juga aktif menyebarkan informasi menarik melalui media sosial, mencakup: Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan Linkedin.
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.		AKR melakukan asesmen tata kelola berkala melalui Asean Corporate Governance Scorecard dan SEOJK 32. Penilaian berdasarkan PUGKI baru disajikan di laporan tahunan 2023.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asas, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan.	N.A	
7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham		
Rekomendasi			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor	Terpenuhi	AKR melalui Divisi Hubungan Investor berupaya untuk memenuhi fungsi utamanya yakni menjaga komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan eksternal dan Manajemen. Hal ini ditempuh dengan menggunakan berbagai saluran dan acara interaksi langsung melalui: • Partisipasi dalam paparan publik, • Menghadiri konferensi, *non-deal roadshow*, dan pertemuan dengan broker, • Mengadakan *briefing* capaian kinerja kuartalan, • Pertemuan tatap muka diatur dengan pemegang saham *existing* dan calon pemegang saham, serta • Kunjungan ke lokasi operasional
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.	Terpenuhi	Kebijakan Tata Kelola PT AKR Corporindo Tbk. Mencakup AKR induk dan anak anak perusahaannya
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	Terpenuhi	AKR mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal akuisisi pengambilalihan, dan transaksi luar biasa.

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
7.2.1	Perlakukan Adil Terhadap Pemegang Saham		
Rekomendasi			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: • semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara. • pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	Terpenuhi	Dalam kode etik Perseroan tercantum kode etik Perseroan dengan pemegang saham, di antaranya adalah memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan investor sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/JCuvXf1kYhlLxDFUmvfwo5rtmS6QaTR57yQLOfyt.pdf
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	Terpenuhi	Transaksi afiliasi dilaksanakan bila disetujui di dalam RUPS, dan wajib dilaporkan 2 hari kerja setelah ditetapkan di dalam akta notaris.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	Terpenuhi	AKR memiliki kebijakan *Blackout Period* yang menegaskan larangan transaksi saham dari orang dalam Perseroan selama 10 hari sebelum rilis laporan keuangan hingga laporan keuangan diterbitkan ke publik.
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham		
Rekomendasi			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi	Terpenuhi	AKR mengikuti POJK 15/2020 dalam penyelenggaraan RUPS. Dalam hal panggilan RUPS, AKR menggunakan acuan paling lambat 21 hari sebelum RUPS AKR follows POJK 15/2020 when holding GMS. In terms of calling a GM

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	Terpenuhi	Dalam Tata Tertib yang diedarkan sebelum RUPS disebutkan tata cara pemungutan suara dalam RUPS: • Untuk setiap mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. • Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan serta setelah ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen. • Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY. KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*. • *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara Rapat).
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKR wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	Terpenuhi	Auditor Eksternal yang ditunjuk dalam RUPS dipilih berdasarkan pertimbangan penilaian komite audit. Diantaranya menilai terkait independensi, transparansi, dan akuntabilitas auditor
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya	Terpenuhi	Hasil RUPS dari notaris dirilis 1 hari setelah RUPS, dan menyusul ringkasan risalah RUPS di hari berikutnya.
8.	Pemangku Kepentingan Lainnya		
8.1	Keterlibatan dan Pemangku kepentingan		
Rekomendasi			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. *The Board of Directors ensures and discloses*	Terpenuhi	Melalui Komite ESG dan ESG Task Force, AKR menetapkan makna keberlanjutan yang mencerminkan identitas Perseroan: "Sebagai Perusahaan holding yang strategis, PT AKR Corporindo Tbk. menetapkan tujuan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Portofolio bisnis kami mulai dari logistik dan distribusi, kawasan industri, hingga pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus, dikelola agar dapat menjangkau jutaan orang dan para pemangku kepentingan. PT AKR Corporindo Tbk harus memberikan bermanfaat bagi ekonomi, lingkungan, manusia dan masyarakat dalam menjalankan bisnis. Perseroan berkomitmen menyeimbangkan ambisi dengan kebijaksanaan, dan kesuksesan bisnis dengan kesadaran lingkungan, serta kemajuan sosial. Bagi AKR, inilah arti keberlanjutan – Berporoses dengan Tujuan" Komitmen ini ditopang oleh 4 pilar utama yang menjadi pedoman dan panduan bagi AKR dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan, yaitu: • *Our Business Portfolio* • *Our People* • *Our Communities* • *Our Conduct Through the ESG Committee and ESG Taskforce*

No	Uraian	Apply	Penerapan di AKR
8.3.2	2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	Terpenuhi	Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) adalah aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis AKR yang berada di industri esensial dan kritikal bergantung kepada kemampuan karyawannya untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan strategi yang telah dibuat oleh pimpinan perusahaan. Sasaran pengembangan SDM adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan *corporate value*. Manajemen mendorong kemampuan SDM perseroan agar *agile* dan adaptif menghadapi perubahan yang terjadi, dan memotivasi mereka untuk dapat berkolaborasi. Perseroan melakukan pelatihan dan *sharing session* agar karyawan kami memahami *point-point* adaptif dan berkolaborasi di area pekerjaannya. Perseroan secara berkelanjutan mewujudkan nilai-nilai *zero tolerance* untuk meminimalkan risiko. Salah satunya adalah meningkatkan pelatihan yang dibutuhkan dan mensosialisasikan kesadaran akan pengelolaan risiko di area kerja. Perseroan terus melakukan *empowerment* sehingga dapat memenuhi kebutuhan *leaders* secara internal. Kami aktif mencari calon pemimpin muda yang berpotensi baik dari dalam maupun luar.

Keterbukaan Praktek *Bad Governance*

Pada tahun 2024, AKR tidak melakukan tindakan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan praktik *Bad Corporate Governance* selaras dengan upaya Perseroan untuk menerapkan governansi perusahaan, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Praktik
1.	Aktivitas perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan	Nihil
2.	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun	Nihil
3.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
4.	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material	Nihil
5.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan	Nihil
6.	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/ konsumen/kepailitan/komersial/ persaingan atau lingkungan	Nihil
7.	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting	Nihil
8.	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apapun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan	Nihil





PT AKR Corporindo Tbk

Laporan Keuangan

PT AKR Corporindo Tbk
dan entitas anaknya/ and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2024
and for the year then ended with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Dewan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6-7	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8-9	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	10-146	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT AKR CORPORINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF PT AKR CORPORINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned*:

1. Nama / *Name* : Haryanto Adikoesoemo
   Alamat Kantor / *Office Address* : Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11530
   Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card* : Jl. Simprug Kav. H-7, RT.005 RW.008, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon / *Phone Number* : 021-5311110
   Jabatan / *Position* : Presiden Direktur / *President Director*

2. Nama / *Name* : Termurti Tiban
   Alamat Kantor / *Office Address* : Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11530
   Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card* : Jl Gading Indah IV, Blok NF-1/51, RT.011 RW.012, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
   Nomor Telepon / *Phone Number* : 021-5311110
   Jabatan / *Position* : Direktur Keuangan / *Director of Finance*

Menyatakan bahwa: / *state that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries;*
2. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, / *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan benar, / *All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;*
   b. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material, / *The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan entitas anak. / *We are responsible for the Company and its subsidiaries's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 18 Maret 2025

Presiden Direktur / *President Director*	Direktur Keuangan / *Director of Finance*
Haryanto Adikoesoemo	Termurti Tiban

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT AKR Corporindo Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT AKR Corporindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT AKR Corporindo Tbk

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT AKR Corporindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Kelompok Usaha berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Kecukupan penyisihan atas kerugian kredit ekpektasian atas nilai piutang usaha

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang usaha Perusahaan sebesar Rp5.339.114 juta, mencerminkan 16,1%dari total aset konsolidasian Kelompok Usaha. Piutang usaha diakui sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi akumulasi penurunan nilai. Perusahaan telah mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (KKE) sebesar Rp97.828 juta pada tanggal 31 Desember 2024. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian, terutama mencerminkan penilaian penurunan nilai secara individu untuk sejumlah pelanggan pada tanggal pelaporan. Kami mempertimbangkan penyisihan KKE sebagai hal audit utama karena tingkat pertimbangan yang tinggi yang diterapkan oleh manajemen. Secara umum, dalam menentukan penurunan nilai secara individu atas piutang usaha, manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari pelanggan secara individual dengan mempertimbangkan kelayakan kredit pelanggan dan analisis umur jatuh tempo. Pertimbangan ini juga melibatkan informasi peristiwa masa lalu, keadaan masa kini, dan perkiraan masa depan, serta nilai waktu uang.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Adequacy in allowance for expected credit loss on trade receivables

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2024, the Company's trade receivables amounted to Rp5,339,114 million, which represents 16.1% of the Group's consolidated total assets. The trade receivables are recognized as financial assets at amortized cost less accumulated impairment. The Company recognized allowance for expected credit losses (ECL) amounting to Rp97,828 million as of December 31, 2024. The allowance for ECL is mainly the results of individual impairment assessments of various customers at the reporting date. We considered the allowance for ECL as a key audit matter due to the high degree of judgments applied by management. In general, in assessing the impairment on individual basis of trade receivables, management exercised significant judgments to evaluate the collectability of individual customers after taking into account their creditworthiness and aging analysis. The assessment also involves the information about past events, current conditions and forecasts of future conditions, as well as the time value of money.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kecukupan penyisihan atas kerugian kredit ekpektasian atas nilai piutang usaha (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Pengungkapan terkait piutang usaha dan penyisihan atas KKE disajikan dalam Catatan 2 dan 5a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman atas proses perkiraan penyisihan KKE piutang usaha Perusahaan. Kami menguji dengan menggunakan basis sampel untuk umur jatuh tempo piutang usaha pada akhir tahun. Kami mengevaluasi asumsi yang digunakan oleh manajemen dan pertimbangan atas penilaian kolektibilitas dari setiap individu pelanggan dengan membandingkan tren penerimaan historis dari setiap individu pelanggan. Kami mempertimbangkan fasilitas kredit yang diberikan kepada pelanggan dan/atau pelunasan setelah tanggal pelaporan ketika melakukan analisis terhadap golongan umur piutang. Kami juga memeriksa akurasi matematis dari perhitungan nilai waktu uang, dan menilai tingkat suku bunga efektif yang digunakan dalam mendiskontokan perkiraan penerimaan di masa depan. Selain itu, kami mengevaluasi kewajaran pada penyisihan KKE Perusahaan melalui perhitungan ulang secara independen.

Kami juga melakukan evaluasi atas kecukupan pengungkapan terkait penyisihan KKE atas piutang usaha pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

Adequacy in allowance for expected credit loss on trade receivables (continued)

Description of the key audit matter: (continued)

The disclosure of trade receivables and allowance for ECL are presented in Notes 2 and 5a to the accompanying consolidated financial statements.

Audit response:

We obtained an understanding of the Company's process in estimating the allowance for ECL on trade receivables. We tested on a sample basis the aging of trade receivables at year end. We evaluated the management's assumptions used and judgment on their assessments of collectability from individual customers by comparing them to the historical collection trends of respective individual customers. We considered the credits granted to the customers and/or their subsequent settlements when performing analysis of receivables' aging brackets. We also checked the mathematical accuracy of the time value of money calculation, and assessed the effective interest rate used in discounting the forecast of future collections. In addition, we evaluated the reasonableness of the Company's allowance for ECL through independent recalculation.

We also assessed the adequacy of the disclosures related to allowance for ECL on trade receivables in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2024 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Kelompok Usaha.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Kelompok Usaha tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Kelompok Usaha untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Benyanto Suherman
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685/Public Accountant Registration No. AP.0685

18 Maret 2025/March 18, 2025

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Aset				***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan setara kas	5.365.991.608	3,4,18	6.535.625.681	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha		3,5a,18		*Trade receivables*
Pihak berelasi	943.477	32	132.880	*Related parties*
Pihak ketiga - neto	7.562.546.795		6.403.310.984	*Third parties - net*
Piutang lain-lain		3,5b		*Other receivables*
Pihak berelasi	5.357.930	32	8.217.551	*Related parties*
Pihak ketiga	38.910.981		48.179.645	*Third parties*
Persediaan - neto	3.462.763.531	6	3.133.621.502	*Inventories - net*
Persediaan tanah kawasan industri	3.756.816.356	13	1.620.808.463	*Industrial estate land inventory*
Pajak dibayar di muka	147.198.948	27a,37	90.016.621	*Prepaid taxes*
Uang muka	147.409.624		85.322.248	*Advance payments*
Biaya dibayar di muka	81.762.138	7	73.764.039	*Prepaid expenses*
Aset lancar lainnya	428.410.352	3,8,27c,37	164.000.732	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**20.998.111.740**		**18.163.000.346**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang usaha jangka panjang dari pihak ketiga - neto	304.429.436	3,5a	387.378.827	*Long-term trade receivables from third parties - net*
Investasi pada entitas asosiasi	492.359.823	9	445.892.740	*Investments in associates*
Aset pajak tangguhan - neto	188.343.792	27d	201.297.850	*Deferred tax assets - net*
Properti investasi	1.816.567.520	12	1.816.567.520	*Investment property*
Aset tetap - neto	6.365.009.877	10,18,34	5.466.446.896	*Property, plant and equipment - net*
Aset hak-guna - neto	793.367.518	11,32	617.801.889	*Right-of-use assets - net*
Estimasi tagihan pajak penghasilan jangka panjang	15.571.175	27c	16.274.311	*Estimated claims for tax refund - long-term*
Persediaan tanah kawasan industri untuk pengembangan	1.983.264.085	13	3.026.267.791	*Industrial estate land inventory for development*
Uang muka	27.211.667	34	42.968.020	*Advance payments*
Aset keuangan tidak lancar lainnya - neto	74.742.610	3,34	66.662.432	*Other non-current financial assets - net*
Aset tidak lancar lainnya - neto	49.705.125		46.013.184	*Other non-current assets - net*
Total Aset Tidak Lancar	**12.110.572.628**		**12.133.571.460**	***Total Non-Current Assets***
Total Aset	**33.108.684.368**		**30.296.571.806**	***Total Assets***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Hutang bank jangka pendek	7.000.000	3,17	5.000.000	*Short-term bank loan*
Hutang usaha		3		*Trade payables*
Pihak berelasi	54.828.597	32	-	*Related party*
Pihak ketiga	10.336.753.865	14a	9.519.185.995	*Third parties*
Hutang lain-lain - pihak ketiga	464.043.998	3,14b	349.640.045	*Other payables - third parties*
Hutang pajak	402.699.824	27b,37	491.976.527	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	585.685.122	3,15	571.823.594	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	144.298.160	29	187.750.044	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa jangka pendek	45.084.227	3,16	43.446.381	*Current lease liabilities*
Liabilitas kontrak jangka pendek	272.002.142	12,32	224.865.280	*Current contract liabilities*
Hutang bank jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.140.851.204	3,18	1.089.267.780	*Current maturities of long-term bank loans and others*
Hutang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	3,19	36.833.937	*Current maturities of bonds payables*
Hutang dividen	1.000.288	3	55.536.914	*Dividend payable*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**13.454.247.427**		**12.575.326.497**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	25.699.726	27d	18.384.131	*Deferred tax liabilities - net*
Hutang bank jangka panjang dan lainnya setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.645.033.749	3,18	3.117.277.847	*Long-term bank loans and others net of current maturities*
Liabilitas imbalan pasca kerja	179.043.946	29	177.230.676	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas kontrak jangka panjang	631.405.255	12	19.380.841	*Non-current contract liabilities*
Liabilitas sewa jangka panjang	479.142.813	3,16	336.940.196	*Non-current lease liabilities*
Hutang dividen	54.107.938	3,20	-	*Dividend payable*
Liabilitas jangka panjang lainnya	16.011.040		9.074.105	*Other non-current liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**5.030.444.467**		**3.678.287.796**	***Total Non-Current Liabilities***
Total Liabilitas	**18.484.691.894**		**16.253.614.293**	***Total Liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Ekuitas				***Equity***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity***
Modal saham - nilai nominal Rp20 per saham (angka penuh) Modal dasar - 37.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 20.073.474.600 saham	401.469.492	21	401.469.492	*Share capital - Rp20 par value per share (full amount) Authorized - 37,500,000,000 shares Issued and fully paid - 20,073,474,600 shares*
Tambahan modal disetor	1.301.477.917	22	1.287.163.057	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri - 320.655.000 saham pada 31 Des. 2024 (31 Des. 2023: 336.305.000 saham)	(112.577.374)	21	(118.071.864)	*Treasury stock - 320,655,000 shares at Dec. 31, 2024 (Dec. 31, 2023: 336,305,000 shares)*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	251.982.560		226.451.794	*Exchange difference due to translation of financial statements*
Komponen ekuitas lainnya				*Other component of equity*
Bagian atas perubahan lainnya dari ekuitas entitas anak	68.994.782	23	68.996.200	*Share of other changes in equity of subsidiaries*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Ditentukan penggunaannya	3.918.000	28	3.718.000	*Appropriated -*
- Tidak ditentukan penggunaannya	9.647.271.262		9.392.897.529	*Unappropriated –*
	11.562.536.639		11.262.624.208	
Kepentingan nonpengendali	3.061.455.835	20	2.780.333.305	*Non-controlling interests*
Total Ekuitas	**14.623.992.474**		**14.042.957.513**	***Total Equity***
Total Liabilitas dan Ekuitas	**33.108.684.368**		**30.296.571.806**	***Total Liabilities and Equity***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	38.457.126.044	24,32	41.817.425.630	*Revenue from contract with customers*
Pendapatan sewa	272.367.254		269.526.806	*Rental income*
Total Pendapatan	**38.729.493.298**		**42.086.952.436**	***Total Revenues***
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	(35.220.457.367)	25	(37.613.487.899)	***Cost of Sales and Revenues***
Laba bruto	**3.509.035.931**		**4.473.464.537**	***Gross profit***
Beban Usaha		26,32		***Operating Expenses***
Beban umum dan administrasi	(873.443.923)		(877.798.573)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(101.147.934)		(97.071.990)	*Selling expenses*
Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya				***Other Operating Income (Expenses)***
Laba atas penjualan/pengalihan aset tetap - neto	3.733.007	10	14.657.761	*Gain on sale/transfer of property, plant and equipment - net*
Laba selisih kurs - neto	13.689.654		6.248.958	*Foreign exchange gain - net*
Pendapatan usaha lainnya	38.790.304		48.961.005	*Other operating income*
Beban usaha lainnya	(12.191.957)		(7.927.557)	*Other operating expenses*
Laba usaha	**2.578.465.082**		**3.560.534.141**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	352.599.086		196.567.492	*Finance income*
Pajak final terkait penghasilan keuangan	(53.714.989)		(35.675.352)	*Final tax related to finance income*
Beban keuangan	(84.909.111)	16,17,18,19	(68.489.236)	*Finance costs*
Bagian atas laba entitas asosiasi	46.467.083	9	34.534.891	*Share in profit of associates*
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	**2.838.907.151**		**3.687.471.936**	***Profit Before Final and Income Tax***
Pajak final	(26.556.061)		(19.813.545)	*Final tax*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**2.812.351.090**		**3.667.658.391**	***Profit Before Income Tax***
Pajak penghasilan - neto:		27c		*Income tax - net:*
Pajak kini	(393.765.710)		(577.041.476)	*Current tax*
Pajak tangguhan	(19.117.868)		(12.147.214)	*Deferred tax*
Pajak penghasilan - neto	(412.883.578)		(589.188.690)	*Income tax - net*
Laba Neto Tahun Berjalan	**2.399.467.512**		**3.078.469.701**	***Net Profit for the Year***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos yang Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Mendatang				***Item to be Reclassified to Profit or Loss in Subsequent Period***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	49.726.617		(19.633.446)	*Exchange difference due to translation of financial statements*
Pos yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Mendatang				***Item Not to be Reclassified to Profit or Loss in Subsequent Period***
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan pasca kerja	4.324.503	29	(11.753.559)	*Actuarial gain (loss) of post-employment benefits*
Pajak tangguhan terkait	(1.151.785)		1.243.052	*Related deferred tax*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**52.899.335**		**(30.143.953)**	***Other Comprehensive Income (Loss) for the Year, Net of Tax***
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.452.366.847**		**3.048.325.748**	***Total Comprehensive Income for the Year***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Profit for the Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk	2.225.117.975		2.780.349.511	*Equity holders of parent entity*
Kepentingan nonpengendali	174.349.537	20	298.120.190	*Non-controlling interests*
Laba Neto Tahun Berjalan	**2.399.467.512**		**3.078.469.701**	***Net Profit for the Year***
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk	2.253.821.459		2.760.912.670	*Equity holders of parent entity*
Kepentingan nonpengendali	198.545.388	20	287.413.078	*Non-controlling interests*
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.452.366.847**		**3.048.325.748**	***Total Comprehensive Income for the Year***
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		31		***EARNINGS PER SHARE*** *(in full Rupiah)*
Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Attributable to equity holders of the parent entity*
Dasar	112,73		140,87	*Basic*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Entity*										
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid-up Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiaries*	Total/ *Total*	Kepentingan Nonpengendali/ *Non-controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
					Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*						
Saldo per 1 Januari 2024		**401.469.492**	**1.287.163.057**	**(118.071.864)**	**3.718.000**	**9.392.897.529**	**226.451.794**	**68.996.200**	**11.262.624.208**	**2.780.333.305**	**14.042.957.513**	***Balance as of January 1, 2024***
Laba tahun berjalan 2024		-	-	-	-	2.225.117.975	-	-	2.225.117.975	174.349.537	2.399.467.512	*Profit for the year 2024*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	3.172.718	25.530.766	-	28.703.484	24.195.851	52.899.335	*Other comprehensive income*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	2.228.290.693	25.530.766	-	2.253.821.459	198.545.388	2.452.366.847	*Total comprehensive income for the year*
Pencadangan umum	28	-	-	-	200.000	(200.000)	-	-	-	-	-	*Appropriation of general reserve*
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	28	-	-	-	-	(1.973.716.960)	-	-	(1.973.716.960)	-	(1.973.716.960)	*Distribution of dividends to equity holders of parent entity*
Bagian atas perubahan lainnya dari ekuitas entitas anak	23	-	-	-	-	-	-	(1.418)	(1.418)	1.418	-	*Share of other changes in equity of subsidiaries*
Penerbitan kembali saham treasuri	21	-	2.314.860	5.494.490	-	-	-	-	7.809.350	-	7.809.350	*Reissuance of treasury stock*
Pelaksanaan MESOP	21	-	12.000.000	-	-	-	-	-	12.000.000	-	12.000.000	*Exercise of MESOP*
Penambahan investasi oleh kepentingan nonpengendali	20	-	-	-	-	-	-	-	-	82.575.724	82.575.724	*Additional investment by non-controlling interests*
Saldo per 31 Desember 2024		**401.469.492**	**1.301.477.917**	**(112.577.374)**	**3.918.000**	**9.647.271.262**	**251.982.560**	**68.994.782**	**11.562.536.639**	**3.061.455.835**	**14.623.992.474**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements orom an integral part of these consolidated financial statements.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Entity*								Kepentingan Nonpengendali/ *Non-controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid-up Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiaries*	Total/ *Total*			
					Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*						
Saldo per 1 Januari 2023		**401.469.492**	**1.287.163.057**	**(118.071.864)**	**3.518.000**	**9.090.404.725**	**235.378.128**	**69.001.149**	**10.968.862.687**	**2.185.948.088**	**13.154.810.775**	***Balance as of January 1, 2023***
Laba tahun berjalan 2023		-	-	-	-	2.780.349.511	-	-	2.780.349.511	298.120.190	3.078.469.701	*Profit for the year 2023*
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	(10.510.507)	(8.926.334)	-	(19.436.841)	(10.707.112)	(30.143.953)	*Other comprehensive loss*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	2.769.839.004	(8.926.334)	-	2.760.912.670	287.413.078	3.048.325.748	*Total comprehensive income for the year*
Pencadangan umum	28	-	-	-	200.000	(200.000)	-	-	-	-	-	*Appropriation of general reserve*
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	28	-	-	-	-	(2.467.146.200)	-	-	(2.467.146.200)	-	(2.467.146.200)	*Distribution of dividends to equity holders of parent entity*
Bagian atas perubahan lainnya dari ekuitas entitas anak	23	-	-	-	-	-	-	(4.949)	(4.949)	4.949	-	*Share of other changes in equity of subsidiaries*
Penambahan investasi oleh kepentingan nonpengendali	20	-	-	-	-	-	-	-	-	306.967.190	306.967.190	*Additional investment by non-controlling interests*
Saldo per 31 Desember 2023		**401.469.492**	**1.287.163.057**	**(118.071.864)**	**3.718.000**	**9.392.897.529**	**226.451.794**	**68.996.200**	**11.262.624.208**	**2.780.333.305**	**14.042.957.513**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements orom an integral part of these consolidated financial statements.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Kas yang diterima dari pelanggan	42.610.375.219		46.155.348.462	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban usaha	(38.272.118.301)		(39.920.722.875)	*Cash payments to suppliers and for operating expenses*
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	4.338.256.918		6.234.625.587	*Cash provided by operating activities*
Penerimaan dari (pembayaran untuk):				*Cash received from (payments for):*
Penghasilan keuangan	215.740.530		148.600.565	*Finance income*
Beban keuangan	(52.398.505)		(59.823.435)	*Finance costs*
Akuisisi persediaan tanah kawasan industri, termasuk uang muka ke kontraktor dan kapitalisasi bunga	(1.232.041.471)	13	(1.143.894.858)	*Acquisitions of industrial estate land inventory, including advanced payments to contractors and interest capitalization*
Pengembalian pajak penghasilan dan pajak lainnya	324.761.348		292.675.226	*Refund of income tax and other taxes*
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(2.247.687.582)		(1.970.285.390)	*Payment of income tax and other taxes*
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**1.346.631.238**		**3.501.897.695**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan/pengalihan aset tetap	10.077.582	10	63.443.491	*Proceeds from sale/transfer of property, plant and equipment*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	4.403.386	9	1.539.036	*Receipt of cash dividend from associate entity*
Perolehan aset tetap	(1.187.078.235)	10,36	(635.802.929)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Uang muka pembelian aset tetap	(315.505)		(12.714.392)	*Advance for purchase of property, plant, and equipment*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.172.912.772)**		**(583.534.794)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended December 31,2024
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan hutang bank jangka pendek	300.500.000	17	64.200.000	*Proceeds of short-term bank loans*
Pembayaran hutang bank jangka pendek	(298.500.000)	17	(60.773.100)	*Repayments of short-term bank loans*
Penambahan hutang bank jangka panjang	2.700.000.000	18	2.438.212.337	*Proceeds of long-term bank loans*
Pembayaran hutang bank jangka panjang dan lainnya	(2.120.433.892)	18	(870.240.766)	*Repayments of long-term bank loans and others*
Pembayaran liabilitas sewa	(131.265.846)	16	(59.676.224)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen tunai kepada pemilik entitas induk	(1.973.716.960)	28	(2.467.146.200)	*Payments of cash dividends to equity holders of the parent entity*
Penerbitan kembali saham treasuri melalui program MESOP	7.809.350	21	-	*Reissuance of treasury stock through MESOP program*
Pembayaran hutang obligasi	(37.000.000)	19	-	*Payment of bonds payable*
Penerimaan setoran modal dari kepentingan nonpengendali entitas anak	82.575.724	20	306.967.190	*Capital contribution from non-controlling interest of subsidiaries*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(1.470.031.624)**		**(648.456.763)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(1.296.313.158)**		**2.269.906.138**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak perubahan selisih kurs	126.679.085		(72.261.208)	*Effect of foreign exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**6.535.625.681**	4	**4.337.980.751**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**5.365.991.608**	4	**6.535.625.681**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Pengungkapan tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 36.

Supplemental cash flow information is presented in Note 36.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT AKR Corporindo Tbk ("Perusahaan") didirikan di Surabaya berdasarkan Akta Notaris Sastra Kosasih, S.H., No. 46 tanggal 28 November 1977 yang diubah dengan Akta Notaris No. 26 oleh notaris yang sama tanggal 12 April 1978. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/151/7 tanggal 14 Juni 1978, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Surat No. 277/1978 dan No. 278/1978 tanggal 20 Juli 1978 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara No. 101 Tambahan No. 741 tanggal 19 Desember 1978. Pada tahun 1985, Perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke lokasinya pada saat ini di Jakarta. Pada tahun 2004, Perusahaan mengganti namanya dari PT Aneka Kimia Raya Tbk menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mana perubahan terakhir dicakup dalam Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 47 tanggal 28 April 2023, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perusahaan antara lain meliputi bidang industri barang kimia dan bahan bakar minyak; perdagangan besar dan kecil dan distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak ("BBM") dan gas; pengangkutan dan pergudangan (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya); aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi pengangkutan dan pergudangan; konstruksi; pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin.

Perusahaan saat ini bergerak dalam bidang distribusi produk BBM ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT AKR Corporindo Tbk (the "Company") was established in Surabaya on November 28, 1977, based on the Notarial Deed No. 46 of Sastra Kosasih, S.H., which was amended by Notarial Deed No. 26 of the same notary dated April 12, 1978. The deed of establishment and its amendment were approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. Y.A.5/151/7 dated June 14, 1978, registered at the District Court of Surabaya in its Letters No. 277/1978 and No. 278/1978 on July 20, 1978, and published in Supplement No. 741 of the State Gazette No. 101 dated December 19, 1978. In 1985, the Company moved its head office to its current location in Jakarta. In 2004, the Company changed its name from PT Aneka Kimia Raya Tbk to PT AKR Corporindo Tbk. The Articles of Association of the Company has been amended from time to time, the latest of which is covered in Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 47 dated April 28, 2023, concerning changes in the composition of Board of Commissioners of the Company.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its main business activities comprises of chemical and petroleum industry; wholesale and retail sale trading and distribution of primarily chemical products and petroleum products and gas; transportation and warehousing (activities of lease and finance lease without option rights, employment, travel agent and other business support); professional, scientific and technical (services) activities; and supporting business activities comprises of transportation and warehousing; construction; procurement of electricity, gas, steam, hot water and cool air.

The Company is currently engaged in the distribution of petroleum products to industrial customers, distribution and trading of chemical products (such as caustic soda, sodium sulphate, PVC resin and soda ash) used by various industries in Indonesia in accordance with distributorship agreements with foreign and local manufacturers, rental of warehouses, transportation vehicles, tanks and other logistic services.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978.

Perusahaan berdomisili di AKR Tower, Lantai 26, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta. Kantor cabang utama Perusahaan berlokasi di Jl. Sumatra No. 51-53, Surabaya. Kantor penjualan lainnya sekaligus terminal tangki berlokasi di Medan, Palembang, Lampung, Ciwandan (Banten), Bandung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Stagen (Kalimantan Selatan), Muara Teweh (Kalimantan Tengah), Manado, Morowali (Sulawesi Tengah) dan Bali.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris				*Board of Commissioners*
Presiden Komisaris	:	Soegiarto Adikoesoemo	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	Moh. Fauzi M. Ichsan	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Sofyan A. Djalil	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				*Board of Directors*
Presiden Direktur	:	Haryanto Adikoesoemo	:	*President Director*
Direktur	:	Jimmy Tandyo	:	*Directors*
		Bambang Soetiono		
		Mery Sofi		
		Suresh Vembu		
		Nery Polim		
		Termurti Tiban		
Komite Audit				*Audit Committee*
Ketua	:	Moh. Fauzi M. Ichsan	:	*Chairman*
Anggota	:	Sahat Pardede	:	*Members*
		Djisman Simandjuntak		

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2023 berlaku efektif sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai 2.074 karyawan tetap (31 Desember 2023: 1.994) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company started its commercial operations in June 1978.

The Company is domiciled at AKR Tower, 26th Floor, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta. Its major branch office is located at Jl. Sumatra No. 51-53, Surabaya. Other sales office also the tank terminals is located in Medan, Palembang, Lampung, Ciwandan (Banten), Bandung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Stagen (South Kalimantan), Muara Teweh (Central Kalimantan), Manado, Morowali (Central Sulawesi) and Bali.

The members of the Company's Boards of Commissioners ("BOC") and Directors ("BOD") and Audit Committee on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

The composition of BOD and BOC appointed on April 28, 2023 through the Annual General Shareholders' Meeting is effective until the Annual General Shareholders' Meeting to be held in 2025.

The Company and its Subsidiaries have total permanent employees of 2,074 as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 1,994) (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Entitas Induk dan Entitas Induk Terakhir dari Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha AKR" atau "Kelompok Usaha") adalah PT Arthakencana Rayatama yang merupakan bagian dari kelompok Usaha yang dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikoesoemo yang berbasis di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries

The Parent and Ultimate Parent Company of the Company and its Subsidiaries (together referred to as "AKR Group" or the "Group") is PT Arthakencana Rayatama which is part of the business group owned by Soegiarto's and Haryanto Adikoesoemo's family based in Indonesia.

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Usaha Era Pratama Nusantara ("UEPN") dan Entitas Anak/ *and Subsidiary*	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	2000	12.171.806	10.343.681
PT Anugerah Krida Retailindo ("AKRIDA") dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Jakarta	Perdagangan, perusahaan *holding*/ *Trading, holding company*	99,99	99,99	2018	2.107.729	1.720.212
PT Jakarta Tank Terminal ("JTT")	Jakarta	Terminal tangki penyimpanan/ *Tank storage terminal*	51,00	51,00	2010	1.179.575	1.244.753
PT AKR Sea Transport ("AST")	Jakarta	Pelayaran domestik/ *Domestic shipping*	99,99	99,99	2013	867.263	673.354
PT Andahanesa Abadi ("Andahanesa") dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	1982	612.297	422.018
PT Arjuna Utama Kimia ("Aruki")	Surabaya	Pabrikan bahan perekat/ *Manufacturing of adhesive materials*	99,96	99,96	1976	377.797	354.489
PT AKR Transportasi Indonesia ("ATI")	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,90	99,90	2013	255.182	172.458
Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. ("CPIT")	Singapura	Perdagangan/ *Trading*	100,00	-	2024	84.000	-
PT AKR Niaga Indonesia ("ANI") dan Entitas Anak/*and Subsidiary*	Jakarta	Perdagangan kimia dasar/ *Basic chemical trading*	99,99	99,99	2013	79.595	73.475
PT Berkah Buana Energi ("BBE")	Gresik	Distribusi dan pengangkutan/ *Distribution and transportation*	65,00	65,00	-	54.898	31.255
PT Berkah Renewable Energi Nusantara ("BREN")	Gresik	Pembangkitan, pengoperasian, konstruksi dan instalasi tenaga listrik/ *Electrical power generation, operation, construction and installation*	99,97	-	-	30.914	-
PT Terminal Energi Primer (TEP)	Gresik	Jasa logistik/, *Logistic services*	99,99	-	-	25.083	-
PT Anugrah Karya Raya (Anugrah)	Jakarta	Perdagangan dan pertambangan batubara/ *Coal trading and mining*	99,99	99,99	2011	756	683

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Rincian mengenai entitas anak dari UEPN adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengoperasian kawasan industri dan fasilitas pendukung/ *Industrial estate operations and supporting facilities*	60,00	60,00	2015	11.671.519	9.420.604

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 (PP No. 71/2021), Pemerintah Indonesia telah menetapkan lokasi usaha BKMS di Gresik, Jawa Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") dalam area batas delineasi dalam PP tersebut. Penetapan ini diharapkan akan membawa nilai tambah untuk BKMS sebagai *developer* dan operator dari Kawasan Industri dan Pelabuhan Jawa Terpadu ("JIIPE") serta para pelaku usaha di dalam Kawasan tersebut.

Rincian mengenai entitas anak dari Andahanesa adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	60,00	60,00	2018	373.079	387.995
PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia ("AKPI")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	-	232.826	32.838
PT Krida Jasa Utama ("KJU")	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,80	99,80	-	459	500

1. *GENERAL (continued)*

b. *Consolidated Subsidiaries (continued)*

The details of the subsidiary of UEPN are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengoperasian kawasan industri dan fasilitas pendukung/ *Industrial estate operations and supporting facilities*	60,00	60,00	2015	11.671.519	9.420.604

Based on the Government Regulation Number 71 Year 2021 dated June 28, 2021 (PP No. 71/2021), the Government of Indonesia has designated BKMS commercial location at Gresik, East Java, as a Special Economic Zone ("SEZ") within the area as defined in the PP. This designation is expected to bring value added to both BKMS as the developer and operator of Java Integrated Industrial and Ports Estate ("JIIPE") and the tenants of the said Estate.

The details of the subsidiaries of Andahanesa are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	60,00	60,00	2018	373.079	387.995
PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia ("AKPI")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	-	232.826	32.838
PT Krida Jasa Utama ("KJU")	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,80	99,80	-	459	500

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Rincian mengenai entitas anak dari AKRIDA adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

The details of the subsidiaries of AKRIDA are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 30, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Aneka Petroindo Raya ("APR")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	50,10	50,10	2018	1.912.311	1.572.104
PT Dirgantara Petroindo Raya ("DPR")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	50,10	50,10	2019	75.481	71.406
PT Anugerah Lubrindo Raya ("ALR") dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	80,00	80,00	2019	98.335	61.834
PT Berkah Bunker Service ("BBS")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	-	20.060	10.000

Rincian mengenai entitas anak dari ALR adalah sebagai berikut:

The details of the subsidiaries of ALR are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Anugerah Lubrindo Batam ("ALB")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	99,90	99,90	2019	4.313	2.746
Lubrindo Shipping Services Pte.Ltd ("LSS")	Singapura/ *Singapore*	Perdagangan umum (pemasaran minyak pelumas)/ *General trading (marketing of lubricants)*	100	100	2019	7.915	1.230

Rincian mengenai entitas anak dari ANI adalah sebagai berikut:

The details of the subsidiary of ANI are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*		31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*
PT Anugerah Kimia Indonesia ("AKI")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	51,00	51,00	2021	78.527	72.361

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2024

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 13 tanggal 8 Januari 2024, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp821.165.000 menjadi Rp949.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp128.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 005/L-AKR-CS/2024 tanggal 10 Januari 2024 ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 167 tanggal 25 September 2024, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp949.165.000 menjadi Rp967.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp18.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 108/L-AKR-CS/2024 tanggal 26 September 2024 ke ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 126 tanggal 26 November 2024, AKRIDA meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp967.165.000 menjadi Rp1.039.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp72.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 120/L-AKR-CS/2024 tanggal 11 Desember 2024 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 151 tanggal 29 Oktober 2024, APR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.683.713.448 menjadi Rp1.833.790.860 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp75.188.783, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp74.888.629.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2024

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 13 dated January 8, 2024, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp821,165,000 to Rp949,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp128,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 005/L-AKR-CS/2024 dated January 10, 2024 to Financial Service Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX").

Further, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 167 dated September 25, 2024, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp949,165,000 to Rp967,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp18,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 108/L-AKR-CS/2024 dated September 26, 2024 to OJK and IDX.

Moreover, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 126 dated November 26, 2024, AKRIDA increased its authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp1,500,000,0000 and increased its issued and paid-up capital from Rp967,165,000 to Rp1,039,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp72,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 120/L-AKR-CS/2024 dated December 11, 2024 to OJK and IDX.

Based on Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 151 dated October 29, 2024, APR increased its issued and paid-up capital from Rp1,683,713,448 to Rp1,833,790,860 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp75,188,783, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp74,888,629.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2024 (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 32 tanggal 7 Oktober 2024, Perusahaan dan UEPN mendirikan satu entitas baru, PT Terminal Energi Primer ("TEP"). Perusahaan memiliki 99,99% kepemilikan di TEP dan sisanya dimiliki oleh UEPN dengan modal dasar TEP sebesar Rp100.000.000. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000, dimana Perusahaan mengambil bagian dari modal yang disetor Rp24.990.000, sedangkan pemegang saham lainnya, UEPN, mengambil sisa saham sebesar Rp10.000. TEP akan bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan, penyimpanan minyak dan gas bumi, dan aktivitas penunjang lainya.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 16 tanggal 3 Oktober 2024, BBS meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.000.000 menjadi Rp20.000.000 dimana AKRIDA mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp10.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 188 tanggal 2 Oktober 2024, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp142.904.600 menjadi Rp158.309.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp7.717.905, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp7.687.095.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 11 tanggal 8 Januari 2024, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp205.950.000 menjadi Rp355.950.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp150.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 006/L-AKR-CS/2024 tanggal 10 Januari 2024 ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 33 tanggal 12 Juli 2024, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp355.950.000 menjadi Rp356.449.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp499.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 073/L-AKR-CS/2024 tanggal 18 Juli 2024 ke OJK dan BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2024 (continued)

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 32 dated October 7, 2024, the Company and UEPN established a new entity, PT Terminal Energi Primer ("TEP"). The Company holds a 99.99% ownership in TEP and the remaining is held by UEPN, with a total authorized capital amount of Rp100,000,000. The authorized capital has been issued and paid-up amounting to Rp25,000,000, whereby the Company subscribed the paid-up capital of Rp24,990,000, while the other shareholder, UEPN, subscribed the remaining amount of Rp10,000. TEP will engage in warehousing and storage, oil and gas storage, and other supporting activities.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 16 dated October 3, 2024, BBS increased its issued and paid-up capital from Rp10,000,000 to Rp20,000,000 whereby AKRIDA subscribed the entire capital increase of Rp10,000,000.

Based on Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 188 dated October 2, 2024, DPR increased its issued and paid-up capital from Rp142,904,600 to Rp158,309,600 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp7,717,905, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp7,687,095.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 11 dated January 8, 2024, ADH increased its issued and paid-up capital from Rp205,950,000 to Rp355,950,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp150,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 006/L-AKR-CS/2024 dated January 10, 2024 to OJK and IDX.

Further, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 33 dated July 12, 2024, ADH increased its issued and paid-up capital from Rp355.950,000 to Rp356,449,000 whereby the Company subscribed to the entire capital increase of Rp499,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 073/L-AKR-CS/2024 dated July 18, 2024 to OJK and IDX.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2024 (lanjutan)

Pada tanggal 12 April 2024, AKR mendirikan satu entitas baru, Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. ("CPIT") di Singapura. AKR memiliki 100% kepemilikan di CPIT. CPIT akan bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi produk kimia dan bahan bakar minyak. Total modal disetor dan ditempatkan CPIT sebesar US$5.000.134,72. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 040/L-AKR-CS/2024 tanggal 17 April 2024 dan No. 055/L-AKR-CS/2024 tanggal 4 Juni 2024 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 63 tanggal 23 Februari 2024, AST meningkatkan modal dasar dari Rp300.000.000 menjadi Rp500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp274.900.000 menjadi Rp404.900.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp130.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 017/L-AKR-CS/2024 tanggal 27 Februari 2024 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 12 tanggal 8 Januari 2024, AKPI meningkatkan modal dasar dari Rp100.000.000 menjadi Rp500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp30.000.000 menjadi Rp180.000.000 dimana Andahanesa mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp150.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 8 tanggal 5 Januari 2024, AKR dan UEPN mendirikan satu entitas baru, PT Berkah Renewable Energi Nusantara ("BREN"). AKR memiliki 99,97% kepemilikan di BREN dan sisanya dimiliki oleh UEPN, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp30.000.000. BREN akan bergerak dalam bidang pembangkitan, pengoperasian, konstruksi dan instalasi tenaga listrik. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 004/L-AKR-CS/2024 tanggal 9 Januari 2024 ke OJK dan BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2024 (continued)

On April 12, 2024, AKR established a new entity, Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. ("CPIT") in Singapore. AKR holds a 100% ownership in CPIT. CPIT will engage mainly in trading and distribution of chemicals and petroleums products. The total paid up capital is amounting to US$5,000,134.72. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 040/L-AKR-CS/2024 dated April 17, 2024 and No. 055/L-AKR-CS/2024 dated June 4, 2024 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 63 dated February 23, 2024, AST increased its authorized capital from Rp300,000,000 to Rp500,000,000 and increased its issued and paid-up capital from Rp274,900,000 to Rp404,900,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp130,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 017/L-AKR-CS/2024 dated February 27, 2024 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 12 dated January 8, 2024, AKPI increased its authorized capital from Rp100,000,000 to Rp500,000,000 and increased its issued and paid-up capital from Rp30,000,000 to Rp180,000,000 whereby Andahanesa subscribed the entire capital increase of Rp150,000,000.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 8 dated January 5, 2024, AKR and UEPN established a new entity, PT Berkah Renewable Energi Nusantara ("BREN"). AKR holds a 99.97% ownership in BREN and the remaining is held by UEPN, with a total subscribed capital amount of Rp30,000,000. BREN will engage in electrical power generation, operation, construction and installation activities. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 004/L-AKR-CS/2024 dated January 9, 2024 to OJK and IDX.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2023

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 77 tanggal 24 Februari 2023, APR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.173.434.256 menjadi Rp1.218.449.484 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp22.552.629, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp22.462.599.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 48 tanggal 24 Juli 2023, APR meningkatkan modal dasar dari Rp1.301.283.900 menjadi Rp1.621.107.900 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.218.449.484 menjadi Rp1.323.511.668 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp52.636.154, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp52.426.030.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 6 tanggal 1 Desember 2023, APR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.323.511.668 menjadi Rp1.428.573.852 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp52.636.154, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp52.426.030.

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 124 tanggal 29 Desember 2023, APR meningkatkan modal dasar dari Rp1.621.107.900 menjadi Rp2.020.887.900 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.428.573.852 menjadi Rp1.683.713.448 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp127.824.938, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp127.314.658.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2023

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 77 dated February 24, 2023, APR increased its issued and paid-up capital from Rp1,173,434,256 to Rp1,218,449,484 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp22,552,629, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp22,462,599.

Further, based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 48 dated July 24, 2023, APR increased its authorized capital from Rp1,301,283,900 to Rp1,621,107,900 and increased its issued and paid-up capital from Rp1,218,449,484 to Rp1,323,511,668 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp52,636,154, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp52,426,030.

Moreover, based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 6 dated December 1, 2023, APR increased its issued and paid-up capital from Rp1,323,511,668 to Rp1,428,573,852 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp52,636,154, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp52,426,030.

Furthermore, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 124 dated December 29, 2023, APR increased its authorized capital from Rp1,621,107,900 to Rp2,020,887,900 and increased its issued and paid-up capital from Rp1,428,573,852 to Rp1,683,713,448 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp127,824,938, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp127,314,658.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2023 (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 51 tanggal 11 Desember 2023, Andahanesa dan Bpk. Yuwono Ongkowijoyo ("Yuwono") mendirikan satu entitas baru, KJU. Andahanesa memiliki 99,80% kepemilikan di KJU dan sisanya dimiliki oleh Yuwono dengan modal dasar KJU sebesar Rp2.000.000. KJU bergerak dalam bidang penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi, dan perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak ("BBM"), Bahan Bakar Gas ("BBG") dan Liquefied Petroleum Gas ("LPG").

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 47 tanggal 17 Februari 2023, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp677.995.000 menjadi Rp700.595.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp22.600.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 006/L-AKR-CS/2023 tanggal 21 Februari 2023 ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 51 tanggal 19 Mei 2023, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp700.595.000 menjadi Rp705.865.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp5.270.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 037/L-AKR-CS/2023 tanggal 22 Mei 2023 ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 35 tanggal 10 Agustus 2023, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp705.865.000 menjadi Rp768.515.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp62.650.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 061/L-AKR-CS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 ke OJK dan BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2023 (continued)

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 51 dated December 11, 2023, Andahanesa and Mr. Yuwono Ongkowijoyo ("Yuwono") established a new entity, KJU. Andahanesa holds a 99.80% ownership in KJU and the remaining is held by Yuwono, with a total authorized capital amount of Rp2,000,000. KJU is engaged in the provision of human resources and management functions, and retail trading of Fuel Oil ("BBM"), Fuel Gas ("BBG") and Liquefied Petroleum Gas ("LPG").

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 47 dated February 17, 2023, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp677,995,000 to Rp700,595,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp22,600,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 006/L-AKR-CS/2023 dated February 21, 2023 to OJK and IDX.

Further, based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 51 dated May 19, 2023, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp700,595,000 to Rp705,865,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp5,270,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 037/L-AKR-CS/2023 dated May 22, 2023 to OJK and IDX.

Moreover, based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 35 dated August 10, 2023, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp705,865,000 to Rp768,515,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp62,650,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 061/L-AKR-CS/2023 dated August 11, 2023 to OJK and IDX.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2023 (lanjutan)

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 1 tanggal 1 Desember 2023, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp768.515.000 menjadi Rp821.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp52.650.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 101/L-AKR-CS/2023 tanggal 5 Desember 2023 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 21 tanggal 12 Oktober 2023, AST meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp194.900.000 menjadi Rp274.900.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp80.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 081/L-AKR-CS/2023 tanggal 16 Oktober 2023 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 1 tanggal 2 Oktober 2023, AKRIDA dan Andahanesa mendirikan satu entitas baru, BBS. AKRIDA memiliki 99,99% kepemilikan di BBS dan sisanya dimiliki oleh Andahanesa, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp10.000.000. BBS bergerak dalam bidang aktivitas pelayanan kepelabuhan laut. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 075/L-AKR-CS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 66 tanggal 28 Juli 2023, Andahanesa dan UEPN mendirikan satu entitas baru, AKPI. Andahanesa memiliki 99,99% kepemilikan di AKPI dan sisanya dimiliki oleh UEPN, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp30.000.000. AKPI bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan, penyimpanan minyak dan gas bumi, aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat, pergudangan dan penyimpanan lainnya. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 052/L-AKR-CS/2023 tanggal 1 Agustus 2023 ke OJK dan BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2023 (continued)

Furthermore, based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 1 dated December 1, 2023, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp768,515,000 to Rp821,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp52,650,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 101/L-AKR-CS/2023 dated December 5, 2023 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 21 dated October 12, 2023, AST increased its issued and paid-up capital from Rp194,900,000 to Rp274,900,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp80,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 081/L-AKR-CS/2023 dated October 16, 2023 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 1 dated October 2, 2023, AKRIDA and Andahanesa established a new entity, BBS. AKRIDA holds a 99.99% ownership in BBS and the remaining is held by Andahanesa, with a total subscribed capital amount of Rp10,000,000. BBS is engaged in sea port services activities. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 075/L-AKR-CS/2023 dated October 3, 2023 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 66 dated July 28, 2023, Andahanesa and UEPN established a new entity, AKPI. Andahanesa holds a 99.99% ownership in AKPI and the remaining is held by UEPN, with a total subscribed capital amount of Rp30,000,000. AKPI is engaged in warehousing and storage, oil and gas storage, bounded warehousing activities or bounded areas, other warehousing and storage. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 052/L-AKR-CS/2023 dated August 1, 2023 to OJK and IDX.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2023 (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 98 tanggal 23 Juni 2023, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp132.578.200 menjadi Rp142.904.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp5.173.527, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp5.152.873.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 45 tanggal 16 Mei 2023, BBE meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp15.500.000 menjadi Rp24.600.000 dimana Perusahaan mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebesar Rp5.915.000, sedangkan pemegang saham lainnya, PT Bayu Buana Gemilang ("BBG") mengambil sisa saham sebesar Rp3.185.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 036/L-AKR-CS/2023 tanggal 19 Mei 2023 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., No. 92 tanggal 27 April 2023, TNU meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp171.250.000 menjadi Rp281.250.000 dimana Andahanesa mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp66.000.000, sedangkan pemegang saham lainnya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, mengambil sisa saham sebesar Rp44.000.000.

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan

Pada bulan September 1994, Perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp4.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selanjutnya, pada bulan yang sama, seluruh saham Perusahaan sebanyak 65.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2023 (continued)

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 98 dated June 23, 2023, DPR increased its issued and paid-up capital from Rp132,578,200 to Rp142,904,600 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp5,173,527, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp5,152,873.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 45 dated May 16, 2023, BBE increased its issued and paid-up capital from Rp15,500,000 to Rp24,600,000 whereby the Company subscribed the capital increase of Rp5,915,000, while the other shareholder, PT Bayu Buana Gemilang ("BBG"), subscribed the remaining amount of Rp3,185,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 036/L-AKR-CS/2023 dated May 19, 2023 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yatiningsih, S.H., M.H., No. 92 dated April 27, 2023, TNU increased its issued and paid-up capital from Rp171,250,000 to Rp281,250,000 whereby Andahanesa subscribed the capital increase of Rp66,000,000, while the other shareholder, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, subscribed the remaining amount of Rp44,000,000.

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company

In September 1994, the Company completed the initial public offer of 15,000,000 shares at an offering price of Rp4,000 (in full Rupiah) per share. Further, in the same month, all of the Company's shares totaling 65,000,000 shares at a par value of Rp1,000 (in full Rupiah) per share were listed on the IDX.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan (lanjutan)

Pada tahun 1996, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham (*stock split*) yang menurunkan nilai nominal saham dari Rp1.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham, dan pembagian saham bonus dengan perbandingan 6:10. Pemecahan saham dan pembagian saham bonus tersebut meningkatkan jumlah saham beredar dari 65.000.000 lembar saham menjadi 208.000.000 lembar saham. Sesuai dengan Surat No. 217/BEJ-1.2/1996 tanggal 27 September 1996 dari BEI, seluruh saham Perusahaan yang beredar sebanyak 208.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada BEI.

Pada tanggal 24 Agustus 2004, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue*) atas 416.000.000 lembar saham dengan harga penawaran Rp500 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"). Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif pada tanggal 23 September 2004 setelah disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal yang sama. Dalam penawaran tersebut, setiap pemegang saham yang memiliki satu lembar saham berhak membeli dua lembar saham yang ditawarkan.

Efektif tanggal 8 November 2004, seluruh saham Perusahaan telah dipindahkan pencatatannya dari Papan Pengembangan ke Papan Utama di BEI berdasarkan Surat dari Bursa Efek tertanggal 5 November 2004.

1. GENERAL (continued)

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company (continued)

In 1996, the shareholders approved the stock split which resulted in the par value of the shares being reduced from Rp1,000 (in full Rupiah) to Rp500 (in full Rupiah) per share, and the distribution of 6:10 bonus shares. As a result of the stock split and distribution of bonus shares, the number of outstanding shares increased from 65,000,000 to 208,000,000 shares. In accordance with the Letter No. 217/BEJ-1.2/1996 dated September 27, 1996 from the IDX, all of the Company's outstanding shares totaling 208,000,000 shares at a par value of Rp500 (in full Rupiah) per share were listed on the IDX.

On August 24, 2004, the Company submitted the Registration Statement for Limited Public Offering I (Rights Issue) of 416,000,000 shares at an offering price of Rp500 (in full Rupiah) per share to the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"). The Registration Statement became effective on September 23, 2004 after the approval by the shareholders through their Extraordinary Shareholders' Meeting held on the same date. In the offering, every shareholder holding one share was entitled to buy two new shares.

Effective on November 8, 2004, all of the Company's shares were transferred from the listing at the Development Board to Primary Board in the IDX based on the Letter from the Stock Exchange dated November 5, 2004.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan (lanjutan)

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Mei 2007, para pemegang saham menyetujui hal-hal berikut:

- Pemecahan saham (*stock split*) yang menurunkan nilai nominal saham dari Rp500 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pemecahan saham tersebut meningkatkan jumlah saham beredar dari 624.000.000 lembar saham menjadi 3.120.000.000 lembar saham. Pemecahan saham ini menjadi efektif pada tanggal 27 Juli 2007 sebagaimana dinyatakan dalam Surat BEI tanggal 24 Juli 2007 No. PENG-638/BEJ.PSJ/P/07-2007.

- Peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp416.000.000 menjadi Rp750.000.000 yang terbagi dalam 7.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham.

- Peningkatan modal disetor melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui program pemberian opsi saham kepada Dewan Direksi, Komisaris selain Komisaris Independen, dan karyawan kunci Perusahaan melalui *Management and Employees Stock Option Plan* ("MESOP") yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2020.

Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas II (*Rights Issue II*) kepada BAPEPAM-LK atas 627.658.500 lembar saham dengan nilai nominal saham Rp100 (dalam Rupiah penuh) per lembar dengan harga penawaran sebesar Rp860 per lembar saham (dalam Rupiah penuh). Dalam penawaran tersebut, setiap pemegang saham yang memiliki lima lembar saham berhak membeli satu saham yang ditawarkan. Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM-LK melalui suratnya No. S-489/BL/2010 tertanggal 20 Januari 2010. Pernyataan tersebut dinyatakan efektif setelah persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Januari 2010. Saham tersebut telah didaftarkan di BEI sejak bulan Februari 2010.

1. GENERAL (continued)

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company (continued)

In the Extraordinary General Shareholders' Meeting, held on May 31, 2007, the shareholders approved the following:

- *Stock split which resulted in the par value of the shares being reduced from Rp500 (in full Rupiah) to Rp100 (in full Rupiah) per share. As a result of the stock split, the number of outstanding shares increased from 624,000,000 shares to 3,120,000,000 shares. The stock split was effective on July 27, 2007 as noted IDX's Letter No. PENG-638/BEJ.PSJ/P/07-2007 dated July 24, 2007.*

- *Increase in the authorized capital from Rp416,000,000 to Rp750,000,000 divided into 7,500,000,000 shares at par value of Rp100 (in full Rupiah) per share.*

- *Increase in the subscribed capital through the mechanism of increase of capital without rights issue, by granting share options to the Board of Directors, Commissioners other than Independent Commissioner and key employees of the Company via Management and Employees Stock Option Plan ("MESOP") introduced initially in 2007 and concluded in 2020.*

On December 22, 2009, the Company submitted the Registration Statement for Limited Public Offering II (Rights Issue II) to BAPEPAM-LK of 627,658,500 shares at par value of Rp100 (in full Rupiah) per share with offering price of Rp860 per share (in full Rupiah). In the offering, every shareholder holding five shares was entitled to buy one new share. The Company has obtained the notice of effectivity from the Chairman of BAPEPAM-LK in his Letter No. S-489/BL/2010 dated January 20, 2010. The notice is effective after the approval from the shareholders through their Extraordinary General Meeting held on January 21, 2010. These shares have been listed on the IDX since February 2010.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan (lanjutan)

Penerimaan neto dari *Rights Issue II* terhadap biaya-biaya sehubungan dengan pengeluaran saham, sebesar Rp531.529.220 digunakan untuk pembangunan tambahan fasilitas terminal tangki dan dermaga di berbagai lokasi dan untuk keperluan modal kerja umum sehubungan dengan peningkatan kebutuhan persediaan Perusahaan sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional sesuai dengan Prospektus yang diterbitkan pada saat *Rights Issue*.

Pada tanggal 20 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham *(stock split)* yang menurunkan nilai nominal saham dari Rp100 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp20 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pemecahan saham tersebut meningkatkan jumlah saham dasar semula dari 7.500.000.000 saham menjadi 37.500.000.000 saham dan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dari semula 4.014.694.920 saham menjadi 20.073.474.600 saham. Sesuai dengan Surat No. S-10033/BEI.PP2/12-2021 tanggal 28 Desember 2021 dari BEI, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022, seluruh saham Perusahaan yang beredar sebanyak 20.073.474.600 lembar saham dengan nilai nominal Rp20 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada BEI.

d. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2025.

1. GENERAL (continued)

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company (continued)

The net proceeds from the Rights Issue II, after netting off with related share issuance costs, amounting to Rp531,529,220 were used for the construction of additional tank terminal facilities and jetty in various locations and general working capital requirements in relation to the increase of the Company's inventories in line with the increase of operational activities in accordance with the Prospectus issued during the Rights Issue.

On December 20, 2021, the shareholders approved the stock split which resulted in the par value of the shares being reduced from Rp100 (in full Rupiah) to Rp20 (in full Rupiah) per share. As a result of the stock split, the authorized share capital increased from initial 7,500,000,000 shares to 37,500,000,000 shares and issued and fully paid shares increased from 4,014,694,920 shares to 20,073,474,600 shares. In accordance with the Letter No. S-10033/BEI.PP2/12-2021 dated December 28, 2021 from the IDX, effective on January 12, 2022, all of the Company's outstanding shares totaling 20,073,474,600 shares at a par value of Rp20 (in full Rupiah) per share were listed on the IDX.

d. Completion Date of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were authorized for issue on March 18, 2025.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2z dibawah ini.

Kelompok Usaha telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Kelompok Usaha akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Presentation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or "DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or " OJK").

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2z.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Kelompok Usaha kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,

ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Kelompok Usaha, kecuali entitas anak tertentu, yaitu JTT yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"). Tiap entitas dalam Kelompok Usaha menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI, and other components of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency, except for certain subsidiaries, namely JTT whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar"). Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("US$"), mengacu pada *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") 1 US$ adalah sebesar Rp16.162 (31 Desember 2023: Rp15.416).

Transaksi dalam mata uang asing selain Dolar AS adalah tidak signifikan.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, akun-akun Entitas Anak tersebut dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan mekanisme berikut:

- aset dan liabilitas dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan;
- pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata periode berjalan;
- akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- selisih kurs yang terjadi disajikan pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan" di ekuitas.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 32.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Foreign Currency Transactions and Translation (continued)

At December 31, 2024, the rate of exchange used for United States Dollar ("US$"), refer to Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR"), 1 US$ was Rp16,162 (December 31, 2023: Rp15,416).

Transactions in foreign currencies other than US Dollar are not significant.

For consolidation purposes, the accounts of those Subsidiaries are translated into Rupiah using the following mechanism:

- *assets and liabilities are translated using exchange rate at reporting date;*
- *revenues and expenses are translated at the average rates of exchange for the period;*
- *equity accounts are translated at historical rates; and*
- *any resulting foreign exchange is presented as "Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements" in the equity.*

d. Transactions with Related Parties

The Group has transactions with related parties as defined under PSAK 224, "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions with related parties are disclosed in the Note 32.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas, bank dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode *first-in first-out* ("FIFO"), kecuali untuk persediaan produk kimia tertentu yang menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi neto.

Nilai realisasi neto adalah estimasi nilai jual dalam transaksi usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya untuk penyelesaian dan biaya untuk menjual produk yang bersangkutan.

Nilai persediaan terdiri dari seluruh nilai pembelian dan biaya terkait untuk memproses sampai dengan persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan atau dijual.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 (three) months or less at the time of placements and not restricted to use, that are readily convertible to a known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using first-in first-out ("FIFO") method, except for certain chemical product inventory which uses the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Cost of inventories comprises purchase costs and the related processing costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

h. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Investments in Associates (continued)

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date.

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income reflect the Group's share of the results of operations of the associates. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the Group's interest in those associates.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period as the Group.

The Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investments in its associates. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investments in the associates are impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amounts of the investments in associates and their carrying values and recognizes the amount in profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *("carrying amount")* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Investments in Associates (continued)

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

i. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such costs include the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the property, plant and equipment as follows:

	Tahun/ *Years*	**Persentase/ *Percentage***	
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	5-24	4,2%-20,0%	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	3-20	5,0%-33,3%	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	5-20	5,0%-20,0%	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	2-10	10,0%-50,0%	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa dan renovasi gedung	5-20	5,0%-20,0%	*Leasehold and building improvements*
Peralatan kantor	3-10	10,0%-33,3%	*Office equipment*
Kapal	20-30	3,3%-5,0%	*Vessels*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai (Catatan 2u).

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land, including legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

The extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are deferred and amortized over the shorter between the land rights' legal life and the economic life of the land, and presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use (Note 2u).

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi Kelompok Usaha.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

j. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Property, Plant and Equipment" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as property, plant and equipment as disclosed above.

Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

j. Leases

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan asset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

	Tahun/ *Years*
Tanah	5-30
Bangunan dan tangki	2-5
Kendaraan	2

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Kelompok Usaha akan mengeksekusi opsi beli, maka Kelompok Usaha menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Kelompok Usaha menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2u).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Land	
Building and tanks	
Vehicles	

If the lease transfers the ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2u).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Kelompok Usaha dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka-pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli. Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa atas sewa jangka pendek tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option. The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. The Group recognizes the leases payments associated with these short-term leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Sewa di mana Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

k. Persediaan Tanah Kawasan Industri

Persediaan tanah kawasan industri terdiri dari tanah yang siap untuk dijual, sedang dalam tahap pengembangan dan yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri yang menjadi bagian dari Kawasan Industri dan Pelabuhan Jawa Terpadu (proyek "JIIPE") (Catatan 13) yang akan tersedia untuk dijual pada saat selesai pengembangan. Biaya-biaya akuisisi tanah dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah pengembangan (termasuk biaya praakuisisi tanah yang relevan), biaya pengembangan langsung, kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tidak langsung lainnya yang dapat diatribusikan pada pengembangan tanah persediaan tersebut. Akumulasi biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke tanah yang tersedia untuk dijual atau ke akun aset tetap terkait pada saat dianggap perlu untuk operasi secara internal pada saat pengembangan tanah telah selesai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

k. Industrial Estate Land Inventory

The industrial estate land consists of inventory of land available for sale, under development and land to be developed into industrial estate as part of the Java Integrated Industrial and Ports Estate ("JIIPE" project) (Note 13) which will be available for sale upon completion. The land acquisition costs are stated at the lower of cost or net realizable value.

The costs of land under development consist of the costs of land for development (including relevant preacquisition costs), direct development costs, capitalized borrowing costs and other indirect costs that are attributable to the development of such land inventory. The accumulated costs shall be transferred to land inventory available for sale or to relevant property, plant, and equipment account when they are deemed to be need for operating internaly when the development of such land has been completed.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Persediaan Tanah Kawasan Industri (lanjutan)

Biaya pinjaman, termasuk biaya pinjaman yang timbul dari pinjaman Kelompok Usaha yang memenuhi ketentuan dalam PSAK 223 untuk kondisi tersebut, yang dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat tanah dalam pengembangan adalah biaya pinjaman sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh untuk membiayai perolehan dan pengembangan tanah selama tahap pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat pengembangan proyek ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya atau pada saat proses pengembangan tanah tersebut sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai.

Persediaan tanah kawasan industri yang siap untuk dijual dan sedang dalam tahap pengembangan diklasifikasikan sebagai aset lancar karena dimaksudkan untuk dijual dalam siklus operasi normal, sedangkan tanah yang akan dikembangkan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

l. Properti Investasi

Properti investasi diukur pada biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya baik saat dilepas (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan nilai tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Kelompok Usaha mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Industrial Estate Land Inventory (continued)

Borrowing costs, including those arising from Group's borrowings which met the provision in PSAK 223 for such circumstances, capitalized as part of the carrying amount of land under development are those relating to debts obtained to finance the acquisition and development of the land during the development stage. Capitalization ceases when the development of the land is deferred or postponed or when activities to develop the land for its intended use are substantially completed.

The industrial estate land inventory available for sale and under development are classified as current asset as it is intended for sale in a normal operation cycle while land inventory for future development is classified as part of non-current asset.

l. Investment Property

Investment properties are measured at cost, including transaction costs.

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Properti Investasi (lanjutan)

Pengalihan dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika terdapat perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, Kelompok Usaha memperhitungkan properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan yang digunakan.

m. Biaya Emisi Saham dan Obligasi

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan.

Biaya emisi obligasi disajikan neto terhadap hutang obligasi dan diamortisasi selama masa obligasi menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 2t terkait dengan kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi).

n. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan dan Entitas Anaknya di Indonesia memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta, peraturan Perusahaan (Catatan 29). Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 219, "Imbalan Pasca Kerja" dan perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain dan disajikan pada bagian ekuitas. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laba rugi.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Investment Property (continued)

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

m. Share and Bonds Issuance Costs

Share issuance costs are presented as part of additional paid-in capital and are not amortized.

Bonds issuance costs are presented net against the bonds payable and amortized over the term of the bonds using effective interest rate method (refer to Note 2t related to accounting policies for financial liabilities measured at amortized cost).

n. Post-Employment Benefits

The Company and its Subsidiaries in Indonesia provide defined post-employment benefits to their employees in accordance with the prevailing Laws and Regulation and the Company's regulation (Note 29). No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group adopted PSAK 219, "Post-Employment Benefits" and the cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit method. The actuarial gains or lossess incurred are recognized in Other Comprehensive Income and is presented in the equity section. Past service cost is recognized immediately to profit or loss.

The benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2022, berdasarkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja, Kelompok Usaha telah mengatribusikan imbalan tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material dibawah program tersebut.

o. Pembayaran berbasis saham

Karyawan yang berhak (termasuk eksekutif senior) Kelompok Usaha menerima remunerasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham, di mana karyawan memberikan jasa sebagai imbalan dalam bentuk instrumen ekuitas (transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas).

Biaya transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas ditentukan oleh nilai wajar pada tanggal pemberian diberikan dengan menggunakan model penilaian yang sesuai, rincian lebih lanjut diberikan dalam Catatan 21.

Biaya tersebut diakui dalam beban umum dan administrasi, bersama-sama dengan peningkatan ekuitas (tambahan modal disetor), selama periode jasa dan, jika berlaku, kondisi kinerja terpenuhi (periode *vesting*). Beban kumulatif yang diakui untuk transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas pada setiap tanggal pelaporan hingga tanggal *vesting* mencerminkan sejauh mana periode *vesting* telah berakhir dan estimasi terbaik Kelompok Usaha atas jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan menjadi *vest*. Beban atau kredit dalam laporan laba rugi suatu periode merupakan pergerakan beban kumulatif yang diakui pada awal dan akhir periode tersebut.

Kondisi layanan dan kinerja non-pasar tidak diperhitungkan saat menentukan nilai wajar tanggal pemberian penghargaan, tetapi kemungkinan kondisi terpenuhi dinilai sebagai bagian dari estimasi terbaik Kelompok Usaha atas jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan menjadi hak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Post-Employment Benefits (continued)

Starting from January 1, 2022, based on the press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 219: Employee Benefits, the Group attributes benefits when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan.

o. Share-based payments

Eligible employees (including senior executives) of the Group receive remuneration in the form of share-based payments, whereby employees render services as consideration for equity instruments (equity-settled transactions).

The cost of equity-settled transactions is determined by the fair value at the date when the grant is made using an appropriate valuation model, further details of which are given in Note 21.

That cost is recognized in general and administrative expenses, together with a corresponding increase in equity (additional paid-in capital), over the period in which the service and, where applicable, the performance conditions are fulfilled (the vesting period). The cumulative expense recognized for equity-settled transactions at each reporting date until the vesting date reflects the extent to which the vesting period has expired and the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately vest. The expense or credit in the statement of profit or loss for a period represents the movement in cumulative expense recognized as at the beginning and end of that period.

Service and non-market performance conditions are not taken into account when determining the grant date fair value of awards, but the likelihood of the conditions being met is assessed as part of the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately vest.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pembayaran berbasis saham (lanjutan)

Kondisi kinerja pasar tercermin dalam nilai wajar tanggal pemberian. Setiap kondisi lain yang melekat pada penghargaan, tetapi tanpa persyaratan layanan terkait, dianggap sebagai kondisi *non-vesting*. Kondisi *non-vesting* tercermin dalam nilai wajar penghargaan dan mengarah pada pengeluaran langsung penghargaan kecuali ada juga layanan dan/atau kondisi kinerja.

Tidak ada beban yang diakui untuk penghargaan yang pada akhirnya tidak menjadi hak karena kinerja non-pasar dan/atau kondisi layanan belum terpenuhi.

p. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

q. Saham Treasuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham treasuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Kelompok Usaha. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Share-based payments (continued)

Market performance conditions are reflected within the grant date fair value. Any other conditions attached to an award, but without an associated service requirement, are considered to be non-vesting conditions. Non-vesting conditions are reflected in the fair value of an award and lead to an immediate expensing of an award unless there are also service and/or performance conditions.

No expense is recognized for awards that do not ultimately vest because non-market performance and/or service conditions have not been met.

p. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

q. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Group's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Penjualan diakui ketika Kelompok Usaha memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dapat dipenuhi pada suatu waktu tertentu atau dari waktu ke waktu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) yang dipenuhi. Kelompok Usaha secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

(a) Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian aset dialihkan ke pelanggan. Umumnya, penjualan lokal pada saat pengiriman barang, sedangkan penjualan ekspor ketika barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*), karena kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dinilai telah terpenuhi dan oleh karena itu pendapatan diakui.

Pendapatan diukur berdasarkan pada janji entitas dalam kontrak dengan pelanggan, dikurangi diskon dan potongan harga, jika ada.

(b) Penjualan jasa

Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui dalam periode akuntansi di mana jasa diberikan.

Kelompok Usaha menawarkan imbalan variabel berupa hak pengembalian dan penyesuaian harga sehubungan klaim kualitas, dengan menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan pola pembelian saat ini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

Revenue from contracts with customers

Sales are recognized when the Group satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to the customer, which is when the customer obtains control of the good or service. A performance obligation may be satisfied at a point or over time. The amount of the revenue recognized is the amount allocated to the satisfied performance obligation. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

(a) Sale of goods

Revenue from the sale of goods is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer. Generally, local sales on delivery of goods, while export sales when the goods are shipped (FOB Shipping Point), as performance obligation is judged have been satisfied and revenue is therefore recognized.

Revenue is measured at the consideration promised of the entity in the contract with a customer, less discounts and rebates, if any.

(b) Sale of services

Revenue from services rendered is recognized in the accounting period in which services are rendered.

The Group estimates the variable considerations such as right of return and price adjustments arising from quality claim, using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Manajemen menetapkan metode estimasi untuk memastikan dimasukkannya imbalan variabel tersebut hanya sedemikian agar tidak terjadi pembalikan yang signifikan atas pendapatan kumulatif yang diakui ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel tersebut diselesaikan kedepannya. Sedangkan pengakuan dilakukan ketika dokumen pendukung telah diterima dari pelanggan atau saat kemungkinan besar penyesuaian harga akan diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Kelompok Usaha atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan pada Catatan 2t Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Liabilitas kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Kelompok Usaha telah menerima imbalan (atau jumlah imbalan yang jatuh tempo) dari pelanggan.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Kelompok Usaha mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Kelompok Usaha memenuhi pelaksanaan kontrak.

Penghasilan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Revenue from contracts with customers (continued)

The management established estimation method that ensure inclusion of these variable consideration only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. Meanwhile, the recognition is made when supporting documents have been received from customers or when it is probable price adjustments will be given.

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Note 2t in Financial instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

Contract liabilities

A contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

s. Perpajakan

Kelompok Usaha menerapkan ISAK No. 123 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. ISAK ini membahas akuntansi untuk pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 212: Pajak Penghasilan. ISAK ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 212, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan perlakuan pajak yang tidak pasti. Penafsiran secara khusus membahas hal-hal berikut:

- Apakah suatu entitas mempertimbangkan perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah;
- Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan; dan
- Bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan dan tarif pajak.

Kelompok Usaha menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut. Kelompok Usaha menerapkan penilaian signifikan dalam mengidentifikasi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Setelah adopsi Interpretasi, Kelompok Usaha mempertimbangkan apakah Kelompok Usaha memiliki posisi pajak yang tidak pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Rental income

Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Recognition of expenses

Expenses are recognized when incurred or based on their beneficial periods.

s. Taxation

The Group adopted ISAK No. 123 - Uncertainty over Income Tax Treatments. This ISAK addresses the accounting for income taxes when tax treatments involve uncertainty that affects the application of PSAK 212: Income Taxes. This ISAK does not apply to taxes or levies outside the scope of PSAK 212, nor does it specifically include requirements relating to interest and penalties associated with uncertain tax treatments. The interpretation specifically addresses the following:

- *Whether an entity considers uncertain tax treatments separately;*
- *The assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by the taxation authorities; and*
- *How an entity determines taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rate.*

The Group determines whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses the approach that better predicts the resolution of the uncertainty. The Group applies significant judgment in identifying uncertainties over income tax treatments. Upon adoption of the Interpretation, the Group considered whether it has any uncertain tax positions.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pengajuan pajak Perusahaan dan entitas anak di berbagai yurisdiksi termasuk otoritas perpajakan dapat menentang perlakuan pajak tersebut. Kelompok Usaha menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya (termasuk yang untuk entitas anak) akan diterima oleh otoritas perpajakan.

Pajak Final

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, pajak penghasilan Kelompok Usaha dari aktivitas penyewaan tangki dan gudang dihitung secara final sebesar 10% sedangkan pendapatan pengangkutan untuk pelayaran dalam negeri dikenakan pajak final sebesar 1,2%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2008 tanggal 4 November 2008, efektif tanggal 1 Januari 2009, penghasilan dari penjualan atau pengalihan tanah dan bangunan dikenakan pajak final sebesar 5% dari nilai penjualan atau pengalihan. Pada tanggal 8 Agustus 2016, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.03/2016, pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak bersifat final sebesar 2,5%.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan - Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan akan terpulihkan atau yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak. Tarif pajak dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak adalah tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan, di negara dimana Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan laba kena pajaknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

The Company's and the subsidiaries' tax filings in different jurisdictions include the taxation authorities may challenge those tax treatments. The Group determined, based on its tax compliance that it is probable that its tax treatments (including those for the subsidiaries) will be accepted by the taxation authorities.

Final Tax

In accordance with prevailing tax regulation, the Group's income from rental of tanks and warehouses are subject to 10% final tax while domestic shipping transportation income is subject to final tax at rate of 1.2%.

Based on Government Regulation No. 71/2008 dated November 4, 2008, effective January 1, 2009, the income from sale or transfer of land and building is subject to a final tax of 5% from the sale or transfer value. On August 8, 2016, based on the Government Regulation No. 34/2016 and Ministry of Finance Regulation No. 261/PMK.03/2016, income from sale of land and/or buildings subject to final tax of 2.5%.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective final tax bases is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Income Tax - Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date, in the countries where the Group operates and generates taxable income.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan - Pajak Kini (lanjutan)

Pajak kini yang terkait dengan komponen yang diakui langsung ke ekuitas diakui di ekuitas dan tidak ke laporan laba rugi. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil sehubungan dengan pelaporan pajak untuk situasi dimana relevan pajak terkait memerlukan interpretasi dan melakukan pencadangan jika diperlukan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Paling sedikit 40% saham yang beredar dipegang oleh pemegang saham publik yang terdiri dari paling sedikit oleh 300 pemegang saham;
- Masing-masing pemegang saham memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar; dan
- Dua kondisi di atas harus dipenuhi paling singkat dalam kurun waktu 183 hari dalam waktu satu tahun pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Income Tax - Current Tax (continued)

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

The conditions to be fulfilled are as follows:

- *At least 40% of the outstanding shares are held by public comprising of at least 300 shareholders;*
- *Each shareholder holding less than 5% of the outstanding shares; and*
- *The two conditions above must be maintained for 183 days within one fiscal year.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Pilar Dua

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Kelompok Usaha telah menerapkan amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua.

Kelompok Usaha akan menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua. Sebagai tambahan, Kelompok Usaha tidak memiliki entitas anak yang beroperasi di yuridiksi dimana tarif pajak efektif (TER) entitas konstituennya di bawah ambang batas 15%.

Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Pillar Two Income Taxes

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2024, the Group has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two.

The Group will apply the exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes. In addition, the Group does not have subsidiaries which are operate in jurisdictions where the effective tax rate (ETR) of their constituent entities falls below the 15% threshold.

Income Tax - Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry forwards to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carryforwards can be utilized.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Efek pajak tangguhan yang timbul dari akuisisi disajikan sebagai bagian dari akun "Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan".

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak Penjualan

Penjualan, beban dan aset diakui neto terhadap nilai pajak penjualan (yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak terkait lainnya, jika ada) kecuali:

- Situasi dimana pajak penjualan yang timbul dari pembelian aset atau jasa tidak terpulihkan dari otoritas pajak, dalam situasi tersebut pajak penjualan terkait diakui sebagai bagian dari nilai perolehan aset atau bagian dari beban.
- Piutang dan hutang yang diakui termasuk pajak penjualan terkait.

Nilai dari pajak penjualan neto yang dipulihkan atau terhutang ke otoritas pajak dicatat sebagai bagian dari piutang atau hutang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Income Tax - Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are charged to the current year, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity. The deferred tax effect arising from acquisition is recognized as part of the "Deferred Tax Asset or Liability" account.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Sales Tax

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of sales tax (i.e. value-added tax and other relevant taxes, if any) except:

- *Where the sales tax incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the sales tax is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of sales tax included.*

The net amount of sales tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the consolidated statements of financial position.

t. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain ("PKL"), dan nilai wajar melalui laba rugi.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Kelompok Usaha telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 115. Lihat kebijakan akuntansi pada Catatan 2r untuk kebijakan terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui PKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang Semata-mata Pembayaran Pokok dan Bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terhutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Kelompok Usaha mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through Other Comprehensive Income ("OCI"), and fair value through profit or loss.

Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115. Refer to Note 2r for the accounting policy in relation to revenue from contracts with customers.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset lancar lainnya yang seluruhnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui PKL atau nilai wajar melalui laba rugi.

Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi:

i) Aset keuangan tersebut dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual, dan

ii) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang SPPI dari jumlah pokok terhutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

The Group has cash and cash equivalents, trade and other receivables, and other current assets which are all classified as financial assets measured at amortized cost. The Group has no financial assets measured at fair value through OCI or fair value through profit or loss.

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

i) The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and

ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan suku bunga efektif ("SBE") dan diuji penurunan nilainya. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha), terjadi apabila:

i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

ii) Kelompok Usaha telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan terhadap pihak ketiga melalui suatu kesepakatan "penyerahan" dan (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Subsequent measurement

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial asset is derecognized, modified or impaired.

Derecognition

A financial asset, or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

i) The contractual rights to receive the cash flows from these assets have expired;

ii) The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risk and rewards of the financial assets, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risk and rewards of the assets, but has transferred control of the asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Apabila Kelompok Usaha telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mengalihkan maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Dalam hal itu, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan beserta liabilitas terkait diukur dengan dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban yang dimiliki Kelompok Usaha.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset alihan diukur sebesar jumlah yang lebih rendah antara jumlah aset alihan dan jumlah maksimal imbalan yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk seluruh instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. KKE didasarkan pada selisih antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan akan diterima Kelompok Usaha, didiskontokan dengan SBE awal. Arus kas ekspektasian akan mencakup arus kas dari penjualan agunan atau perbaikan risiko-kredit lain yang merupakan bagian dari persyaratan kontraktual.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its right to receive cash flows from an asset or has entered in to "pass-through" arrangement, has neither transferred nor retained substantially all risk and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

Impairment of financial asset

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Losses ("ECL") for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

KKE diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, KKE dilakukan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu gagal bayar (KKE sepanjang umur).

Untuk piutang usaha, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung KKE. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umur pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menyusun matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik bagi debitur dan lingkungan ekonomi.

Kelompok Usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Kelompok Usaha tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap perbaikan risiko-kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Impairment of financial asset (continued)

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang usaha dan hutang lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa dan hutang dividen.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya. Semua liabilitas keuangan Kelompok Usaha diklasifikasikan sebagai pinjaman dan hutang.

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and other financial liabilities. The Group determines the classification of its financial liabilities at intial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities include short-term bank loan, long-term bank loans, trade and other payables, accrued expenses, lease liabilities, and dividend payables.

Subsequent measurement

The measurement of a financial liability depends on its classification. All of the Group's financial liabilities are classified as loans and borrowings.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

u. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kelompok Usaha mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Kelompok Usaha atas aset individual yang dialokasikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

u. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill,* penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operation, if any, are recognized as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit and loss.

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024.

w. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, Kelompok Usaha dibagi menjadi empat (4) segmen operasi utama berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 33, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

Aset dan liabilitas yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut.

x. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2024.

w. Segment Information

For management purposes, the Group is organized into four (4) main operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance. Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 33, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

Assets and liabilities that relate jointly to one or more segments are allocated to their respective segment, if and only if, their related revenues and expenses are also allocated to those segments.

x. Fair Value Measurement

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.

ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat perpindahan antara *Level* dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *Level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Fair Value Measurement (continued)

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Tagihan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 27.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgment

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 27.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya dari masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional bisa membutuhkan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, suatu entitas dapat bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Judgment (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) atas Piutang Usaha

Kelompok Usaha menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Kelompok Usaha terutama menggunakan penilaian penurunan nilai secara individu untuk sejumlah pelanggan dalam melakukan pencadangan KKE atas piutang usaha pada tanggal pelaporan. Secara umum, dalam menilai penurunan nilai secara individu atas piutang usaha, manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari pelanggan secara individual dengan mempertimbangkan kelayakan kredit pelanggan, kesulitan finansial yang dialami pelanggan, pengalaman gagal bayar atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, probabilitas pelanggan akan mengalami kebangkrutan dan analisis umur jatuh tempo, dan bila dapat diterapkan, nilai wajar jaminan yang diberikan oleh pelanggan. Hal ini melibatkan pertimbangan bahwa cadangan KKE harus mencerminkan informasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan informasi yang bersifat perkiraan masa depan, serta nilai waktu uang.

Kelompok Usaha juga menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan wilayah geografis, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Expected Credit Losses (ECL) of Trade Receivable

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. The Group mainly uses individual impairment assessment for various customers in respect to provide allowance for ECL of trade receivables at the reporting date. In general, in assessing the individual basis of impairment of trade receivables, management exercised judgments to evaluate the collectability from individual customers after taking into account their creditworthiness, whether they have financial difficulties, experience of default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy and aging analysis, and if applicable, the fair value of collateral provided by customers. This involves judgment as the allowance for ECL must reflect information about past events, current conditions and forecasts of future conditions, as well as the time value of money.

The Group also uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) atas Piutang Usaha (lanjutan)

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Kelompok Usaha yang diamati secara historis. Kelompok Usaha akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan *(forward-looking)*. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, minyak mentah, tingkat konsumsi, tingkat inflasi, *oil west texas intermediate,* minyak sawit mentah, minyak kelapa sawit, pertumbuhan ekonomi, *BI-7 days repo rate, Jakarta Composite Index*) diekspektasikan akan memburuk/membaik pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor industri, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dari informasi pelanggan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

Sewa

Kelompok Usaha tidak dapat dengan mudah menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (“IBR”) untuk mengukur liabilitas sewa. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan IBR. Kelompok Usaha mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa dalam denominasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Expected Credit Losses (ECL) of Trade Receivable (continued)

The provision matrix is initially based on the Group’s historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., crude oil, consumption rate, inflation rate, oil west texas intermediate, crude palm oil, palm oil, GDP growth, BI-7 days Repo Rate, Jakarta Composite Index) are expected to deteriorate/recover over the next year which can lead to an increased number of defaults in the industrial sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances of customer information and of forecast economic conditions. The Group’s historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer’s actual default in the future. The information about the ECLs on the Group’s trade receivables is disclosed in Note 5.

Leases

The Group can not readily determine the implicit interest rate in the lease, therefore, the Group uses the Incremental Borrowing Rate (“IBR”) to measure lease liabilities. There are number factors to consider in determining an incremental borrowing rate. The Group considers the following main factors: the Company’s corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi terminasi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pemutusan hubungan kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika sewa tersebut dipastikan akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 29.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Leases (continued)

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Pension and Employee Benefits

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

The carrying amounts of the Group's estimated employee benefits liabilities at reporting dates are disclosed in Note 29.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pembayaran berbasis saham

Dalam mengestimasi nilai wajar untuk transaksi pembayaran berbasis saham memerlukan penentuan model penilaian yang paling tepat, yang bergantung pada syarat dan ketentuan pemberian. Estimasi ini juga membutuhkan penentuan input yang paling tepat untuk model penilaian termasuk umur ekspektasian dari opsi saham, volatilitas dan hasil dividen dan membuat asumsi atas hal tersebut. Untuk pengukuran nilai wajar transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas dengan karyawan pada tanggal pemberian, Kelompok Usaha menggunakan model *black-scholes*. Asumsi dan model yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar transaksi pembayaran berbasis saham diungkapkan dalam Catatan 21.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya, kecuali hak atas tanah tidak diamortisasi. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 30 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Share-based payments

Estimating fair value for share-based payment transactions requires determination of the most appropriate valuation model, which depends on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determination of the most appropriate inputs to the valuation model including the expected life of the share option, volatility and dividend yield and making assumptions about them. For the measurement of the fair value of equity-settled transactions with employees at the grant date, the Group uses black-scholes model. The assumptions and models used for estimating fair value for share-based payment transactions are disclosed in Note 21.

Depreciation of Property, Plant and Equipment (PPE)

The costs of PPE are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives, except for landrights which is not amortized. Management estimates the useful lives of these PPE to be within 2 to 30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amounts of the Group's PPE at reporting dates are disclosed in Note 10.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai diestimasi berdasarkan arus kas masa depan neto yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas UPK terkait.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal pelaporan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia, sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell and the value in use are estimated based on the net future cash flows discounted to their present values using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the related CGU.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The management believes that no impairment loss is required at reporting dates.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the tax losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Kelompok Usaha sebelum penyisihan nilai realisasi neto diungkapkan dalam Catatan 6.

z. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang berlaku pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Penomoran baru untuk setiap PSAK dan ISAK diurut ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode akuntansi yang dimulai pada dan setelah 1 Januari 2024. Isi dari PSAK dan ISAK terkait tidak berubah dan tidak menimbulkan dampak akuntansi pada laporan keuangan konsolidasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Group's inventories before allowance for net realizable value are disclosed in Note 6.

z. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Financial Accounting Standards Nomenclature

The new reference numbers of individual PSAK and ISAK are reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for accounting periods beginning on and after January 1, 2024. Contents of related PSAK and ISAK are not changed and not resulted in any accounting impact to the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang berlaku pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha: (lanjutan)

Amandemen PSAK 201 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- bahwa jika derivatif melekat pada liabilitas yang dapat dikonversi dianggap sebagai instrumen ekuitas, maka ketentuan liabilitas ini tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai lancar atau tidak lancar.

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika liabilitas, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Changes in Accounting Principles (continued)

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group: (continued)

Amendment of PSAK 201 (previously referred to as PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *that if an embedded derivative in a convertible liability is considred as an equity instrument, the terms of the liability would not affect its classification as current or non-current.*

In addition, an entity is required to disclose when a liability, arising from a loan agreement, is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang berlaku pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha: (lanjutan)

Amandemen PSAK 116 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 116: Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Amandemen PSAK 207 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 2) dan PSAK 107 (sebelumnya dirujuk sebagai PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Changes in Accounting Principles (continued)

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group: (continued)

Amendment of PSAK 116 (previously referred to as PSAK 73): Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 116: Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognize any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 207 (previously referred to as PSAK 2) and PSAK 107 (previously referred to as PSAK 60): Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

3. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), bukan dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha - neto, piutang lain-lain dan aset lancar lainnya.

   Seluruh aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. Piutang *forward* dicatat sebesar nilai wajarnya dengan menggunakan model *forward pricing*.

2. Aset keuangan tidak lancar.

   Aset keuangan yang disajikan pada akun ini merupakan piutang usaha jangka panjang dari pihak ketiga - neto dan uang jaminan.

   Piutang usaha jangka panjang dari pihak ketiga - neto merupakan aset keuangan yang tidak dikenakan bunga dan disajikan pada nilai kini dari estimasi penerimaan kas di masa mendatang dengan menggunakan bunga pasar yang tersedia untuk instrumen yang kurang lebih sejenis.

3. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values, or their fair values cannot be reliably measured.

The fair values of the financial assets and liabilities are presented at the amounts which instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, not in a forced sale or liquidation.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value:

1. Cash and cash equivalents, trade receivables - net, other receivables and other current assets.

   All these financial assets are short-term financial assets that will due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values. Forward receivables are carried at their fair values using forward pricing model.

2. Non-current financial assets.

   The financial assets presented in this account comprises of long-term trade receivables from third parties - net and refundable deposits.

   Long-term trade receivables from third parties - net are financial assets which bear no interest and are presented at the net present value of the estimated future cash receipts using market interest rate available for debt with approximately similar characteristics.

3. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut: (lanjutan)

3. Hutang bank jangka pendek, hutang usaha, hutang lain-lain - pihak ketiga, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa jangka pendek dan hutang dividen.

   Seluruh liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. Hutang *forward* dicatat sebesar nilai wajarnya dengan menggunakan model *forward pricing*.

4. Hutang bank jangka panjang dan lainnya dan hutang obligasi, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun, liabilitas sewa jangka panjang, dan hutang dividen.

   Hutang bank jangka panjang dan lainnya merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga pasar variabel, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. Hutang obligasi merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tetap, namun nilai wajarnya tidak berubah secara signifikan dibandingkan dengan nilai tercatatnya.

   Liabilitas sewa disajikan pada nilai kini dari estimasi pengeluaran kas di masa mendatang dengan menggunakan suku bunga inkremental untuk pinjaman yang kurang lebih sejenis.

3. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value: (continued)

3. Short-term bank loan, trade payables, other payables - third parties, accrued expenses, current lease liabilities and dividend payable.

   All these financial liabilities are due within 12 months thus the carrying value of the financial liabilities approximate their fair values. Forward payables are carried at their fair values using forward pricing model.

4. Long-term bank loans and others and bonds payables, including their current maturities, non-current lease liabilities, and dividend payable.

   The long-term bank loans and others are liabilities with floating market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values. Bonds payables are liabilities with fixed interest rates, however the fair value is not significant changed compared to its carrying value.

   Lease liabilities are presented at the net present value of the estimated future cash flows using incremental borrowing rate for debt with approximately similar characteristic.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Kas	17.426.643	26.742.962	*Cash on hand*
Bank - Pihak ketiga			*Cash in banks - Third parties*
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Permata Tbk	627.674.517	413.842.845	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	585.459.238	358.853.539	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	366.680.948	888.351.064	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	224.267.994	40.542.175	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	157.496.577	1.091.804.233	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mizuho Indonesia	100.930.538	33.723.058	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	65.335.912	213.078.797	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	47.627.325	217.460.162	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	39.918.511	11.299.771	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Standard Chartered Bank	38.127.241	3.894.052	*Standard Chartered Bank*
Lain-lain	236.103	807.040	*Others*
Dolar AS			***US Dollar***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	752.997.395	662.127.846	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	741.453.126	1.164.414.872	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	669.148.128	5.161.084	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	411.783.104	277.461.841	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	24.051.602	300.317.494	*PT Bank Permata Tbk*
Standard Chartered Bank	6.019.810	12.349.729	*Standard Chartered Bank*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.550.427	459.006.006	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Mizuho Indonesia	1.838.536	74.097.160	*PT Bank Mizuho Indonesia*
Lain-lain	10.093.192	16.824.510	*Others*
Lainnya	1.937.864	1.401.681	***Others***
Sub-total	4.876.628.088	6.246.818.959	*Sub-total*
Deposito berjangka - Pihak ketiga			*Time deposits - Third parties*
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	246.000.000	145.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	112.850.000	63.755.440	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	27.500.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.000.000	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5.000.000	-	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank Central Asia Syariah	-	53.000.000	*PT Bank Central Asia Syariah*
Dolar AS			***US Dollar***
DBS Bank Singapore	53.137.186	-	*DBS Bank Singapore*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.449.691	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	-	308.320	*PT Bank Permata Tbk*
Sub-total	471.936.877	262.063.760	*Sub-total*
Total	**5.365.991.608**	**6.535.625.681**	***Total***

Rekening bank dari JTT, Entitas Anak, sebesar Rp69.268.422 pada tanggal 31 Desember 2023 dijadikan jaminan terhadap pinjaman bank yang diperoleh JTT dari PT Bank Permata Tbk. JTT diperkenankan menggunakan kas tersebut untuk aktivitas operasinya tanpa harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, sepanjang tidak terdapat wanprestasi (*event of default*) (Catatan 18).

The bank accounts of a Subsidiary, JTT, amounting to Rp69,268,422 as of December 31, 2023 are pledged as collateral to the loan obtained by JTT from PT Bank Permata Tbk. JTT is allowed to utilize the cash for its operating activities without prior written approval from the bank provided there is no event of default (Note 18).

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Tingkat suku bunga deposito per tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Interest rates on time deposits per year as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Rupiah	4,70% - 7,00%	4,15% - 6,25%	*Rupiah*
Dolar AS	3,83% - 5,30%	0,25%	*US Dollar*

5. PIUTANG / *5. ACCOUNT RECEIVABLES*

a. Piutang Usaha / *Trade Receivables*

Berdasarkan pelanggan: / *By debtor:*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Pihak berelasi (Catatan 32)	943.477	132.880	*Related parties (Note 32)*
Pihak ketiga	8.034.325.171	6.975.564.287	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(99.124.121)	(94.400.857)	*Allowance for expected credit losses*
Penyesuaian nilai wajar	(68.224.819)	(90.473.619)	*Fair value adjustment*
Total	7.867.919.708	6.790.822.691	*Total*
Dikurangi bagian jangka panjang	(304.429.436)	(387.378.827)	*Less non-current portion*
Neto	**7.563.490.272**	**6.403.443.864**	***Net***

Berdasarkan umur: / *By age:*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Belum jatuh tempo	6.903.052.609	6.201.667.295	*Not yet due*
Jatuh tempo:			*Past due:*
1 - 30 hari	372.181.600	146.730.957	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	131.721.552	63.407.493	*31 - 60 days*
> 60 hari	581.462.976	501.011.694	*> 60 days*
Sub-total	7.988.418.737	6.912.817.439	*Sub-total*
WAPU PPN	46.849.911	62.879.728	*VAT Collector*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(99.124.121)	(94.400.857)	*Allowance for expected credit losses*
Penyesuaian nilai wajar	(68.224.819)	(90.473.619)	*Fair value adjustment*
Neto	**7.867.919.708**	**6.790.822.691**	***Net***

5. PIUTANG (lanjutan) / *5. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)*

a. Piutang Usaha (lanjutan) / *a. Trade Receivables (continued)*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Rupiah	4.735.522.348	4.002.178.383	*Rupiah*
Dolar AS	3.299.746.300	2.973.518.784	*US Dollar*
Total	8.035.268.648	6.975.697.167	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(99.124.121)	(94.400.857)	*Allowance for expected credit losses*
Penyesuaian nilai wajar	(68.224.819)	(90.473.619)	*Fair value adjustment*
Neto	**7.867.919.708**	**6.790.822.691**	***Net***

Mutasi akun cadangan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebagai berikut: / *The changes in the allowance for expected credit losses are as follows*:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Saldo awal	94.400.857	90.186.024	*Beginning balance*
Penambahan	6.745.429	7.023.055	*Additions*
Penghapusan	(2.022.164)	(2.808.222)	*Written-off*
Saldo akhir	**99.124.121**	**94.400.857**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

Piutang usaha JTT sebesar Rp30.348.902 pada tanggal 31 Desember 2023 dijadikan jaminan terhadap pinjaman yang diperoleh JTT dari PT Bank Permata Tbk (Catatan 18).

Trade receivables of JTT amounting to Rp30,348,902 as of December 31, 2023 are pledged as collateral to the loan obtained by JTT from PT Bank Permata Tbk (Note 18).

b. Piutang Lain-lain / *b. Other Receivables*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Pihak berelasi			***Related parties***
Lain-lain (Catatan 32)	5.357.930	8.217.551	*Others (Note 32)*
Pihak ketiga			***Third parties***
Piutang karyawan	5.474.964	6.392.712	*Employee receivables*
Piutang klaim asuransi	4.409.539	1.624.244	*Insurance claim receivables*
Lain-lain	29.026.478	40.162.689	*Others*
Total	**38.910.981**	**48.179.645**	***Total***

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that no allowance for expected credit losses on other receivables is required to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. PERSEDIAAN - NETO / 6. *INVENTORIES - NET*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Barang jadi	3.290.935.538	2.872.641.059	*Finished goods*
Bahan baku	124.590.517	218.264.142	*Raw materials*
Bahan kemasan	3.668.156	3.122.682	*Packing materials*
Suku cadang dan lain-lain	43.569.320	39.593.619	*Spare parts and others*
Total	**3.462.763.531**	**3.133.621.502**	***Total***

Persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan dan pendapatan adalah sebesar Rp32.272.580.889 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp34.271.941.001) (Catatan 25).

Inventories charged to cost of sales and revenues for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp32,272,580,889 (2023: Rp34,271,941,001) (Note 25).

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that no allowance for decline in value of inventories is required at reporting dates.

Persediaan telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan paket polis sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

The inventories are insured to third parties against losses from fire, theft and other risks under blanket policies at reporting dates as mentioned below:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Dolar AS	204.178.946	190.627.174	*US Dollar*
Rupiah	520.364.165	266.882.703	*Rupiah*

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian akibat risiko tersebut.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Nilai asuransi tersebut mencakup asuransi untuk persediaan milik Kelompok Usaha serta persediaan milik pelanggan Perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab Perusahaan. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian akibat risiko tersebut.

The insurance amounts cover the inventories of the Group and the inventories of the Company's customers stored in the Company's premises, which are under the Company's responsibility. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / 7. *PREPAID EXPENSES*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Asuransi dibayar di muka	23.162.841	20.194.365	*Prepaid insurance*
Pemeliharaan dibayar di muka	19.402.196	19.478.343	*Prepaid maintenance*
Perizinan dan lisensi dibayar di muka	16.831.884	18.869.896	*Prepaid permits and licenses*
Sewa tanah dan bangunan dibayar di muka	2.651.698	5.052.225	*Prepaid land and building rents*
Lain-lain	19.713.519	10.169.210	*Others*
Total	**81.762.138**	**73.764.039**	***Total***

8. ASET LANCAR LAINNYA / *8. OTHER CURRENT ASSETS*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Tagihan pengembalian pajak (Catatan 27c)	415.609.983	156.248.399	*Claims for tax refund (Note 27c)*
Lain-lain	12.800.369	7.752.333	*Others*
Total	**428.410.352**	**164.000.732**	***Total***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES*

Perusahaan, melalui Entitas Anaknya, memiliki investasi dalam entitas-entitas berikut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The Company, through its Subsidiaries, has investments in the following entities as of December 31, 2024 and 2023:

	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Saldo 1 Jan. 2024/ *Balance Jan. 1, 2024*	Bagian atas laba entitas asosiasi/ *Share in profit of associates*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo 31 Des. 2024/ *Balance Dec. 31, 2024*	
Metode Ekuitas						***Equity Method***
PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	40,00%	445.396.947	46.467.083	-	491.864.030	*PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)*
PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)	45,00%	495.793	-	-	495.793*	*PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)*
Total		**445.892.740**	**46.467.083**	**-**	**492.359.823**	***Total***

*) Entitas ini dilikuidasi pada tanggal 17 Januari 2025/*This entity is liquidated on January 17, 2025.*

	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Saldo 1 Jan. 2023/ *Balance Jan. 1, 2023*	Bagian atas laba entitas asosiasi/ *Share in profit of associates*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo 31 Des. 2023/ *Balance Dec. 31, 2023*	
Metode Ekuitas						***Equity Method***
PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	40,00%	416.804.478	34.534.891	5.942.422	445.396.947	*PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)*
PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)	45,00%	495.793	-	-	495.793	*PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)*
Total		**417.300.271**	**34.534.891**	**5.942.422**	**445.892.740**	***Total***

Informasi keuangan dari entitas asosiasi yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

The financial information of the related associates is as follows:

Laporan posisi keuangan: / ***Statement of financial position:***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*							
	Aset Lancar/ *Current Assets*	Aset Tidak Lancar/ *Non-current Assets*	Liabilitas Jangka Pendek/ *Current Liabilities*	Liabilitas Jangka Panjang/ *Non-current Liabilities*	Agio Saham/ *Share Premium*	Ekuitas/ *Equity*	Kepentingan/ *Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
BMS	201.482.548	1.707.701.498	186.871.344	592.552.627	66.600.000	1.063.160.075	40,00%	491.864.030
EMS	1.101.762	-	-	-	-	1.101.762	45,00%	495.793

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*							
	Aset Lancar/ *Current Assets*	Aset Tidak Lancar/ *Non-current Assets*	Liabilitas Jangka Pendek/ *Current Liabilities*	Liabilitas Jangka Panjang/ *Non-current Liabilities*	Agio Saham/ *Share Premium*	Ekuitas/ *Equity*	Kepentingan/ *Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
BMS	246.490.069	1.583.941.572	100.940.684	715.898.589	66.600.000	946.992.368	40,00%	445.396.947
EMS	1.101.762	-	-	-	-	1.101.762	45,00%	495.793

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Informasi keuangan dari entitas asosiasi yang bersangkutan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. *INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)*

The financial information of the related associates is as follows: (continued)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain: / ***Statement of profit or loss and other comprehensive income:***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*					
	Pendapatan/ *Revenues*	**Laba Rugi/ *Profit or Loss***	**Total Penghasilan Komprehensif/ *Total Comprehensive Income***	**Kepentingan/ *Interest***	**Bagian atas laba entitas asosiasi/ *Share in profit of associates***	
BMS	437.557.810	116.287.344	116.167.707	40,00%	46.467.083	*BMS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*					
	Pendapatan/ *Revenues*	**Laba Rugi/ *Profit or Loss***	**Total Penghasilan Komprehensif/ *Total Comprehensive Income***	**Kepentingan/ *Interest***	**Bagian atas laba entitas asosiasi/ *Share in profit of associates***	
BMS	251.017.952	86.337.227	86.337.227	40,00%	34.534.891	*BMS*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi.

As of December 31, 2024 and 2023, management believes that there is no decline in the value of investment in associates.

UEPN dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI") mendirikan BMS di tahun 2012, yang mana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, UEPN telah melakukan jumlah setoran modal sebesar Rp355.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 40% di BMS, sedangkan BJTI memiliki 60%. BMS adalah bagian dari fasilitas terpadu di JIIPE (Catatan 33) mengoperasikan 400ha pelabuhan laut dalam yang terletak di lokasi strategis di Selat Madura.

UEPN and PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI") established BMS in 2012, whereby UEPN as of December 31, 2024 and 2023 has made a total contribution of Rp355,000,000 representing 40% ownership in BMS, while BJTI owns 60%. BMS is part of integrated facilities in JIIPE (Note 33) operating 400ha deep seaport strategically located in Madura Strait.

UEPN mendirikan EMS di tahun 2015. Saat ini pemegang saham EMS adalah UEPN, BJTI, PT Santiniluwansa Lestari dan PT Amanah Indo Invest. Maksud dan tujuan dari EMS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang industri, perdagangan, dan jasa pembangkit listrik di Surabaya, yang mana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, UEPN telah melakukan jumlah setoran modal sebesar Rp450.000 yang mencerminkan kepemilikan sebesar 45% di EMS.

UEPN established EMS in 2015. Currently, the shareholders of EMS are UEPN, BJTI, PT Santiniluwansa Lestari and PT Amanah Indo Invest. The purpose and objectives of establishment of EMS is to carry out business activities in the industry sector, trade and services of power plant in Surabaya, whereby UEPN as of December 31, 2024 and 2023 has made a total contribution of Rp450,000 representing 45% ownership in EMS.

10. ASET TETAP / *10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Biaya Perolehan:							***At Cost:***
Hak atas tanah	688.562.423	-	-	-	-	688.562.423	*Landrights*
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	4.849.076.763	86.402.093	3.579.289	240.054.433	78.978.051	5.250.932.051	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	1.016.015.346	47.579.724	9.595.123	159.496.590	5.362.194	1.218.858.731	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	599.049.778	2.113.647	1.446.802	28.227.955	-	627.944.578	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	423.024.400	41.780.463	41.919.448	45.848.886	9.900	468.744.201	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	95.994.119	133.857	64.220	658.951	-	96.722.707	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	585.409.564	959.294	81.031	25.163.932	-	611.451.759	*Building improvements*
Peralatan kantor	167.913.293	8.736.097	5.854.363	521.003	(1.685.623)	169.630.407	*Office equipment*
Kapal	775.412.298	182.139.332	-	-	-	957.551.630	*Vessels*
Aset dalam penyelesaian	432.303.690	895.709.708	1.110.892	(489.760.697)	1.149.547	838.291.356	*Construction in progress*
Total	9.632.761.674	1.265.554.215	63.651.168	10.211.053	83.814.069	10.928.689.843	*Total*
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	2.248.693.852	213.139.169	3.558.247	-	43.762.653	2.502.037.427	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	299.398.633	73.683.158	9.346.819	-	(3.708.132)	360.026.840	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	464.344.353	31.595.587	1.196.428	-	-	494.743.512	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	266.021.974	23.690.843	37.244.303	-	9.900	252.478.414	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	93.893.216	1.089.570	64.220	-	-	94.918.566	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	495.081.680	22.975.601	71.526	-	-	517.985.755	*Building improvements*
Peralatan kantor	108.385.582	10.579.679	5.825.050	-	(1.736.069)	111.404.142	*Office equipment*
Kapal	190.495.488	39.589.822	-	-	-	230.085.310	*Vessels*
Total	4.166.314.778	416.343.429	57.306.593	-	38.328.352	4.563.679.966	*Total*
Nilai Tercatat	**5.466.446.896**					**6.365.009.877**	***Carrying Amount***

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Biaya Perolehan:							***At Cost:***
Hak atas tanah	642.500.941	41.859.908	-	4.201.574	-	688.562.423	*Landrights*
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	4.732.612.449	67.979.108	16.875.946	80.233.317	(14.872.165)	4.849.076.763	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	735.621.055	329.674.608	54.265.522	8.513.193	(3.527.988)	1.016.015.346	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	725.703.076	2.606.353	135.877.462	6.617.811	-	599.049.778	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	380.619.672	20.232.911	11.527.956	33.703.955	(4.182)	423.024.400	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	93.842.433	632.539	141.276	1.660.423	-	95.994.119	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	574.373.879	1.256.580	5.852.240	15.631.345	-	585.409.564	*Building improvements*
Peralatan kantor	161.636.629	8.327.740	3.883.340	2.255.508	(423.244)	167.913.293	*Office equipment*
Kapal	627.412.317	147.999.981	-	-	-	775.412.298	*Vessels*
Aset dalam penyelesaian	298.620.838	312.914.793	-	(152.817.126)	(26.414.815)	432.303.690	*Construction in progress*
Total	8.972.943.289	933.484.521	228.423.742	-	(45.242.394)	9.632.761.674	*Total*
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	2.088.358.374	196.147.672	16.864.726	-	(18.947.468)	2.248.693.852	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	289.140.512	66.280.419	54.154.024	-	(1.868.274)	299.398.633	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	519.033.309	33.078.948	87.767.904	-	-	464.344.353	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	257.704.798	19.496.649	11.176.535	-	(2.938)	266.021.974	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	93.100.421	934.071	141.276	-	-	93.893.216	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	462.084.646	38.649.158	5.652.124	-	-	495.081.680	*Building improvements*
Peralatan kantor	102.975.807	10.790.831	3.881.423	-	(1.499.633)	108.385.582	*Office equipment*
Kapal	163.848.590	26.646.898	-	-	-	190.495.488	*Vessels*
Total	3.976.246.457	392.024.646	179.638.012	-	(22.318.313)	4.166.314.778	*Total*
Nilai Tercatat	**4.996.696.832**					**5.466.446.896**	***Carrying Amount***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Sekitar 4,03% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dari keseluruhan luas tanah Perusahaan masih belum atas nama Perusahaan. Perusahaan belum melakukan proses balik nama menjadi nama Perusahaan sampai dengan tanggal-tanggal pelaporan. Hak Guna Bangunan ("HGB") akan berakhir pada berbagai tanggal sampai dengan 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa kepemilikan hak atas tanah dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan.

Biaya penyusutan dibebankan sebagai berikut:

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Approximately 4.03% as of December 31, 2024 and 2023 of the Company's total land area is not under the name of the Company. The Company has not applied for the transfers of titles on the reporting dates. The Building Right Title (Hak Guna Bangunan or "HGB") expires on various dates up to 2053. The Management believes that the said titles of land right ownership can be renewed and/or extended.

The management believes that the carrying amounts of the property, plant and equipment do not exceed their recoverable amounts at the reporting dates.

Depreciation expense is charged to the following:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pokok penjualan dan pendapatan (Catatan 25)	374.361.894	353.053.151	*Cost of sales and revenues (Note 25)*
Beban usaha (Catatan 26)	41.981.535	38.971.495	*Operating expenses (Note 26)*
Total	**416.343.429**	**392.024.646**	***Total***

Rincian laba atas penjualan/pengalihan aset tetap sebagai berikut:

The details of gain on sale/transfer of property, plant and equipment are as follows:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Hasil penjualan/pengalihan aset tetap	10.077.582	63.443.491	*Proceeds from sale/transfer of property, plant and equipment*
Nilai tercatat	(6.344.575)	(48.785.730)	*Carrying amount*
Laba atas penjualan/pengalihan aset tetap	**3.733.007**	**14.657.761**	***Gain on sale/transfer of property, plant and equipment***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kecuali hak atas tanah, telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal-tanggal pelaporan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian akibat risiko tersebut.

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Property, plant and equipment, except for landrights, are insured to third parties against losses from fire, theft and other risks under blanket policies at the reporting dates as mentioned below. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Rupiah	7.221.604.779	5.957.770.353	*Rupiah*
Dolar AS	79.633.690	75.663.690	*US Dollar*

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset dalam penyelesaian terutama merupakan berbagai konstruksi seperti fasilitas terminal, dan stasiun pengisian bahan bakar umum ("SPBU"), yang persentase penyelesaiannya berkisar dari 9% - 97% (2023: 5% - 90%).

As of December 31, 2024, the construction in progress mainly represents various construction activities in such as terminal facilities, and gas stations of petroleum ("SPBU"), with completion percentages ranging from 9% - 97% (2023: 5% - 90%).

Pembangunan fasilitas-fasilitas di atas diharapkan selesai dalam waktu sekitar 1-2 tahun. Manajemen tidak mengharapkan akan adanya kesulitan dalam penyelesaian pembangunan pada waktu yang ditargetkan.

The construction of the above facilities is expected to be completed in approximately 1-2 years. The management does not expect any difficulties in meeting the targeted completion date.

Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi oleh Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

No borrowing costs were capitalized by the Group for the year ended December 31, 2024 and 2023.

Kelompok Usaha memiliki aset tangki penyimpanan yang digunakan untuk sewa operasi sebesar Rp224.917.451 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp239.546.914).

The Group has assets of storage tanks used for the operating lease amounting to Rp224,917,451 as of December 31, 2024 (2023: Rp239,546,914).

Aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 18 dan 34) adalah sebagai berikut:

Property, plant and equipment used as collateral to the loans obtained by the Group as of December 31, 2024 and 2023 (Notes 18 and 34) are as follows:

- UEPN - melalui entitas anak BKMS - tanah dan bangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas ("PLTMG") beserta bangunan infrastruktur, mesin-mesin dan peralatan yang melekat di atasnya yang terletak di Gresik, Jawa Timur, melalui fasilitas *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik* ("IMBT") dan aset yang dibiayai melalui fasilitas *Musyarakah Mutanaqishah* ("MMQ") dari PT Bank Permata Tbk ("Permata").

- *UEPN - through its subsidiary BKMS - land and building of the gas powerplant ("PLTMG") project including the building infrastructure, machineries and equipment on top of which it is located in Gresik, East Java, through Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik ("IMBT") facilities and assets being financed through Musyarakah Mutanaqishah ("MMQ") facilities from PT Bank Permata Tbk ("Permata").*

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 18 dan 34) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Andahanesa - melalui entitas anak TNU - tangki penyimpanan dan peralatan pendukungnya yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").

- JTT - bangunan dan fasilitas tangki terminal dijadikan jaminan terhadap fasilitas kredit dari Permata.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai perolehan aset yang sudah disusutkan penuh adalah sejumlah Rp1.236.192.237 (2023: Rp1.196.756.908). Aset-aset ini masih digunakan untuk menunjang operasional Kelompok Usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai tercatat aset yang sementara tidak dipakai dalam operasi adalah sebesar Rp16.877.390 (2023: Rp15.079.415).

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Property, plant and equipment used as collateral to the loans obtained by the Group as of December 31, 2024 and 2023 (Notes 18 and 34) are as follows: (continued)

- *Andahanesa - through its subsidiary TNU - storage tanks and its supporting equipment at Tanjung Perak Port, Surabaya financed by PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") under long-term facilities.*

- *JTT - building and tank terminal facilities are used to secure the loan facilities by Permata.*

As of December 31, 2024, the acquisition costs of the assets which have been fully depreciated amounted to Rp1,236,192,237 (2023: Rp1,196,756,908). Those assets are still being used by the Group in operations.

As of December 31, 2024, the carrying amount of assets temporary not used in operations amounted to Rp16,877,390 (2023: Rp15,079,415).

11. ASET HAK-GUNA

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

	Saldo 1 Jan. 2024/ *Balance Jan. 1, 2024*	Penambahan/ *Additions*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to translation of financial statements*	Saldo 31 Des. 2024/ *Balance Dec. 31, 2024*	
Harga perolehan					***Acquisition costs***
Sewa tanah	813.298.281	239.202.516	5.949.524	1.058.450.321	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	13.451.664	5.086.079	-	18.537.743	*Building, tank and vehicle leases*
	826.749.945	244.288.595	5.949.524	1.076.988.064	
Akumulasi depresiasi/amortisasi					***Accumulated depreciation/amortization***
Sewa tanah	198.206.660	73.018.826	589.996	271.815.482	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	10.741.396	1.063.668	-	11.805.064	*Building, tank and vehicle leases*
	208.948.056	74.082.494	589.996	283.620.546	
Total	**617.801.889**			**793.367.518**	***Total***

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan) / *11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

	Saldo 1 Jan. 2023/ *Balance Jan. 1, 2023*	Penambahan/ *Additions*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to translation of financial statements*	Saldo 31 Des. 2023/ *Balance Dec. 31, 2023*	
Harga perolehan					***Acquisition costs***
Sewa tanah	721.229.297	94.894.730	(2.825.746)	813.298.281	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	13.451.664	-	-	13.451.664	*Building, tank and vehicle leases*
	734.680.961	94.894.730	(2.825.746)	826.749.945	
Akumulasi depresiasi/amortisasi					***Accumulated depreciation/amortization***
Sewa tanah	140.773.898	57.432.762	-	198.206.660	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	7.713.930	3.027.466	-	10.741.396	*Building, tank and vehicle leases*
	148.487.828	60.460.228	-	208.948.056	
Total	**586.193.133**			**617.801.889**	***Total***

Biaya penyusutan dan amortisasi atas aset hak-guna dibebankan sebagai berikut:

Depreciation and amortization expenses of right-of-use assets are charged to the following:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pokok penjualan dan pendapatan (Catatan 25)	70.876.021	57.904.402	*Cost of sales and revenues (Note 25)*
Beban usaha (Catatan 26)	3.206.473	2.555.826	*Operating expenses (Note 26)*
Total	**74.082.494**	**60.460.228**	***Total***

Kelompok Usaha telah mengakui beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.086.215 (2023: Rp8.544.687) dan dicatat sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 26).

The Group has recognized the expense relating to short-term leases for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp8,086,215 (2023: Rp8,544,687) and recorded under general and administrative expense (Note 26).

Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2024.

Based on the assessment of the management of the Group, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of right-of-use assets as of December 31, 2024.

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Kelompok Usaha telah mengadakan sewa operasi untuk tangki. Sewa ini memiliki jangka waktu sewa 1-5 tahun dan termasuk klausul untuk revisi sewa sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Pendapatan sewa yang diakui Kelompok Usaha selama tahun berjalan adalah sebesar Rp78.792.484 (2023: Rp80.905.702).

Piutang sewa minimum di masa depan berdasarkan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terkait dengan sewa tangki yang akan dibebankan berdasarkan penggunaan aktual. Piutang sewa minimum di masa depan berdasarkan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terkait dengan tangki adalah sebagai berikut:

11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

The Group as Lessor

The Group has entered into operating leases on its tank. These leases have lease term of 1-5 years and include a clause for rental revision subject to prevailing market conditions. Lease income recognized by the Group during the year is amounting to Rp78,792,484 (2023: Rp80,905,702).

Future minimum rentals receivable under non-cancellable operating leases as at December 31, 2024 and 2023 relating to tank rental which will be charged based on actual usage. Future minimum rentals receivable under non-cancellable operating leases as at December 31, 2024 and 2023 relating to tank are as follows:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Dalam 1 tahun	29.532.276	34.441.846	*Within 1 year*
Dalam 1-5 tahun	77.283.176	76.637.326	*Within 1-5 years*
Total	**106.815.452**	**111.079.172**	***Total***

12. PROPERTI INVESTASI

Akun ini terdiri dari dua bidang tanah sebagai berikut (i) 193,5 hektar disewakan kepada *anchor tenant* dari BKMS (ii) 80,4 hektar belum ditentukan peruntukkannya, yang dimiliki oleh UEPN, entitas anak dari Perusahaan. Dua bidang tanah tersebut terletak di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, BKMS telah merubah perjanjian sewa tanah sebelumnya dengan *tenant* tersebut, untuk masa 18 tahun, dengan hak untuk memperpanjang masa sewa untuk dua (2) tahun dan enam (6) kali berturut-turut untuk periode sepuluh (10) tahun untuk setiap periode perpanjangan serta memiliki hak untuk membeli tanah tersebut selama masa sewa berdasarkan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut juga berisi mengatur biaya pemeliharaan dan biaya terkait lainnya yang relevan dengan sewa. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2021, kedua belah pihak juga menandatangani perjanjian sewa area tambahan untuk meletakkan peralatan proyek *smelter* untuk 2 tahun.

12. INVESTMENT PROPERTY

This account consists of two parcels of land i.e. (i) 193.5 hectares leased to an anchor tenant of BKMS (ii) 80.4 hectares reserved for future use, owned by UEPN, a subsidiary of the Company. The two parcels of land are located in Manyar, Gresik, East Java.

On August 27, 2021, BKMS has amended the previous lease agreement of land with the said tenant for a period of 18 years, whereby it has the right to extend the lease term for two (2) years and thereafter six (6) consecutive periods of ten (10) contract years for each renewal period with a right to purchase the land during the lease term based on the terms and conditions stipulated in agreement. The agreement also contains a maintenance fee arrangement and other provisions relevant to the lease. Further, on August 12, 2021, the two parties also signed additional lease of land area for laydown the equipments for its smelter project for a period of 2 years.

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Pada tahun 2024 dan 2023, BKMS telah menerima uang muka sewa tanah di atas sampai dengan bulan Agustus 2029 sejumlah Rp858,6 juta (2023: Rp632,5 juta), dimana BKMS telah mengakui pendapatan sewa selama periode tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diakui sebagai pendapatan sewa sebesar Rp185,1 juta (2023: Rp173,2 juta). Pada tanggal 31 Desember 2024, uang muka sebesar Rp752,7 juta (2023: Rp79,2 juta) termasuk bagian jangka pendek, disajikan sebagai "Liabilitas Kontrak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak terdapat beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan pendapatan sewa dikarenakan BKMS hanya menyewakan lahan kosong tanpa kewajiban kontraktual untuk melakukan konstruksi, membangun atau untuk memperbaiki di atas bidang tanah, atau untuk memelihara atau meningkatkan properti investasi tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, total nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp2.625.637.708 (2023: Rp2.522.171.256). Pengukuran nilai wajar atas properti investasi menggunakan *Level* 2 hirarki nilai wajar, dimana *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung.

Nilai wajar *Level* 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar. Harga pasar dari tanah yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. *Input* yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter persegi.

12. INVESTMENT PROPERTY (continued)

In 2024 and 2023, BKMS has received advances for the above leases of the land up to period August 2029 amounted to Rp858.6 million (2023: Rp632.5 million), whereby BKMS has recognized the lease income over the periods. For the year ended December 31, 2024, it has recognized rental income amounting to Rp185.1 million (2023: Rp173.2 million). As of December 31, 2024, the outstanding advance amounting to Rp752.7 million (2023: Rp79.2 million) including the current portion, is presented as "Contract Liabilities" in the consolidated statement of financial position.

There are no direct operating expenses arising from the investment property that generated rental income since BKMS leases the land with no contractual obligation to construct, build or repair on the improved parcels of land or for maintenance or enhancements of the investment property.

As of December 31, 2024, the total fair value of the investment property amounted to Rp2,625,637,708 (2023: Rp2,522,171,256). The fair value measurement of such investment property uses Level 2 of fair value hierarchy, whereby the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 2 fair value of land is calculated using the comparable market data approach. The approximate market price of comparable land is adjusted for differences in key attributes such as property size, location and use of an asset. The most significant input into this valuation approach is price per square meter assumptions.

13. PERSEDIAAN TANAH KAWASAN INDUSTRI

Akun ini terutama merupakan harga perolehan tanah dan biaya pengembangan terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada nilai persediaan tanah sebesar Rp376.314.777 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp276.177.846). Pada tanggal 31 Desember 2024, tingkat kapitalisasi bunga adalah sebesar 8,84% (2023: 9,14%). Persediaan tanah ini dijadikan kawasan industri sebagai bagian dari proyek JIIPE yang dikembangkan oleh salah satu entitas anak yang dimiliki tidak langsung, BKMS (Catatan 1b). Tanah ini berlokasi di KEK Gresik, Jawa Timur. Proyek JIIPE mempunyai pelabuhan laut yang dalam, kawasan industri dan perumahan secara terintegrasi. Pelabuhan laut dimiliki dan dikelola oleh BMS yang merupakan entitas asosiasi dari UEPN (Catatan 9), sedangkan kawasan industri dikelola oleh BKMS.

Bagian yang siap untuk dijual dan sedang dalam pengembangan disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan yang diperuntukkan untuk tahap pengembangan berikutnya disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar.

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas persediaan tanah kawasan industri pada tanggal-tanggal pelaporan.

13. INDUSTRIAL ESTATE LAND INVENTORY

This account represents acquisition costs and related development costs, either directly or indirectly, including borrowing costs capitalized to the carrying amounts of land inventory, totaling to Rp376,314,777 for the year ended December 31, 2024 (2023: Rp276,177,846). As of December 31, 2024, the interest capitalization rate is 8.84% (2023: 9.14%). The land inventory is an industrial estate as part of JIIPE project developed through an indirect subsidiary, BKMS (Note 1b). The land is located in SEZ Gresik, East Java. The JIIPE project is an integrated estate complex which has a deep-sea port, industrial estate and residential zone. The sea port is owned and operated by BMS, an associate entity of UEPN (Note 9) while the estate area is operated by BKMS.

The portion available for sale and under development are presented as part of current assets, while those retained for subsequent stage development are presented as part of non-current assets.

Management believes that there is no allowance for decline in value of industrial estate land inventory at reporting dates.

14. HUTANG

a. Hutang Usaha - Pihak Ketiga

Berdasarkan umur:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Belum jatuh tempo	10.287.513.531	9.494.226.968	*Not yet due*
Jatuh tempo:			*Past due:*
1 - 30 hari	48.424.423	24.717.715	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	590.532	133.217	*31 - 60 days*
> 60 hari	225.379	108.095	*> 60 days*
Total	**10.336.753.865**	**9.519.185.995**	***Total***

Berdasarkan mata uang:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Rupiah	3.946.472.352	2.317.358.223	*Rupiah*
Dolar AS	6.388.493.791	7.200.225.978	*US Dollar*
Mata uang lainnya	1.787.722	1.601.794	*Other currencies*
Total	**10.336.753.865**	**9.519.185.995**	***Total***

Hutang usaha tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga.

14. ACCOUNT PAYABLES

a. Trade Payables - Third Parties

By age:

By currency:

Trade payables are unsecured and non-interest bearing.

14. HUTANG (lanjutan) / *14. ACCOUNT PAYABLES (continued)*

b. Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga / *b. Other Payables - Third Parties*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Hutang pembelian aset tetap (Catatan 34)	284.050.163	278.316.275	*Purchase of property, plant and equipment payable (Note 34)*
Hutang kepada kontraktor	91.447.809	5.396.017	*Payables to contractor*
Hutang royalti	16.957.240	9.440.046	*Royalty payable*
Hutang jasa profesional	67.320	2.820.097	*Professional fees payables*
Lain-lain	71.521.466	53.667.610	*Miscellaneous*
Total	**464.043.998**	**349.640.045**	***Total***

15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *15. ACCRUED EXPENSES*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Beban impor	152.590.115	142.348.574	*Import charges*
Bunga	118.975.699	69.556.784	*Interest*
Biaya angkut dan penanganan	116.600.487	128.919.873	*Freight in and handling*
Konstruksi	26.887.405	25.548.880	*Construction*
Beban penjualan dan pemasaran	14.176.718	13.927.461	*Selling and marketing expenses*
Biaya profesional	18.089.182	46.673.714	*Professional fees*
Lain-lain	138.365.516	144.848.308	*Miscellaneous*
Total	**585.685.122**	**571.823.594**	***Total***

16. LIABILITAS SEWA / *16. LEASE LIABILITIES*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental indikatif pada awal tahun	380.386.577	322.335.069	*Discounted using the indicative incremental borrowing rate as at beginning year*
Penambahan sewa	244.288.595	94.894.730	*Addition of lease*
Penambahan bunga	29.620.167	24.225.563	*Accretion of interest*
Selisih kurs	1.197.547	(1.392.561)	*Exchange rate difference*
Pembayaran	(131.265.846)	(59.676.224)	*Payments*
Total liabilitas sewa	524.227.040	380.386.577	*Total lease liabilities*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	45.084.227	43.446.381	*Current portion*
Bagian jangka panjang	**479.142.813**	**336.940.196**	***Long term portion***

16. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Estimasi arus kas keluar masa depan pada saat jatuh tempo menggunakan tingkat suku bunga 5,96% - 9,78% untuk Rupiah dan 2,02% untuk Dolar AS per tahun adalah sebagai berikut:

16. LEASE LIABILITIES (continued)

The estimated cash outflows by maturity calculated using interest rate of 5.96% - 9.78% for Rupiah and 2.02% for US Dollar per annum are as follows:

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024/ *Year Ended December 31, 2024*

	Arus kas keluar/ *Cash outflows*	**Komponen bunga/ *Interest component***	**Nilai kini/ *Present value***	
Dalam 1 tahun	47.734.252	2.650.025	45.084.227	*Within 1 year*
Dalam 1-5 tahun	315.948.429	148.541.317	167.407.112	*Within 1-5 years*
Lebih dari 5 tahun	399.390.680	87.654.979	311.735.701	*More than 5 years*
Total	**763.073.361**	**238.846.321**	**524.227.040**	***Total***

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*

	Arus kas keluar/ *Cash outflows*	**Komponen bunga/ *Interest component***	**Nilai kini/ *Present value***	
Dalam 1 tahun	50.970.667	7.524.286	43.446.381	*Within 1 year*
Dalam 1-5 tahun	246.592.603	114.538.183	132.054.420	*Within 1-5 years*
Lebih dari 5 tahun	246.281.625	41.395.849	204.885.776	*More than 5 years*
Total	**543.844.895**	**163.458.318**	**380.386.577**	***Total***

Tidak ada opsi perpanjangan dan penghentian dimana Kelompok Usaha berpotensi memiliki eksposur yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.

There is no extension and termination options which the Group is potentially exposed that are not reflected in the measurements of lease liabilities.

17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

17. SHORT-TERM BANK LOAN

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
ALR			*ALR*
PT Bank Permata Tbk	7.000.000	5.000.000	*PT Bank Permata Tbk*

ALR

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

ALR memiliki fasilitas *Omnibus Revolving Loan* dari Permata dengan total *limit* Rp18.000.000 yang mencakup (i) fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen, (ii) Bank Garansi/*Standby Letter of Credit ("SBLC")* dan (iii) *Payable Services*. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025.

ALR

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

ALR obtained an Omnibus Revolving Loan Facility from Permata with total limit amounting to Rp18,000,000 with comprising of (i) uncommitted revolving loan facility, (ii) Bank Guarantee/Standby Letter of Credit ("SBLC") and (iii) Payable Services. This facility is available until October 7, 2025.

17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) / *17. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)*

ALR (lanjutan) / ***ALR (continued)***

PT Bank Permata Tbk ("Permata") (lanjutan) / *PT Bank Permata Tbk ("Permata") (continued)*

Perjanjian pinjaman mengharuskan pemenuhan beberapa persyaratan oleh ALR, antara lain, untuk mempertahankan sejumlah rasio keuangan serta tidak mengubah komposisi pemegang saham.

The loan agreement contains several loan covenants whereby it requires ALR, among others, to maintain certain financial ratios and not to change the shareholders' composition.

Fasilitas kredit yang dijelaskan di atas dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebagai berikut:

The above-mentioned credit facilities are subject to annual interest rates as follows:

	31 Des. 2024/ *Des. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Rupiah	6,36% - 8,80%	5,95% - 8,80%	*Rupiah*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa ALR telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam semua perjanjian kredit di atas.

As of December 31, 2024 and 2023, the management believes that ALR has complied with all the relevant covenants as required under all the credit agreements mentioned above.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA / *18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Perusahaan			*The Company*
PT Bank Central Asia Tbk	600.000.000	721.875.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	181.071.659	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total	600.000.000	902.946.659	*Sub-total*
UEPN dan Entitas Anak			*UEPN and Subsidiary*
Dana Syirkah Temporer -			*Dana Syirkah Temporer -*
PT Bank Permata Tbk	2.263.739.793	517.887.439	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.784.997.012	1.850.558.737	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	496.428.744	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	-	118.495.097	*PT Berlian Jasa Terminal Indonesia*
Sub-total	4.048.736.805	2.983.370.017	*Sub-total*
JTT			*JTT*
PT Bank Permata Tbk (US$9.720.977)	-	149.858.574	*PT Bank Permata Tbk (US$9,720,977)*
Andahanesa dan Entitas Anak			*Andahanesa and Subsidiary*
PT Bank Central Asia Tbk	137.148.148	170.370.377	*PT Bank Central Asia Tbk*
Total	**4.785.884.953**	**4.206.545.627**	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.140.851.204	1.089.267.780	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**3.645.033.749**	**3.117.277.847**	***Long-term portion***

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Fasilitas Kredit *Installment Loan* 4

Pada tanggal 27 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas baru *Installment Loan* 4 dari BCA sebesar Rp1.250.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali hutang obligasi. Fasilitas ini terdiri dari:

i) *Tranche* A dengan jumlah Rp500.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali Obligasi I Tahun 2012 Seri B. Periode ketersediaan dari fasilitas ini sampai dengan Desember 2019 dan telah ditarik sepenuhnya.

ii) *Tranche* B dengan jumlah Rp750.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap 1 Tahun 2017 Seri A. Periode ketersediaan dari fasilitas ini sampai dengan Juli 2020 dan telah ditarik sepenuhnya.

Fasilitas ini berjangka waktu 5 tahun sejak penarikan pertama setiap *Tranche* (tidak ada masa tenggang). Pokok pinjaman dan bunga terhutang secara kuartalan. Perjanjian ini juga mengandung sejumlah rasio keuangan yang serupa dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan oleh BCA kepada Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp271.875.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp234.375.000).

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai hutang bank jangka panjang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp450.000.000 (31 Desember 2023: Rp721.875.000).

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

The Company

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Installment Loan Facility 4

On November 27, 2019, the Company obtained a new Installment Loan 4 facility from BCA amounting to Rp1,250,000,000 which was used for refinancing bonds payables. The facilities are:

i) Tranche A amounting to Rp500,000,000 used for refinancing B Series - Bonds I Year 2012. The availability period of this facility was until December 2019 and has been fully drawn down.

ii) Tranche B amounting to Rp750,000,000 to be used for refinancing A Series - Shelf Registration Bonds I AKR Corporindo 1st Tranche Year 2017. The availability period of this facility was until July 2020 and has been fully drawdown.

The term of this facility is 5 years from the first utilization date of each Tranche (with no grace period). The loan principal and interest are payable on a quarterly basis. The loan agreement also contains certain financial ratios similar to the other facilities provided by BCA to the Company.

The Company has paid the related loan balance amounted to Rp271,875,000 for the year ended December 31, 2024 (2023: Rp234,375,000).

The outstanding loan from this facility is Rp450,000,000 as of December 31, 2024 (December 31, 2023: Rp721,875,000).

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Fasilitas Kredit Investasi 6

Pada tanggal 22 September 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi 6 dengan *limit* sebesar Rp300.000.000 dengan jangka waktu kredit 5 tahun yang digunakan untuk *capital expenditure* dan atau peningkatan modal pada entitas anak. Terdapat penarikan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp150.000.000.

Perjanjian-perjanjian kredit dengan BCA tersebut diubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan perubahan terakhir di bulan September 2023 fasilitas yang tersedia adalah:

i) Fasilitas cerukan sebesar US$2.000.000 dan Rp80.000.000;

ii) Fasilitas pinjaman non-kas sebesar US$450.000.000 dengan beberapa fasilitas untuk *L/C uncommitted*, SKBDN, *Standby L/C ("SBLC")*, Bank Garansi, dan pinjaman berjangka *Money Market Line*;

iii) Fasilitas valuta asing sebesar US$65.000.000.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *negative pledge* atas aset (Entitas Induk) dimana Perusahaan tidak boleh memberikan jaminan kepada pihak lain di masa depan tanpa persetujuan tertulis dari BCA. Perusahaan disyaratkan untuk mengajukan terlebih dahulu kepada BCA apabila Perusahaan bermaksud untuk memperoleh pinjaman atau kredit baru. Dan juga tanpa persetujuan dari BCA, Perusahaan tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- mengagunkan harta kekayaan Perusahaan; mengajukan permohonan pailit;
- melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- mengubah status kelembagaan;
- mengubah kepemilikan mayoritas saham pada Perusahaan dan/atau PT AKRT oleh Keluarga Adikoesoemo, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan jumlah kepemilikan saham menjadi kurang dari 50,1%.

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Investment Credit 6 Facility

On September 22, 2023, the Company signed Investment Credit 6 facility with limit amount of Rp300,000,000 with a credit period of 5 years to be used for capital expenditure and/or increase capital in subsidiaries. There is a drawdown as of December 31, 2024 amounting Rp150,000,000.

The loan agreements with BCA are amended from time to time. Based on the latest amendment in September 2023 the available facilities are:

i) Overdraft facility of US$2,000,000 and Rp80,000,000;

ii) Non-cash loan facilities at US$450,000,000 with various facility for uncommitted L/C, SKBDN, Standby L/C ("SBLC"), Bank Guarantee, and Money Market Line;

iii) Foreign exchange line facility amounted to US$65,000,000.

The loan facilities are secured by a negative pledge on assets (Parent Entity) whereby the Company commits not to create any securities with future lenders without prior written consent from BCA. The Company is obliged to BCA's right of first offer whenever the Company is seeking new loan or credit facility. Also, the Company without prior approval from BCA, shall not among others:

- *pledge of its assets; file for bankruptcy;*
- *conduct consolidation, merger, takeover or liquidation;*
- *change the organization status;*
- *change the majority shareholding of the Company and/or PT AKRT by Adikoesoemo's Family, either directly or indirectly which will result in the reduction of the shareholding to less than 50.1%.*

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Fasilitas Kredit Investasi 6 (lanjutan)

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai hutang bank jangka panjang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp150.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas *Term Loan* dari Mandiri sebesar Rp600.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B, kebutuhan kegiatan usaha terkait investasi, dan *general corporate purposes* terkait fasilitas biaya keuangan. Periode ketersediaan dari fasilitas ini adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan. Pada tanggal 26 Maret 2020, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

Fasilitas tersebut berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal awal Perjanjian Kredit atau berakhir di 31 Desember 2024. Pokok pinjaman harus dilunasi secara tiga-bulanan dimulai bulan Maret 2020. Perjanjian ini mengandung sejumlah persyaratan yang serupa dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan oleh Mandiri kepada Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp181.071.659 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Investment Credit 6 Facility (continued)

This Agreement also requires the Company, among others, to maintain several financial ratios. The credit agreement has been extended until September 30, 2025.

The outstanding loan from this facility is Rp150,000,000 as of December 31, 2024.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

On December 2, 2019, the Company obtained a Loan Term Facility from Mandiri amounting to Rp600,000,000 which was used for refinancing part of the Series B of Bonds I AKR Corporindo Year 2012, business activities related to investment, and general corporate purposes related to financial facility costs. The availability period of this facility is 6 (six) months from the signing date. As of March 26, 2020, the Company has fully drawdown the facility.

The term of this facility is 5 years from the first Credit Agreement or ends on December 31, 2024. The loan principal is repayable on a quarterly basis starting March 2020. The loan agreement contains certain loan covenants similar to those facilities provided by Mandiri to the Company.

The Company has paid the related loan balance amounting to Rp181,071,659 for the year ended December 31, 2024 and 2023.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

UEPN melalui Entitas Anak, BKMS

Dana Syirkah Temporer - PT Bank Permata Tbk ("Permata")

BKMS telah menandatangani beberapa fasilitas pembiayaan Syariah atau *Islamic* dengan Permata melalui model MMQ ("*Musyarakah Mutanaqishah*") pada tanggal 25 Agustus 2022, yang telah di adendum terakhir kali pada tanggal 1 Juli 2024. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembiayaan kembali aset/fasilitas tertentu seperti instalasi pengolahan air limbah, fasilitas air bersih, gedung perkantoran dan lainnya. Total fasilitas sejumlah Rp2.788 miliar dan akan dijamin dengan aset yang dibiayai. Fasilitas ini dikenakan biaya bunga JIBOR ditambah dengan persentase margin tertentu dan memiliki tenor selama 5 tahun.

Fasilitas kredit ini juga mensyaratkan BKMS untuk memelihara sejumlah rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024, pemenuhan rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Permata telah disetujui untuk di-*waived*.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp2.612.459.570 dan BKMS telah memenuhi seluruh batasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

BKMS telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp295.424.574 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp36.424.403).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 27 Juni 2023, BKMS telah menandatangani fasilitas kredit berjangka dengan BNI dengan total pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000 dalam dua *tranch.* Fasilitas tersebut dikenakan biaya bunga JIBOR 3 bulanan ditambah dengan persentase margin tertentu, yang digunakan untuk membiayai kembali pinjaman pemegang. Fasilitas ini berjangka waktu 7 tahun dengan porsi tertentu yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 26 Juni 2030. Fasilitas ini dijamin dengan sejumlah bidang tanah dan pengalihan fidusia piutang tertentu.

Fasilitas kredit ini juga mensyaratkan BKMS untuk memelihara sejumlah rasio keuangan.

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

UEPN through its Subsidiary, BKMS

Dana Syirkah Temporer - PT Bank Permata Tbk ("Permata")

BKMS signed several Shariah or Islamic financing facilities with Permata under MMQ model ("Musyarakah Mutanaqishah") on August 25, 2022, which was last amended on July 1, 2024. The facilities are set for both project financing and refinancing of certain supporting assets/facilities such as waste-water treatment plant, freshwater facilities, office buildings and others. The amounts of facilities totalled Rp2,788 billion which is to be secured by the assets being financed. These facilities are subject to interest at JIBOR plus a certain percentage margin and have a tenor of 5 years.

These financing facilities require BKMS to maintain several financial ratios. As of December 31, 2024, the compliance with financial ratios required by Permata has been approved to be waived.

As of December 31, 2024, BKMS has withdrawn Rp2,612,459,570 and BKMS has met all the covenants as required in the agreement.

BKMS has paid the related loan principal facility amounting to Rp295,424,574 for the year ended December 31, 2024 (2023: Rp36,424,403).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On June 27, 2023, BKMS signed a loan term credit facility with BNI with a total plafond of Rp2,000,000,000 under two tranches. The facility, which bears interest at 3-months JIBOR plus a certain percentage margin, shall be used to refinance existing shareholder loans. It has a tenor of 7 years with a certain portion to be settled no longer than June 26, 2030. The facility is secured by certain parcels of land and fiduciary transfer of certain receivables.

It also requires BKMS to maintain several financial ratios.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

UEPN melalui Entitas Anak, BKMS (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000.000. Hal ini sesuai dengan semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pada tanggal pelaporan.

BKMS telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp315.561.725 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp140.182.930).

Pada tanggal 19 Juni 2024, BKMS telah menandatangani fasilitas kredit berjangka dengan BNI dengan total pinjaman sejumlah Rp500.000.000. Fasilitas tersebut dikenakan biaya bunga JIBOR 3 bulanan ditambah dengan persentase margin tertentu, yang digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman pihak ketiga. Fasilitas ini berjangka waktu 3 tahun dengan porsi tertentu yang harus diselesaikan paling lambat bulan Desember 2027. Fasilitas ini dijamin dengan sejumlah bidang tanah dan pengalihan fidusia piutang tertentu.

Pada tanggal 28 Juni 2024, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp500.000.000. Hal ini sesuai dengan semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pada tanggal pelaporan.

BKMS telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp250.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF")

Pada tanggal 11 Desember 2020, BKMS menandatangani fasilitas pinjaman dengan IIF. Jumlah maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp500.000.000. Perjanjian ini dikenakan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar JIBOR ditambah persentase margin tertentu sesuai dengan perjanjian secara kuartalan dan dijamin dengan beberapa jaminan antara lain jaminan hak tanggungan tingkat pertama atas beberapa bidang tanah dan lainnya. Fasilitas kredit ini juga mensyaratkan BKMS untuk memelihara sejumlah rasio keuangan. BKMS telah melakukan pelunasan pinjaman pada tanggal 28 Juni 2024.

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

UEPN through its Subsidiary, BKMS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)

As of December 31, 2023, BKMS has withdrawn Rp2,000,000,000. It is in compliance with all the conditions required in the agreement at the reporting date.

BKMS has paid the related loan balance amounting to Rp315,561,725 for the year ended December 31, 2024 (2023: Rp140,182,930).

On June 19, 2024, BKMS signed a term loan credit facility with BNI with a total plafond of Rp500,000,000. The facility, which bears interest at 3-month JIBOR plus a certain percentage margin, shall be used to refinance existing third-party loans. It has a tenor of 3 years with a certain portion to be settled no longer than December 2027. The facility is secured by certain parcels of land and fiduciary transfer of certain receivables.

On June 28, 2024, BKMS has withdrawn Rp500,000,000. It is in compliance with all the conditions required in the agreement at the reporting date.

BKMS has paid the related loan balance amounting to Rp250,000,000 for the year ended December 31, 2024.

PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF")

On December 11, 2020, BKMS signed a loan facility with IIF. The maximum amount of the credit facility is Rp500,000,000. This agreement bore interest at JIBOR plus a certain percentage margin as defined in the Agreement on a quarterly basis and was secured by several collateral i.e. first-rate mortgage of several parcels of land etc. This credit facility has required BKMS to maintain several financial ratios. BKMS has fully paid the related loan facility on June 28, 2024.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

UEPN melalui Entitas Anak, BKMS (lanjutan)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")

Pada tanggal 30 Desember 2015, 30 Maret 2016, dan 26 Februari 2020, BJTI (pemegang saham 40% dari BKMS) telah memberikan pinjaman pemegang saham kepada BKMS dengan total sejumlah Rp320.000.000 untuk pengembangan fasilitas kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan (proyek JIIPE). Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah persentase margin tertentu, terhutang setiap bulan. BKMS telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman tersebut sebesar Rp118.495.097 pada bulan Januari 2024.

JTT

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 30 Oktober 2018, JTT menandatangani perjanjian pinjaman dengan Permata, dimana Permata setuju untuk memberikan dua fasilitas kredit kepada JTT.

Fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:

i) Fasilitas *Term Loan* 1 ("Fasilitas TL 1") yang bersifat *committed* sebesar US$21.500.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali fasilitas pinjaman sebelumnya untuk pembangunan tangki penyimpanan produk-produk cair dan bangunan kantor Tahap I, dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya;

ii) Fasilitas *Term Loan* 2 ("Fasilitas TL 2") yang bersifat *committed* sebesar US$28.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan investasi pembangunan tangki penyimpanan produk-produk cair Tahap IIA. Penarikan pertama dilakukan pada Maret 2019 dan fasilitas ini tersedia sampai dengan September 2020. Jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman terakhir adalah di bulan Januari 2027.

iii) Fasilitas *Forex Line* dengan *Loan Equivalent Risk* ("LER") sebesar US$1.000.000.

Pada tanggal 15 Desember 2021, Permata setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman berulang (*revolving*) kepada JTT sebesar US$1.500.000. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk modal kerja.

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

UEPN through its Subsidiary, BKMS (continued)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")

On December 30, 2015, March 30, 2016, and February 26, 2020, BJTI (the holder of 40% shares in BKMS) provided several shareholder loan facilities to BKMS with totaling amount of Rp320,000,000 for the development of the integrated industrial estate and port facilities (JIIPE project). The facility is subject to interest at JIBOR plus a certain percentage margin, payable monthly. BKMS has fully paid the outstanding amount of Rp118,495,097 in January 2024.

JTT

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On October 30, 2018, JTT signed a loan agreement with Permata, whereby Permata agreed to provide two credit facilities to JTT.

The facilities available are as follows:

i) Committed loan in the Term Loan 1 facility ("TL 1 Facility") at US$21,500,000. The purpose of the facility is to refinance the previous loan facilities for the constructions of liquid products storage tanks and office building Phase I, and the facilities have been fully utilized;

ii) Committed loan in the Term Loan 2 facility ("TL 2 Facility") at US$28,000,000. The purpose of the facility is to finance the constructions of liquid product storage tanks for Phase IIA. The first withdrawal was done in March 2019 and the term of the facility is available up to September 2020. The last repayment of loan principle will due in January 2027.

iii. *Forex Line facility with Loan Equivalent Risk ("LER") at US$1.000.000.*

On December 15, 2021, Permata agreed to provide an additional facility of revolving loan to JTT at US$1,500,000. The purpose of this facility is for working capital.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

JTT (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk ("Permata") (lanjutan)

Pada tanggal 2 Desember 2022, fasilitas pinjaman berulang *(revolving)* telah diperpanjang sampai 7 Oktober 2025 dengan tingkat bunga pasar per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang berlaku untuk masing-masing fasilitas yang merupakan penjumlahan suku bunga dasar dengan margin yang berlaku sesuai dengan Perjanjian dan bunga terhutang secara kuartalan.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan hak pakai atas bangunan kantor di Tanjung Priok, fasilitas tangki terminal, seluruh saham disetor JTT, rekening bank, piutang, dan hasil klaim asuransi.

Perjanjian ini mengandung sejumlah pembatasan dan persyaratan, termasuk pemenuhan rasio keuangan tertentu.

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 13 dan 14, serta Akta Addendum No. 12 tanggal 8 Maret 2019, JTT dan Vopak Indonesia B.V., selaku Para Pemegang Saham JTT menandatangani Perjanjian Pemberian Gadai Saham dengan Permata, atas seluruh saham yang dimilikinya dan dikendalikan oleh pemegang saham JTT. Adapun pemberian gadai saham kepada Permata tersebut terkait pemberian fasilitas perbankan yang telah diberikan oleh Permata kepada JTT, yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha JTT guna meningkatkan kapasitas/membangun tangki dan fasilitas penunjang lainnya. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 007/L-AKR-CS/2019 tanggal 12 Maret 2019 ke OJK dan BEI.

JTT telah melakukan pelunasan pinjaman sebesar US$9.731.250 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: US$6.281.250), dan pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, JTT masih dalam proses untuk melepaskan aset yang dijaminkan kepada Permata.

18. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)

JTT (continued)

PT Bank Permata Tbk ("Permata") (continued)

On December 2, 2022, the revolving loan facility has been extended to October 7, 2025, with market interest rate per annum.

The facilities are subject to the annual interest rate applied for each facility which is the aggregate percentage of the applicable margin and the base rate as defined in the Agreement and interest is payable on a quarterly basis.

The Facilities are secured by security of rights to use of the office building at Tanjung Priok, tank terminal facilities, all the issued and paid-up shares of JTT, its bank accounts, receivables, and proceeds from insurance claim.

The agreement also contains certain restrictions and requirements, including compliance with certain financial ratios.

Based on the Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 13 and 14, and Addendum of Notarial Deed No. 12 dated March 8, 2019, JTT and Vopak Indonesia B.V., as the Shareholders of JTT have signed a deed of the Shares Pledge Agreement with Permata, for all shares that owned and controlled by the shareholders of JTT. The granting of share pledge to Permata is related with loan facility has been given from Permata to JTT, used for support business activities to expand capacity/build new tank and other facility. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 007/L-AKR-CS/2019 dated March 12, 2019 to OJK and IDX.

JTT has fully paid the entire loan outstanding amounted to US$9,731,250 for the year ended December 31, 2024 (2023: US$6,281,250), and as of the completion date of these consolidated financial statements, JTT is still in-process to release all the collaterals to Permata.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG DAN LAINNYA (lanjutan)

Andahanesa melalui Entitas Anak, TNU

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 27 Oktober 2017, TNU memperoleh pinjaman Kredit Investasi dari BCA dengan maksimum pinjaman sejumlah Rp250.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk membiayai pembangunan tangki penyimpanan Tahap I di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Fasilitas ini berjangka waktu 8 tahun (termasuk *grace period* 18 bulan sejak penarikan pertama atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2019). Perjanjian ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan terakhir pada bulan Mei 2024, atas penambahan tenor 3 tahun, sampai dengan Agustus 2030.

Fasilitas ini dijamin dengan seluruh aset yang dibiayai oleh fasilitas ini mencakup 13 unit tangki penyimpanan.

Fasilitas ini juga mengharuskan pemenuhan sejumlah persyaratan, antara lain, (i) Perusahaan mempertahankan kepemilikannya paling sedikit sebesar 50,1% atas TNU, baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta (ii) pemenuhan sejumlah rasio keuangan tertentu.

TNU telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp33.222.229 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp31.944.437).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa TNU telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam semua perjanjian kredit di atas.

Semua fasilitas kredit yang dijelaskan di atas dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebagai berikut:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Rupiah	7,15% - 9,33%	6,50% - 11,11%	*Rupiah*
Dolar AS	7,55% - 7,64%	6,32% - 7,64%	*US Dollar*

Kepatuhan atas Kovenan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Kelompok Usaha telah memenuhi semua kovenan hutang bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. *LONG-TERM BANK LOANS AND OTHERS (continued)*

Andahanesa through its Subsidiary, TNU

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

On October 27, 2017, TNU obtained an Investment Credit facility loan from BCA with maximum plafond totalling Rp250,000,000. The purpose of the facility is to finance storage tanks Phase I in Tanjung Perak Port, Surabaya. The term of the facility is 8 years (including a grace period of 18 months from the first utilization date or at the latest by January 31, 2019). The agreement has been amended from time to time, the latest of which was in May 2024, pertaining to an additional tenor of 3 years, to August 2030.

The facility is secured by the related assets financed by the facility covering 13 units of storage tanks.

It requires compliance with certain covenants, among others, (i) the Company shall retain control of at least 50.1% of TNU directly or indirectly, and (ii) compliance with certain financial ratios.

TNU has paid the related loan facility amounting to Rp33,222,229 for the year ended December 31, 2024 (2023: Rp31,944,437).

As of December 31, 2024 and 2023, management believes that TNU has complied with all the relevant covenants as required under all the credit agreements mentioned above.

All the above-mentioned credit facilities are subject to annual interest rates as follows:

Compliance with Covenants

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

19. HUTANG OBLIGASI / *19. BONDS PAYABLES*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Jumlah pokok hutang Seri C - 2017	-	37.000.000	*Principal amount of payables C Series - 2017*
Biaya emisi yang belum diamortisasi	-	(166.063)	*Unamortized issuance costs*
Total	**-**	**36.833.937**	***Total***

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang diaktakan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., dalam Akta No. 83 tanggal 30 Maret 2017, juncto Addendum I No. 79 tanggal 24 Mei 2017 dan Addendum II No. 25 tanggal 12 Juni 2017 oleh notaris yang sama, PT Bank Mega Tbk (sebagai pihak independen) telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap 1 Tahun 2017.

Based on the Trusteeship Agreement as notarized by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., in Deed No. 83 dated March 30, 2017, juncto Amendment I No. 79 dated May 24, 2017 and Amendment II No. 25 dated June 12, 2017 of the same notary, PT Bank Mega Tbk (as an independent party) has been appointed as the Trustee of the Bondholders in conjunction with the Shelf Registration Bonds I AKR Corporindo 1st Tranche Year 2017.

Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap 1 Tahun 2017 ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

The Shelf Registration Bonds I AKR Corporindo 1st Tranche Year 2017 were issued scriptless, maximum 7 (seven) years with the terms and conditions of the Bonds as follows:

Seri/ ***Series***	**Pemeringkatan oleh/** ***Rating by*** **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**	**Tercatat/** ***Listed***	**Jatuh tempo (secara penuh)/** ***Maturity (bullet payment)***	**Nominal/** ***Amount***	**Bunga tetap (dibayar secara 3-bulanan)/** ***Fixed rate (quarterly payment)***	**Jaminan/** ***Security***
Seri C	idAA (*Double A*) dengan *Outlook* Stabil/*with Stable Outlook*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	7 Jul. 2024/ *Jul. 7, 2024*	Rp37.000.000	9,00%	Tidak dijamin/ *Unsecured*

Tujuan dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap 1 Tahun 2017, dipergunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk modal kerja segmen distribusi dan perdagangan dalam rangka pembelian bahan bakar minyak ("BBM") dan bahan kimia dasar. Awalnya Obligasi ini terdiri dari tiga Seri (A,B&C) dan Perusahaan telah membayar penuh Seri A dan B masing-masing pada bulan Juli 2020 dan Juli 2022, dan selanjutnya Seri C di bulan Juli 2024.

The purpose of the Shelf Registration Bonds I AKR Corporindo 1st Tranche Year 2017 is to use entirely for working capital required in the trading and distribution segment for procurement of petroleum and chemical. Initially Bonds I consists of three Series (A,B&C) and the Company has fully repaid Series A and B in July 2020 and July 2022, respectively, and further Series C in July 2024.

Pemeringkatan dari PEFINDO berlaku dari 8 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 yaitu idAA (*double A*) dengan *Outlook* Stabil untuk Perusahaan dan Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahun 2017 Tahap 1 Seri C. Atas hal tersebut, Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 023/L-AKR-CS/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 ke OJK dan BEI. Perusahaan juga telah memberikan keterbukaan informasi ke OJK dan BEI terkait penyelesaian Obligasi Seri C pada bulan Juli 2024.

The rating from PEFINDO is valid from March 8, 2024 to March 1, 2025 i.e idAA (double A) with Stable Outlook for the Company and Shelf Registration Bonds I AKR Corporindo 1st Tranche Year 2017, C series. For the matter, the Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 023/L-AKR-CS/2024 dated March 15, 2024 to OJK and IDX. The Company also has made the relevant disclosure information to OJK and IDX pertaining to the settlement of Series C Bond in July 2024.

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *20. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Anak Perusahaan/ *Subsidiaries*	Saldo 1 Januari 2024/ *Balance January 1, 2024*	Bagian Atas Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Current Year Profit (Loss)*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiary*	Penambahan Investasi/ *Additional of Investment*	Saldo 31 Desember 2024/ *Balance December 31, 2024*
PT Jakarta Tank Terminal	501.713.322	13.176.105	24.195.851	-	-	539.085.278
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, entitas anak UEPN	1.583.228.242	208.034.783	-	-	-	1.791.263.025
PT Terminal Nilam Utara, entitas anak Andahanesa	77.329.764	7.065.959	-	-	-	84.395.723
PT Dirgantara Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	34.176.272	(5.300.409)	-	-	7.687.095	36.562.958
PT Aneka Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	563.876.964	(52.121.327)	-	1.418	74.888.629	586.645.684
PT Anugerah Lubrindo Raya, entitas anak AKRIDA	5.315.356	353.898	-	-	-	5.669.254
PT Anugerah Kimia Indonesia, entitas anak ANI	6.748.509	3.494.047	-	-	-	10.242.556
PT Berkah Buana Energi	7.944.876	(353.519)	-	-	-	7.591.357
Total	**2.780.333.305**	**174.349.537**	**24.195.851**	**1.418**	**82.575.724**	**3.061.455.835**

Anak Perusahaan/ *Subsidiaries*	Saldo 1 Januari 2023/ *Balance January 1, 2023*	Bagian Atas Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Current Year Profit (Loss)*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiary*	Penambahan Investasi/ *Additional of Investment*	Saldo 31 Desember 2023/ *Balance December 31, 2023*
PT Jakarta Tank Terminal	507.477.015	4.943.419	(10.707.112)	-	-	501.713.322
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, entitas anak UEPN	1.227.080.754	356.147.488	-	-	-	1.583.228.242
PT Terminal Nilam Utara, entitas anak Andahanesa	30.998.554	2.331.163	-	47	44.000.000	77.329.764
PT Dirgantara Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	35.049.654	(6.026.255)	-	-	5.152.873	34.176.272
PT Aneka Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	368.582.385	(59.339.640)	-	4.902	254.629.317	563.876.964
PT Anugerah Lubrindo Raya, entitas anak AKRIDA	4.852.307	463.049	-	-	-	5.315.356
PT Anugerah Kimia Indonesia, entitas anak ANI	6.642.427	106.082	-	-	-	6.748.509
PT Berkah Buana Energi	5.264.992	(505.116)	-	-	3.185.000	7.944.876
Total	**2.185.948.088**	**298.120.190**	**(10.707.112)**	**4.949**	**306.967.190**	**2.780.333.305**

Ringkasan informasi keuangan BKMS, entitas anak yang dimiliki 60% oleh UEPN sebelum eliminasi disajikan di bawah ini:

The summarized financial information of BKMS, a subsidiary held 60% by UEPN before elimination is provided below:

Laporan posisi keuangan / ***Statement of financial position***

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Aset Lancar	7.008.236.857	5.207.857.544	*Current Assets*
Aset Tidak Lancar	4.663.282.129	4.704.322.477	*Non-Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	2.891.060.093	3.240.951.167	*Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang	4.055.697.761	2.464.897.024	*Non-Current Liabilities*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	4.724.761.132	4.206.331.830	*Equity attributable to the owners of the Company*

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2018, para pemegang saham BKMS menyetujui pembagian dividen sebesar Rp135.269.845 (termasuk bagian untuk Pemegang Saham Pengendali) dari laba tahun 2015, 2016 dan 2017. Pembayaran dividen tergantung ketersediaan kas setelah memperhitungkan pembayaran hutang bank dan pemegang saham, saldo hutang dividen kepada pihak nonpengendali disajikan dalam "Hutang Dividen".

20. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Based on the Annual General Shareholders' Meeting held on April 26, 2018, the BKMS's shareholders approved the declaration of dividends of Rp135,269,845 (including the portion for the Controlling Interest) out of the profit for the year 2015, 2016 and 2017. The payment is subject to availability of cashflows after reserve for bank and shareholder loans, the outstanding balance to the NCI of which is presented under "Dividend Payable".

21. MODAL SAHAM / *21. SHARE CAPITAL*

Nama Pemegang Saham / *Names of Shareholders*	31 Desember 2024/ *Desember 31, 2024*			31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total Saham/ *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Total Modal Disetor/ *Total Paid-up Capital*	Total Saham/ *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Total Modal Disetor/ *Total Paid-up Capital*
PT Arthakencana Rayatama	12.768.961.300	63,61%	255.379.226	12.077.492.600	60,17%	241.549.852
Haryanto Adikoesoemo	205.604.600	1,02%	4.112.092	203.604.600	1,01%	4.072.092
Soegiarto Adikoesoemo	101.604.800	0,51%	2.032.096	100.604.800	0,50%	2.012.096
Jimmy Tandyo	39.000.000	0,19%	780.000	37.500.000	0,19%	750.000
Bambang Soetiono	4.780.000	0,02%	95.600	3.780.000	0,02%	75.600
Suresh Vembu	3.727.500	0,02%	74.550	3.627.500	0,02%	72.550
Mery Sofi	2.303.000	0,01%	46.060	603.000	0,00%	12.060
Nery Polim	1.050.000	0,01%	21.000	450.000	0,00%	9.000
Termurti Tiban	450.000	0,00%	9.000	50.000	0,00%	1.000
Masyarakat (masing-masing di bawah kepemilikan 5%)	6.625.338.400	33,01%	132.506.768	7.309.457.100	36,41%	146.189.142
Sub-total	19.752.819.600	98,40%	395.056.392	19.737.169.600	98,32%	394.743.392
Saham treasuri	320.655.000	1,60%	6.413.100	336.305.000	1,68%	6.726.100
Total	**20.073.474.600**	**100,00%**	**401.469.492**	**20.073.474.600**	**100,00%**	**401.469.492**

Saham Treasuri

Perusahaan melaksanakan pembelian kembali saham yang beredar dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, antara tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020. Perusahaan mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 untuk pembelian maksimum sejumlah 172.631.882 lembar saham atau sekitar 4,3% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.

Treasury Shares

The Company has conducted shares buyback within a maximum period of 3 months, from March 16, 2020 up to June 12, 2020. The Company allocated the maximum amount of Rp500,000,000 with maximum buyback of 172,631,882 shares or approximately 4.3% of the Company's total issued and fully paid shares.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Saham Treasuri (lanjutan)

Program ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 2/POJK.04/2013. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Program ini dapat mengembalikan kepercayaan investor kepada Perusahaan dan harga saham Perusahaan dapat mencerminkan nilai yang sepadan dengan kelipatan pasar.

Perusahaan telah melakukan *buyback* saham treasuri sebanyak 67.261.000 saham (setara dengan 336.305.000 setelah *stock split* di Januari 2022) dengan harga perolehan sebesar Rp118.071.864, yang disajikan sebagai akun "Saham Treasuri" yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. *Buyback* saham dilakukan sebelum *stock split*.

Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 016/L-AKR-CS/2020 tanggal 13 Maret 2020 ke OJK dan BEI.

Seperti yang diungkapkan pada Surat No. 072/L-AKR-CS/2023 tanggal 19 September 2023 ke OJK, Perusahaan berencana untuk mengalihkan sebagian saham (atau sebanyak 156.500.000 saham) dari saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) dalam bentuk Program Pemberian Hak Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan Perusahaan ("MESOP"). MESOP ini akan diberikan kepada para peserta terpilih ("Peserta"), yang mana hak opsi tersebut kemudian akan diberikan kepada Peserta untuk membeli (atau melaksanakan) sejumlah saham Perusahaan, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dan diatur dalam Program. Pelaksanaan dari hak opsi tersebut telah disetujui RUPS pada bulan April 2024.

21. SHARE CAPITAL (continued)

Treasury Shares (continued)

The Program shall be in compliance with the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 2/POJK.04/2013. The management believes that the Program can increase and bring back investors' confidence in the Company and its share price can reflect the value that is based on market multiples.

The Company has made a buyback 67,261,000 treasury shares (equivalent to 336,305,000 after stock split in January 2022) acquisition at a total cost of Rp118,071,864, which presented as "Treasury Shares" account that deducted the equity in the consolidated statement of financial position. Stock buyback is done before the stock split.

The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 016/L-AKR-CS/2020 dated March 13, 2020 to OJK and IDX.

As disclosed in its Letter No. 072/L-AKR-CS/2023 dater September 19, 2023 to OJK, the Company planned to transfer a portion of the shares (or 156,500,000 shares) from the buyback (treasury shares) through the Management and Employees Stock Option Program ("MESOP"). The MESOP shall be granted to selected participants ("Participants"), whereby these option rights will later give the Participants the right to purchase (or exercise) a number of the Company's shares, with the terms and conditions determined and regulated in the Program. The Option has been approved in the AGM held in April 2024.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Opsi Saham

Opsi saham yang diberikan dapat dieksekusi selama tiga tahun dengan periode pelaksanaan sebagai berikut:

Total opsi MESOP	
Phase I - Agustus 2024	15.650.000
Phase II - Agustus 2025	46.950.000
Phase III.A - 1-26 Mei 2026	46.950.000
Phase III.B - 1-26 Mei 2026	46.950.000
Total opsi yang diberikan	**156.500.000**

Beban kompensasi saham yang diakui oleh Perusahaan adalah sebesar Rp12.000.000 pada tahun 2024. Beban tersebut dicatat sebagai bagian akun "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan rugi komprehensif lain konsolidasian dan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Opsi saham tahap I telah dieksekusi seluruhnya pada Agustus 2024.

Opsi saham yang diberikan setiap tahap dapat dieksekusi selama tiga tahun sebesar 10%, 30% dan 60% setiap tahunnya dari opsi yang diberikan.

Harga pelaksanaan opsi saham sama dengan harga Rp499. Tidak ada alternatif penyelesaian tunai bagi karyawan. Kelompok Usaha tidak memiliki praktik penyelesaian tunai di masa lalu untuk penghargaan ini.

Tidak ada pembatalan atau modifikasi pada penghargaan pada tahun 2024.

Rata-rata tertimbang sisa umur kontrak opsi saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 1,35 tahun (2023: 2,32 tahun).

21. SHARE CAPITAL (continued)

Share Options

The share options granted per phase are exercisable over the next three years with the following exercise period:

Total options MESOP	
Phase I - August 2024	15.650.000
Phase II - August 2025	46.950.000
Phase III.A - May 1-26, 2026	46.950.000
Phase III.B - May 1-26, 2026	46.950.000
Total options granted	**156.500.000**

Share compensation expense recognized by the Company amounted to Rp12,000,000 in 2024. The expense is recorded as part of "General and administrative expenses" account in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive loss and the corresponding equity section in the consolidated statements of financial position.

Phase I options are fully exercised in August 2024.

The stock options granted per phase are exercisable over the next three years at 10%, 30% and 60% of the options granted in such year.

The exercise price of the share options is equal to Rp499. There are no cash settlement alternatives for the employees. The Group does not have a past practice of cash settlement for these awards.

There were no cancellations or modifications to the awards in 2024.

The weighted average remaining contractual life for the share options outstanding as at December 31, 2024 was 1.35 years (2023: 2.32 years).

21. MODAL SAHAM (lanjutan) / *21. SHARE CAPITAL (continued)*

Opsi Saham (lanjutan) / ***Share Options (continued)***

Tabel berikut mencantumkan input ke model yang digunakan untuk ketiga rencana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

The following tables list the inputs to the models used for the three plans for the year ended December 31, 2024:

	2024	
Nilai wajar rata-rata tertimbang pada tanggal pengukuran	Rp845,97	*Weighted average fair values at the measurement date*
Hasil dividen (%)	6,10%	*Dividend yield (%)*
Volatilitas yang diharapkan (%)	41,70%	*Expected volatility (%)*
Suku bunga bebas risiko (%)	6,22%	*Risk-free interest rate (%)*
Ekspektasi opsi gagal diperoleh		*Expected forfeited option (%)*
Tahun 2024	2%	*Year 2024*
Tahun 2025	2%	*Year 2025*
Tahun 2026	15,8%	*Year 2026*
Rata-rata tertimbang harga saham (Rp)	499	*Weighted average share price (Rp)*
Model yang digunakan	Black-scholes	*Model used*

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Rincian akun Tambahan Modal Disetor adalah sebagai berikut:

The Additional Paid-in Capital account details are as follows:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Penawaran Umum Saham Perdana - 1994	6.000.000	6.000.000	*Initial Public Offering - 1994*
Biaya emisi efek			*Share issuance costs*
Rights Issue I (2004)	(5.616.855)	(5.616.855)	*Rights Issue I (2004)*
Rights Issue II (2010), setelah dikurangi dengan biaya emisi efek sebesar Rp8.257.089	468.763.370	468.763.370	*Rights Issue II (2010), net-against share issuance costs at Rp8,257,089*
Pelaksanaan opsi saham MESOP	804.973.325	792.973.325	*Exercise of MESOP share options*
Penerbitan kembali saham treasuri	2.314.860	-	*Reissuance of treasury stock*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	25.043.217	25.043.217	*Difference in values of restructuring transactions of entities under common control*
Total	**1.301.477.917**	**1.287.163.057**	***Total***

23. BAGIAN ATAS PERUBAHAN LAINNYA DARI EKUITAS ENTITAS ANAK / *23. SHARE OF OTHER CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Deductions)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
JTT	70.963.060	-	70.963.060	*JTT*
UEPN	2.838.223	-	2.838.223	*UEPN*
Anugrah	(4.794.465)	-	(4.794.465)	*Anugrah*
Andahanesa	(1.386)	-	(1.386)	*Andahanesa*
AKRIDA	(9.232)	(1.418)	(10.650)	*AKRIDA*
Neto	**68.996.200**	**(1.418)**	**68.994.782**	***Net***

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Deductions)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
JTT	70.963.060	-	70.963.060	*JTT*
UEPN	2.838.223	-	2.838.223	*UEPN*
Anugrah	(4.794.465)	-	(4.794.465)	*Anugrah*
Andahanesa	(1.339)	(47)	(1.386)	*Andahanesa*
AKRIDA	(4.330)	(4.902)	(9.232)	*AKRIDA*
Neto	**69.001.149**	**(4.949)**	**68.996.200**	***Net***

24. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Di bawah ini adalah pemisahan pendapatan Kelompok Usaha dari kontrak dengan pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

24. REVENUE FROM CONTRACT WITH CUSTOMERS

Set out below is the disaggregation of the Group's revenue from contracts with customers for the year ended December 31, 2024 and 2023:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Berdasarkan produk dan jasa			***By product and services***
Perdagangan dan distribusi			*Trading and distribution*
Bahan Bakar Minyak (BBM)			*Petroleum*
Pihak berelasi (Catatan 32)	1.654.576	1.614.867	*Related parties (Note 32)*
Pihak ketiga	28.932.533.511	31.867.050.203	*Third parties*
Kimia dasar dan lainnya			*Basic chemical and others*
Pihak ketiga	6.598.060.864	6.343.964.170	*Third parties*
Sub-total	35.532.248.951	38.212.629.240	*Sub-total*
Pabrikan - Pihak ketiga			*Manufacturing - Third parties*
Adhesive	651.720.510	557.800.532	*Adhesive*
Jasa logistik			*Logistic services*
Operasi pelabuhan dan transportasi			*Port operations and transportation*
Pihak berelasi (Catatan 32)	8.800	4.800	*Related party (Note 32)*
Pihak ketiga	812.566.838	639.001.108	*Third parties*
Jasa penyimpanan	202.011.078	184.307.434	*Storage services*
Lain-lain	63.161.330	74.676.430	*Others*
Sub-total	1.077.748.046	897.989.772	*Sub-total*
Tanah kawasan industri dan lainnya			*Industrial estate land and others*
Penjualan tanah kawasan industri	877.260.909	2.068.780.016	*Industrial estate land sales*
Listrik dan utilitas lainnya	318.147.628	80.226.070	*Electricity and other utilities*
Sub-total	1.195.408.537	2.149.006.086	*Sub-total*
Total	**38.457.126.044**	**41.817.425.630**	***Total***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Berdasarkan waktu pengakuan pendapatan			***By timing of revenue recognition***
Barang ditransfer pada suatu waktu	37.061.230.387	40.839.209.787	*Goods transferred at a point in time*
Jasa yang ditransfer pada suatu waktu	1.216.398.944	826.714.054	*Services transferred at a point in time*
Jasa yang ditransfer dari waktu ke waktu	179.496.713	151.501.789	*Services transferred over time*
Pendapatan total dari kontrak dengan pelanggan	**38.457.126.044**	**41.817.425.630**	***Total revenue from contract with customers***

25. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN / *25. COST OF SALES AND REVENUES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Perdagangan dan distribusi			*Trading and distribution*
Beban pokok pendapatan:			*Cost of revenues:*
Kimia dasar, BBM dan lainnya	32.284.931.864	34.283.574.248	*Basic chemical, petroleum, and others*
Pengiriman, bongkar-muat dan pengepakan dan lainnya	422.513.553	458.728.743	*Freight-out, handling charges and packaging and others*
Penyusutan (Catatan 10)	146.992.960	155.831.192	*Depreciation (Note 10)*
Penyusutan atas aset hak-guna (Catatan 11)	48.773.268	36.553.685	*Depreciation of right-of-use assets (Note 11)*
Sub-total	32.903.211.645	34.934.687.868	*Sub-total*
Pabrikan			*Manufacturing*
Beban pokok penjualan:			*Cost of goods sold*:
Bahan baku yang digunakan	327.433.402	294.187.489	*Raw materials used*
Tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik	27.265.461	26.311.710	*Direct labor and factory overhead*
Penyusutan (Catatan 10)	2.958.585	2.811.418	*Depreciation (Note 10)*
Beban pokok produksi	357.657.448	323.310.617	*Cost of goods manufactured*
Persediaan barang jadi			*Finished goods*
Awal tahun	13.385.650	13.506.298	*At beginning of the year*
Akhir tahun	(15.067.738)	(13.385.650)	*At end of the year*
Sub-total	355.975.360	323.431.265	*Sub-total*
Jasa logistik			*Logistic services*
Pengiriman, bongkar-muat dan pengepakan	559.846.694	490.621.475	*Freight-out, handling charges and packaging*
Penyusutan (Catatan 10)	224.410.349	194.410.541	*Depreciation (Note 10)*
Perbaikan dan pemeliharaan	89.127.799	75.836.243	*Repairs and maintenance*
Penyusutan dan amortisasi atas aset hak-guna (Catatan 11)	22.102.753	21.350.717	*Depreciation and amortization of right-of-use assets (Note 11)*
Lain-lain	282.524.725	231.976.402	*Others*
Sub-total	1.178.012.320	1.014.195.378	*Sub-total*
Tanah kawasan industri dan lainnya	783.258.042	1.341.173.388	*Industrial estate land and others*
Total	**35.220.457.367**	**37.613.487.899**	***Total***

26. BEBAN USAHA / *26. OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban Umum dan Administrasi			***General and Administrative Expenses***
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	593.371.399	561.498.907	*Salaries, wages and employee benefits*
Beban operasional kantor	54.186.518	41.513.697	*Office expenses*
Penyusutan (Catatan 10)	41.226.442	38.216.403	*Depreciation (Note 10)*
Perjalanan dinas dan transportasi	40.304.536	37.775.934	*Travelling and transportation*
Biaya profesional	39.766.599	41.320.812	*Professional fees*
Pajak dan perizinan	19.133.166	15.268.360	*Taxes and licenses*
Prasarana dan telekomunikasi	11.934.916	14.322.263	*Utilities and telecommunication*
Perbaikan dan pemeliharaan	8.624.203	8.546.183	*Repairs and maintenance*
Sewa kantor dan bangunan (Catatan 11)	8.086.215	8.544.687	*Office and building rental (Note 11)*
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha dan aset lainnya	6.745.429	67.030.227	*Allowance for impairment losses on trade and other assets*
Asuransi	4.811.592	4.269.580	*Insurance*
Penyusutan dan amortisasi aset hak-guna (Catatan 11)	3.206.473	2.555.826	*Depreciation and amortization of right-of-use assets (Note 11)*
Perlengkapan kantor	2.777.757	2.775.278	*Office supplies*
Biaya bank dan administrasi	1.508.710	5.229.606	*Bank charges and administration*
Pengiriman	1.243.227	1.225.763	*Delivery*
Lain-lain	36.516.741	27.705.047	*Miscellaneous*
Sub-total	873.443.923	877.798.573	*Sub-total*
Beban Penjualan			***Selling Expenses***
Transportasi	18.281.853	14.261.313	*Transportation*
Iklan dan promosi	18.039.442	24.190.394	*Advertising and promotion*
Perjamuan	4.306.251	4.314.629	*Entertainment*
Penyusutan (Catatan 10)	755.093	755.092	*Depreciation (Note 10)*
Lain-lain	59.765.295	53.550.562	*Miscellaneous*
Sub-total	101.147.934	97.071.990	*Sub-total*
Total	**974.591.857**	**974.870.563**	***Total***

27. PERPAJAKAN / *27. TAXATION*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Pajak pertambahan nilai - neto	126.272.187	64.664.241	*Value added tax - net*
Lain-lain	20.926.761	25.352.380	*Others*
Total	**147.198.948**	**90.016.621**	***Total***

b. Hutang Pajak / *b. Taxes Payable*

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pasal 4 (2)	4.298.000	6.788.427	*Article 4 (2)*
Pasal 21	1.846.512	9.792.726	*Article 21*
Pasal 22	7.065.587	6.613.223	*Article 22*
Pasal 23 dan 26	2.858.703	9.191.454	*Articles 23 and 26*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 25	-	12.089.614	*Article 25*
Pasal 29	23.991.617	181.240.640	*Article 29*
Pajak pertambahan nilai - neto	82.527.855	49.800.808	*Value added tax - net*
Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor (“PBBKB”)	279.485.206	215.836.195	*Motor Vehicle Fuel Tax (“PBBKB”)*
Lain-lain	626.344	623.440	*Others*
Total	**402.699.824**	**491.976.527**	***Total***

27. PERPAJAKAN (lanjutan) / *27. TAXATION (continued)*

c. Beban Pajak Kini / *c. Current Tax Expense*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended Desember 31,*		
	2024	**2023**	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.838.907.151	3.687.471.936	*Profit before final and income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba entitas anak sebelum pajak	(778.327.873)	(965.567.585)	*Profit of subsidiaries before tax*
Lain-lain	121.478.921	339.422.891	*Others*
Laba Perusahaan sebelum beban pajak	2.182.058.199	3.061.327.242	*Income before tax attributable to the Company*
Efek penyesuaian translasi atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan	2.566.812	2.571.901	*Adjustment translation effect on the consolidated financial statements of the Company*
Pendapatan dividen dari entitas anak	(99.961.538)	(229.930.742)	*Dividend income from subsidiaries*
Laba Perusahaan sebelum beban pajak, tidak termasuk efek penyesuaian translasi dan pendapatan dividen yang dikenakan pajak final	2.084.663.473	2.833.968.401	*Income before tax attributable to the Company, excluding adjustment translation effect and dividend income subject to final tax*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Penambahan penyisihan kerugian ekspektasian	4.581.248	3.061.134	*Addition for expected credit losses*
Penyusutan	(34.774.818)	(21.566.948)	*Depreciation*
Laba (rugi) penjualan aset tetap	4.001.261	(12.175.772)	*Gain (loss) on disposal of property and equipment*
Imbalan kerja dan lainnya	(49.482.599)	(1.883.614)	*Employment benefits and others*
Sub-total	(75.674.908)	(32.565.200)	*Sub-total*
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Beban terkait penghasilan yang pajaknya bersifat final	214.774.045	189.998.021	*Expenses subjected to final tax*
Penghasilan sewa yang pajaknya bersifat final	(446.667.451)	(413.158.380)	*Rent income subjected to final tax*
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final	(177.010.655)	(126.082.913)	*Finance income subjected to final tax*
Beban pajak	(3.064.936)	(7.515.327)	*Tax expenses*
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	(1.432.448)	(1.715.983)	*Salaries, wages and employee benefits*
Lain-lain	11.186.663	21.340.581	*Others*
Sub-total	(402.214.782)	(337.134.001)	*Sub-total*
Penghasilan kena pajak Perusahaan	**1.606.773.783**	**2.464.269.200**	***Taxable income of the Company***

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan beban pajak dan hutang pajak kini Perusahaan adalah sebagai berikut:

27. *TAXATION (continued)*

c. Current Tax Expense (continued)

The current tax expense and payable of the Company are calculated as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perusahaan	353.490.232	542.139.224	*The Company*
Entitas Anak	40.275.478	34.902.252	*Subsidiaries*
Total	**393.765.710**	**577.041.476**	***Total***
Dikurangi pembayaran pajak di muka			*Less prepaid taxes*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 22	274.823.800	149.235.242	*Article 22*
Pasal 23	21.087.718	188.018.489	*Article 23*
Pasal 25	43.055.737	36.269.262	*Article 25*
Sub-total	338.967.255	373.522.993	*Sub-total*
Entitas Anak	31.896.286	9.434.572	*Subsidiaries*
Total	**370.863.541**	**382.957.565**	***Total***
Hutang pajak - Pasal 29			*Current tax payable - Article 29*
Perusahaan	14.522.977	168.616.231	*The Company*
Entitas Anak	9.468.640	12.624.409	*Subsidiaries*
Total	**23.991.617**	**181.240.640**	***Total***
Estimasi tagihan pajak penghasilan			***Estimated claims for tax refund***
Perusahaan			*The Company*
PPN - 2024	405.211.438	-	*VAT - 2024*
PPN - 2023	-	148.960.141	*VAT - 2023*
Entitas Anak	25.969.720	23.562.569	*Subsidiaries*
Total	**431.181.158**	**172.522.710**	***Total***
Bagian jangka pendek - Disajikan pada aset lancar lainnya (Catatan 8)	415.609.983	156.248.399	*Current portion - presented under other current assets (Note 8)*
Bagian jangka panjang	**15.571.175**	**16.274.311**	***Long-term portion***

Tagihan pengembalian pajak tahun 2023 merupakan kelebihan bayar Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ("SKPPKP") dari Kantor Pajak terkait PPN masa Oktober-Desember 2023. Perusahaan telah menerima seluruh pengembalian pajak tersebut pada tahun 2024. Tagihan pengembalian pajak tahun 2024 merupakan kelebihan bayar Perusahaan terkait PPN masa September-Desember 2024.

The estimated claims for tax refund for 2023 was related to the Company's tax overpayment based on Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bayar *or ("SKPPKP") from the Tax Office pertaining to VAT period October-December 2023. The Company has fully received the refund during 2024. The estimated claims for tax refund for 2024 was related to the tax overpayments submitted by the Company pertaining to VAT period September-December 2024.*

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Kini (lanjutan)

Kecuali ATI, JTT dan Aruki, entitas anak lainnya masih dalam posisi rugi fiskal.

Pajak Penghasilan Pilar Dua

Berbagai negara telah memberlakukan atau bermaksud memberlakukan undang-undang perpajakan untuk mematuhi aturan model Pilar Dua, termasuk Indonesia (Catatan 2s). Kelompok Usaha berada dalam lingkup PMK 136/2024, yang tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian 2024 tetapi mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mulai 1 Januari 2025 dan seterusnya.

PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan di suatu yurisdiksi ketika tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi menurut aturan Pilar Dua, lebih rendah dari tarif minimum 15%. PMK 136/2024 menetapkan mekanisme untuk menentukan entitas mana (atau entitas-entitas mana) dalam Grup PMN yang harus menerapkan pajak tambahan tersebut dan porsi pajak yang dibebankan kepada setiap entitas terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Kelompok Usaha telah menerapkan amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait aturan Pilar Dua sehingga tidak ada dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian 2024. Dampak masa depan dari aturan Pilar Dua untuk Kelompok Usaha masih dalam tahap estimasi.

Aturan model Pilar Dua adalah kompleks dan Kelompok Usaha sedang dalam proses untuk mengestimasi dampak potensialnya terhadap laporan keuangan konsolidasian, jika ada. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Kelompok Usaha tidak mengharapkan adanya dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

27. TAXATION (continued)

c. Current Tax Expense (continued)

Except for ATI, JTT and Aruki, other subsidiaries are still in fiscal loss position.

Pillar Two Income Taxes

Various countries have enacted or intend to enact tax legislation to comply with Pillar Two model rules, including Indonesia (Note 2s). The Group is within the scope of PMK 136/2024, which did not impact 2024 consolidated financial statements but may impact the Group's consolidated financial statements from January 1, 2025 onward.

PMK 136/2024 applies new taxing mechanisms under which a Multinational Enterprises ("MNE") would pay a top-up tax in a jurisdiction whenever the efective tax rate, determined on a jurisdictional basis under the Pillar Two rules is below a 15% minimum rate. PMK 136/2024 sets out the mechanics for determining which entity (or entities) in an MNE Group should apply the top-up tax and the portion of such tax that is charged to each relevant entity.

For the year ended December 31, 2024, the Group has applied amendment to PSAK 212: Income Taxes, which provides mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two rules such that there is no impact to the 2024 consolidated financial statements. The future impact of Pillar Two rules for the Group is still being estimated.

The Pillar Two model rules are complex and the Group is still in the process of assessing potential impact to the consolidated financial statements, if any. Based on currently available information, the Group does not expect any material impact to the consolidated financial statements.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

27. TAXATION (continued)

d. Deferred Tax

The details of the Company and its Subsidiaries' deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Jan. 2024/ *Jan. 1, 2024*	Pengaruh ke laba rugi/ *Effect to profit and loss*	Pengaruh ke posisi keuangan atau ekuitas/ *Effect to financial position or equity*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Aset pajak tangguhan					*Deferred tax assets*
Perusahaan					*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	62.968.280	(10.886.172)	(897.922)	51.184.186	*Employment benefits liabilities*
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha	20.514.374	1.007.875	-	21.522.249	*Allowance for impairment losses on trade receivables*
Akumulasi penyusutan	107.234.962	(6.770.183)	-	100.464.779	*Accumulated depreciation*
Entitas Anak	10.580.234	4.627.358	(35.014)	15.172.578	*Subsidiaries*
Aset pajak tangguhan - neto	**201.297.850**	**(12.021.122)**	**(932.936)**	**188.343.792**	***Deferred tax assets - net***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(18.384.131)**	**(7.096.746)**	**(218.849)**	**(25.699.726)**	***Deferred tax liabilities - net***

	1 Jan. 2023/ *Jan. 1, 2023*	Pengaruh ke laba rugi/ *Effect to profit and loss*	Pengaruh ke posisi keuangan atau ekuitas/ *Effect to financial position or equity*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Aset pajak tangguhan					*Deferred tax assets*
Perusahaan					*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	61.224.371	(414.395)	2.158.304	62.968.280	*Employment benefits liabilities*
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha	19.840.925	673.449	-	20.514.374	*Allowance for impairment losses on trade receivables*
Akumulasi penyusutan	114.658.360	(7.423.398)	-	107.234.962	*Accumulated depreciation*
Entitas Anak	9.489.451	2.312.971	(1.222.188)	10.580.234	*Subsidiaries*
Aset pajak tangguhan - neto	**205.213.107**	**(4.851.373)**	**936.116**	**201.297.850**	***Deferred tax assets - net***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(11.395.226)**	**(7.295.841)**	**306.936**	**(18.384.131)**	***Deferred tax liabilities - net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan di atas dapat terpulihkan.

The management believes that the above deferred tax assets at each reporting date are recoverable.

27. PERPAJAKAN (lanjutan) / *27. TAXATION (continued)*

d. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred Tax (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between tax expense and amounts computed by applying the applied tax rate to profit before income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan konsolidasian	2.838.907.151	3.687.471.936	*Consolidated profit before final and income tax expense*
Laba yang dikenakan pajak final	(866.164.342)	(1.225.012.277)	*Profit subject to final tax*
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian tidak final yang dikenakan tarif pajak yang berlaku	1.972.742.809	2.462.459.659	*Consolidated profit before income tax expense non-final subject to the applicable tax rate*
Beban pajak atas laba diluar penghasilan final dengan tarif pajak yang berlaku	(434.003.417)	(541.741.124)	*Tax expense on profit subject to non-final tax at prevailing tax rates*
Dampak pajak atas:			*Tax effects of:*
Perbedaan tetap dan lainnya	21.119.839	(47.447.566)	*Permanent differences and other*
Beban pajak - neto	**(412.883.578)**	**(589.188.690)**	***Tax expense - net***

Pada tanggal 31 Desember 2024, Kelompok Usaha memiliki estimasi rugi pajak dari entitas anaknya yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan, sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the Group has an estimated tax losses carry forward from its subsidiaries, which is not recognized as deferred tax assets, as follows:

	Tahun Kedaluwarsa/ *Expired Year*	**Jumlah/ *Amount***	**Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets***	
Tahun pajak 2024	2029	6.669.306	1.467.247	*2024 fiscal year*
Tahun pajak 2023	2028	10.448.272	2.298.620	*2023 fiscal year*
Tahun pajak 2022	2027	28.122.764	6.187.008	*2022 fiscal year*
Tahun pajak 2021	2026	30.520.840	6.714.585	*2021 fiscal year*
Tahun pajak 2020	2025	21.571.103	4.745.643	*2020 fiscal year*
Total		**97.332.285**	**21.413.103**	***Total***

28. DIVIDEN DAN PENCADANGAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2024 yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 24 Juli 2024, Perusahaan mendeklarasikan pembagian dividen tunai interim sebesar Rp50 (dalam Rupiah penuh) per saham atau secara keseluruhan sebesar Rp986.858.480 dari laba interim tahun 2024 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang telah dibayarkan pada 15 Agustus 2024.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.467.146.200 atau Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham dari laba tahun 2023 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagian dividen ini adalah dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp986.858.480 atau Rp50 (dalam Rupiah penuh) per saham dan pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp493.429.240 atau Rp25 (dalam Rupiah penuh) per saham. Dividen final sebesar Rp986.858.480 atau Rp50 per saham (dalam Rupiah penuh) telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebutkan di atas, para pemegang saham juga menyetujui pencadangan umum sebesar Rp200.000 dari laba tahun 2023.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1.480.287.720 atau Rp75 (dalam Rupiah penuh) per saham dari laba tahun 2022 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagian dividen ini adalah dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp493.429.240 atau Rp25 (dalam Rupiah penuh) per saham. Dividen final sebesar Rp986.858.480 atau Rp50 per saham (dalam Rupiah penuh) telah dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2023.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebutkan di atas, para pemegang saham juga menyetujui pencadangan umum sebesar Rp200.000 dari laba tahun 2022.

28. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on the Decision of the Company's Directors Meeting held on July 23, 2024 which was approved by the Board of Commissioners on July 24, 2024, the Company declared interim cash dividends at Rp50 (in full Rupiah) per share or amounting to Rp986,858,480 out of the 2024 interim profit attributed to equity holder of the parent, which has been paid on August 15, 2024.

In the Annual General Shareholders' Meeting held on April 29, 2024, the Company's shareholders approved the distribution of cash dividends of Rp2,467,146,200 or Rp125 (in full Rupiah) per share out of the 2023 profit attributable to equity holders of the parent entity. A partial portion of this dividend was paid as interim dividends amounting to Rp986,858,480 or Rp50 (in full Rupiah) per share were paid on August 16, 2023 and Rp493,429,240 or Rp25 (in full Rupiah) per share were paid on November 15, 2023. Final dividends of Rp986,858,480 or Rp50 per share (in full Rupiah) have been paid on May 27, 2024.

In the Annual General Shareholder's Meeting mentioned above, the shareholders also approved the appropriation for general reserve of Rp200,000 from the profit of 2023.

In the Annual General Shareholders' Meeting held on April 28, 2023, the Company's shareholders approved the declaration of cash dividends of Rp1,480,287,720 or Rp75 (in full Rupiah) per share out of the 2022 profit attributable to equity holders of the parent entity. A partial portion of this dividend was paid as interim dividends amounting to Rp493,429,240 or Rp25 (in full Rupiah) per share were paid on August 16, 2022. Final dividends of Rp986,858,480 or Rp50 per share (in full Rupiah) have been paid on May 24, 2023.

In the Annual General Shareholder's Meeting mentioned above, the shareholders also approved the appropriation for general reserve of Rp200,000 from the profit of 2022.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

A. Imbalan kerja jangka pendek

Akrual mencerminkan estimasi imbalan kerja jangka pendek berupa bonus.

B. Imbalan pasca kerja

Perusahaan dan Entitas Anak di Indonesia memberikan imbalan pasca kerja yang belum didanai untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan kebijakan Kelompok Usaha.

a. Beban neto manfaat karyawan

29. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

A. Short-term employee benefits

The accrual represents estimated short-term benefits i.e. bonuses.

B. Post-employment benefits

The Company and its Subsidiaries in Indonesia provide post-employment benefits for their qualifying employees in accordance with prevailing Government Regulation and the Group's policies.

a. Net employee benefits expenses

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Biaya jasa kini	18.993.061	16.745.147	*Current service cost*
Biaya bunga	9.971.833	9.917.965	*Interest cost*
Penyesuaian biaya jasa lalu	(2.927.389)	(51.037)	*Adjustment of past service cost*
Total	**26.037.505**	**26.612.075**	***Total***

b. Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

b. Changes in post-employment benefit liabilities are as follows:

	30 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Saldo awal	177.230.676	144.724.214	*Beginning balance*
Biaya diakui dalam laba rugi	26.037.505	26.612.075	*Expense recognized in profit or loss*
(Keuntungan) kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(4.324.503)	11.753.559	*(Gain) loss recognized in other comprehensive income*
Imbalan yang dibayar	(19.899.732)	(5.859.172)	*Benefits paid*
Saldo akhir	**179.043.946**	**177.230.676**	***Ending balance***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

B. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

c. Perubahan nilai kini kewajiban manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

29. *EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)*

B. Post-employment benefits (continued)

c. Changes in present value for the benefits obligations are as follows:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Saldo awal tahun	177.230.676	144.724.214	*Beginning of year*
Biaya jasa kini	18.993.061	16.745.147	*Current service cost*
Biaya bunga	9.971.833	9.917.965	*Interest cost*
Imbalan yang dibayar	(19.899.732)	(5.859.172)	*Benefits paid*
Penyesuaian biaya jasa lalu	(2.927.389)	(51.037)	*Adjustment of past service cost*
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:			*Actuarial (gain) loss arising from:*
Perubahan asumsi finansial	(3.357.314)	(1.640.851)	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian historis	(967.189)	13.168.720	*Experience adjustment*
Perubahan asumsi demografi	-	225.690	*Changes in demographic assumption*
Saldo akhir tahun	**179.043.946**	**177.230.676**	***End of year***

Akrual atas kewajiban Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada perhitungan aktuaris independen, kecuali Andahanesa didasarkan pada perhitungan internal. Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" yang mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut:

The costs of providing post-employment benefits of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2024 were calculated by independent actuaries, except for Andahanesa was determined based on internal computation. The actuarial valuation was carried out using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

Tingkat bunga diskonto	:	6,37% - 7,13% per tahun/*per year* (31 Des. 2023/*Dec. 31, 2023:* 6,37% - 7,26%)	:	*Discount rate*
Tabel mortalitas	:	TMI 2019	:	*Mortality table*
Tingkat kenaikan gaji	:	3,00% - 7,00%	:	*Salary increase*
Umur pensiun	:	56-58 tahun untuk karyawan dan 62 tahun untuk direktur/*56-58 years for employees and 62 years for directors*	:	*Retirement age*
Tingkat cacat	:	10% dari tingkat mortalitas/*from mortality rate*	:	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	:	2% atau 6% (tergantung jabatan) sampai usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 2 tahun sebelum usia pensiun normal/ *2% or 6% (depends on position) up to age 30 and will decrease until 0% at the age of 2 years before retirement age*	:	*Resignation rate*

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

B. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

29. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

B. Post-employment benefits (continued)

The sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*		31 Desember 2023/*December 31, 2023*		
	Kenaikan tingkat bunga diskonto/ *Increase in discount rate 1%*	Penurunan tingkat bunga diskonto/ *Decrease in discount rate 1%*	Kenaikan tingkat bunga diskonto/ *Increase in discount rate 1%*	Penurunan tingkat bunga diskonto/ *Decrease in discount rate 1%*	
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	(12.162.629)	12.795.674	(7.612.414)	8.205.032	*Effect on defined benefit obligation*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*		31 Desember 2023/*December 31, 2023*		
	Kenaikan tingkat gaji/ *Increase in salary rate 1%*	Penurunan tingkat gaji/ *Decrease in salary rate 1%*	Kenaikan tingkat gaji/ *Increase in salary rate 1%*	Penurunan tingkat gaji/ *Decrease in salary rate 1%*	
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	14.346.980	(13.689.537)	8.994.590	(8.394.752)	*Effect on defined benefit obligation*

Durasi rata-rata liabilitas manfaat pasca kerja diakhir periode pelaporan Kelompok Usaha berkisar antara 3,57 - 19,02 tahun.

The average duration of the Group's defined benefits plan obligation at the end of the reporting period are ranging from 3.57 - 19.02 years.

Jadwal jatuh tempo dari program imbalan pasca kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The undiscounted maturity profile of post-employment benefit obligation as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Des. 2024/ *Des. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Dalam 1 tahun	10.295.915	20.830.976	*Within 1 year*
2 - 5 tahun	89.395.952	58.677.214	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.008.422.150	924.276.003	*More than 5 years*

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that the above amounts are adequate to cover the requirements at reporting dates.

30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING SELAIN RUPIAH

30. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN RUPIAH

Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing selain Rupiah sebagai berikut:

The Group has significant monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah as follows:

		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	
Aset						*Assets*
Kas dan setara kas	US$	166.039.818	2.683.535.537	193.298.117	2.979.883.775	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	US$	204.166.953	3.299.746.300	192.885.235	2.973.518.784	*Third parties*
Total aset			5.983.281.837		5.953.402.559	*Total assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Hutang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	US$	395.278.665	6.388.493.791	467.061.882	7.200.225.978	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	US$	8.991.638	145.322.861	9.759.210	150.447.977	*Accrued expenses*
Hutang bank jangka panjang	US$	-	-	9.720.977	149.858.574	*Long-term bank loans*
Total liabilitas			6.533.816.652		7.500.532.529	*Total liabilities*
Liabilitas neto			**(550.534.815)**		**(1.547.129.970)**	***Net Liabilities***

Perusahaan memiliki kontrak *forward* untuk lindung nilai yang disajikan pada Catatan 34a.

The Company has outstanding forward contracts as disclosed in Note 34a.

31. LABA PER SAHAM

31. EARNINGS PER SHARE

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham:

The computation of profit per share is based on the following data:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.225.117.975	2.780.349.511	*Profit for the year attributable to equity holders of the parent entity*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa - dasar	19.738.498.778	19.737.169.600	*Weighted average number of common shares - basic*
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)			*Earnings per share (in full Rupiah)*
Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			*Attributable to the equity holders of the parent entity*
Dasar	112,73	140,87	*Basic*

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dan diringkas sebagai berikut ini:

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company and its Subsidiaries, in their regular conduct of business, have engaged in transactions with related parties, and summarized as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*	Total transaksi/ *Total transactions*	Saldo/ *Balances*
Transaksi dengan entitas di bawah pengendalian yang sama/ ***Transactions with entities under common control***			
PT Komersial Logistik Nusantara	Sewa kantor/ *Office rent*	Rp24.000 di/*in* 2024 (2023: Rp12.000)	-
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan/*net profit for the year*			0,0%
PT AKR Land Development dan Entitas Anak/ *Subsidiaries*	*Service charge* kepada Perusahaan dan Entitas Anak/ *Service charge to the Company and Subsidiaries*	Rp6.097.978 di/in 2024 (2023: Rp5.453.356)	-
Persentase terhadap beban usaha/*Percentage to operating expenses*			0,6%
	Penjualan bahan bakar minyak (BBM)/*Petroleum sales*	Rp485.017 di/*in* 2024 (2023: Rp313.356) (Catatan/*Note* 24)	Rp106.000 pada tanggal 31 Des. 2024/*as of Dec. 31, 2024* (Catatan/*Note* 5a*)*
Persentase terhadap penjualan/*Percentage to sales*			0,0%
	Pendapatan transportasi/ *Transportation revenue*	Rp8.800 di/*in* 2024 (2023: Rp4.800) (Catatan/*Note* 24)	Rp1.616 pada tanggal 31 Des. 2024/*as of Dec. 31, 2024* (Catatan/*Note* 5a*)*
Persentase terhadap pendapatan/*Percentage to revenues*			0,0%
	Jual beli tanah/ *Sale and purchase of land*	-	Rp54.828.597 pada tanggal 31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024* (31 Des. 2023/*Dec. 31, 2023:* Rp54.828.597)
Persentase terhadap liabilitas/*Percentage to liability*			0,5%
	Perolehan aset tetap/ *Acquisition of PPE*	Rp44.987.200 di/*in* 2024	-
Persentase terhadap aset/*Percentage to assets*			0,14%

Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 061/L-AKR-CS/2024 pada tanggal 19 Juni 2024 terkait pembelian ruang kantor dari PT AKR Land Development ke OJK dan BEI. Transaksi telah dilakukan di bulan September 2024 dengan nilai wajar sesuai dengan keterangan dalam surat keterbukaan informasi.

The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 061/L-AKR-CS/2024 dated June 19, 2024 to OJK and IDX related to the office purchase to PT AKR Land Development. The transaction has been executed in September 2024 at fair value as stated in the disclosure of information.

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dan diringkas sebagai berikut ini: (lanjutan)

32. *NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

The Company and its Subsidiaries, in their regular conduct of business, have engaged in transactions with related parties, and summarized as follows: (continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*	Total transaksi/ *Total transactions*	Saldo/ *Balances*
Transaksi dengan entitas asosiasi/ *Transactions with an associate*			
PT Berlian Manyar Sejahtera	Penjualan bahan bakar minyak (BBM)/*Petroleum sales*	Rp1.169.559 di/*in* 2024 (2023: Rp1.301.511) (Catatan/*Note* 24)	Rp835.861 pada tanggal 31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024* (31 Des. 2023/*Dec. 31, 2023*: Rp132.880) (Catatan/*Note* 5a)
Persentase terhadap penjualan/*Percentage to sales*			0,0%
	Management fee kepada Perusahaan dan Entitas Anak/ *Management fee to the Company and Subsidiaries*	Rp3.578.736 di/*in* 2024 (2023: Rp1.573.310)	-
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan/*Percentage to net profit for the year*			0,2%
	Sewa tanah/ *Land lease*	Rp2.844.703 di/*in* 2024 (2023: Rp2.142.823)	Rp2.133.528 pada tanggal 31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024* (31 Des. 2023/*Dec. 31, 2023*: Rp2.857.098)
Persentase terhadap aset/*Percentage to assets*			0,0%

Semua transaksi-transaksi di atas secara individu tidak melebihi 1% dari jumlah konsolidasian.

All the above transactions individually are less than 1% of total consolidated amounts.

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati antara para pihak.

The transactions with the related parties are made at terms and conditions as agreed among the parties.

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang dari pihak berelasi.

Management believes that no allowance for impairment losses on related party receivables is required to cover possible losses on uncollectible accounts.

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. *NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Kompensasi manajemen kunci

Key management compensation

Manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Rincian atas kompensasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Key management includes the Company's Boards of Commissioners and Directors. The details of compensation provided are as follows:

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Imbalan jangka pendek	24.366.897	21.074.204	*Short-term benefits*

Direksi / *Board of Directors*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Imbalan jangka pendek	107.379.782	97.898.811	*Short-term benefits*
Imbalan pasca kerja	2.326.944	2.652.036	*Post-employment benefits*
Total	**109.706.726**	**100.550.847**	***Total***

33. INFORMASI SEGMEN

33. *SEGMENT INFORMATION*

Aktivitas usaha Perusahaan dan Entitas Anak dibagi atas empat (4) segmen operasi utama dan melayani pasar domestik dan internasional.

The Company's and Subsidiaries' businesses are divided into four (4) main operating segments and serve the local and international market.

Segmen operasi adalah sebagai berikut:

The operating segments are as follows:

- Perdagangan dan distribusi

  Segmen ini mendistribusikan produk BBM dan beragam jenis bahan-bahan kimia dasar seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*.

- *Trading and distribution*

  This segment distributes petroleum products and various kinds of basic chemicals such as caustic soda, sodium sulphate, PVC resin and soda ash.

- Jasa logistik

  Segmen ini menyediakan beragam jasa logistik seperti penyewaan tangki penyimpanan dan gudang, jasa pengepakan, bongkar muat dan jasa transportasi darat dan laut, terutama untuk produk-produk kimia cair dan padat di Indonesia serta produk BBM di Indonesia.

- *Logistics services*

  This segment provides various kinds of logistics services such as rental of storage tanks and warehouses, bagging, port handling and land and sea transportation services mainly for liquid and solid chemical and petroleum products in Indonesia.

- Pabrikan

  Segmen ini memproduksi bahan perekat oleh Aruki.

- *Manufacturing*

  This segment produces adhesive materials by Aruki.

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Segmen operasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Kawasan industri dan jasa utilitas lainnya yang terkait

  Segmen ini merupakan segmen Kelompok Usaha di bawah BKMS, entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung lewat UEPN. Kawasan industri ini adalah bagian dari proyek JIIPE (Catatan 13) yang dikembangkan antara BKMS dan BJTI, entitas anak dari Pelindo. Segmen ini terdiri dari penjualan dan penyewaan tanah kawasan industri, penjualan listrik dan jasa terkait lainnya kepada *tenants* kawasan tersebut.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha:

33. SEGMENT INFORMATION (continued)

The operating segments are as follows: (continued)

- *Industrial estate and related utility services*

  This segment of the Group is under BKMS, an indirect subsidiary of the Company through UEPN. The industrial estate is part of JIIPE project (Note 13) developed together by BKMS and BJTI, a subsidiary of Pelindo. The segment comprises of sales and lease of industrial estate land, sales of electricity and other related services to tenants of the estate.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments:

	31 Desember 2024/*December 31, 2024* dan/*and* tahun yang berakhir tanggal tersebut/*the year then ended*								
	Perdagangan dan distribusi/ ***Trading and distribution***	**Pabrikan/** ***Manufacturing***	**Logistik/** ***Logistics***	**Kawasan industri/** ***Industrial estate***	**Lainnya/** ***Others***	**Total/** ***Total***	**Penyesuaian/ Eliminasi/** ***Adjustments/ Eliminations***	**Neto/** ***Net***	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	35.532.248.951	651.720.510	1.077.748.046	1.195.408.537	-	38.457.126.044	-	38.457.126.044	*Revenue from contract with customers*
Pendapatan sewa	-	-	87.258.660	185.108.594	-	272.367.254	-	272.367.254	*Rental income*
Pendapatan antar segmen	293.723.964	-	446.085.669	-	-	739.809.633	(739.809.633)	-	*Inter-segment sales*
	35.825.972.915	**651.720.510**	**1.611.092.375**	**1.380.517.131**	**-**	**39.469.302.931**	**(739.809.633)**	**38.729.493.298**	
Penyusutan	172.832.766	7.186.451	212.475.176	22.603.261	-	415.097.654	1.245.775	416.343.429	*Depreciation*
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	46.467.083		-	46.467.083	-	46.467.083	*Share in profit of associates*
Penghasilan keuangan - neto	285.415.426	4.657.621	9.700.267	94.394.444	-	394.167.758	(95.283.661)	298.884.097	*Finance income - net*
Beban keuangan	(98.128.056)	(16.248)	(23.699.859)	(28.660.269)	(2.513.219)	(153.017.651)	68.108.540	(84.909.111)	*Finance costs*
Laba (rugi) segmen	2.231.274.772	154.462.683	286.730.148	524.958.053	(2.610.180)	3.194.815.476	(355.908.325)	2.838.907.151	*Segment profit (loss)*
Aset segmen	11.705.359.539	377.797.547	3.658.626.343	12.798.290.626	42.653.746	28.582.727.801	4.525.956.567	33.108.684.368	*Segment assets*
Liabilitas segmen	11.004.246.246	43.667.813	45.392.084	7.357.071.127	40.403.652	18.490.780.922	(6.089.028)	18.484.691.894	*Segment liabilities*
Penambahan aset tetap	573.336.690	1.599.207	482.080.884	208.537.434	-	1.265.554.215	-	1.265.554.215	*Additions to property, plant and equipment*

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha: (lanjutan)

33. SEGMENT INFORMATION (continued)

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments: (continued)

31 Desember 2023/De*sember 31, 2023* dan/*and* tahun yang berakhir tanggal tersebut/*the year then ended*

	Perdagangan dan distribusi/ *Trading and distribution*	Pabrikan/ *Manufacturing*	Logistik/ *Logistics*	Kawasan industri/ *Industrial estate*	Lainnya/ *Others*	Total/ *Total*	Penyesuaian/ Eliminasi/ *Adjustments/ Eliminations*	Neto/ *Net*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	38.212.629.240	557.800.532	897.989.772	2.149.006.086	-	41.817.425.630	-	41.817.425.630	*Revenue from contract with customers*
Pendapatan sewa	-	-	95.859.850	173.666.956	-	269.526.806	-	269.526.806	*Rental income*
Pendapatan antar segmen	375.800.633	-	429.266.117	-	-	805.066.750	(805.066.750)	-	*Inter-segment sales*
	38.588.429.873	**557.800.532**	**1.423.115.739**	**2.322.673.042**	**-**	**42.892.019.186**	**(805.066.750)**	**42.086.952.436**	
Penyusutan	176.322.156	7.273.287	191.148.793	16.029.560	-	390.773.796	1.250.850	392.024.646	*Depreciation*
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	34.534.891	-	-	34.534.891	-	34.534.891	*Share in profit of associates*
Penghasilan keuangan - neto	388.352.789	8.122.442	5.874.887	4.426.877	-	406.776.995	(245.884.855)	160.892.140	*Finance income - net*
Beban keuangan	(131.345.434)	(102.516)	(38.085.783)	(10.543.230)	(2.476.205)	(182.553.168)	114.063.932	(68.489.236)	*Finance costs*
Laba (rugi) segmen	2.836.890.865	113.763.934	261.511.652	886.398.953	(88.559.915)	4.010.005.489	(322.533.553)	3.687.471.936	*Segment profit (loss)*
Aset segmen	10.363.737.275	354.488.646	4.811.437.147	10.228.795.296	42.410.615	25.800.868.979	4.495.702.827	30.296.571.806	*Segment assets*
Liabilitas segmen	10.145.833.540	42.045.614	347.118.692	5.898.148.497	40.276.028	16.473.422.371	(219.808.078)	16.253.614.293	*Segment liabilities*
Penambahan aset tetap	224.696.108	8.058.222	232.732.839	467.997.352	-	933.484.521	-	933.484.521	*Additions to property, plant and equipment*

Beberapa akun tertentu tidak dialokasikan ke segmen individual karena akun-akun tersebut dikelola secara kelompok di mana rekonsiliasinya disajikan di bawah:

Certain accounts are not allocated to individual segments as those accounts are managed on a group basis which reconciliations are shown belows:

Rekonsiliasi atas: / *Reconciliation of:*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended Desember 31,*

	2024	2023	
Laba segmen	3.194.815.476	4.010.005.489	*Segment profit*
Eliminasi antar segmen	(23.629.008)	(111.968.353)	*Inter-segment eliminations*
Beban penjualan	(34.120.243)	(32.294.062)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(533.769.430)	(481.085.734)	*General and administratives expenses*
Penghasilan keuangan	273.810.521	384.163.085	*Finance income*
Beban keuangan	(74.355.128)	(120.278.963)	*Finance costs*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	1.562.004	4.000.636	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Lain-lain	34.592.959	34.929.838	*Others*
Laba Kelompok Usaha	**2.838.907.151**	**3.687.471.936**	***Group Segment Profit***

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Beberapa akun tertentu tidak dialokasikan ke segmen individual karena akun-akun tersebut dikelola secara kelompok di mana rekonsiliasinya disajikan di bawah: (lanjutan)

33. SEGMENT INFORMATION (continued)

Certain accounts are not allocated to individual segments as those accounts are managed on a group basis which reconciliations are shown belows: (continued)

	31 Des 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Aset segmen	28.582.727.801	25.800.868.979	*Segment assets*
Eliminasi antar segmen	(1.328.271.564)	(2.074.292.145)	*Inter-segment eliminations*
Kas dan setara kas	4.225.823.761	5.400.359.611	*Cash and cash equivalents*
Aset lain-lain	808.126.273	372.855.646	*Other assets*
Aset tetap - neto	794.552.081	738.373.490	*Property, plant and equipment - net*
Piutang lain-lain	25.726.016	58.406.225	*Other receivables*
Aset Operasi Kelompok Usaha	**33.108.684.368**	**30.296.571.806**	***Group Operating Assets***

	31 Des 2024/ *Dec. 31, 2024*	**31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023***	
Liabilitas segmen	18.465.081.196	16.473.422.371	*Segment liabilities*
Eliminasi antar segmen	(599.010.701)	(1.026.664.315)	*Inter-segment eliminations*
Hutang lain-lain dan biaya masih harus dibayar	372.039.492	447.803.117	*Other payables and accrued expenses*
Liabilitas imbalan pasca kerja	126.472.041	127.631.889	*Post-employment benefits liabilities*
Hutang pajak	94.410.140	175.896.226	*Taxes payable*
Liabilitas pajak tangguhan	25.699.726	18.691.068	*Deferred tax liabilities*
Hutang obligasi	-	36.833.937	*Bonds payables*
Liabilitas Operasi Kelompok Usaha	**18.484.691.894**	**16.253.614.293**	***Group Operating Liabilities***

Semua unit Kelompok Usaha, beroperasi di Indonesia.

All the business units in the Group, operate in Indonesia.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan

a. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki kontrak *forward* dari beberapa bank di bawah ini. Tujuan penandatanganan kontrak ini adalah untuk lindung nilai dari risiko fluktuasi mata uang Dolar AS terhadap Rupiah yang berasal dari pembayaran kepada pemasok. Semua kontrak tersebut memiliki periode jatuh tempo kurang dari tiga bulan. Jumlah bersih nilai wajar keseluruhan kontrak tersebut sebesar Rp3.337.087 disajikan pada akun piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan perubahan nilai wajar sebesar jumlah yang sama disajikan pada akun laba selisih kurs pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perusahaan tidak menerapkan akuntansi lindung nilai untuk kontrak *forward* tersebut.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY

The Company

a. As of December 31, 2024, the Company has outstanding forward contracts from several banks below. The purpose of entering those contracts is to hedge the US Dollar currency movement risk against Rupiah arising from the payments to its suppliers. All the contracts have a maturity date of less than three months period. The net total fair values of those contracts amounting to Rp3,337,087 is presented as other receivables in the consolidated statement of financial position on December 31, 2024 and the net changes in fair values at the same amount is presented as foreign exchange gain in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company's forward contracts are not accounted for under hedge accounting.

	Nilai nominal/ *Nominal value* (dalam Dolar AS/ *in US Dollar*)	**Nilai wajar/ *Fair value* (dalam Rupiah/ *in Rupiah*)**	
PT Bank Mizuho Indonesia	33.650.000	1.605.509	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	32.900.000	1.001.115	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	14.300.000	722.780	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.000.000	7.683	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Total	**82.850.000**	**3.337.087**	***Total***

b. Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT Asahimas Chemical (Asahimas) dimana Asahimas telah menunjuk Perusahaan sebagai penyalur untuk produk-produk kimia Asahimas di Indonesia. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperbaharui secara tahunan kecuali jika dihentikan oleh kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu.

Sehubungan dengan perjanjian di atas, Perusahaan diharuskan untuk menerbitkan bank garansi (*payment bonds*) kepada Asahimas sebesar Rp32.000.000. Bank garansi tersebut akan dipegang oleh Asahimas sampai dengan perjanjian tersebut dihentikan oleh kedua belah pihak. Bank garansi tersebut dikeluarkan oleh Mandiri (Catatan 34i).

b. The Company has a dealership agreement with PT Asahimas Chemical (Asahimas) whereby Asahimas has appointed the Company as the dealer of Asahimas chemical products in Indonesia. The agreement is valid for one-year period and is renewable on a yearly basis unless terminated by both parties with prior written notice.

In connection with the above agreement, the Company is required to issue a bank guarantee (payment bonds) to Asahimas amounting to Rp32,000,000. Such a bank guarantee will be held by Asahimas until the dealership agreement is terminated by both parties. The bank guarantee was provided by Mandiri (Note 34i).

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") di pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya dimana tangki-tangki penyimpanan milik Perusahaan berada. Masa sewa akan berakhir pada tahun 2025 hingga 2034. Saldo yang belum diamortisasi atas hak sewa tanah sebesar Rp69.979.287 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp61.269.140) |dicatat sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

d. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki *acceptance* dan *open L/C* sebesar US$156.671.758 dan *Payable Services* sebesar US$168.488.938 dan Rp1.987.902.019 dari beberapa bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan juga memiliki bank garansi sebesar Rp35.338.414 dari Mandiri.

e. Pada tanggal 23 Desember 2023, Perusahaan telah ditunjuk kembali oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ("BPH Migas") sebagai pendamping dari PT Pertamina (Persero) (PERTAMINA) untuk penyediaan dan pendistribusian minyak solar sebanyak 167.515 kiloliter di tahun 2024 yang mencakup wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa dan Kalimantan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BPH Migas No. 90/P3JBT/BPH Migas/KOM/2023.

Sehubungan dengan penunjukan di atas, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan pihak-pihak lain (operator) dari waktu ke waktu sejak bulan Desember 2009 untuk membuka SPBU di area yang dialokasikan ke Perusahaan berdasarkan surat penunjukan. Terdapat beberapa jenis perjanjian yang ditawarkan kepada pihak-pihak tersebut sehubungan dengan pengoperasian stasiun penyalur seperti jenis "*dealer owns dealer operates"* dan *"company owns dealer operates".* Pompa dispenser BBM untuk stasiun penyalur disediakan oleh Perusahaan dengan sistem pinjam tanpa biaya dan harus dikembalikan kepada Perusahaan pada akhir perjanjian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

c. The Company entered into several long-term land lease agreements with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") in Tanjung Priok and other port areas where the Company's storage tanks are located. The lease agreements will expire from 2025 to 2034. The balance of unamortized land lease rights of Rp69,979,287 as of December 31, 2024 (2023: Rp61,269,140) is recorded as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

d. As of December 31, 2024, the Company has acceptance and open L/C amounting to US$156,671,758 and Payable Services amounting to US$168,488,938 and Rp1,987,902,019 from several banks.

As of December 31, 2024, the Company also has an outstanding bank guarantee amounting to Rp35,338,414 from Mandiri.

e. On December 23, 2023, the Company has been reappointed by Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ("BPH Migas") as the partner of PT Pertamina (Persero) (PERTAMINA) in the supply and distribution of gas oil with a total of 167,515 kiloliters in 2024 which covers an area of Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Java and Kalimantan, based on the Decision Letters of the Chairman of BPH Migas No. 90/P3JBT/BPH Migas/KOM/2023.

In relation to the appointment above, the Company has entered into agreements with other parties (operators) from time to time since December 2009 to open SPBU in the area allocated to the Company based on the appointment letter. There are several types of arrangement offered to the parties in relation to the operations of the gas stations such as "dealer owns dealer operates" type and "company owns dealer operates" type. The oil pump dispenser for the gas station in all types of arrangement are supplied by the Company on loan basis at no cost and shall be returned to the Company at the end of the agreement.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian dengan operator dari SPBU berkisar antara 10 sampai 20 tahun dengan pembayaran kompensasi yang dihitung tergantung jumlah penjualan di masa yang akan datang, namun dapat dihentikan lebih awal tergantung dari kondisi tertentu, yang berhubungan dengan kepatuhan operator terhadap ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian untuk pengoperasian SPBU.

Perusahaan juga memiliki dan mengoperasikan SPBU yang dikenal dengan jenis "*company owns company operates*".

Perusahaan berhak menerima pembayaran penggantian subsidi dari harga jual dari Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jumlah penyaluran minyak solar yang diakui adalah sebesar Rp1.709.434.235 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp1.563.744.165), termasuk subsidi yang diklaim ke Kementerian Keuangan.

f. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah menandatangani kesepakatan kerja atas pekerjaan pembangunan fasilitas dermaga, fasilitas pelabuhan dan lainnya dengan kontraktor dan memiliki komitmen pengeluaran modal untuk aset tetap sekitar Rp151.344.517 (2023: Rp15.091.341).

g. Pada tanggal 26 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bersifat tanpa komitmen dari Standard Chartered Bank, cabang Indonesia dengan kombinasi *limit* dari dengan beberapa *sub-limit* dari *Import L/C*, *Import Loan Facility, Import Invoice Financing Facility*, dan *Export Invoice Financing Facility* dengan total *limit* US$50.000.000. Perjanjian ini telah diubah dari waktu ke waktu, terakhir pada tanggal 14 Februari 2023.

Perjanjian ini mensyaratkan Perusahaan untuk memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu. Perjanjian ini juga memuat klausul perpanjangan secara otomatis untuk basis periode setiap 12 bulan, kecuali diakhiri oleh Bank dari waktu ke waktu.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

The agreements with the operators of SPBU range from 10 to 20 years with a compensation computed dependent on the sales quantity in the future, and can be early terminated dependent on certain conditions, among others, related to the compliance of the operators to the provisions in the agreements in operating SPBUs.

The Company also owns and operates SPBU known as "company owns company operates" type.

The Company is entitled to receive the subsidized portion of the selling price from the Government based on the applicable ruling. Total distribution amounts of gas oil and gasoline recognized amounted Rp1,709,434,235 for the year ended December 31, 2024 (2023: Rp1,563,744,165), including the subsidy claimed to Ministry of Finance.

f. As of December 31, 2024, the Company has signed an agreement for constructions work of jetty, port and other facilities with contractors and has committed capital expenditure for property, plant and equipment approximately Rp151,344,517 (2023: Rp15,091,341).

g. On June 26, 2014, the Company obtained uncommitted non-cash credit facilities from Standard Chartered Bank Indonesia branch with a combined limit of various sub-limit in Import L/C facilities, Import Loan Facility, Import Invoice Financing Facility, and Export Invoice Financing Facility with total limit amounting to US$50,000,000. The Agreement has been amended from time to time, the latest of which is on February 14, 2023.

The Agreement also requires the Company to meet certain financial ratios. The agreement also contains an automatic renewal clause of a period of 12 months unless terminated by the Bank from time to time.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

h. Pada tahun 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa jaminan dengan dasar *uncommitted* dari JP Morgan Chase Bank N.A., Cabang Jakarta, dengan jumlah maksimum kredit adalah sebesar US$30.000.000, untuk fasilitas *L/C*, *Payable Financing* dan *Trust Receipt*. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2025.

i. Pada tanggal 11 November 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Mandiri, dimana Mandiri setuju untuk menyediakan tiga fasilitas kredit (termasuk fasilitas pinjaman berjangka yang disajikan pada Catatan 18) kepada Perusahaan. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian produk bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia, transaksi lindung nilai (*hedging*) dan keperluan tender proyek dan fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu satu tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian. Perjanjian ini telah diamendemen pada tanggal 9 Januari 2025. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 November 2025.

Fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:
i) Fasilitas pinjaman non-kas sebesar US$450.000.000, dengan beberapa *sub-limit* untuk fasilitas LC/SKBDN, *T/R* atas dasar *L/C*, *Deferred Payment,* dan *Standby L/C ("SBLC"),* yang tersedia sebagai *Global line* dapat digunakan oleh CPIT, anak usaha Perusahaan;
ii) Fasilitas Bank Garansi sebesar US$100.000.000;
iii) Fasilitas *hedging FX* sebesar US$50.000.000.

j. Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Permata yang mencakup:

i) Fasilitas *revolving* yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp200.000.000;
ii) Fasilitas transaksi valuta asing dengan *LER* sebesar US$20.000.000;
iii) Fasilitas kredit tanpa jaminan dengan dasar *uncommitted* berupa *Omnibus L/C* Impor, yang terdiri dari fasilitas *L/C* dan SKBDN, *CBN Discrepant*, Bank Garansi dan *Payable Services,* dengan total *limit* US$100.000.000, yang mana pada bulan September 2024 limit fasilitas *Payable Services* telah ditingkatkan menjadi US$300.000.000.

Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

h. In 2007, the Company obtained unsecured and uncommitted credit facilities from JP Morgan Chase Bank N.A., Jakarta Branch, with maximum facility amount US$30,000,000, for issuance of L/C, Payable Financing and Trust Receipt. These facilities have been extended until November 15, 2025.

i. On November 11, 2009, the Company signed loan agreements with Mandiri, whereby Mandiri agreed to provide three credit facilities (including the term loan facility as disclosed in Note 18) to the Company. These facilities are intended for purchase of petroleum and chemical products, hedging and tender projects and are available for one year from the signing date. This agreement has been amended on January 9, 2025. These facilities have been extended until November 9, 2025.

The facilities available are as follows:
i) Committed and revolving non-cash loan at US$450,000,000, with various sub-limit for LC/SKBDN, T/R facility base on L/C, Deferred Payment, and Standby L/C ("SBLC") facility, which available as Global line for CPIT, the Company's subsidiary;
ii) Bank Guarantee facility at US$100,000,000;
iii) Hedging FX facility at US$50,000,000.

j. The Company obtained loan facilities from Permata comprising of:

i) Uncommitted revolving loan facility amounting to Rp200,000,000;
ii) Foreign exchange facility with LER amounting to US$20,000,000;
iii) Unsecured and uncommitted credit facilities of Omnibus L/C Import consisting of L/C and SKBDN, CBN Discrepant. Bank Guarantee and Payable Services Facility, with a total limit US$100,000,000, which on September 2024, the Payable Services facility has been increased to US$300,000,000.

These facilities are available until October 7, 2025.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

k. Pada tahun 2005 dan 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan BCA dimana BCA setuju untuk memberikan beberapa fasilitas kepada Perusahaan. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja, mengimpor BBM dan bahan kimia, transaksi lindung nilai (*hedging*) dan untuk keperluan tender.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2025.

l. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan BNI. Pada 11 Agustus 2023, Perusahaan dan BNI melakukan perubahan atas Perjanjian Kredit, dimana BNI setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berupa:

i) Fasilitas non-kas sebesar US$200.000.000 dengan berbagai fasilitas untuk *L/C,* SKBDN, Bank Garansi, *Trust Receipt*;

ii) Fasilitas *Limit* Negosiasi Wesel Ekspor ("LNWE") sebesar US$25.000.000; dan
iii) Fasilitas *Treasury Line* sebesar US$5.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

k. In 2005 and 2006, the Company entered into loan agreements with BCA whereby BCA agreed to provide several credit facilities to the Company. These facilities are used for working capital, petroleum and chemical import transactions, hedging and for participation in tender offer.

These Agreements also require the Company, among others, to maintain several financial ratios. The credit agreement has been extended until September 30, 2025.

l. On August 15, 2022, the Company signed several loan agreements with BNI. On August 11, 2023, the Company signed amendment of Loan Agreement with BNI, where BNI agreed to provide the following credit facilities:

i) Non-cash loan facilities at US$200,000,000 with various facilities for L/C, SKBDN, Bank Guarantee and Trust Receipt;
ii) Limit Negosiasi Wesel Export ("LNWE") facility at US$25,000,000; and
iii) Treasury Line Facility at US$5,000,000.

These loan agreements also require the Company, among others, to maintain several financial ratios. These loan agreements are valid until August 14, 2025.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

m. Pada tanggal 15 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mizuho Indonesia (Mizuho) dan tanggal 30 April 2024 Perusahaan melakukan tandatangan addendum Perjanjian terkait dengan penambahan *limit* untuk fasilitas *Import L/C* dari US$50.000.000 menjadi US$100.000.000 sehingga fasilitas kredit menjadi:

i) Fasilitas *Import L/C/Acceptance/Trust Receipt/Export L/C*, Bank Garansi, *Revolving Loan* sebesar US$100.000.000;

ii) Fasilitas *Forex Line* sebesar US$10.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.

n. Pada tanggal 28 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Danamon, dimana Danamon setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian produk bahan bakar minyak ("BBM") dan bahan kimia, transaksi lindung nilai (*hedging*), keperluan tender proyek dan tersedia untuk jangka waktu satu tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian.

Perjanjian fasilitas pinjaman telah diubah dari waktu ke waktu dimana perubahan terakhir pada bulan September 2024 yang memberikan fasilitas sebagai berikut:

i) Fasilitas yang bersifat tanpa komitmen (*uncommitted*) dan berulang (*revolving*) sebesar US$120.000.000 dengan beberapa *sub-limit* untuk LC/SKBDN, *Trust Receipt* ("*T/R*"), *Open Account Financing* ("*OAF*"), Bank Garansi/*Standby Letter of Credit* ("*SBLC*") dan *Trade Supplier Financing* ("*TSF*");

ii) Fasilitas transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan *Pre-Settlement Exposure* ("*PSE*") sebesar US$10.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Mei 2025.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

m. On December 15, 2022, the Company signed loan agreements with PT Bank Mizuho Indonesia (Mizuho) and on April 30, 2024 the Company signed an addendum to the Agreement relating to the increase limit for the Import L/C facility from US$50,000,000 to US$100,000,000, whereby the credit facilitiy becomes:

i) Import L/C/Acceptance/ Trust Receipt/Export L/C, Bank Guarantee, Revolving Loan Facilities at US$100,000,000;

ii) Forex Line facility at US$10,000,000.

These loan agreements also require the Company, among others, to maintain several financial ratios. These loan agreements are valid until December 15, 2025.

n. On March 28, 2014, the Company signed several loan agreements with Danamon, whereby Danamon agreed to provide credit facilities to the Company. These facilities are intended for purchase of petroleum and chemical products, hedging, tender projects and available for a year from the signing date.

The facility agreements have been amended from time to time whereby the latest amendments were made in September 2024 providing the following credit lines:

i) Uncommitted and revolving loan at US$120,000,000 with various sub-limit for LC/SKBDN, Trust Receipt ("T/R"), Open Account Financing ("OAF"), Bank Guarantee/Standby Letter of Credit ("SBLC") and Trade Supplier Financing ("TSF");

ii) Hedging FX facility with Pre-Settlement Exposure ("PSE") at US$10,000,000.

The agreement also requires the Company to maintain several financial ratios. These facilities have been extended until May 28, 2025.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

o. Melalui Surat Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI No. 066/L-AKR-CS/2023 tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan melaporkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 telah menandatangani *Letter of Intent* dengan Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. ("Hebang"), kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan perusahaan patungan di JIIPE, dengan kepemilikan saham Hebang dan Perusahaan/affiliasi yang ditunjuk, masing-masing sebesar 90% dan 10%. *Letter of Intent* ditandatangani bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat antara Hebang dan BKMS atas lahan di JIIPE sekitar 67 hektar untuk pembangunan pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia dengan perkiraan total nilai investasi sebesar US$800 juta.

p. Pada tanggal 20 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB"), dimana CIMB setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berupa:

i) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Payable*, yang terdiri dari SKBDN/*LC* dan *Trust Receipt* dengan total *limit* sebesar US$75.000.000;

ii) Fasilitas *Forex Line* dengan *Pre Settlement limit* sebesar US$5.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.

q. Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), dimana HSBC setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berupa:

i) Fasilitas SKBDN/*LC*, *Trust Receipt, Import Loan* dengan total limit sebesar US$32.000.000;

ii) Fasilitas *Forex Line* dengan LER sebesar US$500.000

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

o. Through its Disclosure of Information Letter to OJK and IDX No. 066/L-AKR-CS/2023 dated August 31, 2023, the Company reported that on August 28, 2023, it has signed Letter of Intent with Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. ("Hebang"), which both parties, among others, agreed to establish a joint venture in JIIPE, with ownership interest of Hebang and the Company/any affiliates designated, of 90% and 10%, respectively. The Letter of Intent is signed parallelly with the sign-off a Conditional Sales and Purchase Binding Agreement between Hebang and BKMS of industrial land in JIIPE approximate 67 hectares for a chemical related plant with a total estimated investment value of US$800 million.

p. On June 20, 2024, the Company signed loan agreements with PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB"), whereby CIMB agreed to provide credit facilities:

i) Special Transaction of Trade Account Payable, consisting of SKBDN/LC and Trust Receipt Facilities with total limit at US$75,000,000;

ii) Forex Line facility with Pre Settlement limit at US$5,000,000.

The agreement also requires the Company to maintain several financial ratios. These facilities have been extended until June 20, 2026.

q. On October 2024, the Company signed loan agreements with PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), whereby HSBC agreed to provide credit facilities:

i) SKBDN/LC, Trust Receipt & Import Loan Facilities with total limit at US$32,000,000;

ii) Forex Line facility with LER limit at US$500,000.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak

Aruki

a. Aruki memiliki perjanjian dengan Mitsui Chemicals Inc. ("MCI"), Jepang, dimana MCI memberikan Aruki hak untuk menggunakan pengetahuan teknis dalam memproduksi kimia perekat dan logo/merek dagang di Indonesia tanpa dibebani biaya. Perjanjian ini berlaku tanpa waktu terbatas selama Perusahaan tetap merupakan pemegang saham pengendali atas Aruki.

b. Pada tanggal 4 Mei 2018, Aruki menandatangani perjanjian kredit dengan BCA, dimana BCA setuju untuk menyediakan fasilitas kredit non-kas dengan jumlah tidak melebihi ekuivalen US$3.000.000 dengan beberapa *sub-limit* untuk *Usance L/C*, *Sight L/C* dan SKBDN. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku, suku cadang/mesin. Pada bulan Agustus 2020, fasilitas kredit diperpanjang dengan tambahan fasilitas *forex line* sebesar US$2.000.000 untuk kontrak *forward* sampai dengan 2 bulan. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 4 Mei 2025.

   Perjanjian ini mensyaratkan Aruki untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

c. Aruki memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan total *limit* US$2.000.000 yang mencakup (i) fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen, (ii) fasilitas surat kredit berdokumen berulang dan (iii) fasilitas *forex line*. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 September 2025.

   Perjanjian pinjaman mengharuskan pemenuhan beberapa persyaratan oleh Aruki, antara lain, untuk mempertahankan sejumlah rasio keuangan, tidak mengubah komposisi pemegang saham dan tidak menjaminkan atau menjual sahamnya.

JTT

JTT mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan Pelindo, termasuk sewa jalur pipa bawah laut sampai dengan tahun 2034 di Tanjung Priok, Jakarta. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi adalah Rp67.820.275 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp71.571.976) disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries

Aruki

a. Aruki has agreement with Mitsui Chemicals Inc. ("MCI"), Japan, whereby MCI granted Aruki to use the technical know how to produce its adhesive chemical products and to use the logo/trademark in Indonesia free of charge. The agreement shall remain in force for an unlimited period as long as the Company remains as the controlling shareholder of Aruki.

b. On May 4, 2018, Aruki signed a credit agreement with BCA, whereby BCA agreed to provide of non-cash credit facilities with amount not exceeding equivalent US$3,000,000 with various sub-limit of Usance L/C, Sight L/C and SKBDN. These facilities are intended for the purchase of raw materials, spare parts/machines. In August 2020, there is an additional facility - forex line amounting to US$2,000,000 with contract forward up to 2 months. Those facilities are available until May 4, 2025.

   The agreement requires Aruki to maintain certain financial ratios.

c. Aruki obtained loan facilities from PT Bank Mizuho Indonesia with total limit amounting to US$2,000,000 with comprising of (i) uncommitted revolving loan facility, (ii) revolving letter of credit facility, and (iii) forex line facility. This facility has been extended until September 9, 2025.

   The loan agreement contains several loan covenants whereby it requires Aruki, among others, to maintain certain financial ratios, not to change the shareholders' composition and not to pledge or sell the shares.

JTT

JTT has a long-term land lease agreement with Pelindo, including lease of underwater ways for pipelines until 2034 in Tanjung Priok, Jakarta. The balance of unamortized land lease rights of Rp67,820,275 as of December 31, 2024 (2023: Rp71,571,976) is recorded as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

BKMS

a. Sehubungan dengan konstruksi proyek JIIPE sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 13 dan catatan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan, pada tanggal 31 Desember 2024, BKMS telah menandatangani/meng-*award* kontrak dengan/ kepada berbagai kontraktor dan penyedia jasa dengan rincian sebagai berikut:

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

BKMS

a. In relation to the construction of JIIPE project as disclosed in Note 13 and other relevant notes to the consolidated financial statements, as of December 31, 2024, BKMS has signed/awarded contracts with/to various contractors and vendors as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*			31 Desember 2023/ *December 31, 2023*			
	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pembayaran Uang Muka/ *Advance Payment*	Nilai Komitmen/ *Commitment Value*	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pembayaran Uang Muka/ *Advance Payment*	Nilai Komitmen/ *Commitment Value*	
Rupiah	436.652.196	215.476.739	221.175.457	228.948.093	77.250.955	151.697.138	*Rupiah*

Uang muka yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun Uang Muka atau Persediaan Tanah Kawasan Industri dalam dan untuk Pengembangan atau Aset Tetap, tergantung dari sifat pembayaran yang dilakukan, dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal pelaporan. Jenis pekerjaan yang dicakup antara lain adalah persiapan pembangunan jalan akses sementara, pekerjaan pelindungan pantai di beberapa area dari kawasan industri, pekerjaan reklamasi tanah, pasokan pasir, instalasi pipa angkut dan lainnya.

The downpayment made is recorded as part of Advanced Payments or Industrial Estate Land Inventory under and for Development or Property, Plant, and Equipment, depending on the nature of payment, in the consolidated statement of financial position at the reporting date. The type of work covered in the contracts, among others, preparing temporary access road, seashore protection works in certain parts of industrial estate location, land reclamation work, supply of sand, pipe line installation, etc.

b. BKMS juga menandatangani perjanjian dengan beberapa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Kabupaten Gresik untuk penyediaan jasa pembuatan akta jual beli dan pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB").

b. BKMS also entered into agreements with several Notaries and Land Deed Officers ("PPAT") resided at Gresik Regency in providing services for certification of Notarial of Sale and Purchase Agreements and Certificates of Building Rights Title ("HGB").

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

BKMS (lanjutan)

c. BKMS dan PT Berkah Tiga Usaha ("BTU") memiliki permasalahan hukum terkait perjanjian pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di JIIPE, Gresik tanggal 19 Oktober 2015, yang kemudian diubah pada tanggal 1 Desember 2015, di mana atas kerja sama tersebut, BTU telah memberikan bank garansi (jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan) kepada BKMS sebesar Rp30.000.000 dan Rp7.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Bukopin (saat ini bernama PT Bank KB Bukopin Syariah ("Bukopin")). Setelah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap atas permasalahan hukum antara BKMS dan BTU, Bukopin telah mencairkan bank garansi (jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan) sebesar Rp37.500.000 kepada BKMS pada tanggal 11 Juli 2024.

d. Pada tanggal 8 Desember 2020, BKMS memperoleh fasilitas pembiayaan IMBT dari Permata dengan jumlah maksimum sebesar Rp162.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 tahun untuk pembiayaan kembali pinjaman sindikasi yang ada.

Transaksi pembiayaan kembali ini mengadopsi prinsip Akuntansi Syariah "Ijarah" sesuai dengan PSAK 107 dimana BKMS seolah-olah mengalihkan 6-tahun-manfaat PLTMG sebagai aset jaminan ("objek ijarah untuk sewa") kepada Permata, dan kemudian BKMS akan menyewa kembali PLTMG tersebut selama masa berlaku fasilitas. Pada akhir masa pinjaman, Permata harus mengalihkan kembali objek sewa ke BKMS dengan menggunakan akad hibah tanpa biaya. Perbedaan antara nilai manfaat 6-tahun dan nilai fasilitas pinjaman yang diterima diakui sebagai laba atas pengalihan objek "ijarah" untuk sewa sebesar Rp61.312.010. Pembayaran cicilan dari fasilitas pinjaman harus dicatat sebagai biaya sewa.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan proyek PLTMG seluas 1,6 hektar berikut bangunan infrastruktur, mesin-mesin serta peralatan yang melekat di atasnya yang terletak di Gresik, Jawa Timur, dan seluruh hasil klaim atas asuransi sehubungan dengan proyek PLTMG.

BKMS juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

BKMS (continued)

c. BKMS and PT Berkah Tiga Usaha ("BTU") had legal issues related to the sand transportation and soil normalization work agreement at JIIPE, Gresik dated October 19, 2015, which was later amended on December 1, 2015, where for the cooperation, BTU had provided a bank guarantee (down payment guarantee and implementation guarantee) to BKMS amounting to Rp30,000,000 and Rp7,500,000 issued by PT Bank Syariah Bukopin (currently named PT Bank KB Bukopin Syariah ("Bukopin")). After obtaining a final and binding decision on the legal issues between BKMS and BTU, Bukopin has disbursed the bank guarantee (down payment guarantee and implementation guarantee) amounting to Rp37,500,000 to BKMS on July 11, 2024.

d. On December 8, 2020, BKMS obtained an IMBT financing facility from Permata with maximum amount of Rp162,000,000 with credit term of 6 years to refinance its existing syndication loan.

This refinancing transaction adopted the Islamic Shariah Accounting "Ijarah" principle in accordance with PSAK 107 whereby BKMS as if transferred the 6-year-benefits of its PLTMG as the collateralized asset ("ijarah object for lease") to Permata, which then BKMS lease back the PLTMG over the tenor of the facility. At the end of the tenor, Permata shall transfer back the lease object to BKMS using the "akad hibah" at no cost. The difference between the cost of the 6-year-benefits and the facility amount received is recognized as gain on the transferred of a "ijarah" object for lease amounting to Rp61,312,010. The payment of the installment of the loan facility shall be recorded as lease expense.

This loan is secured by the land and building of the PLTMG project covering an area of 1.6 hectares along with the building infrastructure, machineries and equipment attached to it which is located in Gresik, East Java, and all of the insurance claims related to the PLTMG project.

BKMS also required to maintain certain financial ratios.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

BKMS (lanjutan)

e. Pada tanggal 31 Desember 2024, BKMS memiliki kontrak *forward* dan fasilitas Bank Permata dengan nilai nominal sebesar US$32.452.000 dan nilai wajar sebesar Rp6.690.964 disajikan pada akun hutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Pada bulan September 2023, BKMS dan *anchor tenant* menandatangani Perjanjian Serah Terima untuk sistem kabel listrik dan infrastrukturnya, dimana BKMS membeli aset tersebut dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp293 juta. Kedua belah pihak setuju untuk melanjutkannya dengan Perjanjian Penjualan/Penyerahan secara formal dan dengan perjanjian sewa tanah tambahan terkait dengan infrastruktur tersebut. Aset terkait telah dicatat sebagai bagian dari Aset Tetap pada tahun 2023 (Catatan 10).

TNU

a. TNU, entitas anak Andahanesa, mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan BJTI sampai dengan tahun 2034 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi adalah Rp14.973.117 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp14.136.272), yang disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

b. Pada tahun 2018, TNU, entitas anak tidak langsung Perusahaan, menerima klaim dari pihak ketiga dalam hubungannya dengan pembangunan asetnya. Klaim ini sedang dalam proses penyelesaian oleh kedua belah pihak melalui proses mediasi pada tanggal pelaporan.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

BKMS (continued)

e. As of December 31, 2024, BKMS has outstanding forward contracts from Bank Permata with a notional value of US$32,452,000 and with the fair value of Rp6,690,964 is presented as other payable in the consolidated statement of financial position.

f. On September 2023, BKMS and an anchor tenant have signed a Handover Agreement for electrical cabling system and its infrastructures, whereby BKMS purchased such asset at the agreed amount of Rp293 million. Both parties have agreed to proceed with a formal Sales/Transfer Agreement and with the additional land lease agreement related to the infrastructures. The related assets have been recorded as part of Property, Plant and Equipment in 2023 (Note 10).

TNU

a. TNU, a subsidiary of Andahanesa, has a long-term land lease agreement with BJTI until 2034 in Port of Tanjung Perak, Surabaya. The balance of unamortized land lease rights of Rp14,973,117 as of December 31, 2024 (2023: Rp14,136,272), which is presented as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

b. In 2018, TNU, an indirect subsidiary of the Company, received a claim from a third party pertinent to its asset construction. The claim is in the process to be settled by the parties through a mediation process at reporting date.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

Anugrah

Pada bulan Juli 2011, dan beserta perubahan berikutnya, Anugrah menandatangani perjanjian investasi modal dengan dua pemegang saham individual PT Jabal Nor ("Jabal Nor") untuk mengakuisisi keseluruhan 59,40% kepemilikan saham di Jabal Nor sebesar Rp176.000.000 yang akan dicapai dalam beberapa tahapan sesuai dengan pencapaian ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian oleh semua pihak. Pada tanggal 31 Desember 2016, Anugrah belum mencapai target persentase kepemilikan, sehingga jumlah setoran tunai yang telah dilakukan yang mencerminkan 42,94% kepemilikan di Jabal Nor, diperlakukan sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 27 tanggal 9 Maret 2017, Anugrah, entitas anak Perusahaan, selaku pemegang 42,94% saham Jabal Nor, telah menandatangani akta Pengalihan Saham atas seluruh kepemilikan saham Anugrah atas Jabal Nor. Transaksi pengalihan saham tersebut dicatat di dalam akun "Aset keuangan tidak lancar lainnya".

Berdasarkan ikatan perjanjian tanggal 29 Juli 2020, pemegang saham individual telah sepakat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pengalihan aset berupa tanah kepada Anugrah.

AKRIDA

Pada tanggal 15 November 2016, AKRIDA dan BP Global Investments Limited menandatangani Perjanjian Pendahuluan (*Heads of Agreement*) untuk usaha *Joint Venture* Ritel di London. Maksud dan tujuan dari Perjanjian Pendahuluan ini adalah untuk mengeksplorasi pendirian usaha *joint venture* dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan ritel BBM untuk memasok BBM berkualitas *premium* dan memberikan tawaran yang berbeda untuk konsumen Indonesia. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 112/L-AKR-CS/2016 tanggal 16 November 2016 ke OJK dan BEI (Catatan 1b).

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

Anugrah

On July 2011, and further as amended, Anugrah signed a capital investment agreement with two individual shareholders of PT Jabal Nor ("Jabal Nor") to acquire a total of 59.40% ownership interest in Jabal Nor at Rp176,000,000 to be achieved in certain stages upon the completion of certain requirements as stipulated in the agreement by all parties. As of December 31, 2016, Anugrah has not reached the total targeted ownership percentage up and therefore, the total cash contribution made reflecting a 42.94% ownership interest in Jabal Nor, is treated as investment in an associate.

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 27 dated March 9, 2017, Anugrah, a subsidiary of the Company, as the holder of 42.94% shares in Jabal Nor, has signed the deed of transfer Anugrah whole shares ownership in Jabal Nor. The transaction from the share transfer is recorded under "Other non-current financial assets".

Based on the commitment agreement on July 29, 2020, individual shareholders agreed to settle the transaction by transferring assets in the form of lands to Anugrah.

AKRIDA

On November 15, 2016, AKRIDA and BP Global Investments Limited signed a Heads of Agreement for Retail Joint Venture in London. The purpose and objective of entering into the Heads of Agreement is to explore the creation of a joint venture to establish and grow retail fuel network to supply premium quality fuels and provide differentiated offer to the Indonesia customers. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 112/L-AKR-CS/2016 dated November 16, 2016 to OJK and IDX (Note 1b).

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

AKRIDA (lanjutan)

Pada tanggal yang sama, kedua pihak di atas juga menandatangani Perjanjian Usaha Patungan di bidang bahan bakar penerbangan di London. Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mendukung pengembangan industri penerbangan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi di bidang infrastruktur, menerapkan teknologi inovatif terkini, serta penerapan sistem operasional terbaik untuk pasokan bahan bakar penerbangan. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 111/L-AKR-CS/2016 tanggal 16 November 2016 ke OJK dan BEI (Catatan 1b).

APR

a. APR, entitas anak AKRIDA, mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang sampai dengan tahun 2038 di Jakarta dan Surabaya. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi adalah Rp201.167.388 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp133.610.173) yang disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

b. Pada tanggal 4 November 2024, APR menandatangani Perubahan Ke-6 (Keenam) terhadap Perjanjian Kredit No. 064/CB/JKT/2018 tanggal 30 November 2018 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit hingga 31 Oktober 2025. CIMB setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada APR dalam rangka pembelian produk, transaksi lindung nilai, dan keperluan tender proyek.

Perjanjian fasilitas pinjaman memberikan fasilitas sebagai berikut:

i) Fasilitas *Credit Commercial Lines*: Fasilitas *Letter of Credit ("L/C")* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") sebesar US$13.000.000 ("Fasilitas *CC Lines*") yang bersifat *interchangeable* atau dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan;
ii) Fasilitas Bank Garansi dengan ketentuan jumlah total penggunaan Fasilitas *CC Lines* tidak diperkenankan lebih dari US$13.000.000 ("Fasilitas BG/*SBLC*");

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

AKRIDA (continued)

At the same date, both parties also signed a Joint Venture Agreement related to Aviation Fuels business in London. The purpose and objective of entering into the Agreement is to support the development of the growth of the Indonesian economy by investing in infrastructure, applying the latest innovative technology and operational best practices for the supply of aviation fuel. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 111/L-AKR-CS/2016 dated November 16, 2016 to OJK and IDX (Note 1b).

APR

a. APR, a subsidiary of AKRIDA, has a long-term land lease agreement until 2038 in Jakarta and Surabaya. The balance of unmortized land lease rights of Rp201,167,388 as of December 31, 2024 (2023: Rp133,610,173) which is presented as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

b. On November 4, 2024, APR signed 6th (Sixth) Amendment and Restatement to the Credit Agreement No. 064/CB/JKT/2018 dated November 30, 2018 with PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") to extend the credit facility availability period up to October 31, 2025. CIMB agreed to provide credit facilities to APR for purchase of products, hedging transactions, and tender projects.

The facility agreements are providing the following credit lines:

i) Credit Commercial Lines Facility: Letter of Credit ("L/C") Facility and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") amounting to US$13,000,000 ("CC Lines Facility") which is interchangeable with or can be used in conjunction with;

ii) Bank Guarantee Facility with the provisions of total amount CC Lines Facility, no more than US$13,000,000 ("BG/SBLC Facility");

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

APR (lanjutan)

Perjanjian fasilitas pinjaman memberikan fasilitas sebagai berikut: (lanjutan)

iii) Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dengan *Pre-Settlement Limit* secara keseluruhan tidak melebihi ekuivalen US$5.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki *open* Bank Garansi sebesar Rp101.055.000 dan *open Letter of Credit* sebesar US$7.313.653,69.

c. Pada tanggal 15 November 2023, APR menandatangani Perubahan atas Surat Fasilitas No. JKT/FF1/5859 yang merujuk kepada Surat Fasilitas (Tanpa Ikatan) No. JKT/FA1/5741 tanggal 6 Maret 2023 untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit dari Standard Chatered Bank hingga 31 Oktober 2025.

Jenis-jenis fasilitas sebagai berikut:
i) *L/C* Impor - tidak dijamin,
ii) *L/C* Impor - dijamin, dan
iii) Obligasi dan Jaminan.

Dengan *limit* sebesar US$25.000.000, untuk ketiga fasilitas tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki *open* Bank Garansi sebesar Rp35.176.365 dan *open Letter of Credit* sebesar US$3.079.528.

DPR

Pada tanggal 23 Januari 2020, DPR menandatangani perjanjian pinjaman dengan Standard Chartered Bank - Cabang Indonesia ("SCB"), dimana SCB setuju untuk menyediakan (i) Fasilitas *L/C* Impor *unsecured* US$2.000.000; (ii) Fasilitas *L/C* Impor *secured* US$2.000.000; (iii) Obligasi dan Bank Garansi US$200.000, dengan total gabungan batas fasilitas sejumlah US$2.000.000.

Fasilitas ini digunakan untuk penerbitan *L/C* impor barang dan untuk penerbitan jaminan *(bid bond, advance payment bond* dan *performance bond*). Fasilitas ini telah diperpanjang otomatis.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

APR (continued)

The facility agreements are providing the following credit lines: (continued)

iii) Foreign Exchange Agreement with Pre-Settlement Limit as a whole not exceeding the equivalent US$5,000,000.

As of December 31, 2024, the Company has open Bank Guarantee amounting to Rp101,055,000 and open Letter of Credit amounting to US$7,313,653.69.

c. On November 15, 2023, APR signed Amendment of Facility Letter No. JKT/FF1/5859 refer to the Facility Letter (Uncommitted) No. JKT/FA1/5741 dated March 6, 2023, to extend the credit facility availability period from Standard Chartered Bank up to October 31, 2025.

Types of facilities are as follows:
i) Import L/C - unsecured,
ii) Import L/C - secured, and
iii) Bond and Guarantees.

With limit facility amounting to US$25,000,000 for those facilities. As of December 31, 2024, the Company has open Bank Guarantee amounting to Rp35,176,365 and open Letter of Credit amounting to US$3,079,528.

DPR

On January 23, 2020, DPR signed a loan agreement with Standard Chartered Bank - Indonesia Branch ("SCB"), whereby SCB agreed to provide (i) L/C Import unsecured facility US$2,000,000; (ii) L/C Import secured facility US$2,000,000; (iii) Bonds and Guarantees US$200,000, with total combined facilities limit of US$2,000,000.

These facilities are intended for issuance of L/C covering the import of goods and issuance of guarantees (bid bond, advance payment bond and performance bond). The facilities have been automatically extended.

34. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

AKI

Pada bulan Desember 2023, AKI menandatangani perjanjian perpanjangan pinjaman dengan Permata, dimana Permata setuju untuk menyediakan dua fasilitas kredit kepada AKI. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian produk bahan kimia dan transaksi lindung nilai (*hedging*). Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai tanggal 7 Oktober 2025.

Fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:

i) *Uncommitted Omnibus Revolving Loan* sebesar US$5.000.000 meliputi *Revolving Loan* dan *L/C*/SKBDN;

ii) Fasilitas *hedging FX* sebesar US$500.000 dengan *Loan Equivalent Risk ("LER") Spot transaction* maksimal US$25.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024, AKI memiliki kontrak *forward* dari fasilitas FX dengan nilai nominal sebesar US$3.005.574 dan dengan nilai wajar sebesar Rp334.187 disajikan pada akun hutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

AKPI

AKPI, entitas anak Andahanesa, mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan BMS sampai dengan tahun 2043 di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp2.133.528 (2023: Rp2.142.823) yang disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11.)

BBE

Pada tanggal 11 November 2024, BBE menandatangani perjanjian pinjaman dengan BNI, dimana BNI setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada BBE berupa:

i) Fasilitas Kredit Modal Kerja Terbatas maksimal sebesar Rp5.000.000;
ii) Fasilitas Kredit Investasi *Refinancing* maksimal sebesar Rp51.000.000;
iii) Fasilitas *Standby L/C ("SBLC")* sebesar US$7.600.000;
iv) Fasilitas Bank Garansi sebesar US$2.100.000.

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu lima tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian yang berakhir di 10 November 2029.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

AKI

On December 2023, AKI signed extension of loan agreements with Permata, whereby Permata agreed to provide two credit facilities to AKI. These facilities are intended for the purchase of chemical products and hedging transactions. The facilities are available for a period date until October 7, 2025.

The facilities available are as follows:

i) Uncommitted Omnibus Revolving Loan at US$5,000,000 covering Revolving Loan and L/C/SKBDN;

ii) Hedging FX facility at US$500,000 with Loan Equivalent Risk ("LER") Spot transaction at maximum of US$25,000,000.

As of December 31, 2024, AKI has outstanding forward contracts from its FX facility with a nominal value of US$3,005,574 and with the fair value of Rp334,187 is presented as other payable in the consolidated statement of financial position.

AKPI

AKPI, a subsidiary of Andahanesa, has a long-term land lease agreement with BMS until 2043 in Kawasan JIIPE, Gresik, East Java. The balance of the unamortized land lease rights is Rp2,133,528 as of December 31, 2024 (2023: Rp2,142,823), which is presented as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

BBE

On November 11, 2024, BBE signed loan agreements with BNI, whereby BNI agreed to provide four credit facilities to BBE as follow:

i) Working Capital Loan facility maximum amount of Rp5,000,000;
ii) Investment Credit Refinancing facility maximum amount of Rp51,000,000;
iii) Standby L/C ("SBLC") facility at US$7,600,000;
iv) Bank Guarantee facility at US$2,100,000.

The facility is available for five years from the signing date and will expire on November 10, 2029.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Kelompok Usaha dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Kelompok Usaha yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Kelompok Usaha adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Kelompok Usaha. Kelompok Usaha secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terbaik.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Kelompok Usaha gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Kelompok Usaha. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha dari pelanggan yang timbul dari aktivitas perdagangan dan distribusi, penjualan produk dan sejumlah jasa terpadu kepada pelanggan seperti jasa penyimpanan dan penanganan barang dan lainnya.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana ditunjukkan dalam Catatan 5a. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Kelompok Usaha yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh unit-unit usaha terkait.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

In their daily business activities, the Group is exposed to risks. The main risks facing by the Group arising from its financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk, foreign exchange rate risk and commodity price risk) and liquidity risk. The core function of the Group's risk management is to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and group risk appetite. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Group's customers fail to fulfill their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from trade receivables from customers generated from the Group's trading and distribution activities, product sales and various integrated services to customers such as storage and handling of goods etc.

The maximum Group's exposure of the credit risk approximates its net carrying amounts of trade receivables as shown in Note 5a. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in the trade receivables.

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Group's established policy, procedures and control relating to customer risk management. Credit limits are established for all customers based on internal rating criteria. Outstanding customer receivables are regularly monitored by relevant business units.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang terutama mencakup kas dan setara kas, risiko kredit yang dihadapi timbul karena wanprestasi dari *counterparty*. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimal eksposur setara dengan nilai tercatat sebagaimana ditunjukkan pada Catatan 4.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Kelompok Usaha dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman jangka pendek dan panjang dari Kelompok Usaha yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kelompok Usaha memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Kelompok Usaha secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga pada saat ini.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

With respect to credit risk arising from the other financial assets, which mainly comprise of cash and cash equivalents, the Group's exposure to credit risk arises from the default of counterparty. The Group has a policy to not place investments in instruments that have a high credit risk and only puts the investments in banks with high credit ratings. The maximum exposure equals to the carrying amounts as disclosed in Note 4.

b. Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, interest rate risk, foreign currency exchange risk and commodity price risk.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's short-term and long-term debt obligations with floating interest rates.

The Group closely monitors the market interest rate fluctuation and market expectation, so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any interest rate swaps.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari tingkat suku bunga atas saldo pinjaman yang dikenakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2024, dimana semua variabel lainnya dianggap konstan, terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market Risk (continued)

Interest rate risk (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably change in interest rates on the floating interest loans at December 31, 2024, with all other variables held constant, to the consolidated profit before income tax for the year ended December 31, 2024:

	Kenaikan (penurunan) dalam persentase/ *Increase (decrease) in percentage*	**Efek terhadap laba sebelum pajak/ *Effect on income before tax***	
Mata uang pinjaman			***Loan currency***
Rupiah	0,5%	(23.964.425)	*Rupiah*
	(0,5%)	23.964.425	

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Pengaruh dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari aktivitas usaha Kelompok Usaha (ketika pendapatan dan beban terjadi dalam dalam uang yang berbeda dari mata uang fungsional Kelompok Usaha), dan pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Perusahaan dan entitas anak tertentu di Indonesia berasal dari nilai tukar antara Dolar AS dan Rupiah karena mata uang fungsional adalah Rupiah, sedangkan penjualan dan pendapatan tertentu, beban pokok penjualan dan pendapatan tertentu serta pinjaman tertentu dilakukan dalam Dolar AS. Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing berasal dari kas dan setara kas, piutang, hutang, dan biaya yang masih harus dibayar.

Foreign exchange risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Group's operating activities (when revenue or expense are denominated in a different currency from the Group's functional currency), and US Dollar denominated loans.

Exposure to exchange rate fluctuations to the Company and certain subsidiaries in Indonesia comes from the exchange rate between US Dollar and Rupiah as the functional currency is Rupiah, while certain sales and revenues, costs of sales and revenues and loans are denominated in US Dollar. The significant portion of the foreign exchange risk is contributed by cash and cash equivalents, account receivables, account payables, and accrued expenses.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS, Perusahaan mengusahakan, dimana memungkinkan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan dimana hutang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimum mungkin, dimana memungkinkan. Perusahaan juga melakukan transaksi pembelian *forward* untuk membeli Dolar AS dari bank sehubungan dengan pembelian produk BBM yang dilakukan dalam mata uang Dolar AS dengan tujuan untuk menciptakan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar tersebut.

Kelompok Usaha memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Kelompok Usaha pada waktu yang tepat, antara lain, dengan membeli transaksi *forward* dengan tujuan untuk lindung nilai dari risiko nilai tukar pembelian produk BBM dalam mata uang Dolar AS seperti yang dijelaskan di atas.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dimana semua variabel lain konstan dan mengasumsikan tidak ada pembelian tambahan kontrak *forward*, atas aset dan liabilitas moneter dalam Dolar AS terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market Risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

In order to anticipate and mitigate the risk of exchange rate fluctuations against the US Dollar, the Company seeks, where possible, to ensure that significant portions of purchases and sales are carried out in the same currency as well as matching the timing of transactions and to implement a policy whereby debts in foreign currency used to finance business activities are made in the same currency (natural hedging). The management monitors to make sure that such policies are implemented to the maximum extent possible. The Company also enters, as appropriate, into forward transactions with banks to buy US Dollar in relation with the purchases of petroleum products made in US Dollar to create a hedging over the risk of currency exchange.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time, among others, by buying forward with the purpose of hedging the exchange risk from its US Dollar purchases of petroleum products as mentioned above.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably change in Rupiah exchange rate against US Dollar, with all other variables held constant and assuming no additional forward contracts were purchased, on the US Dollar denominated monetary asset and liabilities, to the consolidated profits before income tax for the year ended December 31, 2024:

	Kenaikan (penurunan) dalam persentase/ *Increase (decrease) in percentage*	**Efek terhadap laba sebelum pajak/ *Effect on income before tax***	
Dolar AS - Rupiah	1%	(5.505.348)	*US Dollar - Rupiah*
	(1%)	5.505.348	

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Aset dan liabilitas moneter yang signifikan dari Kelompok Usaha dalam mata uang asing pada tanggal-tanggal pelaporan disajikan pada Catatan 30.

Risiko harga komoditas

Kelompok Usaha, secara khusus Perusahaan, dipengaruhi oleh labilnya harga beberapa komoditas di pasar dari waktu ke waktu, terutama dari komoditas harga minyak ("BBM"). Penjualan BBM menyumbangkan lebih dari 50% pada kedua periode yang disajikan dari penjualan dan pendapatan konsolidasian. Manajemen memonitor pergerakan (tren) dan analisa pasar atas harga BBM secara ketat dan terus menerus untuk meminimalisasi efek signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangannya. Manajemen juga mengurangi risiko ini dengan memelihara tingkat persediaan secara tepat untuk mengambil efek terbaik dari lindung nilai alami.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market Risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

The Group's significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at reporting dates are presented in Note 30.

Commodity price risk

The Group, in particular the Company, is affected by the volatility of certain commodity prices in the market from time to time, specifically from petroleum products ("BBM"). The sales of BBM contributed over 50% for both periods presented from total consolidated sales and revenues. The management monitors the market trend and analysis of BBM price strictly and continuously to minimize significant and negative impact to its financial performance. Management also reduces the risk by maintaining a proper inventory level to get the optimum effect from natural hedging.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, fund needed to settle the current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

c. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity Risk (continued)*

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha pada jumlah kontraktual yang belum didiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities at undiscounted contractual amount as of December 31, 2024 and 2023:

	2024				
	Di bawah 1 tahun/ *Below 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *Over 1 year up to 2 years*	Lebih dari 3 tahun/ *Over 3 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Hutang bank jangka pendek	7.047.633	-	-	7.047.633	*Short-term bank loan*
Hutang usaha	10.391.582.462	-	-	10.391.582.462	*Trade payables*
Hutang lain-lain - pihak ketiga	464.043.998	-	-	464.043.998	*Other payables - third parties*
Biaya masih harus dibayar	585.685.122	-	-	585.685.122	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	144.298.160	-	-	144.298.160	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	47.734.252	281.892.436	433.446.673	763.073.361	*Lease liabilities*
Hutang bank jangka panjang dan lainnya	1.523.314.120	2.194.403.473	2.185.504.208	5.903.221.801	*Long-term bank loans and others*
Hutang dividen	1.000.288	54.107.938	-	55.108.226	*Dividend payable*
Total Liabilitas Keuangan	**13.164.706.035**	**2.530.403.847**	**2.618.950.881**	**18.314.060.763**	***Total Financial Liabilities***

	2023				
	Di bawah 1 tahun/ *Below 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *Over 1 year up to 2 years*	Lebih dari 3 tahun/ *Over 3 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Hutang bank jangka pendek	5.024.792	-	-	5.024.792	*Short-term bank loan*
Hutang usaha - pihak ketiga	9.519.185.995	-	-	9.519.185.995	*Trade payables - third parties*
Hutang lain-lain - pihak ketiga	349.640.045	-	-	349.640.045	*Other payables - third parties*
Biaya masih harus dibayar	571.823.594	-	-	571.823.594	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	187.750.044	-	-	187.750.044	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	50.970.667	38.999.148	453.875.080	543.844.895	*Lease liabilities*
Hutang bank jangka panjang dan lainnya	1.361.166.115	1.887.097.029	1.918.953.375	5.167.216.519	*Long-term bank loans and others*
Hutang obligasi	39.074.191	-	-	39.074.191	*Bonds payables*
Hutang dividen	55.536.914	-	-	55.536.914	*Dividend payable*
Total Liabilitas Keuangan	**12.140.172.357**	**1.926.096.177**	**2.372.828.455**	**16.439.096.989**	***Total Financial Liabilities***

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Changes in Liabilities Arising from Financing Activities

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	Arus Kas Neto/ *Net Cash Flow*	Efek Selisih Kurs/ *Exchange Rate Effect*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31*	
Hutang bank jangka pendek	5.000.000	2.000.000	-	-	7.000.000	*Short-term bank loan*
Bagian lancar atas hutang bank jangka panjang dan lainnya	1.089.267.780	(2.120.433.982)	-	2.172.017.406	1.140.851.204	*Current maturities on long-term bank loans and others*
Hutang bank jangka panjang dan lainnya	3.117.277.847	2.700.000.000	(4.763.279)	(2.167.480.819)	3.645.033.749	*Long-term bank loans and others*
Bagian lancar atas hutang obligasi	36.833.937	(37.000.000)	-	166.063	-	*Current maturities on bonds payables*
Liabilitas sewa	380.386.577	(131.265.846)	1.197.547	273.908.762	524.227.040	*Lease liabilities*
Hutang dividen	55.536.914	-	-	(428.688)	55.108.226	*Dividend payable*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**4.684.303.055**	**413.300.172**	**(3.565.732)**	**278.182.724**	**5.372.220.219**	***Total liabilities from financing activities***

	2023					
	1 Januari/ *January 1*	Arus Kas Neto/ *Net Cash Flow*	Efek Selisih Kurs/ *Exchange Rate Effect*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31*	
Hutang bank jangka pendek	1.573.705	3.426.900	(605)	-	5.000.000	*Short-term bank loan*
Bagian lancar atas hutang bank jangka panjang dan lainnya	554.639.521	(870.240.766)	(2.627.335)	1.407.496.360	1.089.267.780	*Current maturities on long-term bank loans and others*
Hutang bank jangka panjang dan lainnya	2.101.263.279	2.438.212.337	(3.652.343)	(1.418.545.426)	3.117.277.847	*Long-term bank loans and others*
Bagian lancar atas hutang obligasi	-	-	-	36.833.937	36.833.937	*Current maturities on bonds payables*
Hutang obligasi	36.751.679	-	-	(36.751.679)	-	*Bonds payables*
Liabilitas sewa	322.335.069	(59.676.224)	(1.392.561)	119.120.293	380.386.577	*Lease liabilities*
Hutang dividen	55.094.165	-	-	442.749	55.536.914	*Dividend payable*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**3.071.657.418**	**1.511.722.247**	**(7.672.844)**	**108.596.234**	**4.684.303.055**	***Total liabilities from financing activities***

Kolom 'Lain-lain' mencakup efek reklasifikasi ke bagian lancar atas hutang bank jangka panjang, hutang obligasi, penambahan sewa dan penyesuaian karena berlalunya waktu. Kelompok Usaha mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

The 'Others' column includes the effect of reclassification to current maturities on long-term bank loans and bonds payables, lease addition and adjustments due to the passage of time. The Group classifies interest paid as cash flows from operating activities.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha AKR adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal tertentu yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Secara kelompok maupun pada tingkat entitas induk saja, manajemen menetapkan batas-batas, yang tergantung kepada sifat proyek, untuk pengukuran rasio-rasio utama sehubungan dengan modal, antara lain, yaitu Rasio Pengembalian atas Ekuitas ("ROE") dan Rasio Hutang terhadap Ekuitas ("DER"), tergantung pada sifat dari proyek. Manajemen mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha AKR dapat memilih sejumlah opsi seperti, antara lain, menyesuaikan pembayaran dividen atau menerbitkan saham baru.

Pada tingkat entitas induk, Perusahaan juga memiliki sejumlah persyaratan rasio keuangan yang diminta para kreditur sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan. Sejumlah Entitas Anak juga dimintakan hal yang sama oleh para krediturnya. Di luar ROE dan DER, rasio terkait modal yang juga disyaratkan para kreditur adalah rasio Investasi terhadap Ekuitas ("IER") pada tingkat Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang Perusahaan Tahun 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Perusahaan telah melakukan pencadangan secara tahunan dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham ke akun Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya.

Pada tanggal-tanggal pelaporan, manajemen dapat mempertahankan rasio aktual di atas batasan yang yang dijelaskan dalam Catatan 17 dan 18.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of AKR Group's capital management is to ensure that it maintains certain healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. On a group basis, as well as at parent level, the management sets up the measurement limits, on the key capital related ratios, among others, Return of Equity ("ROE") and Debt to Equity Ratio ("DER"), depending on the nature of the project. The management manages the capital structure and makes adjustments to it in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, AKR Group may choose several options, among others, adjustment to dividend payment or issue new shares.

At the parent entity level, the Company also has certain financial ratio covenants imposed by the lenders from the available credit facilities provided to the Company. Certain Subsidiaries are also required the same requirements by their lenders. In addition to the above ROE and DER, the ratio which is also imposed by the lenders related to capital is the Investment to Equity Ratio ("IER") at the Company's level. In addition, the Company is also required by the Corporate Law Year 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. The Company has set aside a reserve on a yearly basis through the Annual General Shareholders' Meeting to the Appropriated Retained Earnings account.

At reporting dates, the management is able to maintain the actual ratios above the limits set as mentioned in Notes 17 and 18.

36. AKTIVITAS NON-KAS / *36. NON-CASH ACTIVITIES*

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas konsolidasian pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Non-cash activities supporting the consolidated statements of cash flows at each reporting date is as follows:

	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	31 Des. 2023/ *Dec. 31, 2023*	
Penambahan aset tetap melalui penambahan hutang - akumulasi	402.385.377	323.909.397	*Acquisitions of property, plant and equipment through incurrence of liabilities - accumulated*
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi uang muka	12.354.068	-	*Acquisitions of property, plant and equipment through reclassification from advance payments*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi melalui piutang	-	4.403.386	*Dividend from an associate through receivable*

37. REKLASIFIKASI AKUN / *37. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha per 31 Desember 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha per 31 Desember 2024.

Certain accounts in the consolidated financial statement of the Group as of December 31, 2023 have been reclassified to conform with the presentation in the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2024.

Rincian klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

The details of the reclassifications are as follows:

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Disajikan kembali/ *As reclassified*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				***Consolidated statement of financial position***
Aset Lancar				***Current Assets***
Pajak dibayar di muka	197.028.073	(107.011.452)	90.016.621	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	15.040.591	148.960.141	164.000.732	*Other current assets*
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Hutang pajak	450.027.838	(41.948.689)	491.976.527	*Taxes payable*

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 15 Januari 2025, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), dimana BRI setuju untuk menyediakan fasilitas berupa:

i) Fasilitas kredit dengan total US$200.000.000 dengan *sub-limit*: KMK *Buyer*, *LC*/SKBDN, Kredit Jangka Pendek, *BG/SBLC, SCF A/P;*

ii) Fasilitas *Forex Line* dengan sebesar US$20.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2026.

38. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

On January 15, 2025, the Company signed loan agreements with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), whereby BRI agreed to provide credit facilities:

i) Credit facility at US$200,000,000 with sub-limit to KMK Buyer, LC/SKBDN, Short-term Credit, BG/SBLC, SCF A/P;

ii) Forex Line facility with limit at US$20,000,000.

The agreement also requires the Company to maintain several financial ratios. These facilities valid until January 15, 2026.

Referensi Silang SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Perusahaan Publik

	Keterangan	Halaman
I.	**Ketentuan Umum**	
II.	**Bentuk Laporan**	
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik	v
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	v
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	v
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).	v
III.	**Isi Laporan Tahunan**	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat:	
	a. ikhtisar data keuangan penting;	20–24
	b. informasi saham (jika ada);	24–25
	c. laporan Direksi;	40–47
	d. laporan Dewan Komisaris;	34–38
	e. profil Emiten atau Perusahaan Publik;	54–103
	f. analisis dan pembahasan manajemen;	106–141
	g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	156–265
	h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	SR
	i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	267–427
	j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	50–51
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:**	**20–24**
	i. pendapatan/penjualan;	21
	ii. laba bruto;	21
	iii. laba (rugi);	21
	iv. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	21
	v. total laba (rugi) komprehensif;	21
	vi. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	21

Keterangan		Halaman
	vii. laba (rugi) per saham;	21
	viii. jumlah aset;	20
	ix. jumlah liabilitas	20
	x. jumlah ekuitas;	20
	xi. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	22
	xii. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	22
	xiii. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	22
	xiv. rasio lancar;	22
	xv. rasio liabilitas terhadap ekuitas;	22
	xvi. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	22
	xvii. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	22
b.	**Informasi Saham** **Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:**	**24–25**
	i. saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	24
	• jumlah saham yang beredar;	24
	• kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	24
	• harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	24
	• volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	24
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	-
	ii. dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	25
	• tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	-
	• rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	-
	• jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-
	• jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	-
	• harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-
	iii. dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	25
	iv. dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	25
c.	**Laporan Direksi**	**40–47**

	Keterangan	Halaman
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	i. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	42–43
	• strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	42
	• peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	42
	• proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	42
	• perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	43
	• kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik	42
	ii. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	46
	iii. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	43–44
d.	**Laporan Dewan Komisaris**	**34–38**
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	i. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	36–37
	ii. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	38
	iii. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	37–38
e.	**Profil Emiten atau Perusahaan Publik**	**54–103**
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	54
	i. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	54
	ii. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	54–55
	• alamat;	55
	• nomor telepon;	55
	• alamat surat elektronik; dan	55
	• alamat situs web;	55
	iii. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	56
	iv. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	6–7 & 58
	v. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	62–64
	vi. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	9 & 102–103
	vii. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	70
	viii. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	69
	ix. profil Direksi, paling sedikit memuat	74–80

Keterangan	Halaman
• nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	v
• foto terbaru;	v
• usia;	v
• Kewarganegaraan;	v
• riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	v
• riwayat jabatan, meliputi informasi;	v
▸ dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	v
▸ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	v
▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
• hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	v
• perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	81
x. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	71–73
• nama dan jabatan;	v
• foto terbaru;	v
• usia;	v
• kewarganegaraan;	v
• riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	v
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	v
▸ dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	v
▸ dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	v
▸ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	v
▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
• hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	v
• pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	v

Keterangan	Halaman
• perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	81
xi. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	81
xii. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel;	146–147
xiii. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	86–91
• pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	86
• anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	89–90
• kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	88
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
xiv. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	89–90
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
xv. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	89
• kepemilikan institusi lokal;	v
• kepemilikan institusi asing;	v
• kepemilikan individu lokal; dan	v
• kepemilikan individu asing;	v
xvi. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	90–91
xvii. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut	95–96
xviii. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	92–93

Keterangan		Halaman
xix.	informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	93
xx.	informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	97
	• nama dan alamat;	v
	• periode penugasan;	v
	• informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	v
	• biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	v
	• dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	v
	• Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	v
xxi.	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP	98
f.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen**	**106–141**
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	106–141
i.	tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	107–114
	• produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	107–113
	• pendapatan/penjualan; dan	108
	• profitabilitas;	113–114
ii.	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	115–126
	• aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	115–119
	• liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	119–121
	• ekuitas;	121
	• pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	122–126
	• arus kas;	126
iii.	kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	127
iv.	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	117–118
v.	struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	
vi.	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	128
	• tujuan dari ikatan tersebut;	129
	• sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	v
	• mata uang yang menjadi denominasi; dan	v

Keterangan		Halaman
	• langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	v
vii.	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	v
	• jenis investasi barang modal;	129
	• tujuan investasi barang modal; dan	v
	• nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	v
viii.	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	v
ix.	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	131
x.	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	132–134
	• pendapatan/penjualan;	129–130
	• laba (rugi);	v
	• struktur modal (capital structure); atau	v
	• hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	v
xi.	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	v
	• pendapatan/penjualan;	130–131
	• laba (rugi);	v
	• struktur modal (capital structure); atau	v
	• hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	v
xii.	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	v
xiii.	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	135–136
	• kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	134–135
	• tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	134
	• jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	135
	• jumlah dividen per tahun yang dibayar;	135
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	135
xiv.	realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	136
	• dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	v
	• dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	v
xv.	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	136–139
	• tanggal, nilai, dan objek transaksi;	139

Keterangan	Halaman
• nama pihak yang melakukan transaksi;	139
• sifat hubungan afiliasi (jika ada);	139
• penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	138
• pemenuhan ketentuan terkait; dan	138
• dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	138
▸ pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan	138
▸ peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle);	138
• untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;	v
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	v
• untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	v
• dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	v
xvi. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	140
xvii. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	140
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	156–265
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
i. RUPS, paling sedikit memuat:	166–176
• Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	
▸ keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	166–176
▸ keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	-
• dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	169 & 173
ii. Direksi, paling sedikit memuat:	184–190

Keterangan	Halaman
• tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	185
• Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	186–187
• pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	184
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	196–198
• Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	196–198
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	189–190
▸ kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	v
▸ pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	v
• penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	190
prosedur penilaian kinerja; dan	v
kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	v
• dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	v
iii. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	177–182
• tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	178
• pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	177
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	196–197
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	196–197
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	181–182
▸ kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	181
▸ pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	181–182
• penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	198–199
▸ prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	v
▸ kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	v
▸ pihak yang melakukan penilaian; dan	v
• penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	182
▸ prosedur penilaian kinerja; dan	v

Keterangan		Halaman
	▸ kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	v
iv.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	199–201
	• prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	199
	• prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	201
	▸ prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	201
	▸ struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan	201
	▸ besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	201
v.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N/A
	• nama;	-
	• dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	-
	• periode penugasan dewan pengawas syariah;	-
	• tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	-
	• frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	-
vi.	Komite audit, paling sedikit memuat:	202–207
	• nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	v
	• usia;	v
	• kewarganegaraan;	v
	• riwayat pendidikan;	v
	• riwayat jabatan, meliputi informasi:	v
	▸ dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	v
	▸ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	v
	▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
	• periode dan masa jabatan anggota komite audit;	v
	• pernyataan independensi komite audit	204
	• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	206–207
	• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	205
	• pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	206
vii.	komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	207–210
	• nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	v
	• usia;	v

Keterangan	Halaman
• kewarganegaraan;	v
• riwayat pendidikan;	v
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	v
▸ dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	v
▸ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	v
▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
• periode dan masa jabatan anggota komite;	v
• pernyataan independensi komite;	208
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	210
• uraian tugas dan tanggung jawab;	208–209
• pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);	207
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	209
• uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	209
• dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	-
▸ alasan tidak dibentuknya komite; dan	-
▸ pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	-
viii. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	211–212
• nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	v
• usia;	v
• kewarganegaraan;	v
• riwayat pendidikan;	v
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	v
▸ dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	v
▸ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	v
▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
• periode dan masa jabatan anggota komite;	v
• pernyataan independensi komite;	211
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	-
• uraian tugas dan tanggung jawab;	212
• pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);	-
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; dan	-

Keterangan	Halaman
• uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	212
ix. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	212–214
• nama;	v
• domisili;	v
• riwayat jabatan, meliputi:	v
▸ dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	v
▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
• riwayat pendidikan;	v
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	213–214
• uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	213
x. Unit audit internal, paling sedikit memuat:	214–219
• nama kepala unit audit internal;	v
• riwayat jabatan, meliputi:	v
▸ dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	v
▸ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	v
• kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	217–218
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	217
• struktur dan kedudukan unit audit internal;	215
• uraian tugas dan tanggung jawab;	216
• pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan	214
• uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	218–219
xi. uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	219–223
• pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	219
• tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	223
• pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	223
xii. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	224–228
• gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	224
• jenis risiko dan cara pengelolaannya;	225–226
• tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	227
• pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	228
xiii. perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	229

Keterangan		Halaman
	• pokok perkara/gugatan;	v
	• status penyelesaian perkara/gugatan; dan	v
	• pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	v
xiv.	informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	229
xv.	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	232–234
	• pokok-pokok kode etik;	232
	• bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	233
	• pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	233
xvi.	uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP);	235
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	235
	• jumlah saham dan/atau opsi;	v
	• jangka waktu pelaksanaan;	v
	• persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	v
	• harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	v
xvii.	uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	191
	• kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	v
	• pelaksanaan atas kebijakan dimaksud:	v
xviii.	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	236–238
	• cara penyampaian laporan pelanggaran;	237
	• perlindungan bagi pelapor;	237
	• penanganan pengaduan;	238
	• pihak yang mengelola pengaduan; dan	238
	• hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	238
	▸ jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	v
	▸ tindak lanjut pengaduan;	v
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	–
xix.	uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	236
	• program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	v

	Keterangan	Halaman
	• pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	v
	• Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	-
	xx. penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	243–265
	• pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	v
	• penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	v
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	v
h.	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik**	**SR**
	i. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	v
	• penjelasan strategi keberlanjutan;	v
	• ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	v
	• profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	v
	• penjelasan Direksi;	v
	• tata kelola keberlanjutan;	v
	• kinerja keberlanjutan;	v
	• verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	v
	• lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	v
	• tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	v
	ii. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	v
	iii. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	v
	• diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	v
	• merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	v
	iv. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	v
	v. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	v
	• memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	v
	• disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	v

	Keterangan	Halaman
	vi. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	v
	vii. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	v
i.	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit**	**267–427**
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundangundangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	
j.	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.**	**50–51**

2024

Laporan Tahunan

PT AKR Corporindo Tbk

AKR Tower
JL. Panjang No. 5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia

(021) 5311110
www.akr.co.id